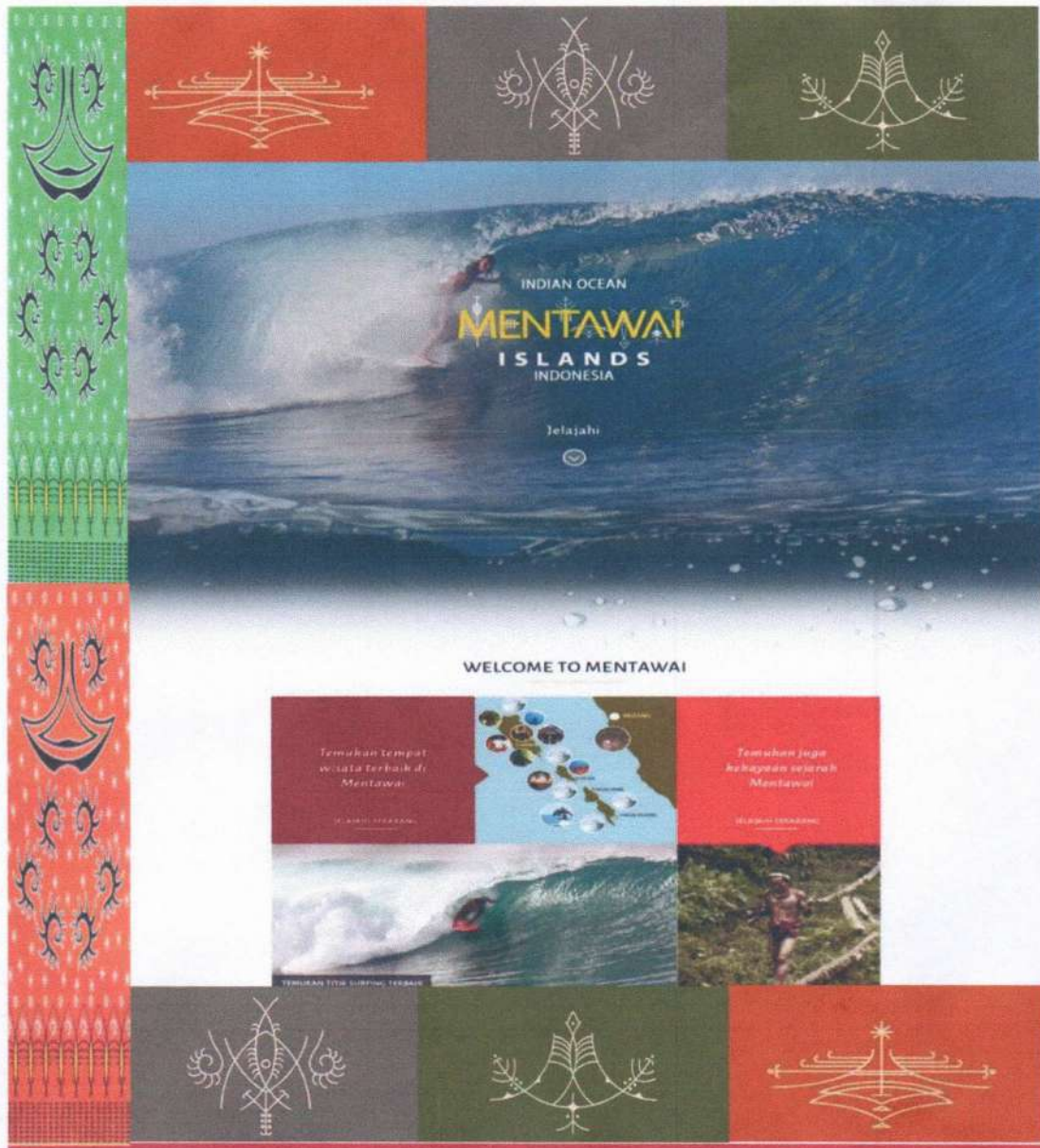


RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP) INSPEKTORAT TAHUN 2026



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI INSPEKTORAT

Jl. Raya Tuapejat Km. 9 Sipora Utara Tel. (0759) 320651

Fax.(0759) 320212

Email :inspektoratmtw@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Karunianya, sehingga Inspektorat Daerah dapat menyusun Rencana Tindak Pengendalian Inspektorat Tahun 2025. Rencana Tindak Pengendalian ini merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen Manajemen Risiko

Rencana tindak pengendalian dibuat dan dilakukan evaluasi setiap tahun dengan mendasarkan pada hasil identifikasi risiko dan analisis risiko strategis dan risik operasional Inspektorat Daerah Tahun 2025.

Kami menyadari bahwa Rencana Tindak Pengendalian Risiko Inspektorat Daerah tahun 2026 ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu masukan dan saran perbaikan dari semua pihak akan diterima dengan senang hati untuk perbaikan penyusunan di masa perbaikan dari semua pihak akan diterima dengan senang hati untuk perbaikan penyusunan di masa yang akan datang.

Semoga Rencana Tindak Pengendalian Risiko Inspektorat Daerah tahun 2026 ini bermanfaat menjadi bagian dari keinginan bersama untuk perbaikan berkelanjutan bagi Inspektorat Daerah.



Tuapejat, Januari 2026
Inspektur

Serieli Bawamenewi, SH, CGCAE

19830905 200802 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I GAMBARAN UMUM	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Sekilas Tentang SPIP	17
BAB II URAIAN RENCANA TINDAK LANJUT PENGENDALIAN INTERN	28
A.Penerapan Spip Pada Inspektorat Kab. Kepulauan Mentawai.....	28
B.Penciptaan Lingkungan Pengendalian Yang Diharapkan	29
C. Risiko Dan Kegiatan Pengendalian Di Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai.....	36
BAB III PENUTUP.....	42

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Pemetaan Lingkungan Pengendalian Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2026	31
Tabel 2. 2 Rencana Tindak Penguatan Lingkungan Pengendalian Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025	34
Tabel 2. 3 Tujuan dan Sasaran Strategis Perangkat Daerah	37

BAB I

GAMBARAN UMUM

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, mengamanatkan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui empat pilar, yaitu:

- a. efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan;
- b. keandalan pelaporan keuangan;
- c. pengamanan aset negara; dan
- d. ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Konsep pengendalian intern tersebut menjadi panduan minimal bagi instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam merancang pengendalian intern di sektor pemerintahan. Penerapan konsep kendali melekat (*softcontrol*) secara terintegrasi kedalam kegiatan dan tindakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, sebagai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), memerlukan suatu strategi dan perencanaan untuk mengarahkan efektivitas

pengembangannya. Gambaran umum desain penyelenggaraan SPIP meliputi latar belakang penyusunan desain penyelenggaraan SPIP Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, dasar hukum, tujuan, manfaat, ruang lingkup, dan metodologi pengembangan SPIP.

- a. Seluruh aktivitas dalam rangka penyelenggaraan SPIP pada Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai, dilaksanakan oleh Satuan Tugas Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terintegrasi Di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- b. Tugas Pokok Satgas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi sebagai berikut :
 - 1) Memberi pemahaman (*knowing*) melalui sosialisasi, pendidikan dan latihan, bimbingan teknis penyelenggaraan SPIP Terintegrasi bagi pegawai di Inspektorat Daerah;
 - 2) Melakukan pemetaan (*mapping*) yaitu penilaian pada awal penyelenggaraan SPIP Terintegrasi untuk mengetahui kondisi Sistem Pengendalian Intern pada unit kerja atas penyelenggaraan SPIP di lingkungan Inspektorat Daerah;
 - 3) Membangun berbagai prasarana/ infrastruktur (*norming*) dalam penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di lingkungan Inspektorat Daerah;
 - 4) Melaksanakan internalisasi (*forming*) nilai-nilai budaya kerja yang melekat dalam SPIP Terintegrasi di lingkungan Inspektorat Daerah.
 - 5) Mengembangkan SPIP Terintegrasi secara berkelanjutan (*performing*) untuk mempertahankan dan menguatkan kualitas

penyelenggaraan SPIP Terintegrasi;

- 6) Mengadministrasikan dan melaporkan hasil pelaksanaan SPIP Terintegrasi kepada Bupati.

2. Organisasi Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai

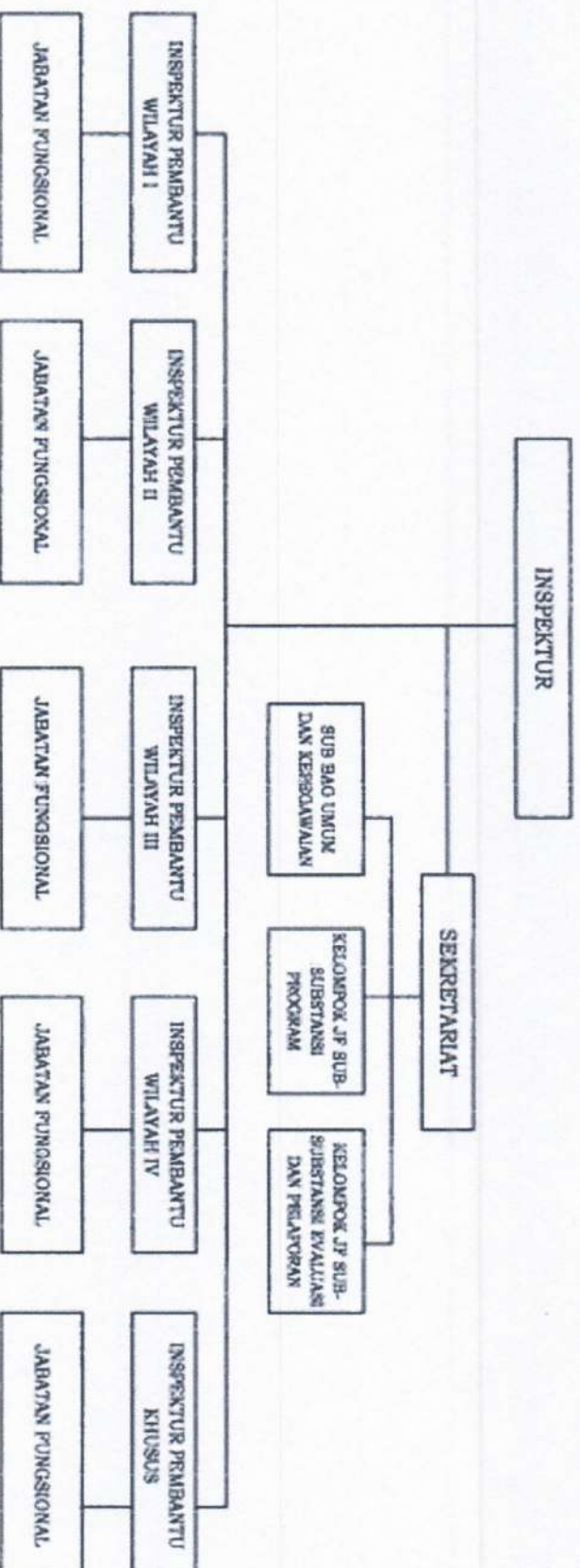
Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tanggal 19 Desember 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang pengawasan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah sebagai berikut :

- a. Inspektur
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program;
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Evaluasi dan Pelaporan
- c. Inspektur Pembantu, terdiri dari :
 - 1) Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - 2) Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - 3) Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - 4) Inspektur Pembantu Wilayah IV

5) Inspektur Pembantu Khusus

Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai



Sumber : Peraturan Bupati Kab Kepulauan Mentawai No. 54 Tahun 2021

3. Tugas Pokok dan Fungsi

3.1 Tugas Pokok Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai :

Membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

3.2 Fungsi Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

3.3 Tugas dan Fungsi Sekretariat

1) Tugas Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas penyelenggaraan fungsi Pendukung Pelaksanaan Perencanaan Umum, Penguasaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan serta Ketatausahaan, Keuangan, Kepegawaian, Pengelolaan Aset, Tata Laksana dan Koordinasi Pelaksanaan Tugas, Pembinaan serta Pemberian Dukungan Administrasi pada Seluruh Bagian di

Lingkungan Inspektorat.

2) Fungsi Sekretariat antara lain :

- a. Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan Inspektorat;
- b. Koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan hasil pembinaan dan pengawasan Daerah;
- c. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi lingkup Inspektorat;
- d. Penataan organisasi dan tata laksanakan lingkup Inspektorat;
- e. Penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pembinaan dan pengawasan;
- f. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan lingkup Inspektorat;
- g. Pengeloaan barang milik Daerah lingkup Inspektorat; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3.3.1 Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- a. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian lingkup Inspektorat;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan lingkup Inspektorat;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kerja sama dan hubungan masyarakat lingkup Inspektorat;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kearsipan dan dokumentasi lingkup

Inspektorat;

- e. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan penataan organisasi dan tata laksana lingkup Inspektorat;
- f. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan pengelolaan keuangan di lingkungan Inspektorat;
- g. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Inspektorat; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3.3.2 Tugas Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program

- a. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan program lingkup Inspektorat;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran lingkup Inspektorat;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan lingkup Inspektorat; dan
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3.3.3 Tugas Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Evaluasi dan Pelaporan

- a. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan evaluasi dan pelaporan pembinaan dan pengawasan Daerah; Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang evaluasi dan pelaporan pembinaan dan pengawasan Daerah;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan di

lingkungan Inspektorat;

- c. Melaksanakan penyiapan bahan layanan administrasi pemerintahan di bidang pembinaan dan pengawasan Daerah; dan
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3.4 Tugas dan Fungsi Inspektur Pembantu

1) Tugas Inspektur Pembantu

Inspektur Pembantu mempunyai tugas membantu Inspektur dalam pelaksanaan fungsi Inspektorat sebagai pembina dan pengawas pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah pada setiap Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa dalam wilayah kerjanya.

2) Fungsi Inspektur Pembantu, antara lain :

- 1) pembinaan dan pengawasan pengelolaan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, keuangan, barang, dan kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah sesuai wilayah kerjanya;
- 2) pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa sesuai wilayah kerjanya;
- 3) pelaksanaan reviu rencana kerja anggaran Perangkat Daerah sesuai wilayah kerjanya;
- 4) pelaksanaan reviu laporan keuangan Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa sesuai wilayah kerjanya;

- 5) pelaksanaan reviu laporan kinerja instansi pemerintah pada Perangkat Daerah sesuai wilayah kerjanya;
 - 6) evaluasi sistem pengendalian internal pada Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa sesuai wilayah kerjanya;
 - 7) penanganan pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
 - 8) pelaksanaan pemeriksaan terpadu;
 - 9) pengawalan pencapaian sasaran reformasi birokrasi;
 - 10) penyusunan standar operasional prosedur bidang pembinaan dan pengawasan;
 - 11) koordinasi program pembinaan dan pengawasan dengan Perangkat Daerah sesuai wilayah kerjanya;
 - 12) pemeriksaan hibah/bantuan sosial yang dikelola oleh Perangkat Daerah sesuai wilayah kerjanya;
 - 13) pendampingan, asistensi, dan fasilitasi bidang pembinaan dan pengawasan pada Perangkat Daerah sesuai wilayah kerjanya; dan
 - 14) melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- 3) Wilayah Kerja Inspektur Pembantu, sebagai berikut:
- a. Inspektur Pembantu Wilayah I
Mempunyai tugas membantu Inspektur dalam

pelaksanaan fungsi Inspektorat sebagai pembina dan pengawasan pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah pada setiap Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa dalam wilayah kerja sebagai berikut :

- Sekretariat Daerah
- Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Inspektorat, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
- Dinas Perikanan
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat
- Kecamatan Pagai Selatan
- Kecamatan Sikakap
- Kecamatan Pagai Utara
- Desa dalam Kecamatan Pagai Selatan, Desa Kecamatan Sikakap, Desa Kecamatan Pagai Utara.

b. Inspektur Pembantu Wilayah II

Mempunyai tugas membantu Inspektur dalam pelaksanaan fungsi Inspektorat sebagai pembina dan pengawasan pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah pada setiap Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa dalam wilayah kerja sebagai berikut;

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
- Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
- Rumah Sakit Umum Daerah
- Kecamatan Sipora Selatan
- Kecamatan Sipora Utara
- Desa dalam Kecamatan Sipora Selatan dan Kecamatan Sipora Utara.

c. Inspektur Pembantu Wilayah III

Mempunyai tugas membantu Inspektur dalam pelaksanaan fungsi Inspektorat sebagai pembina dan pengawasan pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah pada setiap Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa dalam wilayah kerja sebagai berikut :

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- Badan Keuangan Daerah
- Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
- Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
- Dinas Komunikasi dan Informatika
- Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
- Kecamatan Siberut Selatan
- Kecamatan Siberut Barat Daya

- Kecamatan Siberut Tengah
 - Desa dalam Kecamatan Siberut Selatan, Kecamatan Siberut Barat Daya Kecamatan Siberut Tengah.
- d. Inspektur Pembantu Wilayah IV
- Mempunyai tugas membantu Inspektur dalam pelaksanaan fungsi Inspektorat sebagai pembina dan pengawasan pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah pada setiap Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa dalam wilayah kerja sebagai berikut :
- Dinas Kesehatan
 - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
 - Dinas Perhubungan
 - Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - Kecamatan Siberut Utara
 - Kecamatan Siberut Barat
 - Desa dalam Kecamatan Siberut Utara dan Kecamatan Siberut Barat.

3.5 Tugas dan Fungsi Inspektur Pembantu Khusus

1) Tugas Inspektur Pembantu

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Inspektorat dibidang pengawasan sewaktu-waktu dengan tujuan tertentu terhadap

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantu oleh Perangkat Daerah serta penyelenggaraan pemerintah desa dan pelaksanaan urusan pemerintah desa.

- 2) Fungsi Inspektur Pembantu, sebagai berikut;
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja pengawasan dengan tujuan tertentu;
 - b. Pengkajian data dan informasi pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
 - c. Pengelolaan pelaksanaan pemeriksaan atas penanganan pengaduan masyarakat;
 - d. Pengelolaan pelaksanaan pemeriksaan atas permintaan dari lembaga lainnya;
 - e. Pengelolaan pelaksanaan pemeriksaan terpadu;
 - f. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan terhadap pejabat fungsional yang melaksanakan pengawasan pada Inspektur Pembantu Khusus;
 - g. Pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
 - h. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - i. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang tugasnya;
 - j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - k. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas di masing-masing wilayah kerja.

4 Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- e. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 48 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- f. Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 100.3.3.2-119 Tahun 2024 Tentang Pedoman Risiko di Lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai

5. Maksud dan Tujuan

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) merupakan dokumen yang berisi gambaran dari efektivitas, struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi dalam mengendalikan risiko, perbaikan pengendalian yang ada/terpasang serta pengkomunikasikan

dan pemantauan pelaksanaan perbaikannya. Dokumen ini merupakan rencana tindak pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai sehingga diharapkan dapat memperoleh keyakinan memadai bahwa tujuan perangkat daerah yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Rencana Tindak Pengendalian dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di lingkungan Inspektorat dalam rangka membangun pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan Inspektorat yang bermuara pada pencapaian tujuan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

6. Ruang Lingkup

Rencana tindak pengendalian ini fokus kepada pengendalian atas sasaran strategis Inspektorat dan sasaran kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, dalam Rencana Strategis, Dokumen Indikator Kinerja Utama, Dokumen Indikator Kinerja Kunci, dan Dokumen Pelaksanaan Kegiatan. Pelaksanaan rencana tindak pengendalian melibatkan seluruh jajaran dalam Perangkat Daerah, meliputi Inspektur sebagai manajer puncak di Inspektorat, Sekretaris sebagai administrator, Inspektur Pembantu sebagai pengawas dan seluruh pelaksana/JFU maupun JFT di lingkungan Inspektorat. Pelaksanaan atas Rencana Tindak Pengendalian diharapkan direalisasi dalam tahun 2026.

B. SEKILAS TENTANG SPIP

1. Pengertian

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, merupakan salah satu kebijakan pemerintah di bidang pengelolaan keuangan negara yang dimaksudkan untuk menjadi standar pengendalian intern atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sehingga pengelolaan keuangan negara menjadi efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai, untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Bab I Pasal 1 Butir 1). Keempat tujuan tersebut di atas tidak perlu dicapai secara khusus atau terpisah-pisah.

Dengan kata lain, instansi pemerintah tidak harus merancang secara khusus pengendalian untuk mencapai satu tujuan. Suatu kebijakan atau prosedur dapat saja dikembangkan untuk dapat mencapai lebih dari satu tujuan pengendalian.

Dari definisi tersebut, SPIP merupakan suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan oleh pimpinan dan seluruh pegawai serta diintegrasikan dengan proses kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan secara berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi. Pencapaian tujuan organisasi tersebut harus dapat diraih

dengan cara menjaga dan mengamankan aset negara/ daerah untuk menjamin tersedianya laporan manajerial yang handal, mentaati ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak negatif keuangan/ kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/fraud, dan pelanggaran aspek kehati-hatian, serta meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

Menurut Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern (SPI) didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan, keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang- undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) didefinisikan sebagai Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Definisi SPI dan SPIP di atas dipahami oleh para penyelenggara pelayanan publik sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan oleh pimpinan dan seluruh pegawai serta diintegrasikan dengan proses kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan secara berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi. Pencapaian tujuan organisasi tersebut harus dapat diraih dengan cara menjaga dan mengamankan aset negara/ daerah yang diamanatkan kepada para penyelenggara pelayanan publik menjamin tersedianya laporan manajerial yang handal, mentaati ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak negatif keuangan/ kerugian, penyimpangan termasuk

kecurangan/ fraud, dan pelanggaran aspek kehati-hatian, serta meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

2. Tujuan SPIP

Penyelenggaraan SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

3. Unsur-unsur SPIP

Berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, SPIP terdiri dari lima unsur, yaitu :

- a. Lingkungan pengendalian
- b. Penilaian Risiko
- c. Kegiatan Pengendalian
- d. Informasi dan Komunikasi
- e. Pemantauan Pengendalian Intern

Keterkaitan kelima unsur sistem pengendalian intern tersebut menjelaskan bahwa kelima unsur pengendalian intern merupakan unsur yang terjalin erat satu dengan yang lainnya. Untuk terwujudnya penyelenggaraan SPIP yang efektif, maka unsur-unsur tersebut harus diterapkan secara terintegrasi dan menyatu dengan aktivitas yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai, agar mampu mencegah timbulnya kegagalan dan ketidakefisienan dalam pencapaian tujuan instansi pemerintah.

Yang menjadi dasar dari pengendalian intern tersebut adalah sumber daya manusia (SDM) di dalam organisasi, yang

membentuk lingkungan pengendalian yang baik dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai instansi pemerintah.

Selanjutnya akan dijelaskan secara lebih terperinci mengenai kelima unsur SPIP tersebut.

1) Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi yang dibangun dan diciptakan dalam suatu instansi pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Dalam instansi pemerintahan wajib diciptakan dan dipelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui :

- a) Penegakan integritas dan nilai etika;
- b) Komitmen terhadap kompetensi;
- c) Kepemimpinan yang kondusif;
- d) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g) Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan
- h) Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

Lingkungan pengendalian adalah kondisi suatu instansi pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Membangun lingkungan pengendalian memiliki arti membangun dan menciptakan suatu “atmosfir” yang kondusif yang

mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern secara efektif. Lingkungan pengendalian yang baik merupakan kunci keberhasilan penyelenggaraan pengendalian intern di lingkungan Inspektorat.

Lingkungan pengendalian akan efektif bila suatu lingkungan dengan orang-orang yang berkompeten memahami tanggung jawab dan batasan kewenangannya, memiliki pengetahuan yang memadai, memiliki kesadaran yang penuh dan komitmen untuk melakukan apa yang benar dan yang seharusnya dengan mematuhi kebijakan dan prosedur organisasi berikut standar etika dan perilaku. Peranan pimpinan dalam mewujudkan suatu lingkungan pengendalian yang baik sangat penting karena pimpinan berperan sebagai teladan dalam organisasi.

2) Penilaian Risiko

Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pimpinan instansi wajib untuk melakukan penilaian risiko.

Kegiatan penilaian risiko dilaksanakan melalui aktivitas identifikasi risiko dengan menggunakan metodologi dan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko instansi, serta analisis risiko untuk menentukan pengaruh risiko yang telah teridentifikasi terhadap pencapaian tujuan instansi.

Penilaian risiko merupakan bagian integral dalam proses pengelolaan risiko dalam pengambilan keputusan pada tindakan dan kegiatan melalui tahapan identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko.

Penilaian risiko merupakan pencerminan dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan daerah, yang bertujuan untuk :

1. Mengidentifikasi dan menguraikan seluruh risiko potensial, baik yang disebabkan faktor internal maupun disebabkan faktor eksternal;
2. Memeringkat risiko teridentifikasi berdasarkan level keutamaan prioritas perhatian dan penanganannya agar dapat dikelola secara efektif.
3. Pelaksanaan proses penilaian risiko dilakukan dalam tiga tahap kegiatan, yang terdiri atas:

- a) Penetapan tujuan instansi, sebagai target terukur yang mengarahkan organisasi dalam menjalankan aktivitasnya. Pernyataan tujuan harus bersifat spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, terikat waktu, dan wajib dikomunikasikan kepada seluruh pegawai.

Untuk mencapai tujuan, pimpinan instansi menetapkan:

- Strategi operasional yang konsisten; dan
- Strategi manajemen terintegrasi dan rencana penilaian risiko.

Selanjutnya juga perlu ditetapkan tujuan pada tingkatan kegiatan, dimana sekurang-kurangnya dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- Berdasarkan pada tujuan dan rencana strategis instansi pemerintah;
- Saling melengkapi, saling menunjang, dan tidak bertentangan satu dengan lainnya;

- Relevan dengan seluruh kegiatan utama instansi pemerintah;
 - Mengandung unsur kriteria pengukuran;
 - Didukung sumber daya instansi pemerintah yang cukup; dan
 - Melibatkan seluruh tingkat pejabat dalam proses penetapannya
- b) Identifikasi risiko untuk menghasilkan suatu gambaran peristiwa yang berpotensi mengganggu pencapaian tujuan aktivitas organisasi. Dalam pelaksanaan proses identifikasi risiko, perlu diperhatikan faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya peristiwa risiko.
- c) Analisis risiko untuk mengestimasi besaran kemungkinan munculnya peristiwa risiko, dan dampak yang ditimbulkan terhadap upaya pencapaian tujuan organisasi apabila peristiwa risiko tersebut benar-benar terjadi, serta menetapkan level atau status risiko sebagai kombinasi hubungan antara kemungkinan dan dampak risiko.

3) Kegiatan Pengendalian

Adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko, serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan.

Kegiatan untuk mengendalikan risiko dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu prevention dan mitigation. Pengendalian yang bersifat prevention merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi kemungkinan terjadinya peristiwa risiko. Sedangkan pengendalian yang bersifat mitigation merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan apabila terjadi suatu peristiwa risiko.

Karakteristik kegiatan pengendalian :

- a. Kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok Instansi Pemerintah;
- b. Kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko;
- c. Kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus Instansi Pemerintah;
- d. Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis;
- e. Prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis; dan
- f. Kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.

4) Informasi dan Komunikasi

Informasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau

lambang tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif.

Pimpinan instansi dan seluruh jajarannya harus mendapatkan informasi yang relevan dan dapat diandalkan, yang diperoleh melalui proses identifikasi dan pengkomunikasian informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat, agar mereka dapat melaksanakan tugas dan fungsi secara efisien dan efektif.

Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif tersebut, pimpinan instansi pemerintah harus sekurang-kurangnya :

- Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi;
- Mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus (memanage sistem informasi).

Dalam rangka penyelenggaraan SPIP, informasi dan komunikasi yang perlu dikelola adalah informasi dan komunikasi yang dapat mengintegrasikan pelaksanaan komponen-komponen SPIP secara efektif, terutama yang terkait langsung dengan pencapaian tujuan organisasi serta berhubungan dengan pengelolaan risiko dan pelaksanaan aktivitas pengendalian.

Informasi dan komunikasi yang diselenggarakan Inspektorat dalam rangka penyelenggaraan SPIP merupakan proses pengumpulan dan pertukaran informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan, mengelola, dan mengendalikan kegiatan instansi. Informasi dan komunikasi mencakup pengumpulan dan penyajian informasi kepada pegawai agar mereka dapat melakukan tanggungjawabnya, termasuk

pemahaman akan peran dan tanggungjawabnya sehubungan dengan pengendalian intern.

5) Pemantauan pengendalian intern

Pemantauan pengendalian intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern, dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti. Pelaksanaan pemantauan pengendalian intern dimaksudkan untuk memastikan bahwa sistem pengendalian intern sudah bekerja sesuai yang diharapkan dan perbaikan-perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan kondisi internal dan eksternal organisasi. Pemantauan pengendalian intern mencakup kegiatan penilaian atas desain dan pelaksanaan pengendalian intern, serta menghasilkan usulan tindakan perbaikan terhadap kualitas sistem pengendalian intern, yang dilaksanakan melalui tiga jenis kerangka pemantauan, yaitu :

- a. Pemantauan Berkelanjutan;
- b. Evaluasi Terpisah;
- c. Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit dan Reviu Lainnya.

4. Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibilities)

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 mengamanatkan Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/ Wali Kota/Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai

dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan ini dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan.

Pernyataan sebagaimana dikehendaki peraturan tersebut membawa konsekuensi perlunya dukungan fakta bahwa sistem pengendalian intern memang sudah diselenggarakan secara memadai. Untuk meyakini keandalan Sistem Pengendalian Intern yang ada, Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai memandang perlu menjalankan siklus penyelenggaraan SPIP setiap tahun, mulai dari identifikasi sasaran/tujuan sampai dengan pemantauan penyelenggaraan pengendalian, serta melakukan evaluasi atas efektifitas penyelenggaraan SPIP tersebut.

BAB II

URAIAN RENCANA TINDAK LANJUT PENGENDALIAN INTERN

A. PENERAPAN SPIP PADA INSPEKTORAT KAB. KEPULAUAN MENTAWAI

Dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kabupaten Kepulauan Mentawai, telah diterbitkan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 48 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Aturan tersebut memuat acuan pelaksanaan pengendalian intern pada seluruh kegiatan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Kemudian untuk memperlancar penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai, juga telah diterbitkan Keputusan Inspektur Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Kualitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Satgas SPIP) di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Berdasarkan Keputusan Inspektur Inspektorat tersebut, tugas pokok dari Satgas SPIP Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah sebagai langkah awal Pengembangan Pengendalian Intern, Tim Satgas SPIP Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai telah melakukan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) tentang rencana penyelenggaraan SPIP pada Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai. Dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) tersebut antara lain membahas tentang :

1. Hasil penilaian kondisi lingkungan pengendalian melalui

pengisian Kuesioner Control Environment Evaluation (CEE). Melalui penilaian ini diharapkan dapat ditemukan celah atau kekurangan pengendalian yang ada/ terpasang, serta merancang rencana tindak perbaikan pengendalian intern yang lebih baik;

2. Proses penilaian risiko yang diarahkan untuk mendapatkan gambaran tentang profil risiko dan aktivitas yang diperlukan untuk mengendalikan risiko pada kegiatan utama Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai;
3. Teknis penyusunan Rencana Tindak Pengendalian Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Hasil kegiatan Focus Group Discussion (FGD) tersebut selanjutnya dijadikan sebagai landasan awal untuk melakukan upaya perbaikan penyelenggaraan pengendalian intern, melalui penyusunan Rencana Tindak Pengendalian Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Rencana Tindak Pengendalian ini merupakan action plan untuk menindaklanjuti hasil kegiatan Focus Group Discussion (FGD), yang terdiri atas dua paket rencana aksi, yaitu :

1. Rencana kegiatan peningkatan kualitas lingkungan pengendalian;
2. Rencana kegiatan penanganan risiko yang relevan dengan kegiatan utama organisasi.

B. PENCIPTAAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN

1. Tujuan Penciptaan Lingkungan Pengendalian

Unsur lingkungan pengendalian merupakan pondasi dari unsur-unsur pengendalian intern lainnya, sehingga unsur lingkungan pengendalian memiliki

pengaruh yang sangat signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan Sistem pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Oleh karena itu, secara umum pembangunan lingkungan pengendalian bertujuan untuk menciptakan “atmosfir” yang kondusif yang mendorong terimplementasinya Sistem Pengendalian Intern secara efektif di Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Lingkungan pengendalian yang baik/ buruk menentukan keberhasilan/ kegagalan penerapan unsur SPIP lainnya. Secara khusus, pembangunan lingkungan pengendalian di lingkungan Inspektorat Daerah bertujuan untuk:

- a. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;
- b. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
- c. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
- d. Terwujudnya struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f. Terwujudnya kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. Terwujudnya aparat pengawasan intern pemerintah yang berperan efektif; dan
- h. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

2. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini

Langkah strategis untuk mengetahui kondisi lingkungan pengendalian saat ini pada Inspektorat Daerah yaitu :

- a. Mengevaluasi Lingkungan Pengendalian dengan melaksanakan survei persepsi melalui pengisian Kuesioner Control Environment Evaluation (CEE) oleh pegawai Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai;

- b. Melakukan rekapitulasi isian Kuesioner Control Environment Evaluation (CEE) dengan fokus pernyataan sub-sub unsur Lingkungan Pengendalian terbanyak “memadai”

Berdasarkan hasil rekapitulasi isian kuesioner terhadap 8 (delapan) sub unsur Lingkungan Pengendalian diperoleh gambaran sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2. 1 Pemetaan Lingkungan Pengendalian Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2026

No.	Lingkungan Pengendalian	Kondisi
1.	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	<i>Memadai</i>
2.	Komitmen terhadap Kompetensi	<i>Memadai</i>
3.	Kepemimpinan yang Kondusif	<i>Memadai</i>
4.	Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	<i>Memadai</i>
5.	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat	<i>Memadai</i>
6.	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	<i>Memadai</i>
7.	Perwujudan Peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang Efektif	<i>Memadai</i>
8.	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	<i>Memadai</i>

Dari Hasil Evaluasi Lingkungan Pengendalian pada Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2026 seperti yang diuraikan pada Tabel 2.1 di atas, ditarik kesimpulan bahwa secara umum lingkungan pengendalian telah memiliki kondisi yang baik, dimana 8 sub unsur memiliki kondisi **“Memadai”**

a. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian yang kondusif merupakan unsur paling penting dalam penerapan pengendalian intern. Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai mengharapkan terciptanya Lingkungan Pengendalian yang kondusif, sehingga mampu mendorong terciptanya perilaku dan tindakan yang lebih efisien dan efektif dari seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Peningkatan kualitas perilaku dan tindakan tersebut diharapkan menjadi modal utama untuk menghasilkan aktivitas pengendalian yang handal guna mencapai tujuan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Hasil evaluasi atas kondisi lingkungan pengendalian dengan pendekatan Control Environment Evaluation menunjukkan bahwa kedelapan sub unsur lingkungan pengendalian telah memiliki kondisi yang memadai. Namun demikian, masih terdapat beberapa kelemahan lingkungan pengendalian yang perlu segera diperbaiki.

Pemetaan Lingkungan Pengendalian Intern berdasarkan Hasil Reviu Dokumen dan Hasil Survei Persepsi (*sesuai form 1.c lampiran 5*), kondisi Lingkungan Pengendalian yang masih terdapat kategori “kurang memadai” sehingga perlu dilakukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dan merupakan prioritas untuk segera dilaksanakan sebagaimana dirumuskan pada Tabel 2.2 berikut ini:

Tabel 2. 2 Rencana Tindak Penguatan Lingkungan Pengendalian Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025

No.	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	B	C	D	e
B	Komitmen Terhadap Kompetensi			
2	Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi / jabatan kurang memadai	Mengusul peningkatan kompetensi pegawai (diklat) sesuai tupoksi / jabatan	Kasubag Umum dan Kepegawai	Tahun 2026
C	Kepemimpinan yang kondusif			
7	Rencana strategis dan rencana kerja Inspektorat belum menyajikan informasi mengenai Risiko	Mengikuti pendampingan dan menyajikan informasi mengenai risiko pada renstra dan renja inspektorat	Perencana Ahli Muda	Tahun 2026
8	Pimpinan kurang berperan serta dan mengikutsertakan pejabat dan pegawai terkait dalam proses pengelolaan Risiko	Melakukan rapat internal bersama antara pejabat terkait dalam proses pengelolaan Risiko	Inspektur	Tahun 2026
E	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang tepat			
3	Kewenangan belum direviu secara periodic	Mengajukan usulan pembuatan SOP Reviu Kegiatan Internal	Kasubag Umum dan Kepegawai	Tahun 2026
F	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM			
4	Inspektorat Telah Menginternalisasi Budaya Sadar Risiko	Melakukan rapat internal untuk menginformasik	Inspektur	Tahun 2026

No.	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	B	C	D	e
		resiko yang telah diidentifikasi		
5	Kurangnya pemberian reward dan/atau punishment atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja)	Memberi Penilai yang sesuai dengan kinerja yang dihasilkan setiap bulannya (reward/ punishment)	Inspektur	Tahun 2026
7	Instansi telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM namun kurang memadai	Membuat Daftar Diklat yang dibutuhkan setiap tahunnya	Kasubag Umum dan Kepegawai	Tahun 2026

C. RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN DI INSPEKTORAT KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

1. Pernyataan Tujuan Strategis

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Rencana Tindak Pengendalian yang disusun pada Satuan Tugas Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terintegrasi Di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai digunakan dalam rangka membantu Inspektur dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern yang diprioritaskan untuk pembangunan pengendalian dalam rangka mencapai sasaran strategis yang terdokumentasi dalam Renstra Inspektorat Tahun 2025-2029.

TUJUAN :

Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan

Tabel 2. 3 Tujuan dan Sasaran Strategis Perangkat Daerah

No.	Tujuan	Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Konfirmasi Pimpinan	Revisi Tujuan/Sasaran
1	Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatnya Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan	v	-
		Meningkatnya Kinerja Inspektorat	v	-

2. Identifikasi Risiko

Berdasarkan hasil penilaian atas Risiko Strategis dan Operasional, yang mengancam tercapainya tujuan organisasi, terdapat risiko-risiko yang menjadi prioritas untuk dipetakan, untuk mengantisipasi risiko berkembang menjadi masalah. Risiko-risiko dimaksud meliputi Risiko Strategis dan Operasional yang teridentifikasi berdasarkan hasil diskusi. Risiko Strategis merupakan risiko yang dipetakan berdasarkan sasaran strategis perangkat daerah sedangkan Risiko Operasional merupakan risiko yang dipetakan berdasarkan sasaran kegiatan yang merupakan pelaksanaan operasional tugas dan fungsi Inspektorat. Hasil pemetaan risiko sebagaimana dapat dilihat pada lampiran Form 3.b untuk Identifikasi Risiko Strategis dan Form 3.c untuk Identifikasi Risiko Operasional.

Penentuan Analisis Resiko berpedoman pada Pedoman Pengelolaan Resiko pada Pemerintah Daerah, Surat Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 100.3.3.2-119 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Perangkat Daerah kabupaten Kepulauan Mentawai.

Hasil analisis terhadap risiko-risiko tersebut kemudian digambarkan dalam Peta Risiko Strategis dan Peta Risiko Operasional sebagai berikut :

Gambar 2.1
Peta Risiko Strategis
Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai
Tahun 2024

MATRIKS ANALISIS RISIKO			Dampak/Konsekuensi			
			Tidak signifikan	Kecil	Besar	Sangat signifikan
Kemungkinan Terjadinya Risiko	Hampir pasti	4				
	Kemungkinan besar	3				
	Kemungkinan kecil	2				
	Sangat jarang	1				

Keterangan :	Sangat rendah	Rendah	Tinggi	Sangat tinggi
--------------	---------------	--------	--------	---------------

Dari dua gambar diatas, level risiko berada pada zona hijau dan sebagian berada di zonakuning yang mendekati zona merah. Artinya, skala kemungkinan dan dampak berada pada angka di atas 2. Risiko pada zona hijau perlu optmalisasi melalui tindak pengendalian lanjutan untuk mempertahankan kondisinya sehingga tidak bergeser ke zona kuning.

Sedangkan untuk risiko yang berada di zona kuning mendekati zona merah harus mendapat perhatian melalui tindak pengendalian yang efektif agar risiko tidak berkembang menjadi permasalahan yang mengganggu pencapaian tujuan organisasi.

3. Kegiatan Pengendalian Terpasang

Terhadap Identifikasi Risiko pada Angka 2 di atas, peta risiko berada di zona kuning yang artinya perlu adanya kegiatan pengendalian agar risiko tidak menjadi masalah.

a. Kegiatan pengendalian yang sudah terpasang/sudah ada untuk Risiko Strategis meliputi :

- 1) Sosialisasi SPIP
- 2) Kalender Diklat
- 3) Peraturan Tentang Anjab dan ABK
- 4) Perda tentang APBD, Renja
- 5) Pedoman Manajemen Risiko

b. Kegiatan pengendalian yang sudah terpasang/sudah ada untuk Risiko Operasional meliputi :

- 1) Koordinasi dengan obyek pemeriksaan (auditan) terkait penyiapan bahan reu
- 2) Daftar Temuan
- 3) Koordinasi Internal
- 4) Peta Diklat
- 5) Daftar Fungsional yang telah mengikut Diklat
- 6) Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
- 7) Daftar Barang Milik Daerah yang akan di pelihara

4. Kegiatan Pengendalian yang Masih Dibutuhkan

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penanganan risiko, beberapa kegiatan pengendalian yang telah ada perlu ditingkatkan dan beberapa kegiatan pengendalian baru perlu dibangun. Pembangunan kegiatan pengendalian didasarkan kepada upaya untuk mengurangi kemungkinan munculnya risiko dan upaya untuk mengurangi dampak apabila risiko benar-benar terjadi.

Selengkapnya terkait dengan identifikasi dan penilaian risiko serta rencana tindak/kegiatan pengendalian, dijabarkan dalam register risiko pada :

- o *Lampiran 1 Register Risiko Strategis RTP*
- o *Lampiran 2 Register Risiko Operasional RTP*

5. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi yang dimaksud adalah informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan tindak pengendalian. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai yang direncanakan dalam RTP meliputi :

- a. Komunikasi non verbal dengan memberikan keteladanan dalam praktik integritas;
- b. Forum Rapat Koordinasi / Rapat Dinas / Fokus Group Diskusi secara internal maupun eksternal dengan stake holder terkait untuk memetakan permasalahan dan merumuskan tindak lanjut penyelesaiannya
- c. Konsultasi, diskusi, dan fasilitasi untuk pendalaman kondisi/permasalahan dan menentukan tindak lanjut.

6. Pemantauan Dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan. Pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan meliputi :

- a. Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan berkelanjutan dilaksanakan atas

pengendalian kunci untuk meyakinkan bahwa pengendalian tersebut dijalankan sebagaimana seharusnya. Masing-masing unit kerja OPD pemilik risiko membangun dan melaksanakan pemantauan berkelanjutan. Pemantauan berkelanjutan yang perlu dilakukan meliputi antara lain sebagai berikut:

- 1) Supervisi
- 2) Monitoring
- 3) Evaluasi

b. Evaluasi Terpisah

Inspektorat Daerah melaksanakan evaluasi atas penyelenggaraan SPIP pada unit-unit kerja strategis pada akhir tahun. Evaluasi bertujuan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif.

c. Pelaksanaan Tindak lanjut

Sebagai bagian dari penyelenggaraan dan perbaikan SPIP, atas setiap rekomendasi hasil audit/evaluasi/reviu dari auditor eksternal maupun internal, setiap unit kerja OPD melaksanakan tindaklanjutnya.

d. Pemantauan atas Pelaksanaan RTP

Inspektorat memberikan laporan atas pelaksanaan RTP sesuai tanggungjawabnya secara berkala kepada tim pemantau. Hasil pemantauan tim pemantau dilaporkan kepada Bupati.

BAB III PENUTUP

Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) ini merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagai upaya mewujudkan proses terpadu yang dilaksanakan oleh pimpinan dan seluruh pegawai secara terus menerus dan berkesinambungan. Dengan penyelenggaraan SPIP diharapkan dapat memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dokumen RTP ini juga menjadi instrumen untuk merencanakan dan mengendalikan pencapaian kinerja sebagaimana target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai. Dokumen RTP ini senantiasa disesuaikan dengan perkembangandan kondisi, untuk pembenahan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara berkelanjutanpada Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Komitmen dari segenap jajaran pimpinan dan seluruh pegawai baik JFU dan JFT, serta ditunjang manajerial yang profesional, efektif, efisien, transparan, serta akuntabel dan berbasiskan pada fungsi, diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan SPIP pada Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai akan tercapai secara bertahap dan berkelanjutan.

Dokumen RTP ini berlaku efektif sejak ditandatangani. Dalam hal terjadi perubahan ketentuan dan peraturan perundang-undangan, maupun terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tuapejat, Januari 2026
Inspektur



Serieli Bawamenewi, SH, CGCAE
NIP. 19830905 200802 1 001

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH

Nama Pemda	: Kabupaten Kepulauan Mentawai
Tahun Penilaian	: 2026
Periode yang dinilai	: Renstra Inspektorat TA 2025-2029
Urusan Pemerintahan	: Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan
OPD yang Dinilai	: Inspektorat
Sumber Data	: Renstra Inspektorat TA 2025-2029
Tujuan Strategis	Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan
Sasaran Strategis	1 Meningkatnya Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan 2 Meningkatnya Kinerja Inspektorat
IKU Renstra OPD	1 Maturitas SPIP Nilai 3,0
	2 Indeks Persepsi Anti Korupsi Indeks 3,20
	3 Indeks Manajemen Risiko (MRI) Indeks 2,7
	4 Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) Indeks 2,7
	5 Nilai LAKIP Inspektorat 73,50
	6 Jumlah Inovasi yang diterapkan Jumlah Inovasi 1
	7 Capaian Kinerja Perangkat Daerah Persen 80
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan : Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan
	Sasaran :
	1. Meningkatnya Integritas Penyelenggaraan Pemerintah
	2. Meningkatnya Kinerja Inspektorat
	1 Maturitas SPIP Nilai 3,0 3 Indeks Manajemen Risiko (MRI) Indeks 2,7

Tuapejat, 28 Januari 2026
 Inspektur

 Serfeli Bawamenewi, SH
 NIP. 19830905 200802 1 001

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL INSPEKTORAT DAERAH

Nama Pemda	: Kabupaten Kepulauan Mentawai																										
Tahun Penilaian	: 2026																										
Periode yang dinilai	: 2025-2029																										
Urusan Pemerintahan	: Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan																										
OPD yang Dinilai	: Inspektorat																										
Sumber Data	Renja 2026																										
Tujuan Strategis	Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan																										
Program Inspektorat dan Kegiatan Utama	<table> <tr><td>1</td><td>Program Penyelenggaraan Pengawasan</td></tr> <tr><td>1,1</td><td>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</td></tr> <tr><td>1,2</td><td>Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</td></tr> <tr><td>2</td><td>Program Perumusan Kebijakan Pendampingan</td></tr> <tr><td>2,1</td><td>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</td></tr> <tr><td>2,2</td><td>Pendampingan dan Asistensi</td></tr> <tr><td>3</td><td>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota</td></tr> <tr><td>3,1</td><td>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</td></tr> <tr><td>3,2</td><td>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</td></tr> <tr><td>3,3</td><td>Administrasi Umum Perangkat Daerah</td></tr> <tr><td>3,4</td><td>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</td></tr> <tr><td>3,5</td><td>Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</td></tr> <tr><td>3,6</td><td>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</td></tr> </table>	1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1,1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1,2	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	2	Program Perumusan Kebijakan Pendampingan	2,1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	2,2	Pendampingan dan Asistensi	3	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	3,1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3,3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3,4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3,5	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3,6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan																										
1,1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal																										
1,2	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu																										
2	Program Perumusan Kebijakan Pendampingan																										
2,1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan																										
2,2	Pendampingan dan Asistensi																										
3	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota																										
3,1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																										
3,2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																										
3,3	Administrasi Umum Perangkat Daerah																										
3,4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																										
3,5	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																										
3,6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																										
Keluaran/ Hasil Kegiatan	<table> <tr><td>1,1</td><td>Meningkatnya kualitas pengawasan dan pengendalian internal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah</td></tr> <tr><td>1,2</td><td>Meningkatnya kualitas Pengawasan dengan tujuan tertentu</td></tr> <tr><td>2,1</td><td>Meningkatnya Kualitas Kebijakan</td></tr> <tr><td>2,2</td><td>Terlaksananya Pendampingan, Asistensi</td></tr> <tr><td>3,1</td><td>Terlaksananya perencanaan dan pelaporan yang disusun perangkat daerah</td></tr> <tr><td>3,2</td><td>Terlaksananya Administrasi Keuangan</td></tr> <tr><td>3,3</td><td>Terlaksananya administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah tepat waktu dan sesuai standar</td></tr> <tr><td>3,4</td><td>Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu dan sesuai standar</td></tr> <tr><td>3,5</td><td>Terlaksananya Pengadaan BMD urusan Perangkat Daerah</td></tr> <tr><td>3,6</td><td>Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah</td></tr> <tr><td>3,7</td><td>Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</td></tr> </table>	1,1	Meningkatnya kualitas pengawasan dan pengendalian internal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	1,2	Meningkatnya kualitas Pengawasan dengan tujuan tertentu	2,1	Meningkatnya Kualitas Kebijakan	2,2	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi	3,1	Terlaksananya perencanaan dan pelaporan yang disusun perangkat daerah	3,2	Terlaksananya Administrasi Keuangan	3,3	Terlaksananya administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah tepat waktu dan sesuai standar	3,4	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu dan sesuai standar	3,5	Terlaksananya Pengadaan BMD urusan Perangkat Daerah	3,6	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	3,7	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
1,1	Meningkatnya kualitas pengawasan dan pengendalian internal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah																										
1,2	Meningkatnya kualitas Pengawasan dengan tujuan tertentu																										
2,1	Meningkatnya Kualitas Kebijakan																										
2,2	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi																										
3,1	Terlaksananya perencanaan dan pelaporan yang disusun perangkat daerah																										
3,2	Terlaksananya Administrasi Keuangan																										
3,3	Terlaksananya administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah tepat waktu dan sesuai standar																										
3,4	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu dan sesuai standar																										
3,5	Terlaksananya Pengadaan BMD urusan Perangkat Daerah																										
3,6	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah																										
3,7	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																										
Informasi Lain	-																										
Kegiatan, dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko	<table> <tr><td>1,1</td><td>Meningkatnya kualitas pengawasan dan pengendalian internal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah</td></tr> <tr><td>1,2</td><td>Meningkatnya kualitas Pengawasan dengan tujuan tertentu</td></tr> <tr><td>2,1</td><td>Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan</td></tr> <tr><td>2,2</td><td>Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi</td></tr> </table>	1,1	Meningkatnya kualitas pengawasan dan pengendalian internal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	1,2	Meningkatnya kualitas Pengawasan dengan tujuan tertentu	2,1	Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	2,2	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi																		
1,1	Meningkatnya kualitas pengawasan dan pengendalian internal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah																										
1,2	Meningkatnya kualitas Pengawasan dengan tujuan tertentu																										
2,1	Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan																										
2,2	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi																										

Tuapejat, 28 Januari 2026
 Inspektur

 Serieli Bawamenewi, SH
 NIP. 19830905 200802 1 001

Identifikasi Risiko Strategis Inspektorat Daerah

: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai : Inspektorat : 2026 : Periode Renstra (Tahun 2025 -2029) : Meningkatkan kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan : Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan											
No	Tujuan/Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko		Pemilik	Sebab		C/UC	Dampak		Pihak yang Terkena
			Uraian	Kode Risiko		Uraian	Sumber		Uraian		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	
1	Tujuan : Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan										
	Sasaran : 1.Meningkatnya Integritas Penyelenggaraan pemerintahan	1. Indeks persepsi anti korupsi	Nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi tidak mencapai target	RSO.26.35.04.01	Inspektur	Pembinaan integritas OPD belum optimal	Internal	C	Target Kinerja tidak tercapai	Pemerintah Daerah	
			Masih terjadi praktik penyimpangan pada OPD	RSO.26.35.04.02	Inspektur	Pengendalian intern lemah	Internal	C	Target Kinerja tidak tercapai	Pemerintah Daerah dan Masyarakat Seluruh OPD	
		2. Manajemen Resiko Indeks (MRI)	Implementasi manajemen risiko pada OPD belum optimal	RSO.26.35.04.03	Inspektur	Pemahaman manajemen risiko rendah	Internal	C	Nilai MRI rendah		
			Dokumen register risiko OPD belum lengkap	RSO.26.35.04.04	Irban	Pendampingan belum optimal	Internal	C	Pengendalian Risiko Tidak Efektif	OPD	
			Dokumen register risiko OPD belum lengkap	RSO.26.35.04.04	Irban	Pendampingan belum optimal	Internal	C	Pengendalian Risiko Tidak Efektif	OPD	
			Agen risiko pada OPD tidak aktif	RSO.26.35.04.05	Irban	Komitmen Pimpinan OPD rendah	Internal	C	Implementasi SPIP tidak optimal	OPD	
		3. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Rekomendasi hasil pengawasan tidak ditindaklanjuti	RSO.26.35.04.06	Irban	Komitmen OPD rendah	Internal	C	Temuan berulang	OPD	
			Area rawan korupsi belum dimitigasi	RSO.26.35.04.07	Inspektur	Monitoring belum optimal	Internal	C	Potensi kerugian daerah	Pemerintah Daerah	

No	Tujuan/Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko		Pemilik	Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko		Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
	Sasaran: 2. Meningkatkan Kinerja Inspektorat	1. Nilai LAKIP	Nilai LAKIP Inspektorat tidak mencapai target	RSO.26.35.04.08	Sekretaris	Perencanaan kinerja kurang optimal	Internal	C	Nilai SAKIP menurun	Inspektorat
		2. Jumlah Inovasi yang diterapkan	Dokumen perencanaan dan pelaporan tidak berkualitas	RSO.26.36.04.09	Sekretaris	Monitoring belum optimal	Internal	C	Penilaian AKIP menurun	Inspektorat
			Inovasi pengawasan tidak berkembang	RSO.26.36.04.10	Sekretaris	Kompetensi SDM terbatas	Internal	C	Kinerja organisasi stagnan	Inspektorat
			Digitalisasi pengawasan belum optimal	RSO.26.35.04.11	Sekretaris	Infrastruktur TI terbatas	Internal	C	Efisiensi kerja menurun	Inspektorat
			Pemanfaatan aplikasi pengawasan rendah	RSO.26.35.04.12	Sekretaris	Kurangnya pelatihan	Internal	C	Proses pengawasan lambat	Inspektorat
		3. Capaian kinerja perangkat daerah	PKPT tidak terlaksana sesuai target	RSO.26.36.04.13	Inspektur	Auditor terbatas	Internal	C	Target pengawasan tidak tercapai	OPD
			Jadwal audit tertunda	RSO.26.36.04.14	Irban	Banyak penugasan khusus	Internal	C	Pengawasan terlambat	OPD
			Cuaca ekstrem menghambat pelaksanaan audit	RSO.26.35.04.15	Inspektur	Gelombang tinggi dan cuaca buruk	Eksternal	U	PKPT tertunda	OPD
			Akses transportasi antar pulau menghambat pengawasan	RSO.26.35.04.16	Inspektur	Kondisi geografis Kepulauan Mentawai	Eksternal	U	Cakupan pengawasan berkurang	OPD
			Gangguan internet menghambat pengawasan berbasis elektronik	RSO.26.35.04.17	Sekretaris	Infrastruktur jaringan terbatas	Eksternal	U	Pelaporan terlambat	Inspektorat
			Anggaran pengawasan tidak mencukupi	RSO.26.35.04.18	Inspektur	Efisiensi APBD	Eksternal	U	Pemeriksaan berkurang	Pemerintah Daerah
			Jumlah auditor bersertifikat belum memenuhi kebutuhan	RSO.26.38.04.19	Inspektur	Formasi dan pengembangan SDM terbatas	Internal	C	Kualitas hasil audit menurun	Inspektorat



Identifikasi Risiko Operasional OPD

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Nama OPD : Inspektorat Tahun Penilaian : 2026 Periode yang dinilai : Tujuan Strategis : Meningkatkan kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan Sasaran strategis OPD : 1. Meningkatkan Integritas Penyelenggaraan pemerintahan 2. Meningkatkan Kinerja Inspektorat Urusan Pemerintahan : Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan														
No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Tahap	Risiko			Pemilik	Sebab ^(*)		CIUC	Dampak ^(**)	
						Uraian	Kode Risiko	Uraian		Uraian	Sumber		Uraian	Uraian
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l			
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan													
1.1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Perencanaan	PKPT belum sepenuhnya berbasis risiko	ROO 26.36.04.01	Irban	Data profil risiko OPD belum lengkap	Internal				C	Pengawasan kurang tepat sasaran	OPD
			Persiapan	Dokumen objek pemeriksaan belum lengkap	ROO 26.35.04.02	Ketua Tim	OPD terlambat menyampaikan dokumen	Internal				C	Jadwal pemeriksaan mundur	OPD
			Pelaksanaan	Pemeriksaan tidak selesai sesuai jadwal	ROO 26.35.04.03	Ketua Tim	Jumlah auditor terbatas	Internal				C	Target PKPT tidak tercapai	Inspektorat
			Pelaporan	LHP terlambat diterbitkan	ROO 26.35.04.04	Ketua Tim	Proses reviu berulang	Internal				C	Tindak lanjut terlambat	OPD
			Tindak Lanjut	Rekomendasi hasil pemeriksaan tidak ditindaklanjuti	ROO 26.35.04.05	Irban	Komitmen OPD rendah	Internal				C	Temuan berulang	OPD
1.1.1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Persiapan	Dokumen kinerja OPD tidak lengkap	ROO 26.35.04.06	Irban	OPD belum terbit administrasi	Internal				C	Pemeriksaan tertunda	OPD
			Pelaksanaan	Data kinerja tidak valid	ROO 26.35.04.07	Ketua Tim	Data belum diverifikasi	Internal				C	Kesimpulan audit tidak akurat	OPD
			Pelaksanaan	Auditor tidak memahami proses bisnis OPD	ROO 26.35.04.08	Ketua Tim	Kompetensi auditor belum memadai	Internal				C	Kualitas audit menurun	Inspektorat
			Pelaporan	Rekomendasi kurang implementatif	ROO 26.35.04.09	Irban	Analisis kurang mendalam	Internal				C	Perbaikan tidak optimal	OPD
			Monitoring	Tindak lanjut rendah	ROO 26.35.04.10	Irban	Pengawasan tindak lanjut kurang	Internal				C	Temuan berulang	OPD
1.1.2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Persiapan	Dokumen keuangan belum lengkap	ROO 26.37.04.11	Irban	OPD terlambat menyampaikan data	Internal				C	Pemeriksaan tertunda	OPD
			Pelaksanaan	Bukti transaksi tidak memadai	ROO 26.37.04.12	Ketua Tim	Arsip kurang baik	Internal				C	Temuan meningkat	OPD
			Pelaksanaan	Kesalahan pengujian transaksi	ROO 26.37.04.13	Ketua Tim	Kompetensi auditor	Internal				C	Hasil audit kurang akurat	Inspektorat
			Pelaporan	LHP terlambat	ROO 26.35.04.14	Ketua Tim	Banyak koreksi	Internal				C	Tindak lanjut terlambat	OPD
			Monitoring	Rekomendasi keuangan tidak ditindaklanjuti	ROO 26.35.04.15	Irban	Komitmen rendah	Internal				C	Kerugian daerah berulang	Pemerintah Daerah
1.1.3	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Perencanaan	Jadwal reviu laporan kinerja tidak sesuai dengan jadwal penyusunan LKJP OPD	ROO 26.35.04.16	Inspektur Pembantu	Perencanaan reviu belum terkoordinasi dengan OPD	Internal				C	Pelaksanaan reviu terlambat	Inspektorat dan OPD

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko			Pemilik	Sebab		C/JUC	Dampak	
					Tahap	Uraian	Kode Risiko		Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a		b	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
					Persiapan	Dokumen LKJP dan data pendukung belum lengkap	ROO 26.35.04.17	Ketua Tim Reviu	OPD terlambat menyampaikan dokumen	Internal	C	Reviu tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal	OPD
					Persiapan	Data kinerja yang disampaikan tidak akurat atau tidak valid	ROO 26.35.04.18	Ketua Tim Reviu	Pengendalian data kinerja OPD lemah	Internal	C	Hasil reviu menjadi kurang andal	OPD
					Pelaksanaan	Auditor/reviu tidak memahami proses bisnis atau indikator kinerja OPD	ROO 26.35.04.19	Inspektur Pembantu	Kompetensi SDM belum memadai	Internal	C	Kualitas hasil reviu menurun	Inspektoral
					Pelaksanaan	Pengujian atas capaian kinerja tidak dilakukan secara memadai	ROO 26.35.04.20	Ketua Tim Reviu	Keterbatasan waktu dan data	Internal	C	Kesimpulan reviu tidak akurat	Pemerintah Daerah
					Pelaksanaan	Terjadi perubahan regulasi mengenai penyusunan LKJP	ROO 26.35.04.21	Inspektur Pembantu	Kebijakan pemerintah pusat	Eksternal	U	Penyesuaian metode reviu	Inspektoral
					Pelaporan	Laporan Hasil Reviu terlambat disampaikan	ROO 26.35.04.22	Ketua Tim Reviu	Proses review internal memerlukan perbaikan berulang	Internal	C	Penyampaian LKJP kepada Kepala Daerah menjadi terlambat	Pemerintah Daerah
					Pelaporan	Rekomendasi hasil reviu kurang jelas atau sulit ditindaklanjuti	ROO 26.35.04.23	Inspektur Pembantu	Analisis reviu kurang mendalam	Internal	C	Perbaikan kinerja OPD tidak optimal	OPD
					Tindak Lanjut	OPD tidak menindaklanjuti rekomendasi hasil reviu	ROO 26.35.04.24	Inspektur Pembantu	Komitmen OPD rendah	Internal	C	Pemaksimalan yang sama berulang	OPD
					Tindak Lanjut	Monitoring tindak lanjut belum dilaksanakan secara berkala	ROO 26.35.04.25	Inspektur Pembantu	Jadwal monitoring belum terstruktur	Internal	C	Efektivitas reviu menurun	Pemerintah Daerah
1.1.4			Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Perencanaan	Jadwal reviu laporan keuangan tidak selaras dengan jadwal penyusunan LKPD	ROO 26.35.04.26	Inspektur Pembantu	Koordinasi dengan perangkat daerah belum optimal	Internal	C	Reviu terlambat dilaksanakan	Inspektoral dan OPD
					Persiapan	Dokumen LKPD dan kertas kerja pendukung belum lengkap	ROO 26.35.04.27	Ketua Tim Reviu	OPD terlambat menyampaikan dokumen	Internal	C	Proses reviu tertunda	OPD
					Persiapan	Data pendukung laporan keuangan tidak akurat atau tidak konsisten	ROO 26.35.04.28	Ketua Tim Reviu	Rekonsiliasi belum selesai	Internal	C	Hasil reviu kurang andal	OPD
					Pelaksanaan	Pengujian prosedur reviu tidak dilaksanakan secara memadai	ROO 26.35.04.29	Ketua Tim Reviu	Keterbatasan waktu dan sumber daya	Internal	C	Kesimpulan reviu kurang tepat	Pemerintah Daerah
					Pelaksanaan	Auditor belum memahami perubahan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) atau regulasi terbaru	ROO 26.35.04.30	Inspektur Pembantu	Kompetensi dan penguasaan pengetahuan belum memadai	Internal	C	Temuan material tidak teridentifikasi	Inspektoral
					Pelaksanaan	Rekonsiliasi data antara OPD dan BPKAD belum selesai	ROO 26.35.04.31	Ketua Tim Reviu	Perbedaan data dan keterlambatan rekonsiliasi	Internal	C	Laporan keuangan belum dapat direviu secara menyeluruh	Pemerintah Daerah
					Pelaksanaan	Gangguan aplikasi SIPD, SIMDA, atau aplikasi pendukung lainnya menghambat hasil	ROO 26.35.04.32	Ketua Tim Reviu	Gangguan sistem aplikasi	Internal	C	Reviu tertunda	Inspektoral dan OPD

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko			Sebab ¹⁾		CIUC	Dampak ²⁾	
					Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	Uraian	Pihak yang Terkena
1.1.5					Pelaporan	Laporan Hasil Reviu terlampir disampaikan kepada Kepala Daerah	ROO.26.35.04.33	Ketua Tim Reviu	Proses reviu internal dan penyempurnaan laporan memerlukan waktu lebih lama	Internal	Penyampaian LKPD kepada BPK berpotensi terlambat	Pemerintah Daerah
					Pelaporan	Rekomendasi hasil reviu tidak jelas atau tidak operasional	ROO.26.35.04.34	Inspektur Pembantu	Analisis dan perumusan rekomendasi kurang mendalam	Internal	Perbaikan laporan keuangan tidak optimal	OPD
					Tindak Lanjut	OPD tidak segera menindaklanjuti rekomendasi hasil reviu	ROO.26.35.04.35	Inspektur Pembantu	Komitmen dan koordinasi OPD masih rendah	Internal	Kesalahan penyajian laporan keuangan tetap terjadi	OPD
					Tindak Lanjut	Perubahan regulasi pengelolaan keuangan daerah menjelang penyampaian LKPD	ROO.26.35.04.36	Inspektur	Terbnyanya kebijakan baru dan Pemerintah Pusat	Eksternal	Diperlukan penyelesaian reviu dan penyajian laporan keuangan	Pemerintah Daerah
					Tindak Lanjut	Keterlambatan penyelesaian koreksi hasil reviu oleh OPD	ROO.26.35.04.37	Inspektur Pembantu	Keterbatasan SDM pengelola keuangan OPD	Internal	Kualitas LKPD menurun dan berpotensi memengaruhi opini BPK	Pemerintah Daerah
1.1.6					Perencanaan	Desa prioritas belum dipetakan berdasarkan risiko	ROO.26.35.04.38	Irbani	Data risiko desa belum tersedia	Internal	Pengawasan kurang efektif	Pemerintah Desa
					Pelaksanaan	Cuaca buruk menghambat pemeriksaan	ROO.26.35.04.39	Irbani	Geombang tinggi	Eksternal	Pemeriksaan terlunda	Pemerintah Desa
					Pelaksanaan	Transportasi laut terbatas	ROO.26.35.04.40	Irbani	Kondisi geografis Kepulauan Mentawai	Eksternal	Cakupan pengawasan berkurang	Pemerintah Desa
					Pelaksanaan	Dokumen APBDDes tidak lengkap	ROO.26.35.04.41	Ketua Tim	Administrasi desa belum tertib	Internal	Pemeriksaan tidak optimal	Pemerintah Desa
					Monitoring	Tindak lanjut hasil pemeriksaan rendah	ROO.26.35.04.42	Irbani	Kapasitas aparatur desa terbatas	Internal	Temuan berulang	Pemerintah Desa
1.1.7					Perencanaan	Ruang lingkup kerja sama tidak jelas	ROO.26.35.04.43	Sekretaris	Perencanaan kurang matang	Internal	Kerja sama tidak efektif	Mitra
					Pelaksanaan	Kordinasi antar APIP kurang efektif	ROO.26.35.04.44	Sekretaris	Komunikasi kurang intensif	Internal	Kegiatan tidak optimal	APIP
					Evaluasi	Kerja sama tidak berlanjut	ROO.26.35.04.45	Sekretaris	Tidak ada evaluasi berkala	Internal	Tujuan kerja sama tidak tercapai	Mitra
					Perencanaan	Perencanaan monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan belum berbasis prioritas risiko	ROO.26.35.04.46	Inspektur Pembantu	Belum dilakukan pemetaan terhadap rekomendasi yang memiliki tingkat urgensi tinggi	Internal	Rekomendasi penting terlambat diselesaikan	Pemerintah Daerah
					Pelaksanaan	Data dan dokumen hasil pemeriksaan BPK RI/APIP belum lengkap	ROO.26.35.04.47	Inspektur Pembantu	Pengumpulan data tindak lanjut dari OPD belum optimal	Internal	Monitoring tindak lanjut tidak berjalan efektif	Inspektoral
					Monitoring	OPD terlambat menyampaikan laporan/bukti tindak lanjut hasil pemeriksaan	ROO.26.35.04.48	Inspektur Pembantu	Rendahnya komitmen OPD terhadap penyelesaian rekomendasi	Internal	Persentase penyelesaian TLHP rendah	OPD

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko			Pemilik	Sebab ^{*)}		CIUC	Dampak ^{**)}	
					Tahap	Uraian	Kode Risiko		Uraian	Sumber		Uraian	Plhak yang Terkena
		b	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
					Monitoring	Bukti tindak lanjut yang disampaikan OPD tidak sesuai dengan rekomendasi pemeriksaan	ROO 26.35.04.49	Ketua Tim Monitoring	OPD belum memahami substansi rekomendasi dan dokumen pendukung yang diperlukan	Internal	C	Rekomendasi belum dapat dinyatakan selesai	OPD
					Monitoring	Masih terdapat rekomendasi hasil pemeriksaan yang belum dilindaklanjuti	ROO 26.35.04.50	Inspektur Pembantu	Kurangnya monitoring dan koordinasi secara berkala dengan OPD	Internal	C	Jumlah rekomendasi outstanding meningkat	Pemerintah Daerah
					Monitoring	Terdapat temuan pemeriksaan yang berulang pada OPD yang sama	ROO 26.35.04.51	Inspektur Pembantu	Penyelesaian rekomendasi belum menyentuh akar permasalahan	Internal	C	Risiko penyimpangan kembali terjadi	OPD
					Evaluasi	Status penyelesaian tindak lanjut tidak menggambarkan kondisi sebenarnya	ROO 26.35.04.52	Ketua Tim Monitoring	Verifikasi bukti tindak lanjut belum dilakukan secara memadai	Internal	C	Laporan monitoring tidak akurat	Pemerintah Daerah
					Evaluasi	Data tindak lanjut antara OPD, Inspektori, dan BPK RI tidak sinkron	ROO 26.35.04.53	Ketua Tim Monitoring	Belum optimalnya rekonsiliasi data secara berkala	Internal	C	Perbedaan data penyelesaian TLHP	Pemerintah Daerah
					Evaluasi	Analisis penyebab belum selesainya rekomendasi belum dilakukan secara mendalam	ROO 26.35.04.54	Inspektur Pembantu	Monitoring masih berfokus pada jumlah penyelesaian, belum pada akar masalah	Internal	C	Efektivitas pengawasan menurun	Inspektori
					Pelaporan	Laporan monitoring dan evaluasi tindak lanjut terlambat disampaikan	ROO 26.35.04.55	Inspektur Pembantu	Rekapitulasi dan verifikasi data membutuhkan waktu lama	Internal	C	Pimpinan terlambat mengambil tindakan	Kepala Daerah
					Pelaporan	Laporan tindak lanjut belum memberikan informasi yang memadai untuk pengambilan keputusan	ROO 26.35.04.56	Inspektur Pembantu	Analisis dan penyajian informasi belum optimal	Internal	C	Keputusan perbaikan kurang tepat	Pemerintah Daerah
					Tindak Lanjut	OPD belum melaksanakan rekomendasi sesuai batas waktu yang ditetapkan	ROO 26.35.04.57	Kepala OPD	Kurangnya perhatian pimpinan OPD terhadap penyelesaian temuan	Internal	C	Akumulasi rekomendasi belum selesai	OPD
					Tindak Lanjut	Penyelesaian rekomendasi yang berkaitan dengan pihak ketiga mengalami hambatan	ROO 26.35.04.58	Kepala OPD	Kendala administratif dan hukum dalam penyelesaian	Eksternal	U	Rekomendasi tidak segera selesai	Pemerintah Daerah
					Tindak Lanjut	Pergantian pejabat pengelola keuangan/kegiatan menghambat penyelesaian rekomendasi	ROO 26.35.04.59	Kepala OPD	Mutasi pejabat tanpa proses serah terima yang baik	Internal	C	Penyelesaian TLHP terlambat	OPD
1.2	Penyenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				Monitoring	Kondisi geografis Kepulauan Mentawai menghambat verifikasi tindak lanjut lapangan	ROO 26.35.04.60	Inspektur Pembantu	Jarak antar pulau dan kondisi cuaca	Eksternal	U	Monitoring lapangan terlunda	Inspektori dan OPD
					Perencanaan	Penentuan objek pemeriksaan tidak berbasis risiko	ROO 26.35.04.61	Irbn	Data risiko OPD belum lengkap	Internal	C	Sasaran pengawasan tidak tepat	OPD

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko			Sebab		CIUC	Dampak	
					Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	Uraian	Pihak yang Terkena
					d	e	f	g	h	i	k	j
					Persiapan	Tim pengawasan tidak memiliki kompetensi sesuai objek pemeriksaan	ROO 26.35.04.62	Irban	Keterbatasan SDM auditor bersertifikat	Internal	Kualitas pemeriksaan menurun	Inspektorat
					Pelaksanaan	Pemeriksaan tidak selesai sesuai jadwal	ROO 26.35.04.63	Ketua Tim	Cuaca ekstrem dan kondisi transportasi antarpulau	Eksternal	Target PKPT tidak tercapai	OPD dan Inspektorat
					Pelaksanaan	Dokumen pendukung tidak diberikan lengkap	ROO 26.35.04.64	Ketua Tim	Komitmen OPD rendah	Eksternal	Temuan tidak memadai	OPD
					Pelaporan	LHP terlambat diterbitkan	ROO 26.35.04.65	Pengendali Teknis	Revisi berulang dan keterbatasan SDM	Internal	Rekomendasi terlambat ditindaklanjuti	Kepala Daerah dan OPD
1.2.1			Pengawasan dengan tujuan tertentu	Jumlah Laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	Perencanaan	Penetapan objek Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) tidak berdasarkan tingkat risiko	ROO 26.35.04.66	Inspektur/ Irban	Data profil risiko OPD belum lengkap dan analisis risiko belum optimal	Internal	Pengawasan tidak tepat sasaran dan efektivitas pengawasan menurun	Inspektorat, OPD
					Perencanaan	Surat Tugas dan Program Kerja Pengawasan terlambat diterbitkan	ROO 26.35.04.67	Irban	Perubahan prioritas penugasan dan keterbatasan SDM	Internal	Jadwal pengawasan bergeser	Tim Pengawasan, OPD
					Persiapan	Auditor yang ditugaskan belum memiliki kompetensi sesuai objek pemeriksaan	ROO 26.35.04.68	Inspektur	Keterbatasan auditor bersertifikat atau berpengalaman	Internal	Kualitas hasil pemeriksaan menurun	Inspektorat
					Pelaksanaan	Dokumen dan data dari OPD tidak lengkap atau terlambat diberikan	ROO 26.35.04.69	Ketua Tim	Pengelolaan arsip OPD kurang baik dan koordinasi kurang efektif	Eksternal	Pemeriksaan tidak optimal dan memperpanjang waktu audit	OPD, Tim Audit
					Pelaksanaan	Pelaksanaan pemeriksaan tidak sesuai jadwal akibat kondisi geografis Kepulauan Mentawai	ROO 26.35.04.70	Ketua Tim	Cuaca buruk, gelombang tinggi, keterbatasan transportasi laut	Eksternal	Target PKPT tidak tercapai	Inspektorat, OPD
					Pelaksanaan	Terjadi intervensi terhadap independensi auditor	ROO 26.35.04.71	Ketua Tim/Inspektur	Adanya tekanan dari pihak yang diperiksa atau pihak lain	Eksternal	Objektivitas hasil pengawasan menurun	Inspektorat
					Pelaporan	Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) terlambat	ROO 26.35.04.72	Ketua Tim	Banyaknya temuan yang harus direvisi dan beban kerja auditor tinggi	Internal	Penyampaian rekomendasi terlambat	Kepala Daerah, OPD
					Pelaporan	Rekomendasi hasil pengawasan kurang tepat atau tidak dapat ditindaklanjuti	ROO 26.35.04.73	Pengendali Teknis	Analisis akar masalah kurang mendalam	Internal	Tindak lanjut rekomendasi tidak efektif	OPD
					Monitoring	OPD tidak menindaklanjuti rekomendasi sesuai batas waktu	ROO 26.35.04.74	Irban	Komitmen pimpinan OPD rendah dan keterbatasan sumber daya OPD	Eksternal	Persentase tindak lanjut rekomendasi menurun	OPD, Pemerintah Daerah
					Evaluasi	Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu tidak memberikan perbaikan tata kelola	ROO 26.35.04.75	Inspektur	Monitoring dan evaluasi tidak lanjut belum optimal	Internal	Tujuan pengawasan tidak tercapai	Pemerintah Daerah

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko			Pemilik	Sebab		CIUC	Dampak	
					Tahap	Uraian	Kode Risiko		Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a		b	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
2.1		Penyusunan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan		Meningkatnya kepatuhan dan implementasi perangkat daerah dalam menjalankan birokrasi	Penyusunan	Kebijakan teknis tidak sesuai regulasi terbaru	ROO.26.35.04.76	Sekretaris	Perubahan regulasi pusat	Eksternal	U	Kebijakan harus direvisi	Inspektorat
					Penyusunan	Penyusunan kebijakan terlambat	ROO.26.35.04.77	Sekretaris	Keterbatasan SDM penyusunan	Internal	C	Program pengawasan terlambat	Seluruh OPD
					Finalisasi	Kebijakan tidak diterapkan OPD	ROO.26.35.04.78	Inspektur	Sosialisasi belum optimal	Internal	C	Kepatuhan OPD rendah	OPD
2.1.1		Penyusunan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun	Identifikasi kebutuhan	Kebutuhan kebijakan teknis tidak teridentifikasi secara lengkap	ROO.26.35.04.79	Sekretaris/ Irban	Inventarisasi kebutuhan dan OPD belum optimal	Internal	C	Kebijakan yang disusun tidak sesuai kebutuhan	Inspektorat, OPD
					Pengumpulan data	Data dan informasi sebagai dasar penyusunan kebijakan tidak lengkap	ROO.26.35.04.80	Tim Penyusunan	OPD terlambat menyampaikan data atau data belum valid	Internal/Eksternal	C	Substansi kebijakan menjadi kurang akurat	Inspektorat, OPD
					Penyusunan draft	Draft kebijakan teknis tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru	ROO.26.35.04.81	Tim Penyusunan	Perubahan regulasi pusat tidak segera diakomodasi	Eksternal	U	Kebijakan harus direvisi atau tidak dapat diterapkan	Inspektorat
					Penyusunan draft	Penyusunan kebijakan teknis melebihi jadwal yang telah ditetapkan	ROO.26.35.04.82	Sekretaris	Keterbatasan SDM dan tingginya beban kerja	Internal	C	Program pengawasan menjadi terlambat	Inspektorat
					Harmonisasi	Terjadi perbedaan pendapat antar unit terhadap substansi kebijakan	ROO.26.35.04.83	Inspektur	Koordinasi dan pembahasan belum optimal	Internal	C	Penetapan kebijakan tertunda	Inspektorat
					Penetapan	Kebijakan teknis terlambat ditetapkan oleh pejabat berwenang	ROO.26.35.04.84	Inspektur	Proses reviu dan persetujuan memerlukan waktu lebih lama	Internal	C	Peaksanaan fasilitas pengawasan tertunda	Inspektorat, OPD
					Sosialisasi	Kebijakan teknis belum dipahami oleh perangkat daerah	ROO.26.35.04.85	Irban	Sosialisasi dan bimbingan teknis belum optimal	Internal	C	Implementasi kebijakan tidak seragam	OPD
					Implementasi	OPD tidak menerapkan kebijakan teknis yang telah ditetapkan	ROO.26.35.04.86	Irban	Komitmen OPD rendah dan kurangnya monitoring	Eksternal	C	Kepatuhan terhadap pengawasan menurun	OPD
					Monitoring	Tidak dilakukan evaluasi terhadap efektivitas kebijakan teknis	ROO.26.35.04.87	Sekretaris	Belum tersedia mekanisme monitoring dan evaluasi	Internal	C	Kebijakan tidak diperbaiki meskipun sudah tidak efektif	Inspektorat
					Evaluasi	Kebijakan teknis tidak mampu meningkatkan kualitas fasilitas pengawasan	ROO.26.35.04.88	Inspektur	Substansi kebijakan kurang sesuai dengan kebutuhan organisasi	Internal	C	Target indikator kinerja tidak tercapai	Pemerintah Daerah
2.2		Pendampingan dan Asistensi		Teraksananya Pendampingan dan Asistensi/ Meningkatnya Kinerja OPD yang telah dilakukan Pendampingan	Perencanaan	OPD tidak mengajukan permohonan pendampingan	ROO.26.35.04.89	Irban	Kurangnya pemahaman manfaat pendampingan	Eksternal	C	Target pendampingan tidak tercapai	OPD

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko			Pemilik	Sebab		CIUC	Dampak	
					Tahap	Uraian	Kode Risiko		Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
		b	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
					Pelaksanaan	Jadwal pendampingan sering berubah	ROO.26.35.04.90	Ketua Tim	Agenda OPD berubah	Eksternal	U	Efektivitas pendampingan menurun	OPD
					Pelaksanaan	Rekomendasi pendampingan tidak dilaksanakan	ROO.26.35.04.91	Irban	Komitmen pimpinan OPD rendah	Eksternal	C	Perbaikan tata kelola tidak optimal	OPD
					Monitoring	Tidak dilakukan monitoring tindak lanjut	ROO.26.35.04.92	Irban	SDM terbatas	Internal	C	Hasil pendampingan tidak berkelanjutan	OPD
					Evaluasi	Kinerja OPD tidak meningkat setelah pendampingan	ROO.26.35.04.93	Inspektur	Implementasi rekomendasi rendah	Eksternal	C	Target KU tidak tercapai	Pemerintah Daerah
2.2.1			Pendampingan dan Asistensi Unsur Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Unsur Pemerintahan Daerah	Perencanaan	Penetapan OPD sasaran pendampingan belum berdasarkan prioritas risiko	ROO.26.35.04.94	Irban	Data profil risiko belum lengkap	Internal	C	Pendampingan kurang efektif	OPD
					Persiapan	Jadwal pendampingan berubah	ROO.26.35.04.95	Ketua Tim	Benturan jadwal OPD	Eksternal	U	Target kegiatan tidak tercapai	OPD
					Pelaksanaan	Dokumen pendukung tidak lengkap	ROO.26.35.04.96	Ketua Tim	Administrasi OPD belum tertib	Eksternal	C	Pendampingan tidak optimal	OPD
					Pelaksanaan	Cuaca dan transportasi laut menghambat pendampingan	ROO.26.35.04.97	Ketua Tim	Kondisi geografis Kepulauan Mentawai	Eksternal	U	Jadwal pendampingan tertunda	Inspektorat & OPD
					Evaluasi	Rekomendasi hasil pendampingan tidak ditindaklanjuti	ROO.26.35.04.98	Irban	Komitmen OPD rendah	Eksternal	C	Perbaikan tata kelola tidak tercapai	OPD
2.2.2			Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Perencanaan	Dokumen Reformasi Birokrasi OPD belum lengkap	ROO.26.35.04.99	Irban	OPD belum memahami indikator RB	Eksternal	C	Penilaian RB tidak optimal	OPD
					Pelaksanaan	Bukti dukung penilaian RB tidak valid	ROO.26.35.04.100	Ketua Tim	Pengelolaan dokumen kurang baik	Eksternal	C	Nilai RB menurun	OPD
					Pelaksanaan	Perubahan regulasi Reformasi Birokrasi	ROO.26.35.04.101	Sekretaris	Kebijakan nasional berubah	Eksternal	U	Dokumen harus direvisi	Inspektorat
					Evaluasi	Verifikasi RB terlambat	ROO.26.35.04.102	Ketua Tim	SDM terbatas	Internal	C	Jadwal evaluasi mundur	Pemda
					Monitoring	OPD tidak menindaklanjuti rekomendasi RB	ROO.26.35.04.103	Irban	Komitmen pimpinan rendah	Eksternal	C	Target RB daerah tidak tercapai	Pemerintah Daerah
2.2.3			Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Perencanaan	Program pencegahan korupsi belum sesuai area risiko	ROO.26.35.04.104	Inspektur	Pemetaan risiko belum optimal	Internal	C	Program kurang efektif	Pemda
					Pelaksanaan	OPD terlambat menyampaikan data MCP	ROO.26.35.04.105	Irban	Koordinasi kurang baik	Eksternal	C	Nilai MCP menurun	Pemerintah Daerah

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keuangan	Risiko			Sebab			CIUC	Dampak	
					Tahap	Uraian	Kode Risiko	Penilik	Uraian	Sumber		Uraian	Phak yang Terkena
a		b	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
					Pelaksanaan	Monitoring tidak sesuai jadwal	ROO.26.35.04.106	Ketua Tim	Cuaca dan transportasi	Eksternal	U	Target monitoring tidak tercapai	Inspektorat
					Evaluasi	Hasil monitoring tidak ditindaklanjuti	ROO.26.35.04.107	Irbani	Komitmen OPD rendah	Eksternal	C	Risiko korupsi meningkat	OPD
					Pelaporan	Pelaporan MCP terlambat	ROO.26.35.04.108	Ketua Tim	SDM dan beban kerja tinggi	Internal	C	Nilai indikator menurun	Pemerintah Daerah
2.2.4			Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Perencanaan	OPD belum memahami indikator penegakan integritas	ROO.26.35.04.109	Irbani	Sosialisasi belum optimal	Internal	C	Pendampingan tidak efektif	OPD
					Pelaksanaan	Bukti dukung verifikasi integritas tidak lengkap	ROO.26.35.04.110	Ketua Tim	Dokumen belum tertata	Eksternal	C	Verifikasi tertunda	OPD
					Pelaksanaan	Partisipasi responden Survei Penilaian Integritas rendah	ROO.26.35.04.111	Irbani	Kesadaran pegawai masih rendah	Eksternal	U	Nilai SPI menurun	Pemerintah Daerah
					Monitoring	Rencana aksi integritas tidak dilaksanakan	ROO.26.35.04.112	Irbani	Komitmen pimpinan OPD rendah	Eksternal	C	Budaya integritas tidak meningkat	OPD
					Evaluasi	Target peringatan integritas tidak tercapai	ROO.26.35.04.113	Inspektur	Monitoring belum optimal	Internal	C	Nilai integritas daerah rendah	Pemerintah Daerah
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota												
3.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Tertaksananya Administrasi keuangan perangkat daerah	Perencanaan	Perencanaan anggaran belanja pegawai tidak sesuai kebutuhan	ROO.26.37.04.114	Sekretaris	Perhitungan kebutuhan kurang akurat	Internal	C	Pelaksanaan administrasi keuangan terganggu	Inspektorat
					Pelaksanaan	Penatausahaan keuangan tidak sesuai ketentuan	ROO.26.37.04.115	Bendahara Pengeluaran	Kurangnya pemahaman regulasi	Internal	C	Temuan pemeriksaan	Inspektorat
					Pelaksanaan	Keterlambatan proses pencairan anggaran	ROO.26.37.04.116	Bendahara Pengeluaran	Dokumen tidak lengkap	Internal	C	Kegiatan tertambat	Pegawai
					Monitoring	Rakonsiliasi keuangan tidak tepat waktu	ROO.26.37.04.117	PPK-SKPD	Kordinasi kurang optimal	Internal	C	Laporan keuangan kurang akurat	Pemerintah Daerah
					Evaluasi	Laporan keuangan tidak sesuai SAP	ROO.26.37.04.118	Sekretaris	Kesalahan pencatatan	Internal	C	Opini dan akurabilitas keuangan menurun	Inspektorat
3.1.1			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Perencanaan	Data pegawai sebagai dasar pembayaran gaji tidak mutakhir	ROO.26.38.04.119	Kasubag Umum & Kepegawain	Perubahan data pegawai belum diperbarui	Internal	C	Kesalahan pembayaran gaji	ASN
					Verifikasi	Dokumen pembayaran gaji tidak lengkap	ROO.26.38.04.120	Bendahara Pengeluaran	Kelalaian administrasi	Internal	C	Pencairan gaji tertunda	ASN
					Pelaksanaan	Pembayaran gaji dan tunjangan terlambat	ROO.26.37.04.121	Bendahara Pengeluaran	Keterlambatan SP2D/SPM	Internal	C	Kesjahteraan pegawai terganggu	ASN
					Pelaksanaan	Kesalahan perhitungan gaji dan tunjangan	ROO.26.37.04.122	Bendahara Pengeluaran	Human error atau kesalahan aplikasi	Internal	C	Kelambatan/kesalahan pembayaran	ASN
					Evaluasi	Rakonsiliasi pembayaran gaji tidak dilakukan secara berkala	ROO.26.37.04.123	Sekretaris	Pengawasan kurang optimal	Internal	C	Kesalahan pembayaran berulang	Inspektorat

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko			Pemilik	Sebab		CIUC	Dampak	
					Tahap	Urutan	Kode Risiko		Urutan	Sumber		Urutan	Phak yang Terkena
3.1.2		b	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
					Perencanaan	Dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN tidak lengkap	ROO.26.38.04.124	Kasubag Umum & Kepegawain	Pengumpulan dokumen kurang optimal	Internal	C	Administrasi kepegawain terganggu	ASN
					Pelaksanaan	Penyelesaian administrasi tugas ASN terlambat	ROO.26.38.04.125	Kasubag Umum & Kepegawain	Beban kerja tinggi	Internal	C	Pelayanan kepada ASN terlambat	ASN
					Pelaksanaan	Kesalahan penginputan data administrasi	ROO.26.38.04.126	Pengelola Kepegawain	Human error	Internal	C	Data ASN tidak akurat	ASN
					Monitoring	Asap administrasi ASN tidak terfata dengan baik	ROO.26.24.04.127	Arsiparis/Pengelola Kepegawain	Pengelolaan arsip belum optimal	Internal	C	Kesulitan penelusuran dokumen	Inspektoral
3.2	Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah			Teraksananya Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah/ Meningkatkan kapasitas dan kompetensi APiP yang memiliki standar	Evaluasi	Administrasi pelaksanaan tugas belum sesuai ketentuan BKN	ROO.26.38.04.128	Sekretaris Kepegawain	Kurangnya pembaruan terhadap regulasi	Internal	C	Temuan pemeriksaan dan pelayanan kurang optimal	Inspektoral
					Perencanaan	Perencanaan kebutuhan pegawai dan pengembangan kompetensi tidak sesuai kebutuhan organisasi	ROO.26.38.04.129	Sekretaris Inspektoral	Analisis kebutuhan pegawai dan kompetensi belum optimal	Internal	C	Kompetensi APiP tidak berkembang sesuai kebutuhan	Pegawai, Inspektoral
					Pengelolaan Administrasi	Data administrasi kepegawain tidak lengkap atau tidak mutakhir	ROO.26.38.04.130	Kasubag Umum dan Kepegawain	Pembaruan data kepegawain tidak dilakukan secara berkala	Internal	C	Kesalahan dalam pengisian kenalkin pangkat, cuti, atau mutasi	Pegawai
					Pelaksanaan	Pendidikan dan pelatihan pegawai tidak teraksana sesuai rencana	ROO.26.38.04.131	Sekretaris Inspektoral	Keterbatasan anggaran dan tingginya beban penugasan pengawain	Internal	C	Target peningkatan kompetensi APiP tidak tercapai	Pegawai, Inspektoral
					Monitoring	Penilaian kinerja pegawai tidak dilakukan secara objektif dan tepat waktu	ROO.26.38.04.132	Atasan Langsung	Monitoring kinerja belum optimal dan keterambatan penginputan SKP	Internal	C	Pengembangan karier dan pemberian penghargaan tidak tepat	Pegawai
3.2.1				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Evaluasi	Jumlah APiP yang memenuhi standar kompetensi belum mencapai target	ROO.26.38.04.133	Inspektur	Keterbatasan kesempatan mengikuti sertifikasi/diklat dan formasi SDM	Internal	C	Kapabilitas APiP dan kualitas pengawain belum meningkat	Inspektoral, Pemerintah Daerah
					Perencanaan	Kebutuhan diklat belum sesuai analisis kebutuhan kompetensi APiP	ROO.26.38.04.134	Sekretaris	Analisis kebutuhan kompetensi belum optimal	Internal	C	Kompetensi pegawai tidak meningkat sesuai kebutuhan	Pegawai
					Penganggaran	Anggaran pendidikan dan pelatihan tidak mencukupi	ROO.26.37.04.135	Sekretaris	Keterbatasan APBD	Internal	C	Jumlah peserta diklat berkurang	Pegawai
					Pelaksanaan	Pegawai batal mengikuti diklat karena benturan tugas pengawain	ROO.26.38.04.136	Inspektur	Banyak penugasan audit dan pendampingan	Internal	C	Target peningkatan kompetensi tidak tercapai	Pegawai
					Pelaksanaan	Jadwal diklat berubah atau dibatalkan oleh penyelenggara	ROO.26.38.04.137	Sekretaris	Perubahan jadwal dari penyelenggara	Eksternal	U	Target output kegiatan tertunda	Inspektoral
					Evaluasi	Hasil diklat belum diterapkan dalam pelaksanaan tugas	ROO.26.38.04.138	Atasan Langsung	Monitoring pascadiklat belum optimal	Internal	C	Peningkatan kualitas pengawain belum optimal	Inspektoral

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Tahap	Risiko			Pemilik	Sebab ^{*)}		CIUC	Dampak ^{**)}	
						Uraian	Kode Risiko	Risiko		Uraian	Sumber		Uraian	Phak yang Terkena
a		b	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	
3.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dan Teraksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah			Perencanaan	Perencanaan kebutuhan administrasi umum tidak sesuai kebutuhan riil	ROO.26.33.04.139	Sekretaris	Perencanaan kurang akurat	Internal	C	Kegiatan administrasi terganggu	Inspektoral	
					Penganggaran	Anggaran administrasi umum tidak mencukupi	ROO.26.33.04.140	Sekretaris	Keterbatasan APBD	Internal	C	Sebagian kegiatan tidak terlaksana	Inspektoral	
					Pelaksanaan	Pengadaan barang/jasa administrasi terlambat	ROO.26.33.04.141	PPTK	Proses pengadaan memerlukan waktu lebih lama	Internal	C	Pelayanan administrasi terhambat	Pegawai	
					Monitoring	Penggunaan barang administrasi tidak tertib	ROO.26.33.04.142	Kasubag Umum	Pengawasan kurang optimal	Internal	C	Pemborosan barang persediaan	Inspektoral	
					Evaluasi	Pelayanan administrasi belum memenuhi standar pelayanan	ROO.26.33.04.143	Sekretaris	Monitoring dan evaluasi belum optimal	Internal	C	Kepuasan pengguna layanan menurun	Pegawai dan Masyarakat	
3.3.1		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Perencanaan	Kebutuhan instalasi listrik tidak sesuai kondisi riil	ROO.26.99.04.144	Kasubag Umum	Inventarisasi kurang akurat	Internal	C	Kekurangan material	Pegawai		
					Pengadaan	Pengadaan komponen listrik terlambat	ROO.26.99.04.145	PPTK	Proses pengadaan terlambat	Internal	C	Pekerjaan tertunda	Inspektoral	
					Pelaksanaan	Komponen listrik tidak sesuai spesifikasi	ROO.26.99.04.146	PPTK	Pengawasan penyedia kurang optimal	Internal	C	Instalasi cepat rusak	Pegawai	
					Operasional	Terjadi pemadaman listrik	ROO.26.99.04.147	Kasubag Umum	Gangguan jaringan PLN	Eksternal	U	Aktivitas kantor terganggu	Pegawai	
3.3.2		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peneliharaan	Instalasi listrik tidak dipelihara secara berkala	ROO.26.99.04.148	Kasubag Umum	Jadwal pemeliharaan tidak berjalan	Internal	C	Risiko kerusakan dan kebakaran	Seluruh pegawai		
				Perencanaan	Kebutuhan peralatan rumah tangga tidak teridentifikasi dengan baik	ROO.26.99.04.149	Kasubag Umum	Inventaris tidak mutakhir	Internal	C	Kekurangan sarana kerja	Pegawai		
				Pengadaan	Pengadaan peralatan terlambat	ROO.26.99.04.150	PPTK	Proses pengadaan lambat	Internal	C	Pelayanan terganggu	Pegawai		
				Pemanfaatan	Peralatan cepat rusak	ROO.26.99.04.151	Pengurus Barang	Penggunaan tidak sesuai SOP	Internal	C	Biaya pemeliharaan meningkat	Inspektoral		
3.3.3		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyimpanan	Kehilangan peralatan	ROO.26.99.04.152	Pengurus Barang	Pengamanan kurang memadai	Internal	C	Kerugian daerah	Inspektoral		
				Evaluasi	Inventaris tidak sesuai kondisi fisik	ROO.26.99.04.153	Pengurus Barang	Stock opname tidak rutin	Internal	C	Data BMN/BMD tidak akurat	Inspektoral		
				Pengadaan	Distribusi logistik terlambat	ROO.26.99.04.154	PPTK	Penyedia terlambat	Eksternal	U	Pelayanan terganggu	Pegawai		
				Penyimpanan	Logistik rusak	ROO.26.99.04.155	Pengurus Barang	Penyimpanan kurang baik	Internal	C	Kerugian daerah	Inspektoral		
				Pemanfaatan	Penggunaan logistik tidak terkendali	ROO.26.99.04.156	Kasubag Umum	Pengawasan kurang	Internal	C	Pemborosan anggaran	Inspektoral		
					Evaluasi	Persediaan tidak sesuai pencatatan	ROO.26.99.04.157	Pengurus Barang	Administrasi kurang tertib	Internal	C	Laporan persediaan tidak akurat	Inspektoral	

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko			Sebab ¹⁾		CIUG	Dampak ²⁾	
					Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian		Sumber	Uraian
3.3.4		b	b	c	d	e	f	g	h	i	k	i
					Perencanaan	Kebutuhan cetak tidak tepat	ROO.26.99.04.158	Kasubbag Umum	Estimasi kebutuhan kurang akurat	Internal	Kekurangan dokumen	Pegawai
					Pengadaan	Penyedia terlambat mencetak	ROO.26.99.04.159	PPTK	Kendala penyedia	Eksternal	Dokumen terlambat tersedia	Pegawai
					Pelaksanaan	Hasil cetak tidak sesuai spesifikasi	ROO.26.99.04.160	PPTK	Pengawasan kurang	Internal	Dokumen harus dicetak ulang	Inspektoral
					Penggunaan	Pemborosan penggunaan kertas	ROO.26.99.04.161	Kasubbag Umum	Pengendalian kurang	Internal	Anggaran meningkat	Inspektoral
3.3.5					Evaluasi	Dokumen tidak terdokumentasi dengan baik	ROO.26.99.04.162	Asiparis	Pengelolaan arsip belum optimal	Internal	Kesulitan penelusuran dokumen	Pegawai
					Perencanaan	Peraturan terbaru tidak teridentifikasi	ROO.26.33.04.163	Sekretaris	Monitoring regulasi kurang	Internal	Kebijakan tidak sesuai aturan	Inspektoral
					Pengadain	Keterlambatan memperoleh regulasi terbaru	ROO.26.33.04.164	Kasubbag Umum	Distribusi terlambat	Eksternal	Pegawai menggunakan aturan lama	Pegawai
					Pelaksanaan	Pegawai tidak memahami perubahan regulasi	ROO.26.33.04.165	Sekretaris	Sosialisasi belum optimal	Internal	Kesalahan pelaksanaan tugas	Pegawai
					Pemanfaatan	Bahan bacaan tidak dimanfaatkan	ROO.26.33.04.166	Seluruh Bidang	Minat baca rendah	Internal	Kompetensi pegawai tidak meningkat	Pegawai
3.3.6					Evaluasi	Koleksi regulasi tidak diperbarui	ROO.26.33.04.167	Asiparis	Evaluasi berkala tidak dilakukan	Internal	Referensi hukum tidak lengkap	Inspektoral
					Perencanaan	Jadwal rapat tidak sesuai agenda peserta	ROO.26.33.04.168	Sekretaris	Koordinasi kurang	Internal	Kehadiran rendah	Pegawai
					Persiapan	Dokumen rapat belum lengkap	ROO.26.33.04.169	Kasubbag Umum	Persiapan kurang matang	Internal	Rapat tidak efektif	Peserta rapat
					Pelaksanaan	Peserta tidak hadir sesuai undangan	ROO.26.33.04.170	Sekretaris	Berturan jadwal	Eksternal	Keputusan terlunda	Inspektoral
					Tindak Lanjut	Hasil rapat tidak ditindaklanjuti	ROO.26.33.04.171	Penanggung Jawab	Monitoring kurang	Internal	Program tidak berjalan	Seluruh bidang
3.4					Evaluasi	Notulen dan dokumentasi rapat tidak lengkap	ROO.26.33.04.172	Notulis	Administrasi kurang tertib	Internal	Kesulitan monitoring hasil rapat	Inspektoral
					Perencanaan	Perencanaan kebutuhan barang tidak sesuai kebutuhan riil	ROO.26.99.04.173	Sekretaris	Inventarisasi kebutuhan kurang akurat	Internal	Pengadaan tidak efektif	Inspektoral
					Penganggaran	Anggaran pengadaan tidak mencukupi	ROO.26.99.04.174	Sekretaris	Keterbatasan APBD	Internal	Sebagian kebutuhan tidak terpenuhi	Inspektoral
					Pengadaan	Proses pengadaan terlambat	ROO.26.99.04.175	PPTK	Kendala proses pengadaan	Internal	Target kegiatan tidak tercapai	Pegawai

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko			Pemilik	Sebab		CIUC	Dampak	
					Tahap	Uraian	Kode Risiko		Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
3.4.1			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Penerimaan	Barang yang diterima tidak sesuai spesifikasi	ROO.26.99.04.176	PPTK	Pengawasan penyedia kurang optimal	Internal	C	Barang tidak dapat dimanfaatkan secara optimal	Inspektoral
					Evaluasi	Pengadaan tidak mendukung peningkatan pelayanan	ROO.26.99.04.177	Sekretaris	Perencanaan kurang tepat	Internal	C	Efektivitas pelayanan menurun	Pegawai
					Perencanaan	Spesifikasi peralatan tidak sesuai kebutuhan	ROO.26.99.04.178	PPTK	Identifikasi kebutuhan kurang tepat	Internal	C	Barang tidak optimal digunakan	Pegawai
3.4.1					Pengadaan	Penyedia terlambat menyerahkan barang	ROO.26.99.04.179	PPTK	Kendala distribusi	Eksternal	U	Operasional kantor terganggu	Inspektoral
					Pemeriksaan	Barang tidak sesuai spesifikasi kontrak	ROO.26.99.04.180	PPTK	Pengawasan penerimaan kurang optimal	Internal	C	Barang harus diganti	Inspektoral
					Operasional	Peralatan mengalami kerusakan sebelum masa manfaat	ROO.26.99.04.181	Pengurus Barang	Penggunaan tidak sesuai SOP	Internal	C	Biaya pemeliharaan meningkat	Pegawai
3.5			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventarisasi	Barang belum dicatat dalam KIB/BMD	ROO.26.99.04.182	Pengurus Barang	Administrasi terlambat	Internal	C	Data aset tidak akurat	Inspektoral
					Perencanaan	Kebutuhan jasa tidak teridentifikasi secara tepat	ROO.26.99.04.183	Sekretaris	Perencanaan kurang akurat	Internal	C	Pelayanan terganggu	Pegawai
					Penganggaran	Anggaran jasa tidak mencakupi	ROO.26.99.04.184	Sekretaris	Efisiensi anggaran	Internal	C	Layanan terbatas	Inspektoral
3.5.1			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Pelaksanaan	Penyedia jasa tidak memenuhi standar pelayanan	ROO.26.99.04.185	PPTK	Pengawasan kurang optimal	Eksternal	U	Pelayanan menurun	Pegawai
					Monitoring	Kontrak jasa tidak diawasi secara optimal	ROO.26.99.04.186	PPTK	Monitoring kurang	Internal	C	Kualitas layanan menurun	Inspektoral
					Evaluasi	Kinerja penyedia jasa tidak dievaluasi	ROO.26.99.04.187	Sekretaris	Evaluasi belum rutin	Internal	C	Perbaikan layanan tidak dilakukan	Pegawai
3.5.1					Perencanaan	Kebutuhan anggaran utilitas tidak sesuai kebutuhan	ROO.26.99.04.188	Estimasi penggunaan kurang akurat	Internal	C	Kekurangan anggaran	Inspektoral	
					Pelaksanaan	Gangguan jaringan internet dan telepon	ROO.26.99.04.189	Gangguan penyedia layanan	Eksternal	U	Pelayanan administrasi terganggu	Pegawai	
					Pelaksanaan	Pemadaman listrik	ROO.26.99.04.190	Gangguan PLN	Eksternal	U	Aktivitas kantor terganggu	Pegawai	
					Pelaksanaan	Gangguan pasokan air bersih	ROO.26.99.04.191	Kerusakan jaringan air	Eksternal	U	Kenyamanan kerja menurun	Pegawai	
					Evaluasi	Tagihan utilitas tidak terbayarkan tepat waktu	ROO.26.99.04.192	Administrasi pembayaran terlambat	Internal	C	Denda atau penghentian layanan	Inspektoral	

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko			Pemilik	Sebab ¹⁾		CIUC	Dampak ²⁾	
					Tahap	Uraian	Kode Risiko		Uraian	Sumber		Uraian	Phak yang Terkena
3.5.2			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
					Perencanaan	Kebutuhan tenaga pelayanan umum tidak sesuai	ROO.26.99.04.193	Sekretaris	Analisis kebutuhan kurang optimal	Internal	C	Pelayanan kurang maksimal	Pegawai
					Pelaksanaan	Tenaga pelayanan tidak hadir	ROO.26.99.04.194	Kasubbag Umum	Disiplin kerja rendah	Internal	C	Kebersihan dan pelayanan terganggu	Pegawai
					Pelaksanaan	Pelayanan kebersihan tidak sesuai standar	ROO.26.99.04.195	Kasubbag Umum	Pengawasan kurang optimal	Internal	C	Lingkungan kerja tidak nyaman	Pegawai
					Monitoring	Kinerja penyedia jasa tidak dimonitor	ROO.26.99.04.196	PPTK	Monitoring belum rutin	Internal	C	Mula pelayanan menurun	Inspektoral
3.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Evaluasi	Kepuasan pengguna layanan rendah	ROO.26.99.04.197	Sekretaris	Evaluasi layanan belum optimal	Internal	C	Produktivitas pegawai menurun	Pegawai
					Perencanaan	Jadwal pemeliharaan tidak disusun dengan baik	ROO.26.99.04.198	Pengurus Barang	Inventarisasi kondisi barang belum optimal	Internal	C	Barang cepat rusak	Inspektoral
					Pelaksanaan	Pemeliharaan terlambat dilakukan	ROO.26.99.04.199	PPTK	Keterbatasan anggaran	Internal	C	Umur aset berkurang	Inspektoral
					Pelaksanaan	Penyedia jasa pemeliharaan tidak memenuhi standar	ROO.26.99.04.200	PPTK	Pengawasan kontrak kurang	Eksternal	U	Kualitas pemeliharaan rendah	Inspektoral
					Monitoring	Kerusakan barang tidak segera dilaporkan	ROO.26.99.04.201	Pengguna Barang	Pengawasan kurang	Internal	C	Kerusakan semakin parah	Pegawai
3.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaran Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan				Evaluasi	Nilai aset menurun akibat pemeliharaan tidak optimal	ROO.26.99.04.202	Sekretaris	Evaluasi kondisi aset tidak rutin	Internal	C	Kerugian daerah dan terganggunya pelayanan	Inspektoral
					Perencanaan	Jadwal pemeliharaan kendaran dinas tidak disusun sesuai kebutuhan	ROO.26.99.04.203	Kasubbag Umum	Inventarisasi kondisi kendaran belum optimal	Internal	C	Kendaran cepat mengalami kerusakan	Inspektoral
					Pelaksanaan	Pemeliharaan kendaran dinas terlambat dilaksanakan	ROO.26.99.04.204	PPTK	Keterbatasan anggaran dan penyedia jasa	Internal	C	Kendaran tidak siap digunakan	Pegawai
					Pelaksanaan	Pembayaran pajak kendaran melewat jatuh tempo	ROO.26.99.04.205	Bendahara Pengeluaran	Monitoring masa berlaku pajak belum optimal	Internal	C	Denda administrasi dan kendaran tidak dapat digunakan	Inspektoral
					Pelaksanaan	Kendaran mengalami kerusakan berat akibat penggunaan yang tidak sesuai SOP	ROO.26.99.04.206	Pengguna Kendaran	Kurangnya kepatuhan terhadap prosedur penggunaan	Internal	C	Biaya pemeliharaan meningkat	Pegawai
					Evaluasi	Riwayat pemeliharaan kendaran tidak terdokumentasi dengan baik	ROO.26.99.04.207	Pengurus Barang	Administrasi pemeliharaan belum tertib	Internal	C	Pemeliharaan pemeliharaan berikutnya tidak akurat	Inspektoral

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Tahap	Risiko		Pemilik	Sebab		CIUC	Dampak	
						Uraian	Kode Risiko		Uraian	Sumber		Uraian	Phak yang Terkena
a		b	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
					Pemanfaatan/ Evaluasi	Gedung yang telah dipelihara tidak dipelihara secara berkala sehingga cepat mengalami kerusakan kembali	ROO.26.99.04.222	Kasubag Umum	Tidak adanya jadwal pemeliharaan rutin	Internal	C	Biaya pemeliharaan meningkat dan pelayanan kantor terganggu	Pegawai dan Masyarakat



Hasil Analisis Risiko

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nama Perangkat Daerah : Inspektorat Tahun Penilaian : 2026 Tujuan Strategis : Meningkatkan kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan Urusan Pemerintahan : Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan		"Risiko" yang Teridentifikasi							
No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Resiko	Kode Risiko	Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan*)	Skala Risiko
a	b			c					
I. Risiko Strategis Inspektorat									
	Sasaran : 1. Meningkatkan Integritas Penyelenggaraan pemerintahan			1. Indeks persepsi anti korupsi	Nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi tidak mencapai target	RSO 26.35.04.01	4	3	12
	Sasaran : 1. Meningkatkan Integritas Penyelenggaraan pemerintahan				Masih terjadi praktik penyimpangan pada OPD	RSO 26.35.04.02	5	3	15
	Sasaran : 1. Meningkatkan Integritas Penyelenggaraan pemerintahan			2. Manajemen Risiko Indeks (MRI)	Implementasi manajemen risiko pada OPD belum optimal	RSO 26.35.04.03	4	4	16
	Sasaran : 1. Meningkatkan Integritas Penyelenggaraan pemerintahan				Dokumen register risiko OPD belum lengkap	RSO 26.35.04.04	3	4	12
	Sasaran : 1. Meningkatkan Integritas Penyelenggaraan pemerintahan				Dokumen register risiko OPD belum lengkap	RSO 26.35.04.04	3	3	9
	Sasaran : 1. Meningkatkan Integritas Penyelenggaraan pemerintahan				Agen risiko pada OPD tidak aktif	RSO 26.35.04.05	5	4	20
	Sasaran : 1. Meningkatkan Integritas Penyelenggaraan pemerintahan			3. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Rekomendasi hasil pengawasan tidak diindaklanjuti	RSO 26.35.04.06	5	3	15
	Sasaran : 1. Meningkatkan Integritas Penyelenggaraan pemerintahan				Area rawan korupsi belum dimiligi	RSO 26.35.04.07	4	3	12

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi					Kode Risiko	Analisis Risiko		
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Risiko		Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan*)	Skala Risiko
a			b			c	d	e	f=dxe
	Sasaran: 2. Meningkatkan Kinerja Inspektorat			1. Nilai LAKIP	Nilai LAKIP Inspektorat tidak mencapai target	RSO 26.35.04.08	4	2	8
	Sasaran: 2. Meningkatkan Kinerja Inspektorat				Dokumen perencanaan dan pelaporan tidak berkualitas	RSO 26.36.04.09	4	3	12
	Sasaran: 2. Meningkatkan Kinerja Inspektorat			2. Jumlah Inovasi yang diterapkan	Inovasi pengawasan tidak berkembang	RSO 26.36.04.10	3	3	9
	Sasaran: 2. Meningkatkan Kinerja Inspektorat				Digitalisasi pengawasan belum optimal	RSO 26.35.04.11	3	3	9
	Sasaran: 2. Meningkatkan Kinerja Inspektorat				Pemanfaatan aplikasi pengawasan rendah	RSO 26.35.04.12	4	4	16
	Sasaran: 2. Meningkatkan Kinerja Inspektorat			3. Capaian kinerja perangkat daerah	PKPT tidak terlaksana sesuai target	RSO 26.36.04.13	4	4	16
	Sasaran: 2. Meningkatkan Kinerja Inspektorat				Jadwal audit tertunda	RSO 26.36.04.14	5	4	20
	Sasaran: 2. Meningkatkan Kinerja Inspektorat				Cuaca ekstrem menghambat pelaksanaan audit	RSO 26.35.04.15	5	4	20
	Sasaran: 2. Meningkatkan Kinerja Inspektorat				Akses transportasi antar pulau menghambat pengawasan	RSO 26.35.04.16	5	4	20
	Sasaran: 2. Meningkatkan Kinerja Inspektorat				Gangguan internet menghambat pengawasan berbasis elektronik	RSO 26.35.04.17	5	4	20
	Sasaran: 2. Meningkatkan Kinerja Inspektorat				Anggaran pengawasan tidak mencukupi	RSO 26.35.04.18	4	3	12
	Sasaran: 2. Meningkatkan Kinerja Inspektorat				Jumlah auditor bersertifikat belum memenuhi kebutuhan	RSO 26.38.04.19	5	3	15
II. Risiko Operasional Inspektorat									
	Program Penyelenggaraan Pengawasan								
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	PKPT belum sepenuhnya berbasis risiko	ROO 26.36.04.01	4	4	16
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Dokumen objek pemeriksaan belum lengkap	ROO 26.35.04.02	3	4	12
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Pemeriksaan tidak selesai sesuai jadwal	ROO 26.35.04.03	4	4	16

"Risiko" yang Teridentifikasi							Analisis Risiko		
No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Resiko	Kode Risiko	Skala Dampak ^{a)}	Skala Kemungkinan ^{b)}	Skala Risiko
a	b						d	e	f=dxe
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	LHP terlambat diterbitkan	ROO.26.35.04.04	4	3	12
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Rekomendasi hasil pemeriksaan tidak ditindaklanjuti	ROO.26.35.04.05	5	4	20
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen kinerja OPD tidak lengkap	ROO.26.35.04.06	3	4	12
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Data kinerja tidak valid	ROO.26.35.04.07	4	3	12
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Auditor tidak memahami proses bisnis OPD	ROO.26.35.04.08	4	3	12
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Rekomendasi kurang implementatif	ROO.26.35.04.09	4	3	12
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Tindak lanjut rendah	ROO.26.35.04.10	5	4	20
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen keuangan belum lengkap	ROO.26.37.04.11	4	4	16
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Bukti transaksi tidak memadai	ROO.26.37.04.12	4	3	12
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kesalahan pengujian transaksi	ROO.26.37.04.13	4	3	12
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	LHP terlambat diterbitkan	ROO.26.35.04.14	4	3	12
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Rekomendasi keuangan tidak ditindaklanjuti	ROO.26.35.04.15	5	4	20
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Jadwal reviu laporan kinerja tidak sesuai dengan jadwal penyusunan LKjIP OPD	ROO.26.35.04.16	4	3	12
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Dokumen LKjIP dan data dukung belum lengkap	ROO.26.35.04.17	3	3	9
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Data kinerja yang disampaikan tidak akurat atau tidak valid	ROO.26.35.04.18	4	3	12

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi					Kode Risiko	Analisis Risiko		
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Resiko		Skala Dampak ^{a)}	Skala Kemungkinan ^{b)}	Skala Risiko
a	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Auditor/reviu tidak memahami proses bisnis atau indikator kinerja OPD	ROO.26.35.04.19	3	3	f-dxe 9
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Pengujian atas capaian kinerja tidak dilakukan secara memadai	ROO.26.35.04.20	5	4	20
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Terjadi perubahan regulasi mengenai penyusunan LKjip	ROO.26.35.04.21	4	4	16
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan Hasil Reviu terlambat disampaikan	ROO.26.35.04.22	4	3	12
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Rekomendasi hasil reviu kurang jelas atau sulit dilindaklanjuti	ROO.26.35.04.23	3	3	9
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	OPD tidak menindaklanjuti rekomendasi hasil reviu	ROO.26.35.04.24	5	4	20
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Monitoring tindak lanjut belum dilaksanakan secara berkala	ROO.26.35.04.25	4	4	16
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Jadwal reviu laporan keuangan tidak selaras dengan jadwal penyusunan LKPD	ROO.26.35.04.26	4	3	12
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Dokumen LKPD dan kertas kerja pendukung belum lengkap	ROO.26.35.04.27	5	4	20
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Data pendukung laporan keuangan tidak akurat atau tidak konsisten	ROO.26.35.04.28	5	4	20
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Pengujian prosedur reviu tidak dilaksanakan secara memadai	ROO.26.35.04.29	4	3	12
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Auditor belum memahami perubahan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) atau regulasi terbaru	ROO.26.35.04.30	4	3	12
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Rekonsiliasi data antara OPD dan BPKAD belum selesai	ROO.26.35.04.31	5	4	20
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Gangguan aplikasi SIPD, SIMDA, atau aplikasi pendukung lainnya menghambat reviu	ROO.26.35.04.32	4	3	12
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan Hasil Reviu terlambat disampaikan kepada Kepala Daerah	ROO.26.35.04.33	4	3	12

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi					Kode Risiko	Analisis Risiko		
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Resiko		Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan*)	Skala Risiko
a	b					c	d	e	f=dxe
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Rekomendasi hasil reviu tidak jelas atau tidak operasional	ROO 26.35.04.34	3	3	9
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	OPD tidak segera menindaklanjuti rekomendasi hasil reviu	ROO 26.35.04.35	5	4	20
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Perubahan regulasi pengelolaan keuangan daerah menjelang penyampaian LKPD	ROO 26.35.04.36	4	3	12
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Keterlambatan penyelesaian koreksi hasil reviu oleh OPD	ROO 26.35.04.37	4	4	16
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Desa	Jumlah hasil Pengawasan Desa	Desa prioritas belum dipetakan berdasarkan risiko	ROO 26.35.04.38	4	4	16
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Desa	Jumlah hasil Pengawasan Desa	Cuaca buruk menghambat pemeriksaan	ROO 26.35.04.39	5	4	20
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Desa	Jumlah hasil Pengawasan Desa	Transportasi laut terbatas	ROO 26.35.04.40	5	5	25
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Desa	Jumlah hasil Pengawasan Desa	Dokumen APBDes tidak lengkap	ROO 26.35.04.41	4	4	16
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Desa	Jumlah hasil Pengawasan Desa	Tindak lanjut hasil pemeriksaan rendah	ROO 26.35.04.42	4	4	16
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah kesepakatan Pengawasan Internal yang terbentuk	Ruang lingkup kerja sama tidak jelas	ROO 26.35.04.43	3	3	9
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah kesepakatan Pengawasan Internal yang terbentuk	Koordinasi antar APIP kurang efektif	ROO 26.35.04.44	4	3	12
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah kesepakatan Pengawasan Internal yang terbentuk	Kerja sama tidak berlanjut	ROO 26.35.04.45	3	3	9
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Monitoring dan Evlauasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Perencanaan monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan belum berbasis prioritas risiko	ROO 26.35.04.46	4	3	12
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Monitoring dan Evlauasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Data dan dokumen hasil pemeriksaan BPK RI/APIP belum lengkap	ROO 26.35.04.47	4	4	16

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi					Kode Risiko	Analisis Risiko		
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Resiko		Skala Dampak ^{a)}	Skala Kemungkinan ^{a)}	Skala Risiko
a	b					c	d	e	f=dxe
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Monitoring dan Evluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lnajut Hasil Pemeriksaan APIP	OPD terlambat menyampaikan laporan/bukti tindak lanjut hasil pemeriksaan	ROO 26.35.04.48	4	4	16
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Monitoring dan Evluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lnajut Hasil Pemeriksaan APIP	Bukti tindak lanjut yang disampaikan OPD tidak sesuai dengan rekomendasi pemeriksaan	ROO 26.35.04.49	5	3	15
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Monitoring dan Evluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lnajut Hasil Pemeriksaan APIP	Masih terdapat rekomendasi hasil pemeriksaan yang belum ditindaklanjuti	ROO 26.35.04.50	5	4	20
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Monitoring dan Evluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lnajut Hasil Pemeriksaan APIP	Terdapat temuan pemeriksaan yang berulang pada OPD yang sama	ROO 26.35.04.51	5	4	20
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Monitoring dan Evluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lnajut Hasil Pemeriksaan APIP	Status penyelesaian tindak lanjut tidak menggambarkan kondisi sebenarnya	ROO 26.35.04.52	5	3	15
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Monitoring dan Evluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lnajut Hasil Pemeriksaan APIP	Data tindak lanjut antara OPD, Inspektorat, dan BPK RI tidak sinkron	ROO 26.35.04.53	4	4	16
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Monitoring dan Evluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lnajut Hasil Pemeriksaan APIP	Analisis penyebab belum selesainya rekomendasi belum dilakukan secara mendalam	ROO 26.35.04.54	4	3	12
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Monitoring dan Evluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lnajut Hasil Pemeriksaan APIP	Laporan monitoring dan evaluasi tindak lanjut terlambat disampaikan	ROO 26.35.04.55	3	4	12
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Monitoring dan Evluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lnajut Hasil Pemeriksaan APIP	Laporan tindak lanjut belum memberikan informasi yang memadai untuk pengambilan keputusan	ROO 26.35.04.56	4	3	12

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi					Kode Risiko	Analisis Risiko		
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Resiko		Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan*)	Skala Risiko
							d	e	f=dxe
a			b			c			
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	OPD belum melaksanakan rekomendasi sesuai batas waktu yang ditetapkan	ROO.26.35.04.57	5	4	20
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Penyelesaian rekomendasi yang berkaitan dengan pihak ketiga mengalami hambatan	ROO.26.35.04.58	4	4	16
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Pergantian pejabat pengelola keuangan/kegiatan menghambat penyelesaian rekomendasi	ROO.26.35.04.59	4	4	16
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kondisi geografis Kepulauan Mentawai menghambat verifikasi tindak lanjut lapangan	ROO.26.35.04.60	4	5	20
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Terlaksananya penyelenggaraan Pengawasan dengan tujuan tertentu	Penentuan objek pemeriksaan tidak berbasis risiko	ROO.26.35.04.61	5	3	15
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Terlaksananya penyelenggaraan Pengawasan dengan tujuan tertentu	Tim pengawasan tidak memiliki kompetensi sesuai objek pemeriksaan	ROO.26.35.04.62	5	3	15
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Terlaksananya penyelenggaraan Pengawasan dengan tujuan tertentu	Pemeriksaan tidak selesai sesuai jadwal	ROO.26.35.04.63	4	4	16
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Terlaksananya penyelenggaraan Pengawasan dengan tujuan tertentu	Dokumen pendukung tidak diberikan lengkap	ROO.26.35.04.64	4	4	16
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Terlaksananya penyelenggaraan Pengawasan dengan tujuan tertentu	LHP terlambat diterbitkan	ROO.26.35.04.65	4	3	12
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Pengawasan dengan tujuan tertentu	Jumlah Laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	Penetapan objek Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) tidak berdasarkan tingkat risiko	ROO.26.35.04.66	4	3	12
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Pengawasan dengan tujuan tertentu	Jumlah Laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	Surat Tugas dan Program Kerja Pengawasan terlambat diterbitkan	ROO.26.35.04.67	3	4	12
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Pengawasan dengan tujuan tertentu	Jumlah Laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	Auditor yang ditugaskan belum memiliki kompetensi sesuai objek pemeriksaan	ROO.26.35.04.68	4	4	16

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi					Kode Risiko	Analisis Risiko		
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Resiko		Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b					c	d	e	f=dxe
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Pengawasan dengan tujuan tertentu	Jumlah Laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	Dokumen dan data dari OPD tidak lengkap atau terlambat diberikan	ROO 26.35.04.69	4	4	16
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Pengawasan dengan tujuan tertentu	Jumlah Laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	Pelaksanaan pemeriksaan tidak sesuai jadwal akibat kondisi geografis Kepulauan Mentawai	ROO 26.35.04.70	4	4	16
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Pengawasan dengan tujuan tertentu	Jumlah Laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	Terjadi intervensi terhadap independensi auditor	ROO 26.35.04.71	4	4	16
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Pengawasan dengan tujuan tertentu	Jumlah Laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) terlambat	ROO 26.35.04.72	4	3	12
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Pengawasan dengan tujuan tertentu	Jumlah Laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	Rekomendasi hasil pengawasan kurang tepat atau tidak dapat ditindaklanjuti	ROO 26.35.04.73	4	3	12
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Pengawasan dengan tujuan tertentu	Jumlah Laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	OPD tidak menindaklanjuti rekomendasi sesuai batas waktu	ROO 26.35.04.74	4	4	16
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Pengawasan dengan tujuan tertentu	Jumlah Laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu tidak memberikan perbaikan tata kelola	ROO 26.35.04.75	4	3	12
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		Meningkatnya kepatuhan dan implementasi perangkat daerah dalam menjalankan birokrasi	Kebijakan teknis tidak sesuai regulasi terbaru	ROO 26.35.04.76	4	3	12
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		Meningkatnya kepatuhan dan implementasi perangkat daerah dalam menjalankan birokrasi	Penyusunan kebijakan terlambat	ROO 26.35.04.77	4	4	16
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		Meningkatnya kepatuhan dan implementasi perangkat daerah dalam menjalankan birokrasi	Kebijakan tidak diterapkan OPD	ROO 26.35.04.78	4	4	16
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Kebutuhan kebijakan teknis tidak teridentifikasi secara lengkap	ROO 26.35.04.79	4	4	16
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Data dan informasi sebagai dasar penyusunan kebijakan tidak lengkap	ROO 26.35.04.80	3	4	12
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Draft kebijakan teknis tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru	ROO 26.35.04.81	4	3	12

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi					Kode Risiko	Analisis Risiko		
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Resiko		Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan*)	Skala Risiko
a			b			c	d	e	f=dxe
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Penyusunan kebijakan teknis melebihi jadwal yang telah ditetapkan	ROO 26.35.04.82	4	4	16
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Terjadi perbedaan pendapat antar unit terhadap substansi kebijakan	ROO 26.35.04.83	3	4	12
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Kebijakan teknis terlambat ditetapkan oleh pejabat berwenang	ROO 26.35.04.84	4	4	16
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Kebijakan teknis belum dipahami oleh perangkat daerah	ROO 26.35.04.85	4	3	12
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	OPD tidak menerapkan kebijakan teknis yang telah ditetapkan	ROO 26.35.04.86	4	3	12
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Tidak dilakukan evaluasi terhadap efektivitas kebijakan teknis	ROO 26.35.04.87	3	3	9
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Kebijakan teknis tidak mampu meningkatkan kualitas fasilitasi pengawasan	ROO 26.35.04.88	4	4	16
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Pendampingan dan Asistensi		Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi/ Meningkatnya Kinerja OPD yang telah dilakukan Pendampingan	OPD tidak mengajukan permohonan pendampingan	ROO 26.35.04.89	4	3	12
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Pendampingan dan Asistensi		Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi/ Meningkatnya Kinerja OPD yang telah dilakukan Pendampingan	Jadwal pendampingan sering berubah	ROO 26.35.04.90	4	3	12
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Pendampingan dan Asistensi		Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi/ Meningkatnya Kinerja OPD yang telah dilakukan Pendampingan	Rekomendasi pendampingan tidak dilaksanakan	ROO 26.35.04.91	4	3	12
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Pendampingan dan Asistensi		Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi/ Meningkatnya Kinerja OPD yang telah dilakukan Pendampingan	Tidak dilakukan monitoring tindak lanjut	ROO 26.35.04.92	4	4	16
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Pendampingan dan Asistensi		Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi/ Meningkatnya Kinerja OPD yang telah dilakukan Pendampingan	Kinerja OPD tidak meningkat setelah pendampingan	ROO 26.35.04.93	3	3	9

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi					Analisis Risiko			
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Resiko	Kode Risiko	Skala Dampak ¹⁾	Skala Kemungkinan ²⁾	Skala Risiko
	b					c	d	e	f=dxe
a	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Penetapan OPD sasaran pendampingan belum berdasarkan prioritas risiko	ROO.26.35.04.94	4	3	12
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jadwal pendampingan berubah	ROO.26.35.04.95	4	3	12
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen pendukung tidak lengkap	ROO.26.35.04.96	3	3	9
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Cuaca dan transportasi laut menghambat pendampingan	ROO.26.35.04.97	4	5	20
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Rekomendasi hasil pendampingan tidak ditindaklanjuti	ROO.26.35.04.98	4	5	20
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Dokumen Reformasi Birokrasi OPD belum lengkap	ROO.26.35.04.99	4	4	16
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Bukti dukung penilaian RB tidak valid	ROO.26.35.04.100	4	3	12
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Perubahan regulasi Reformasi Birokrasi	ROO.26.35.04.101	3	4	12
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Verifikasi RB terlambat	ROO.26.35.04.102	3	3	9
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	OPD tidak menindaklanjuti rekomendasi RB	ROO.26.35.04.103	4	4	16
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Pendampingan dan Asistensi	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Program pencegahan korupsi belum sesuai area risiko	ROO.26.35.04.104	4	4	16
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Pendampingan dan Asistensi	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	OPD terlambat menyampaikan data MCP	ROO.26.35.04.105	3	3	9

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi					Kode Risiko	Analisis Risiko		
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Risiko		Skala Dampak ^{a)}	Skala Kemungkinan ^{b)}	Skala Risiko
	a		b				d	e	f-dxe
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Pendampingan dan Asistensi	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Monitoring tidak sesuai jadwal	ROO.26.35.04.106	4	3	12
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Pendampingan dan Asistensi	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Hasil monitoring tidak ditindaklanjuti	ROO.26.35.04.107	3	4	12
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Pendampingan dan Asistensi	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Pelaporan MCP terlambat	ROO.26.35.04.108	3	3	9
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	OPD belum memahami indikator penegakan integritas	ROO.26.35.04.109	4	4	16
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Bukti dukung verifikasi integritas tidak lengkap	ROO.26.35.04.110	4	3	12
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Partisipasi responden Survei Penilaian Integritas rendah	ROO.26.35.04.111	3	4	12
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Rencana aksi integritas tidak dilaksanakan	ROO.26.35.04.112	4	3	12
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Target peningkatan integritas tidak tercapai	ROO.26.35.04.113	4	3	12
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota								0
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Keunangan Perangkat Daerah		Teriaksananya Administrasi keuangan perangkat daerah	Perencanaan anggaran belanja pegawai tidak sesuai kebutuhan	ROO.26.37.04.114	4	4	16
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Keunangan Perangkat Daerah		Teriaksananya Administrasi keuangan perangkat daerah	Penatausahaan keuangan tidak sesuai ketentuan	ROO.26.37.04.115	4	4	16
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Keunangan Perangkat Daerah		Teriaksananya Administrasi keuangan perangkat daerah	Keterlambatan proses pencairan anggaran	ROO.26.37.04.116	4	4	16

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi					Kode Risiko	Analisis Risiko		
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Resiko		Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b					c	d	e	f=dxe
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terlaksananya Administrasi keuangan perangkat daerah	Rekonsiliasi keuangan tidak tepat waktu	ROO.26.37.04.117	3	4	12
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terlaksananya Administrasi keuangan perangkat daerah	Laporan keuangan tidak sesuai SAP	ROO.26.37.04.118	4	4	16
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Data pegawai sebagai dasar pembayaran gaji tidak mutakhir	ROO.26.38.04.119	4	3	12
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dokumen pembayaran gaji tidak lengkap	ROO.26.38.04.120	4	3	12
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan terlambat	ROO.26.37.04.121	4	3	12
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kesalahan perhitungan gaji dan tunjangan	ROO.26.37.04.122	4	3	12
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Rekonsiliasi pembayaran gaji tidak dilakukan secara berkala	ROO.26.37.04.123	4	3	12
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN tidak lengkap	ROO.26.38.04.124	4	3	12
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyelesaian administrasi tugas ASN terlambat	ROO.26.38.04.125	4	3	12
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kesalahan penginputan data administrasi	ROO.26.38.04.126	4	4	16
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Arsip administrasi ASN tidak tertata dengan baik	ROO.26.24.04.127	4	4	16
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Administrasi pelaksanaan tugas belum sesuai ketentuan BKN	ROO.26.38.04.128	4	4	16

"Risiko" yang Teridentifikasi							Analisis Risiko		
No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Resiko	Kode Risiko	Skala Dampak ^{a)}	Skala Kemungkinan ^{b)}	Skala Risiko
a	b						c	d	e f=dxe
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah/ Meningkatnya kapasitas dan kompetensi APIP yang memiliki standar	Perencanaan kebutuhan pegawai dan pengembangan kompetensi tidak sesuai kebutuhan organisasi	ROO.26.38.04.129	4	3	12
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah/ Meningkatnya kapasitas dan kompetensi APIP yang memiliki standar	Data administrasi kepegawaian tidak lengkap atau tidak mutakhir	ROO.26.38.04.130	4	3	12
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah/ Meningkatnya kapasitas dan kompetensi APIP yang memiliki standar	Pendidikan dan pelatihan pegawai tidak terlaksana sesuai rencana	ROO.26.38.04.131	4	3	12
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah/ Meningkatnya kapasitas dan kompetensi APIP yang memiliki standar	Penilaian kinerja pegawai tidak dilakukan secara objektif dan tepat waktu	ROO.26.38.04.132	4	4	16
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah/ Meningkatnya kapasitas dan kompetensi APIP yang memiliki standar	Jumlah APIP yang memenuhi standar kompetensi belum mencapai target	ROO.26.38.04.133	4	4	16
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kebutuhan diklat belum sesuai analisis kebutuhan kompetensi APIP	ROO.26.38.04.134	4	4	16
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Anggaran pendidikan dan pelatihan tidak mencukupi	ROO.26.37.04.135	5	5	25
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pegawai batal mengikuti diklat karena benturan tugas pengawasan	ROO.26.38.04.136	4	3	12
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jadwal diklat berubah atau dibatalkan oleh penyelenggara	ROO.26.38.04.137	3	3	9
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Hasil diklat belum diterapkan dalam pelaksanaan tugas	ROO.26.38.04.138	4	4	16

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi					Kode Risiko	Analisis Risiko		
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Resiko		Skala Dampak ^{*)}	Skala Kemungkinan ^{*)}	Skala Risiko
a	b					c	d	e	f=dxe
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dan Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Perencanaan kebutuhan administrasi umum tidak sesuai kebutuhan riil	ROO.26.33.04.139	4	3	12
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dan Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Anggaran administrasi umum tidak mencukupi	ROO.26.33.04.140	4	3	12
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dan Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pengadaan barang/jasa administrasi terlambat	ROO.26.33.04.141	4	3	12
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dan Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penggunaan barang administrasi tidak tertib	ROO.26.33.04.142	4	3	12
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dan Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelayanan administrasi belum memenuhi standar pelayanan	ROO.26.33.04.143	4	3	12
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kebutuhan instalasi listrik tidak sesuai kondisi riil	ROO.26.99.04.144	4	3	12
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Pengadaan komponen listrik terlambat	ROO.26.99.04.145	4	3	12
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Komponen listrik tidak sesuai spesifikasi	ROO.26.99.04.146	3	3	9
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terjadi pemadaman listrik	ROO.26.99.04.147	3	3	9
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Instalasi listrik tidak dipelihara secara berkala	ROO.26.99.04.148	3	3	9
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kebutuhan peralatan rumah tangga tidak teridentifikasi dengan baik	ROO.26.99.04.149	4	4	16
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Pengadaan peralatan terlambat	ROO.26.99.04.150	3	3	9

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi					Kode Risiko	Analisis Risiko		
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Resiko		Skala Dampak ^{a)}	Skala Kemungkinan ^{b)}	Skala Risiko
a			b			c	d	e	f=dxe
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Peralatan cepat rusak	ROO.26.99.04.151	4	4	16
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kehilangan peralatan	ROO.26.99.04.152	4	4	16
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Inventaris tidak sesuai kondisi fisik	ROO.26.99.04.153	4	3	12
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Distribusi logistik terlambat	ROO.26.99.04.154	4	3	12
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Logistik rusak	ROO.26.99.04.155	3	3	9
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penggunaan logistik tidak terkendali	ROO.26.99.04.156	4	4	16
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persediaan tidak sesuai pencatatan	ROO.26.99.04.157	4	4	16
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kebutuhan cetak tidak tepat	ROO.26.99.04.158	4	4	16
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyedia terlambat mencetak	ROO.26.99.04.159	4	3	12
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Hasil cetak tidak sesuai spesifikasi	ROO.26.99.04.160	4	3	12
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Pemborosan penggunaan kertas	ROO.26.99.04.161	4	4	16
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Dokumen tidak terdokumentasi dengan baik	ROO.26.99.04.162	4	5	20

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi					Kode Risiko	Analisis Risiko		
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Resiko		Skala Dampak ^(*)	Skala Kemungkinan ^(*)	Skala Risiko
	a	b	c	d	e		f	g	h
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Peraturan terbaru tidak teridentifikasi	ROO.26.33.04.163	4	4	16
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Keterlambatan memperoleh regulasi terbaru	ROO.26.33.04.164	4	3	12
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Pegawai tidak memahami perubahan regulasi	ROO.26.33.04.165	4	3	12
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Bahan bacaan tidak dimanfaatkan	ROO.26.33.04.166	4	5	20
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Koleksi regulasi tidak diperbarui	ROO.26.33.04.167	4	5	20
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jadwal rapat tidak sesuai agenda peserta	ROO.26.33.04.168	4	4	16
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dokumen rapat belum lengkap	ROO.26.33.04.169	4	3	12
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Peserta tidak hadir sesuai undangan	ROO.26.33.04.170	4	3	12
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Hasil rapat tidak ditindaklanjuti	ROO.26.33.04.171	4	3	12
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Notulen dan dokumentasi rapat tidak lengkap	ROO.26.33.04.172	4	3	12
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pengadaan BMD urusan Perangkat Daerah		Perencanaan kebutuhan barang tidak sesuai kebutuhan ril	ROO.26.99.04.173	4	4	16

"Risiko" yang Teridentifikasi							Analisis Risiko		
No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Resiko	Kode Risiko	Skala Dampak ^{*)}	Skala Kemungkinan ^{*)}	Skala Risiko
a	b						d	e	f=dxe
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan / Daerah Kabupaten / Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya Pengadaan BMD urusan Perangkat Daerah	Anggaran pengadaan tidak mencukupi	ROO.26.99.04.174	4	4	16
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan / Daerah Kabupaten / Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya Pengadaan BMD urusan Perangkat Daerah	Proses pengadaan terlambat	ROO.26.99.04.175	4	3	12
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan / Daerah Kabupaten / Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya Pengadaan BMD urusan Perangkat Daerah	Barang yang diterima tidak sesuai spesifikasi	ROO.26.99.04.176	4	4	16
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan / Daerah Kabupaten / Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya Pengadaan BMD urusan Perangkat Daerah	Pengadaan tidak mendukung peningkatan pelayanan	ROO.26.99.04.177	4	4	16
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan / Daerah Kabupaten / Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Spesifikasi peralatan tidak sesuai kebutuhan	ROO.26.99.04.178	4	4	16
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan / Daerah Kabupaten / Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Penyedia terlambat menyerahkan barang	ROO.26.99.04.179	4	3	12
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan / Daerah Kabupaten / Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Barang tidak sesuai spesifikasi kontrak	ROO.26.99.04.180	4	3	12
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan / Daerah Kabupaten / Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Peralatan mengalami kerusakan sebelum masa manfaat	ROO.26.99.04.181	4	4	16
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan / Daerah Kabupaten / Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Barang belum dicatat dalam KIB/BMD	ROO.26.99.04.182	4	3	12

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi					Kode Risiko	Analisis Risiko		
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Resiko		Skala Dampak ^{a)}	Skala Kemungkinan ^{b)}	Skala Risiko
a			b			c	d	e	f=dxe
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan / Daerah Kabupaten / Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kebutuhan jasa tidak teridentifikasi secara tepat	ROO.26.99.04.183	4	3	12
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan / Daerah Kabupaten / Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Anggaran jasa tidak mencukupi	ROO.26.99.04.184	4	3	12
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan / Daerah Kabupaten / Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyedia jasa tidak memenuhi standar pelayanan	ROO.26.99.04.185	3	3	9
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan / Daerah Kabupaten / Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kontrak jasa tidak diawasi secara optimal	ROO.26.99.04.186	4	3	12
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan / Daerah Kabupaten / Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kinerja penyedia jasa tidak dievaluasi	ROO.26.99.04.187	4	3	12
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan / Daerah Kabupaten / Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kebutuhan anggaran utilitas tidak sesuai kebutuhan	ROO.26.99.04.188	4	3	12
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan / Daerah Kabupaten / Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Gangguan jaringan internet dan telepon	ROO.26.99.04.189	4	3	12
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan / Daerah Kabupaten / Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Pemadaman listrik	ROO.26.99.04.190	4	4	16
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan / Daerah Kabupaten / Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Gangguan pasokan air bersih	ROO.26.99.04.191	4	4	16
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan / Daerah Kabupaten / Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tagihan utilitas tidak terbayarkan tepat waktu	ROO.26.99.04.192	4	3	12
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan / Daerah Kabupaten / Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Kebutuhan tenaga pelayanan umum tidak sesuai	ROO.26.99.04.193	4	4	16
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan / Daerah Kabupaten / Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Tenaga pelayanan tidak hadir	ROO.26.99.04.194	4	4	16

"Risiko" yang Teridentifikasi							Analisis Risiko		
No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Resiko	Kode Risiko	Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan)	Skala Risiko
a			b			c	d	e	f=dxe
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Pelayanan kebersihan tidak sesuai standar	ROO.26.99.04.195	4	4	16
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Kinerja penyedia jasa tidak dimonitor	ROO.26.99.04.196	4	3	12
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Kepuasan pengguna layanan rendah	ROO.26.99.04.197	4	5	20
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jadwal pemeliharaan tidak disusun dengan baik	ROO.26.99.04.198	4	4	16
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan terlambat dilakukan	ROO.26.99.04.199	4	4	16
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyedia jasa pemeliharaan tidak memenuhi standar	ROO.26.99.04.200	4	3	12
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kerusakan barang tidak segera dilaporkan	ROO.26.99.04.201	4	3	12
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai aset menurun akibat pemeliharaan tidak optimal	ROO.26.99.04.202	4	4	16
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jadwal pemeliharaan kendaraan dinas tidak disusun sesuai kebutuhan	ROO.26.99.04.203	4	3	12
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan kendaraan dinas terlambat dilaksanakan	ROO.26.99.04.204	4	4	16

"Risiko" yang Teridentifikasi							Analisis Risiko		
No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Risiko	Kode Risiko	Skala Dampak ^{*)}	Skala Kemungkinan ^{*)}	Skala Risiko
a	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Pembayaran pajak kendaraan melewati jatuh tempo	ROO.26.99.04.205	d	e	f-dxe 12
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kendaraan mengalami kerusakan berat akibat penggunaan yang tidak sesuai SOP	ROO.26.99.04.206	4	3	12
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Riwayat pemeliharaan kendaraan tidak terdokumentasi dengan baik	ROO.26.99.04.207	4	4	16
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kebutuhan pemeliharaan kendaraan operasional tidak sesuai kondisi kendaraan	ROO.26.99.04.208	4	4	16
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kendaraan operasional rusak saat digunakan untuk tugas pengawasan	ROO.26.99.04.209	4	3	12
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Pajak atau izin kendaraan terlambat diperpanjang	ROO.26.99.04.210	4	4	16
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Ketersediaan suku cadang terbatas	ROO.26.99.04.211	4	3	12
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Frekuensi kerusakan kendaraan meningkat	ROO.26.99.04.212	4	4	16
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jadwal pemeliharaan peralatan tidak disusun secara berkala	ROO.26.99.04.213	4	4	16

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi						Analisis Risiko			
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Resiko	Kode Risiko	Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan*)	Skala Risiko	
	a	b	c	d			e	f=gxe		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan / Daerah Kabupaten / Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Peralatan mengalami kerusakan karena penggunaan yang tidak sesuai SOP	ROO.26.99.04.214	4	4	16	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan / Daerah Kabupaten / Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Perbaikan peralatan terlambat dilakukan	ROO.26.99.04.215	4	4	16	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan / Daerah Kabupaten / Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kerusakan tidak segera dilaporkan	ROO.26.99.04.216	4	4	16	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan / Daerah Kabupaten / Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Umur ekonomis peralatan lebih pendek dari yang direncanakan	ROO.26.99.04.217	4	4	16	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan / Daerah Kabupaten / Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Pemeliharaan Gedung Rehabilitasi Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kondisi kerusakan gedung tidak teridentifikasi secara akurat sehingga kebutuhan rehabilitasi tidak sesuai	ROO.26.99.04.218	4	4	16	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan / Daerah Kabupaten / Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Pemeliharaan Gedung Rehabilitasi Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Anggaran pemeliharaan atau rehabilitasi tidak mencukupi	ROO.26.99.04.219	4	4	16	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan / Daerah Kabupaten / Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Pemeliharaan Gedung Rehabilitasi Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi terlambat dari jadwal	ROO.26.99.04.220	4	4	16	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan / Daerah Kabupaten / Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Pemeliharaan Gedung Rehabilitasi Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Hasil pekerjaan tidak sesuai spesifikasi teknis atau mutu yang dipersyaratkan	ROO.26.99.04.221	4	3	12	

"Risiko" yang Teridentifikasi							Analisis Risiko		
No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Risiko	Kode Risiko	Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	Program Penunjang Urusan Pemerintahan / Daerah Kabupaten / Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Gedung yang telah dipelihara tidak dipelihara secara berkala sehingga cepat mengalami kerusakan kembali	ROO.26.99.04.222	d 4	e 4	f=dxe 16

Tuapejat, 28 Januari 2026

Inspektur

[Signature]

Seriell Bawamenawi,SH
NIP. 19830805 200802 1 001



Daftar Risiko Prioritas

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai									
Nama Perangkat Daerah : Inspektorat									
Tahun Penilaian : 2026									
Tujuan Strategis : Meningkatkan kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan									
Urusan Pemerintahan : Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan									
No	Program	Risiko Prioritas		Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak		
		a	b						
I. Risiko Strategis Inspektorat									
	Sasaran : 1. Meningkatkan Integritas Penyelenggaraan pemerintahan	Agen risiko pada OPD tidak aktif		20	Irban	Komitmen Pimpinan OPD rendah	Implementasi SPIP tidak optimal		
	Sasaran : 1. Meningkatkan Integritas Penyelenggaraan pemerintahan	Implementasi manajemen risiko pada OPD belum optimal		16	Inspektur	Pemahaman manajemen risiko rendah	Nilai MRI rendah		
	Sasaran : 1. Meningkatkan Integritas Penyelenggaraan pemerintahan	Masih terjadi praktik penyimpangan pada OPD		15	Inspektur	Pengendalian intern lemah	Target Kinerja tidak tercapai		
	Sasaran : 1. Meningkatkan Integritas Penyelenggaraan pemerintahan	Rekomendasi hasil pengawasan tidak ditindaklanjuti		15	Irban	Komitmen OPD rendah	Temuan berulang		
	Sasaran : 1. Meningkatkan Integritas Penyelenggaraan pemerintahan	Nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi tidak mencapai target		12	Inspektur	Pembinaan integritas OPD belum optimal	Target Kinerja tidak tercapai		
	Sasaran : 1. Meningkatkan Integritas Penyelenggaraan pemerintahan	Dokumen register risiko OPD belum lengkap		12	Irban	Pendampingan belum optimal	Pengendalian Risiko Tidak Efektif		
	Sasaran : 1. Meningkatkan Integritas Penyelenggaraan pemerintahan	Area rawan korupsi belum dimitigasi		12	Inspektur	Monitoring belum optimal	Potensi kerugian daerah		
	Sasaran : 1. Meningkatkan Integritas Penyelenggaraan pemerintahan	Dokumen register risiko OPD belum lengkap		9	Irban	Pendampingan belum optimal	Pengendalian Risiko Tidak Efektif		

	Sasaran: 2. Meningkatkan Kinerja Inspektorat	Jadwal audit tertunda	20	Irban	Banyak penugasan khusus	Pengawasan terlambat
	Sasaran: 2. Meningkatkan Kinerja Inspektorat	Cuaca ekstrem menghambat pelaksanaan audit	20	Inspektur	Gelombang tinggi dan cuaca buruk	PKPT tertunda
	Sasaran: 2. Meningkatkan Kinerja Inspektorat	Akses transportasi antar pulau menghambat pengawasan	20	Inspektur	Kondisi geografis Kepulauan Mentawai	Cakupan pengawasan berkurang
	Sasaran: 2. Meningkatkan Kinerja Inspektorat	Gangguan internet menghambat pengawasan berbasis elektronik	20	Sekretaris	Infrastruktur jaringan terbatas	Pelaporan terlambat
	Sasaran: 2. Meningkatkan Kinerja Inspektorat	Pemanfaatan aplikasi pengawasan rendah	16	Sekretaris	Kurangnya pelatihan	Proses pengawasan lambat
	Sasaran: 2. Meningkatkan Kinerja Inspektorat	PKPT tidak terlaksana sesuai target	16	Inspektur	Auditor terbatas	Target pengawasan tidak tercapai
	Sasaran: 2. Meningkatkan Kinerja Inspektorat	Jumlah auditor bersertifikat belum memenuhi kebutuhan	15	Inspektur	Formasi dan pengembangan SDM terbatas	Kualitas hasil audit menurun
	Sasaran: 2. Meningkatkan Kinerja Inspektorat	Dokumen perencanaan dan pelaporan tidak berkualitas	12	Sekretaris	Monitoring belum optimal	Penilaian AKIP menurun
	Sasaran: 2. Meningkatkan Kinerja Inspektorat	Anggaran pengawasan tidak mencukupi	12	Inspektur	Efisiensi APBD	Pemeriksaan berkurang
	Sasaran: 2. Meningkatkan Kinerja Inspektorat	Inovasi pengawasan tidak berkembang	9	Sekretaris	Kompetensi SDM terbatas	Kinerja organisasi stagnan
	Sasaran: 2. Meningkatkan Kinerja Inspektorat	Digitalisasi pengawasan belum optimal	9	Sekretaris	Infrastruktur TI terbatas	Efisiensi kerja menurun
	Sasaran: 2. Meningkatkan Kinerja Inspektorat	Nilai LAKIP Inspektorat tidak mencapai target	8	Sekretaris	Perencanaan kinerja kurang optimal	Nilai SAKIP menurun

II. Resiko Operasional Inspektorat									
	Program Penyelenggaraan Pengawasan								
	Program Penyelenggaraan Pengawasan			20	Irban		Komitmen OPD rendah	Temuan berulang	
	Program Penyelenggaraan Pengawasan			16	Irban		Data profil risiko OPD belum lengkap	Pengawasan kurang tepat sasaran	
	Program Penyelenggaraan Pengawasan			16	Ketua Tim		Jumlah auditor terbatas	Target PKPT tidak tercapai	
	Program Penyelenggaraan Pengawasan			12	Ketua Tim		OPD terlambat menyampaikan dokumen	Jadwal pemeriksaan mundur	
	Program Penyelenggaraan Pengawasan			12	Ketua Tim		Proses revidi berulang	Tindak lanjut terlambat	
	Program Penyelenggaraan Pengawasan			20	Irban		Pengawasan tindak lanjut kurang	Temuan berulang	
	Program Penyelenggaraan Pengawasan			12	Irban		OPD belum tertib administrasi	Pemeriksaan tertunda	
	Program Penyelenggaraan Pengawasan			12	Ketua Tim		Data belum diverifikasi	Kesimpulan audit tidak akurat	
	Program Penyelenggaraan Pengawasan			12	Ketua Tim		Kompetensi auditor belum memadai	Kualitas audit menurun	
	Program Penyelenggaraan Pengawasan			12	Irban		Analisis kurang mendalam	Perbaikan tidak optimal	
	Program Penyelenggaraan Pengawasan			20	Irban		Komitmen rendah	Kerugian daerah berulang	

	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Dokumen keuangan belum lengkap	16	Irbah	OPD terlambat menyampaikan data	Pemeriksaan tertunda
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Bukti transaksi tidak memadai	12	Ketua Tim	Arsip kurang baik	Temuan meningkat
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Kesalahan pengujian transaksi	12	Ketua Tim	Kompetensi auditor	Hasil audit kurang akurat
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	LHP terlambat diterbitkan	12	Ketua Tim	Banyak koreksi	Tindak lanjut terlambat
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Pengujian atas capaian kinerja tidak dilakukan secara memadai	20	Ketua Tim Reviu	Keterbatasan waktu dan data	Kesimpulan reviu tidak akurat
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	OPD tidak menindaklanjuti rekomendasi hasil reviu	20	Inspektur Pembantu	Komitmen OPD rendah	Permasalahan yang sama berulang
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Terjadi perubahan regulasi mengenai penyusunan LKjIP	16	Inspektur Pembantu	Kebijakan pemerintah pusat	Penyesuaian metode reviu
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Monitoring tindak lanjut belum dilaksanakan secara berkala	16	Inspektur Pembantu	Jadwal monitoring belum terstruktur	Efektivitas reviu menurun
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Jadwal reviu laporan kinerja tidak sesuai dengan jadwal penyusunan LKjIP OPD	12	Inspektur Pembantu	Perencanaan reviu belum terkoordinasi dengan OPD	Pelaksanaan reviu terlambat
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Data kinerja yang disampaikan tidak akurat atau tidak valid	12	Ketua Tim Reviu	Pengendalian data kinerja OPD lemah	Hasil reviu menjadi kurang andal
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Laporan Hasil Reviu terlambat disampaikan	12	Ketua Tim Reviu	Proses review internal memerlukan perbaikan berulang	Penyampaian LKjIP kepada Kepala Daerah menjadi terlambat
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Dokumen LKjIP dan data dukung belum lengkap	9	Ketua Tim Reviu	OPD terlambat menyampaikan dokumen	Reviu tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal

	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Auditor/reviu tidak memahami proses bisnis atau indikator kinerja OPD	9	Inspektur Pembantu	Kompetensi SDM belum memadai	Kualitas hasil reviu menurun
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rekomendasi hasil reviu kurang jelas atau sulit ditindaklanjuti	9	Inspektur Pembantu	Analisis reviu kurang mendalam	Perbaikan kinerja OPD tidak optimal
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Dokumen LKPD dan kertas kerja pendukung belum lengkap	20	Ketua Tim Reviu	OPD terlambat menyampaikan dokumen	Proses reviu tertunda
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Data pendukung laporan keuangan tidak akurat atau tidak konsisten	20	Ketua Tim Reviu	Rekonsiliasi belum selesai	Hasil reviu kurang andal
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rekonsiliasi data antara OPD dan BPKAD belum selesai	20	Ketua Tim Reviu	Perbedaan data dan keterlambatan rekonsiliasi	Laporan keuangan belum dapat direviu secara menyeluruh
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	OPD tidak segera menindaklanjuti rekomendasi hasil reviu	20	Inspektur Pembantu	Komitmen dan koordinasi OPD masih rendah	Kesalahan penyajian laporan keuangan tetap terjadi
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Keterlambatan penyelesaian koreksi hasil reviu oleh OPD	16	Inspektur Pembantu	Keterbatasan SDM pengelola keuangan OPD	Kualitas LKPD menurun dan berpotensi memengaruhi opini
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Jadwal reviu laporan keuangan tidak selaras dengan jadwal penyusunan LKPD	12	Inspektur Pembantu	Koordinasi dengan perangkat daerah belum optimal	Reviu terlambat dilaksanakan
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Pengujian prosedur reviu tidak dilaksanakan secara memadai	12	Ketua Tim Reviu	Keterbatasan waktu dan sumber daya	Kesimpulan reviu kurang tepat
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Auditor belum memahami perubahan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) atau regulasi terbaru	12	Inspektur Pembantu	Kompetensi dan pembaruan pengetahuan belum memadai	Temuan material tidak teridentifikasi
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Gangguan aplikasi SIPD, SIMDA, atau aplikasi pendukung lainnya menghambat reviu	12	Ketua Tim Reviu	Gangguan sistem/aplikasi	Reviu tertunda
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Laporan Hasil Reviu terlambat disampaikan kepada Kepala Daerah	12	Ketua Tim Reviu	Proses reviu internal dan penyempurnaan laporan memerlukan waktu lebih lama	Penyampaian LKPD kepada BPK berpotensi terlambat

Program Penyelenggaraan Pengawasan	Perubahan regulasi pengelolaan keuangan daerah menjelang penyampaian LKPD	12	Inspektur	Terbitnya kebijakan baru dari Pemerintah Pusat	Diperlukan penyesuaian reviu dan penyajian laporan keuangan
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rekomendasi hasil reviu tidak jelas atau tidak operasional	9	Inspektur Pembantu	Analisis dan perumusan rekomendasi kurang mendalam	Perbaikan laporan keuangan tidak optimal
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Transportasi laut terbatas	25	Irban	Kondisi geografis Kepulauan Mentawai	Cakupan pengawasan berkurang
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Cuaca buruk menghambat pemeriksaan	20	Irban	Gelombang tinggi	Pemeriksaan tertunda
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Desa prioritas belum dipetakan berdasarkan risiko	16	Irban	Data risiko desa belum tersedia	Pengawasan kurang efektif
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Dokumen APBDes tidak lengkap	16	Ketua Tim	Administrasi desa belum tertib	Pemeriksaan tidak optimal
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Tindak lanjut hasil pemeriksaan rendah	16	Irban	Kapasitas aparatur desa terbatas	Temuan berulang
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Koordinasi antar APIP kurang efektif	12	Sekretaris	Komunikasi kurang intensif	Kegiatan tidak optimal
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Ruang lingkup kerja sama tidak jelas	9	Sekretaris	Perencanaan kurang matang	Kerja sama tidak efektif
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Kerja sama tidak berlanjut	9	Sekretaris	Tidak ada evaluasi berkala	Tujuan kerja sama tidak tercapai
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Masih terdapat rekomendasi hasil pemeriksaan yang belum ditindaklanjuti	20	Inspektur Pembantu	Kurangnya monitoring dan koordinasi secara berkala dengan OPD	Jumlah rekomendasi outstanding meningkat
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Terdapat temuan pemeriksaan yang berulang pada OPD yang sama	20	Inspektur Pembantu	Penyelesaian rekomendasi belum menyentuh akar permasalahan	Risiko penyimpangan kembali terjadi

Program Penyelenggaraan Pengawasan	OPD belum melaksanakan rekomendasi sesuai batas waktu yang ditetapkan	20	Kepala OPD	Kurangnya perhatian pimpinan OPD terhadap penyelesaian temuan	Akumulasi rekomendasi belum selesai
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Kondisi geografis Kepulauan Mentawai menghambat verifikasi tindak lanjut lapangan	20	Inspektur Pembantu	Jarak antar pulau dan kondisi cuaca	Monitoring lapangan tertunda
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Data dan dokumen hasil pemeriksaan BPK RI/APIP belum lengkap	16	Inspektur Pembantu	Pengumpulan data tindak lanjut dari OPD belum optimal	Monitoring tindak lanjut tidak berjalan efektif
Program Penyelenggaraan Pengawasan	OPD terlambat menyampaikan laporan/bukti tindak lanjut hasil pemeriksaan	16	Inspektur Pembantu	Rendahnya komitmen OPD terhadap penyelesaian rekomendasi	Persentase penyelesaian TLHP rendah
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Data tindak lanjut antara OPD, Inspektorat, dan BPK RI tidak sinkron	16	Ketua Tim Monitoring	Belum optimalnya rekonsiliasi data secara berkala	Perbedaan data penyelesaian TLHP
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelesaian rekomendasi yang berkaitan dengan pihak ketiga mengalami hambatan	16	Kepala OPD	Kendala administratif dan hukum dalam penyelesaian	Rekomendasi tidak segera selesai
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Pergantian pejabat pengelola keuangan/kegiatan menghambat penyelesaian rekomendasi	16	Kepala OPD	Mutasi pejabat tanpa proses serah terima yang baik	Penyelesaian TLHP terlambat
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Bukti tindak lanjut yang disampaikan OPD tidak sesuai dengan rekomendasi pemeriksaan	15	Ketua Tim Monitoring	OPD belum memahami substansi rekomendasi dan dokumen pendukung yang diperlukan	Rekomendasi belum dapat dinyatakan selesai
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Status penyelesaian tindak lanjut tidak menggambarkan kondisi sebenarnya	15	Ketua Tim Monitoring	Verifikasi bukti tindak lanjut belum dilakukan secara memadai	Laporan monitoring tidak akurat
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Perencanaan monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan belum berbasis prioritas risiko	12	Inspektur Pembantu	Belum dilakukan pemetaan terhadap rekomendasi yang memiliki tingkat urgensi tinggi	Rekomendasi penting terlambat diselesaikan
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Analisis penyebab belum selesainya rekomendasinya belum dilakukan secara mendalam	12	Inspektur Pembantu	Monitoring masih berfokus pada jumlah penyelesaian, belum pada akar masalah	Efektivitas pengawasan menurun
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Laporan monitoring dan evaluasi tindak lanjut terlambat disampaikan	12	Inspektur Pembantu	Rekapitulasi dan verifikasi data membutuhkan waktu lama	Pimpinan terlambat mengambil tindakan

Program Penyelenggaraan Pengawasan	Laporan tindak lanjut belum memberikan informasi yang memadai untuk pengambilan keputusan	12	Inspektur Pembantu	Analisis dan penyajian informasi belum optimal	Keputusan perbaikan kurang tepat
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Pemeriksaan tidak selesai sesuai jadwal	16	Ketua Tim	Cuaca ekstrem dan kondisi transportasi antarpulau	Target PKPT tidak tercapai
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Dokumen pendukung tidak diberikan lengkap	16	Ketua Tim	Komitmen OPD rendah	Temuan tidak memadai
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penentuan objek pemeriksaan tidak berbasis risiko	15	Irbn	Data risiko OPD belum lengkap	Sasaran pengawasan tidak tepat
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Tim pengawasan tidak memiliki kompetensi sesuai objek pemeriksaan	15	Irbn	Keterbatasan SDM auditor bersertifikat	Kualitas pemeriksaan menurun
Program Penyelenggaraan Pengawasan	LHP terlambat diterbitkan	12	Pengendali Teknis	Reviu berulang dan keterbatasan SDM	Rekomendasi terlambat ditindaklanjuti
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Auditor yang ditugaskan belum memiliki kompetensi sesuai objek pemeriksaan	16	Inspektur	Keterbatasan auditor bersertifikat atau berpengalaman	Kualitas hasil pemeriksaan menurun
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Dokumen dan data dari OPD tidak lengkap atau terlambat diberikan	16	Ketua Tim	Pengelolaan arsip OPD kurang baik dan koordinasi kurang efektif	Pemeriksaan tidak optimal dan memperpanjang waktu audit
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Pelaksanaan pemeriksaan tidak sesuai jadwal akibat kondisi geografis Kepulauan Mentawai	16	Ketua Tim	Cuaca buruk, gelombang tinggi, keterbatasan transportasi laut	Target PKPT tidak tercapai
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Terjadi intervensi terhadap independensi auditor	16	Ketua Tim/Inspektur	Adanya tekanan dari pihak yang diperiksa atau pihak lain	Objektivitas hasil pengawasan menurun
Program Penyelenggaraan Pengawasan	OPD tidak menindaklanjuti rekomendasi sesuai batas waktu	16	Irbn	Komitmen pimpinan OPD rendah dan keterbatasan sumber daya OPD	Persentase tindak lanjut rekomendasi menurun
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penetapan objek Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) tidak berdasarkan tingkat risiko	12	Inspektur/Irbn	Data profil risiko OPD belum lengkap dan analisis risiko belum optimal	Pengawasan tidak tepat sasaran dan efektivitas pengawasan menurun

	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Surat Tugas dan Program Kerja Pengawasan terlambat diterbitkan	12	Irban	Perubahan prioritas penugasan dan keterbatasan SDM	Jadwal pengawasan bergeser
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) terlambat	12	Ketua Tim	Banyaknya temuan yang harus direvisi dan beban kerja auditor tinggi	Penyampaian rekomendasi terlambat
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rekomendasi hasil pengawasan kurang tepat atau tidak dapat ditindaklanjuti	12	Pengendali Teknis	Analisis akar masalah kurang mendalam	Tindak lanjut rekomendasi tidak efektif
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu tidak memberikan perbaikan tata kelola	12	Inspektur	Monitoring dan evaluasi tindak lanjut belum optimal	Tujuan pengawasan tidak tercapai
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyusunan kebijakan terlambat	16	Sekretaris	Keterbatasan SDM penyusun	Program pengawasan terlambat
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Kebijakan tidak diterapkan OPD	16	Inspektur	Sosialisasi belum optimal	Kepatuhan OPD rendah
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Kebutuhan kebijakan teknis tidak teridentifikasi secara lengkap	16	Sekretaris/ Irban	Inventarisasi kebutuhan dari OPD belum optimal	Kebijakan yang disusun tidak sesuai kebutuhan
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Kebijakan teknis tidak sesuai regulasi terbaru	12	Sekretaris	Perubahan regulasi pusat	Kebijakan harus direvisi
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyusunan kebijakan teknis melebihi jadwal yang telah ditetapkan	16	Sekretaris	Keterbatasan SDM dan tingginya beban kerja	Program pengawasan menjadi terlambat
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Kebijakan teknis terlambat ditetapkan oleh pejabat berwenang	16	Inspektur	Proses revidi dan persetujuan memerlukan waktu lebih lama	Pelaksanaan fasilitasi pengawasan tertunda
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Kebijakan teknis tidak mampu meningkatkan kualitas fasilitasi pengawasan	16	Inspektur	Substansi kebijakan kurang sesuai dengan kebutuhan organisasi	Target indikator kinerja tidak tercapai
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Data dan informasi sebagai dasar penyusunan kebijakan tidak lengkap	12	Tim Penyusun	OPD terlambat menyampaikan data atau data belum valid	Substansi kebijakan menjadi kurang akurat

	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Draft kebijakan teknis tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru	12	Tim Penyusun	Perubahan regulasi pusat tidak segera diakomodasi	Kebijakan harus direvisi atau tidak dapat diterapkan
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Terjadi perbedaan pendapat antar unit terhadap substansi kebijakan	12	Inspektur	Koordinasi dan pembahasan belum optimal	Penetapan kebijakan tertunda
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Kebijakan teknis belum dipahami oleh perangkat daerah	12	Irban	Sosialisasi dan bimbingan teknis belum optimal	Implementasi kebijakan tidak seragam
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	OPD tidak menerapkan kebijakan teknis yang telah ditetapkan	12	Irban	Komitmen OPD rendah dan kurangnya monitoring	Kepatuhan terhadap pengawasan menurun
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Tidak dilakukan evaluasi terhadap efektivitas kebijakan teknis	9	Sekretaris	Belum tersedia mekanisme monitoring dan evaluasi	Kebijakan tidak diperbaiki meskipun sudah tidak efektif
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Tidak dilakukan monitoring tindak lanjut	16	Irban	SDM terbatas	Hasil pendampingan tidak berkelanjutan
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	OPD tidak mengajukan permohonan pendampingan	12	Irban	Kurangnya pemahaman manfaat pendampingan	Target pendampingan tidak tercapai
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Jadwal pendampingan sering berubah	12	Ketua Tim	Agenda OPD berubah	Efektivitas pendampingan menurun
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rekomendasi pendampingan tidak dilaksanakan	12	Irban	Komitmen pimpinan OPD rendah	Perbaikan tata kelola tidak optimal
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Kinerja OPD tidak meningkat setelah pendampingan	9	Inspektur	Implementasi rekomendasi rendah	Target IKU tidak tercapai
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Cuaca dan transportasi laut menghambat pendampingan	20	Ketua Tim	Kondisi geografis Kepulauan Mentawai	Jadwal pendampingan tertunda
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rekomendasi hasil pendampingan tidak dilanjutkan	20	Irban	Komitmen OPD rendah	Perbaikan tata kelola tidak tercapai

Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penetapan OPD sasaran pendampingan belum berdasarkan prioritas risiko	12	Irban	Data profil risiko belum lengkap	Pendampingan kurang efektif
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Jadwal pendampingan berubah	12	Ketua Tim	Benturan jadwal OPD	Target kegiatan tidak tercapai
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Dokumen pendukung tidak lengkap	9	Ketua Tim	Administrasi OPD belum tertib	Pendampingan tidak optimal
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Dokumen Reformasi Birokrasi OPD belum lengkap	16	Irban	OPD belum memahami indikator RB	Penilaian RB tidak optimal
Program Penyelenggaraan Pengawasan	OPD tidak menindaklanjuti rekomendasi RB	16	Irban	Komitmen pimpinan rendah	Target RB daerah tidak tercapai
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Bukti dukung penilaian RB tidak valid	12	Ketua Tim	Pengelolaan dokumen kurang baik	Nilai RB menurun
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Perubahan regulasi Reformasi Birokrasi	12	Sekretaris	Kebijakan nasional berubah	Dokumen harus direvisi
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Verifikasi RB terlambat	9	Ketua Tim	SDM terbatas	Jadwal evaluasi mundur
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Program pencegahan korupsi belum sesuai area risiko	16	Inspektur	Pemetaan risiko belum optimal	Program kurang efektif
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Monitoring tidak sesuai jadwal	12	Ketua Tim	Cuaca dan transportasi	Target monitoring tidak tercapai
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Hasil monitoring tidak ditindaklanjuti	12	Irban	Komitmen OPD rendah	Risiko korupsi meningkat
Program Penyelenggaraan Pengawasan	OPD terlambat menyampaikan data MCP	9	Irban	Koordinasi kurang baik	Nilai MCP menurun

	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Pelaporan MCP terlambat	9	Ketua Tim	SDM dan beban kerja tinggi	Nilai indikator menurun
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	OPD belum memahami indikator penegakan integritas	16	Irban	Sosialisasi belum optimal	Pendampingan tidak efektif
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Bukti dukung verifikasi integritas tidak lengkap	12	Ketua Tim	Dokumen belum tertata	Verifikasi tertunda
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Partisipasi responden Survei Penilaian Integritas rendah	12	Irban	Kesadaran pegawai masih rendah	Nilai SPI menurun
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rencana aksi integritas tidak dilaksanakan	12	Irban	Komitmen pimpinan OPD rendah	Budaya integritas tidak meningkat
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Target peningkatan integritas tidak tercapai	12	Inspektur	Monitoring belum optimal	Nilai integritas daerah rendah
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota					
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Perencanaan anggaran belanja pegawai tidak sesuai kebutuhan	16	Sekretaris	Perhitungan kebutuhan kurang akurat	Pelaksanaan administrasi keuangan terganggu
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Penatausahaan keuangan tidak sesuai ketentuan	16	Bendahara Pengeluaran	Kurangnya pemahaman regulasi	Temuan pemeriksaan
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Keterlambatan proses pencairan anggaran	16	Bendahara Pengeluaran	Dokumen tidak lengkap	Kegiatan terlambat
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Laporan keuangan tidak sesuai SAP	16	Sekretaris	Kesalahan pencatatan	Opini dan akurabilitas keuangan menurun
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Rekonsiliasi keuangan tidak tepat waktu	12	PPK-SKPD	Koordinasi kurang optimal	Laporan keuangan kurang akurat

	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Data pegawai sebagai dasar pembayaran gaji tidak mutakhir	12	Kasubag Umum & Kepegawaian	Perubahan data pegawai belum diperbarui	Kesalahan pembayaran gaji
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Dokumen pembayaran gaji tidak lengkap	12	Bendahara Pengeluaran	Kelalaian administrasi	Pencairan gaji tertunda
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Pembayaran gaji dan tunjangan terlambat	12	Bendahara Pengeluaran	Keterlambatan SP2D/SPM	Kesalahan pegawai terganggu
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Kesalahan perhitungan gaji dan tunjangan	12	Bendahara Pengeluaran	Human error atau kesalahan aplikasi	Kelebihan/kekurangan pembayaran
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Rekonsiliasi pembayaran gaji tidak dilakukan secara berkala	12	Sekretaris	Pengawasan kurang optimal	Kesalahan pembayaran berulang
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Kesalahan penginputan data administrasi	16	Pengelola Kepegawaian	Human error	Data ASN tidak akurat
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Arsip administrasi ASN tidak tertata dengan baik	16	Arsiparis/Pengelola Kepegawaian	Pengelolaan arsip belum optimal	Kesulitan penelusuran dokumen
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi pelaksanaan tugas belum sesuai ketentuan BKN	16	Sekretaris	Kurangnya pembaruan terhadap regulasi	Temuan pemeriksaan dan pelayanan kurang optimal
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN tidak lengkap	12	Kasubag Umum & Kepegawaian	Pengumpulan dokumen kurang optimal	Administrasi kepegawaian terganggu
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Penyelesaian administrasi tugas ASN terlambat	12	Kasubag Umum & Kepegawaian	Beban kerja tinggi	Pelayanan kepada ASN terlambat
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Penilaian kinerja pegawai tidak dilakukan secara objektif dan tepat waktu	16	Atasan Langsung	Monitoring kinerja belum optimal dan keterlambatan penginputan SKP	Pengembangan karier dan pemberian penghargaan tidak tepat
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah APIP yang memenuhi standar kompetensi belum mencapai target	16	Inspektur	Keterbatasan kesempatan mengikuti sertifikasi/diklat dan formasi SDM	Kapabilitas APIP dan kualitas pengawasan belum meningkat

	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Perencanaan kebutuhan pegawai dan pengembangan kompetensi tidak sesuai kebutuhan organisasi	12	Sekretaris Inspektorat	Analisis kebutuhan pegawai dan kompetensi belum optimal	Kompetensi APIP tidak berkembang sesuai kebutuhan
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Data administrasi kepegawaian tidak lengkap atau tidak mutakhir	12	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Pembaruan data kepegawaian tidak dilakukan secara berkala	Kesalahan dalam pengusulan kenaikan pangkat, cuti, atau mutasi
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Pendidikan dan pelatihan pegawai tidak terlaksana sesuai rencana	12	Sekretaris Inspektorat	Keterbatasan anggaran dan lingginya beban penugasan pengawasan	Target peningkatan kompetensi APIP tidak tercapai
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Anggaran pendidikan dan pelatihan tidak mencukupi	25	Sekretaris	Keterbatasan APBD	Jumlah peserta diklat berkurang
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Kebutuhan diklat belum sesuai analisis kebutuhan kompetensi APIP	16	Sekretaris	Analisis kebutuhan kompetensi belum optimal	Kompetensi pegawai tidak meningkat sesuai kebutuhan
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Hasil diklat belum diterapkan dalam pelaksanaan tugas	16	Atasan Langsung	Monitoring pascadiklat belum optimal	Peningkatan kualitas pengawasan belum optimal
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Pegawai batal mengikuti diklat karena benturan tugas pengawasan	12	Inspektur	Banyak penugasan audit dan pendampingan	Target peningkatan kompetensi tidak tercapai
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jadwal diklat berubah atau dibatalkan oleh penyelenggara	9	Sekretaris	Perubahan jadwal dari penyelenggara tertunda	Target output kegiatan tertunda
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Perencanaan kebutuhan administrasi umum tidak sesuai kebutuhan ril	12	Sekretaris	Perencanaan kurang akurat	Kegiatan administrasi terganggu
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Anggaran administrasi umum tidak mencukupi	12	Sekretaris	Keterbatasan APBD	Sebagian kegiatan tidak terlaksana
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Pengadaan barang/jasa administrasi terlambat	12	PPTK	Proses pengadaan memerlukan waktu lebih lama	Pelayanan administrasi terhambat
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Penggunaan barang administrasi tidak tertib	12	Kasubbag Umum	Pengawasan kurang optimal	Pemborosan barang persediaan

	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Pelayanan administrasi belum memenuhi standar pelayanan	12	Sekretaris	Monitoring dan evaluasi belum optimal	Kepuasan pengguna layanan menurun
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Kebutuhan instalasi listrik tidak sesuai kondisi riil	12	Kasubbag Umum	Inventarisasi kurang akurat	Kekurangan material
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Pengadaan komponen listrik terlambat	12	PPTK	Proses pengadaan terlambat	Pekerjaan tertunda
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Komponen listrik tidak sesuai spesifikasi	9	PPTK	Pengawasan penyedia kurang optimal	Instalasi cepat rusak
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Terjadi pemadaman listrik	9	Kasubbag Umum	Gangguan jaringan PLN	Aktivitas kantor terganggu
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Instalasi listrik tidak dipelihara secara berkala	9	Kasubbag Umum	Jadwal pemeliharaan tidak berjalan	Risiko kerusakan dan kebakaran
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Kebutuhan peralatan rumah tangga tidak teridentifikasi dengan baik	16	Kasubbag Umum	Inventaris tidak mutakhir	Kekurangan sarana kerja
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Peralatan cepat rusak	16	Pengurus Barang	Penggunaan tidak sesuai SOP	Biaya pemeliharaan meningkat
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Kehilangan peralatan	16	Pengurus Barang	Pengamanan kurang memadai	Kerugian daerah
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Inventaris tidak sesuai kondisi fisik	12	Pengurus Barang	Stock opname tidak rutin	Data BMN/BMD tidak akurat
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Pengadaan peralatan terlambat	9	PPTK	Proses pengadaan lambat	Pelayanan terganggu
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Penggunaan logistik tidak terkendali	16	Kasubbag Umum	Pengawasan kurang	Pemborosan anggaran

	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persediaan tidak sesuai pencatatan	16	Pengurus Barang	Administrasi kurang tertib	Laporan persediaan tidak akurat
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Distribusi logistik terlambat	12	PPTK	Penyedia terlambat	Pelayanan terganggu
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Logistik rusak	9	Pengurus Barang	Penyimpanan kurang baik	Kerugian daerah
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Dokumen tidak terdokumentasi dengan baik	20	Arsiparis	Pengelolaan arsip belum optimal	Kesulitan penelusuran dokumen
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Kebutuhan cetak tidak tepat	16	Kasubbag Umum	Estimasi kebutuhan kurang akurat	Kekurangan dokumen
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Pemborosan penggunaan kertas	16	Kasubbag Umum	Pengendalian kurang	Anggaran meningkat
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Penyedia terlambat mencetak	12	PPTK	Kendala penyedia	Dokumen tertambat tersedia
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Hasil cetak tidak sesuai spesifikasi	12	PPTK	Pengawasan kurang	Dokumen harus dicetak ulang
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Bahan bacaan tidak dimanfaatkan	20	Seluruh Bidang	Minat baca rendah	Kompetensi pegawai tidak meningkat
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Koleksi regulasi tidak diperbarui	20	Arsiparis	Evaluasi berkala tidak dilakukan	Referensi hukum tidak lengkap
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Peraturan terbaru tidak teridentifikasi	16	Sekretaris	Monitoring regulasi kurang	Kebijakan tidak sesuai aturan
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Keterlambatan memperoleh regulasi terbaru	12	Kasubbag Umum	Distribusi terlambat	Pegawai menggunakan aturan lama

	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Pegawai tidak memahami perubahan regulasi	12	Sekretaris	Sosialisasi belum optimal	Kesalahan pelaksanaan tugas
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jadwal rapat tidak sesuai agenda peserta	16	Sekretaris	Koordinasi kurang	Kehadiran rendah
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Dokumen rapat belum lengkap	12	Kasubag Umum	Persiapan kurang matang	Rapat tidak efektif
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Peserta tidak hadir sesuai undangan	12	Sekretaris	Benturan jadwal	Keputusan tertunda
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Hasil rapat tidak ditindaklanjuti	12	Penanggung Jawab	Monitoring kurang	Program tidak berjalan
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Notulen dan dokumentasi rapat tidak lengkap	12	Notulis	Administrasi kurang tertib	Kesulitan monitoring hasil rapat
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Perencanaan kebutuhan barang tidak sesuai kebutuhan riil	16	Sekretaris	Inventarisasi kebutuhan kurang akurat	Pengadaan tidak efektif
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Anggaran pengadaan tidak mencukupi	16	Sekretaris	Keterbatasan APBD	Sebagian kebutuhan tidak terpenuhi
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Barang yang diterima tidak sesuai spesifikasi	16	PPTK	Pengawasan penyedia kurang optimal	Barang tidak dapat dimanfaatkan secara optimal
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Pengadaan tidak mendukung peningkatan pelayanan	16	Sekretaris	Perencanaan kurang tepat	Efektivitas pelayanan menurun
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Proses pengadaan terlambat	12	PPTK	Kendala proses pengadaan	Target kegiatan tidak tercapai
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Spesifikasi peralatan tidak sesuai kebutuhan	16	PPTK	Identifikasi kebutuhan kurang tepat	Barang tidak optimal digunakan

	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Peralatan mengalami kerusakan sebelum masa manfaat	16	Pengurus Barang	Penggunaan tidak sesuai SOP	Biaya pemeliharaan meningkat
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Penyedia terlambat menyerahkan barang	12	PPTK	Kendala distribusi	Operasional kantor terganggu
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Barang tidak sesuai spesifikasi kontrak	12	PPTK	Pengawasan penerimaan kurang optimal	Barang harus diganti
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Barang belum dicatat dalam KIB/BMD	12	Pengurus Barang	Administrasi terlambat	Data aset tidak akurat
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Kebutuhan jasa tidak teridentifikasi secara tepat	12	Sekretaris	Perencanaan kurang akurat	Pelayanan terganggu
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Anggaran jasa tidak mencukupi	12	Sekretaris	Efisiensi anggaran	Layanan terbatas
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Kontrak jasa tidak diawasi secara optimal	12	PPTK	Monitoring kurang	Kualitas layanan menurun
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Kinerja penyedia jasa tidak dievaluasi	12	Sekretaris	Evaluasi belum rutin	Perbaikan layanan tidak dilakukan
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Penyedia jasa tidak memenuhi standar pelayanan	9	PPTK	Pengawasan kurang optimal	Pelayanan menurun
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Pemadaman listrik	16	Gangguan PLN	Eksternal	Pegawai
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Gangguan pasokan air bersih	16	Kerusakan jaringan air	Eksternal	Pegawai
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Kebutuhan anggaran utilitas tidak sesuai kebutuhan	12	Estimasi penggunaan kurang akurat	Internal	Inspektorat

	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Gangguan jaringan internet dan telepon	12	Gangguan penyedia layanan	Eksternal	Pegawai
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Tagihan utilitas tidak dibayarkan tepat waktu	12	Administrasi pembayaran terlambat	Internal	Inspektorat
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Kepuasan pengguna layanan rendah	20	Sekretaris	Evaluasi layanan belum optimal	Produktivitas pegawai menurun
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Kebutuhan tenaga pelayanan umum tidak sesuai	16	Sekretaris	Analisis kebutuhan kurang optimal	Pelayanan kurang maksimal
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Tenaga pelayanan tidak hadir	16	Kasubbag Umum	Disiplin kerja rendah	Kebersihan dan pelayanan terganggu
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Pelayanan kebersihan tidak sesuai standar	16	Kasubbag Umum	Pengawasan kurang optimal	Lingkungan kerja tidak nyaman
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Kinerja penyedia jasa tidak dimonitor	12	PPTK	Monitoring belum rutin	Mutu pelayanan menurun
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jadwal pemeliharaan tidak disusun dengan baik	16	Pengurus Barang	Inventarisasi kondisi barang belum optimal	Barang cepat rusak
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Pemeliharaan terlambat dilakukan	16	PPTK	Keterbatasan anggaran	Umur aset berkurang
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Nilai aset menurun akibat pemeliharaan tidak optimal	16	Sekretaris	Evaluasi kondisi aset tidak rutin	Kerugian daerah dan terganggunya pelayanan
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Penyedia jasa pemeliharaan tidak memenuhi standar	12	PPTK	Pengawasan kontrak kurang	Kualitas pemeliharaan rendah
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Kerusakan barang tidak segera dilaporkan	12	Pengguna Barang	Pengawasan kurang	Kerusakan semakin parah

	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Pemeliharaan kendaraan dinas terlambat dilaksanakan	16	PPTK	Keterbatasan anggaran dan penyedia jasa	Kendaraan tidak siap digunakan
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Riwayat pemeliharaan kendaraan tidak terdokumentasi dengan baik	16	Pengurus Barang	Administrasi pemeliharaan belum tertib	Perencanaan pemeliharaan berikutnya tidak akurat
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jadwal pemeliharaan kendaraan dinas tidak disusun sesuai kebutuhan	12	Kasubbag Umum	Inventarisasi kondisi kendaraan belum optimal	Kendaraan cepat mengalami kerusakan
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Pembayaran pajak kendaraan melewati jatuh tempo	12	Bendahara Pengeluaran	Monitoring masa berlaku pajak belum optimal	Denda administrasi dan kendaraan tidak dapat digunakan
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Kendaraan mengalami kerusakan berat akibat penggunaan yang tidak sesuai SOP	12	Pengguna Kendaraan	Kurangnya kepatuhan terhadap prosedur penggunaan	Biaya pemeliharaan meningkat
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Kebutuhan pemeliharaan kendaraan operasional tidak sesuai kondisi kendaraan	16	Kasubbag Umum	Pemeriksaan berkala belum optimal	Kendaraan sering mengalami gangguan
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Pajak atau izin kendaraan terlambat diperpanjang	16	Bendahara Pengeluaran	Pengendalian administrasi belum optimal	Kendaraan tidak dapat dioptimalkan
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Frekuensi kerusakan kendaraan meningkat	16	Sekretaris	Pemeliharaan preventif belum berjalan optimal	Biaya operasional meningkat
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Kendaraan operasional rusak saat digunakan untuk tugas pengawasan	12	Pengguna Kendaraan	Intensitas penggunaan tinggi dan kondisi medan di Kepulauan Mentawai	Pelaksanaan pengawasan tertunda
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Ketersediaan suku cadang terbatas	12	PPTK	Distribusi barang ke wilayah kepulauan memerlukan waktu lebih lama	Perbaikan kendaraan terlambat
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jadwal pemeliharaan peralatan tidak disusun secara berkala	16	Pengurus Barang	Belum tersedia jadwal pemeliharaan rutin	Peralatan cepat mengalami kerusakan
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Peralatan mengalami kerusakan karena penggunaan yang tidak sesuai SOP	16	Pengguna Barang	Kurangnya pemahaman pengguna	Produktivitas kerja menurun

	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Perbaikan peralatan terlambat dilakukan	16	PPTK	Keterbatasan teknis atau penyedia jasa	Operasional kantor terganggu
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Kerusakan tidak segera dilaporkan	16	Pengguna Barang	Pengawasan internal kurang optimal	Kerusakan menjadi lebih parah
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Umur ekonomis peralatan lebih pendek dari yang direncanakan	16	Sekretaris	Pemeliharaan preventif belum optimal	Biaya pengadaan meningkat
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Kondisi kerusakan gedung tidak teridentifikasi secara akurat sehingga kebutuhan rehabilitasi tidak sesuai	16	Pelaksana Teknis Kegiatan/Kasubbag Umum	Survei kondisi bangunan belum menyeluruh	Pemeliharaan tidak tepat sasaran
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Anggaran pemeliharaan atau rehabilitasi tidak mencukupi	16	Sekretaris/PPTK	Keterbatasan alokasi APBD	Sebagian pekerjaan tidak dapat dilaksanakan
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi terlambat dari jadwal	16	PPTK	Keterlambatan penyedia, cuaca, atau keterlambatan material	Aktivitas perkantoran terganggu
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Gedung yang telah dipelihara tidak dipelihara secara berkala sehingga cepat mengalami kerusakan kembali	16	Kasubbag Umum	Tidak adanya jadwal pemeliharaan rutin	Biaya pemeliharaan meningkat dan pelayanan kantor terganggu
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Hasil pekerjaan tidak sesuai spesifikasi teknis atau mutu yang dipersyaratkan	12	PPTK	Pengawasan pekerjaan kurang optimal	Umur bangunan menjadi lebih pendek dan memerlukan perbaikan ulang



Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai
 Tahun Penilaian : 2026

No.	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e
A Komitmen Terhadap Kompetensi				
1	Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/ jabatan kurang memadai	Melakukan analisis kebutuhan kompetensi dan jabatan, mengusulkan pemenuhan formasi Auditor/PPUP, menyusun rencana pengembangan kompetensi melalui diklat, sertifikasi, bimtek, coaching, serta penempatan pegawai sesuai kompetensi.	Inspektur, Sekretaris Inspektorat, Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Desember 2026
B Kepemimpinan yang kondusif				
1	Rencana strategis dan rencana kerja Inspektorat belum menyajikan informasi mengenai risiko	Mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam Renstra, Renja, PK, dan dokumen perencanaan lainnya, menyusun Register Risiko tahunan serta melakukan reviu secara berkala.	Inspektur, Sekretaris Inspektorat, Perencana	Triwulan III 2026
2	Pimpinan kurang berperan serta dan mengikutsertakan pejabat dan pegawai terkait dalam proses pengelolaan risiko	Melaksanakan rapat manajemen risiko secara berkala, meningkatkan komitmen pimpinan melalui monitoring, evaluasi, pembinaan, serta melibatkan seluruh unit kerja dalam identifikasi, analisis, dan pemantauan risiko.	Inspektur, Sekretaris Inspektorat, Inspektur Pembantu	Triwulan IV 2026
C PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT				
1	Kewenangan belum direviu secara periodik	Melakukan reviu dan evaluasi pembagian tugas, kewenangan, uraian jabatan, pendelegasian wewenang, serta memperbarui SOP sesuai perubahan regulasi dan kebutuhan organisasi.	Sekretaris Inspektorat, Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Triwulan III 2026
D PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA				
1	Inspektorat Telah Menginternalisasi Budaya Sadar Risiko	Meningkatkan implementasi budaya sadar risiko melalui sosialisasi, bimbingan teknis, workshop, penyusunan agen perubahan, monitoring penerapan manajemen risiko, dan evaluasi berkala terhadap efektivitas budaya risiko.	Inspektur, Sekretaris Inspektorat, Tim Manajemen Risiko	Desember 2026
2	Kurangnya pemberian reward dan/atau punishment atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja)	1. Menyusun kebijakan pemberian reward dan punishment yang mempertimbangkan kinerja pengelolaan risiko. 2. Mengintegrasikan indikator pengelolaan risiko ke dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) atau penilaian kinerja unit kerja. 3. Memberikan penghargaan kepada unit kerja/pegawai yang menerapkan manajemen risiko dengan baik serta melakukan pembinaan terhadap unit yang belum optimal. 4. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas penerapan sistem penghargaan dan pembinaan.	Inspektur, Sekretaris Inspektorat, Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Triwulan IV 2026
3	Instansi telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM namun kurang memadai	1. Menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai berdasarkan analisis kebutuhan diklat. 2. Mengoptimalkan pemanfaatan anggaran pengembangan SDM melalui diklat, bimtek, sertifikasi auditor, workshop, dan coaching. 3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan kompetensi serta dampaknya terhadap peningkatan kinerja.	Inspektur, Sekretaris Inspektorat, Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Desember 2026

Tuapejat, 28 Januari 2026
 Inspektur

 Serieli Bawamenewi, SH
 NIP. 19830905 200802 1 001

Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan

Nama Pemda Nama Perangkat Daerah Tahun Penilaian Tujuan Strategis Usuran Pemerintahan				: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai : Inspektorat : 2026 : Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Akuntabel, Transparan dan melayani : Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan							
Risiko Prioritas						Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Resiko						
a	b					c	d	e	f	g	h
I. Risiko Strategis Inspektorat											
	Sasaran : 1.Meningkatnya Integritas Penyelenggaraan pemerintahan			2. Manajemen Resiko Indeks (MRI)	Agan risiko pada OPD tidak aktif	RSO 26.35.04.05	Restra, Renja, PK, IKU, Perjanjian Kinerja dan monitoring capaian kinerja telah disusun serta dilakukan evaluasi berkala.	Monitoring dan evaluasi belum optimal, kualitas data dukung belum konsisten.	Meningkatkan kualitas perencanaan, monitoring dan evaluasi kinerja, serta revalu dokumen SAKIP secara berkala.	Inspektur, Sekretaris Inspektorat, Perencana	Desember 2026
	Sasaran : 1.Meningkatnya Integritas Penyelenggaraan pemerintahan			2. Manajemen Resiko Indeks (MRI)	Implementasi manajemen risiko pada OPD belum optimal	RSO 26.35.04.03	Pedoman manajemen risiko telah tersedia, sosialisasi telah dilaksanakan	Belum seluruh OPD menerapkan manajemen risiko secara konsisten	Pendampingan penyusunan register risiko, coaching clinic dan monitoring implementasi	Sekretaris Inspektorat/Koordinator Manajemen Risiko	Triwulan IV 2026
	Sasaran : 1.Meningkatnya Integritas Penyelenggaraan pemerintahan			1. Indeks persepsi anti korupsi	Masih terjadi praktik penyimpangan pada OPD	RSO 26.35.04.02	Audit, revalu, monitoring, pemeriksaan khusus dan tindak lanjut rekomendasi	Pengendalian intern OPD belum efektif dan kepatuhan masih rendah	Meningkatkan audit berbasis risiko, pembinaan SPIP, monitoring tindak lanjut dan pengawasan berkala	Inspektur Pembantu Wilayah	Desember 2026
	Sasaran : 1.Meningkatnya Integritas Penyelenggaraan pemerintahan			3. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Rekomendasi hasil pengawasan tidak dilindaktanjuti	RSO 26.35.04.06	Penyusunan dokumen mengacu pada Permendagri dan pedoman SAKIP serta dilakukan revalu internal	Penyusunan belum sepenuhnya berbasis hasil dan data pendukung belum lengkap.	Melaksanakan pendampingan penyusunan dokumen, revalu kualitas dokumen dan peningkatan kapasitas pengelola SAKIP.	Sekretaris Inspektorat, Perencana	Triwulan III 2026
	Sasaran : 1.Meningkatnya Integritas Penyelenggaraan pemerintahan			1. Indeks persepsi anti korupsi	Nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi tidak mencapai target	RSO 26.35.04.01	Monitoring MCP KPK, sosialisasi antikorupsi, pembinaan SPIP, pengawasan reguler	Pengawasan belum menjangkau seluruh area, rawan korupsi dan tindak lanjut belum optimal	Meningkatkan pembinaan integritas, monitoring MCP, pengawasan berbasis risiko, dan evaluasi berkala	Inspektur	Desember 2026
	Sasaran : 1.Meningkatnya Integritas Penyelenggaraan pemerintahan			2. Manajemen Resiko Indeks (MRI)	Dokumen register risiko OPD belum lengkap	RSO 26.35.04.04	Templat register risiko dan pedoman telah disampaikan	Sebagian OPD belum menyusun atau memperbarui register risiko	Melaksanakan asistensi penyusunan register risiko dan revalu kualitas dokumen	Tim Manajemen Risiko Inspektorat	Triwulan III 2026
	Sasaran : 1.Meningkatnya Integritas Penyelenggaraan pemerintahan			3. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Area rawan korupsi belum dimitigasi	RSO 26.35.04.07	Telah dibentuk Tim Inovasi dan dilakukan inventarisasi usulan inovasi	Budaya inovasi belum berkembang dan belum ada roadmap inovasi.	Menyusun roadmap inovasi, melaksanakan kompetisi inovasi, benchmarking dan monitoring implementasi inovasi.	Inspektur, Sekretaris Inspektorat	Desember 2026

No	Risiko Prioritas					Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Risiko						
a	Sasaran : 1. Meningkatkan Integritas Penyelenggaraan pemerintahan Sasaran: 2. Meningkatkan Kinerja Inspektoral		b	2. Manajemen Risiko Indeks (MRI)	Dokumen register risiko OPD belum lengkap	RSO 26.35.04.04	Telah diberikan pedoman penyusunan register risiko, dilakukan sosialisasi dan pendampingan kepada OPD, serta monitoring penyampaian dokumen.	Sebagian OPD belum memahami manajemen risiko, kualitas register risiko belum sesuai pedoman, monitoring belum dilakukan secara berkala.	Melaksanakan bimbingan teknis penyusunan register risiko, pendampingan kepada seluruh OPD, menyusun jadwal monitoring dan evaluasi triwulanan, serta memberikan umpan balik atas register risiko yang disampaikan.	Inspektur, Sekretaris Inspektoral, Iban terkait, Tim SPIP/Manajemen Risiko	Triwulan III Tahun 2026
						RSO 26.36.04.14	Jadwal audit telah ditetapkan dalam PKPT dan Surat Tugas.	Perubahan jadwal akibat permintaan mendadak dan keterbatasan auditor belum diantisipasi secara optimal.	Menyusun jadwal cadangan (contingency schedule), melakukan monitoring mingguan, dan penyesuaian prioritas penanganan.	Inspektur Pembantu	Triwulan IV 2026
						RSO 26.35.04.15	Jadwal penanganan mempertimbangkan prakiraan cuaca dan koordinasi dengan OPD.	Belum tersedia prosedur khusus apabila terjadi cuaca ekstrem, terutama untuk wilayah Kepulauan.	Menyusun rencana kontinjensi, memanfaatkan audit jarak jauh (remote audit) jika memungkinkan, dan menyesuaikan jadwal penanganan.	Inspektur, Inspektur Pembantu	Desember 2026
						RSO 26.35.04.16	Penjadwalan penanganan telah disesuaikan dengan jadwal transportasi laut.	Keterbatasan jadwal kapal dan kondisi cuaca menyebabkan penanganan sering tertunda.	Menyusun jadwal audit berbasis klaster wilayah, mengoptimalkan koordinasi dengan pemerintah kecamatan/desa, dan mengalokasikan waktu perjalanan yang memadai.	Inspektur, Sekretaris Inspektoral	Desember 2026
	Sasaran: 2. Meningkatkan Kinerja Inspektoral			3. Capaian kinerja perangkat daerah	Gangguan internet menghambat pengawasan berbasis elektronik	RSO 26.35.04.17	Telah tersedia jaringan internet dan aplikasi berbasis elektronik pada kantor Inspektoral.	Kualitas jaringan di beberapa kecamatan/desa masih rendah sehingga pelaporan dan koordinasi terhambat.	Menyediakan mekanisme kerja luring (offline), meningkatkan kapasitas jaringan di kantor, serta memanfaatkan jaringan alternatif saat penanganan.	Sekretaris Inspektoral, Pengelola TI	Triwulan IV 2026
						RSO 26.35.04.12	SOP penggunaan aplikasi telah tersedia dan telah dilakukan sosialisasi kepada pegawai.	Tingkat kepatuhan penggunaan aplikasi masih rendah dan monitoring belum optimal.	Mewajibkan penggunaan aplikasi dalam setiap penanganan, memberikan pelatihan, serta melakukan evaluasi pemanfaatan aplikasi.	Sekretaris Inspektoral, Admin Aplikasi	Triwulan IV 2026

No	Risiko Prioritas					Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Risiko						
a	Sasaran: 2. Meningkatkan Kinerja Inspektorat		b	3. Capaian kinerja perangkat daerah	PKPT tidak terlaksana sesuai target	c RSO 26.36.04.13	d PKPT telah disusun berdasarkan prioritas risiko dan dilakukan monitoring realisasi setiap triwulan.	e Pengawasan di luar PKPT, keterbatasan auditor, dan anggaran menyebabkan target tidak tercapai.	f Melakukan penyesuaian PKPT secara berkala, mengoptimalkan SDM pengawasan, dan mengoptimalkan penambahan anggaran bila diperlukan.	g Inspektur, Inspektur Pembantu	h Desember 2026
	Sasaran: 2. Meningkatkan Kinerja Inspektorat			3. Capaian kinerja perangkat daerah	Jumlah auditor bersertifikat belum memenuhi kebutuhan	RSO 26.36.04.19	Telah dilaksanakan pengembangan kompetensi melalui diklat, bintek, dan sertifikasi auditor.	Jumlah auditor yang mengikuti sertifikasi masih terbatas karena keterbatasan anggaran dan kuota pelatihan.	Menyusun rencana pengembangan kompetensi jangka menengah, mengoptimalkan penambahan kuota sertifikasi, serta melaksanakan coaching dan knowledge sharing secara internal.	Inspektur, Sekretaris Inspektorat, Kasubag Umum dan Kepegawaian	Desember 2026
	Sasaran: 2. Meningkatkan Kinerja Inspektorat			1. Nilai LAKIP	Dokumen perencanaan dan pelaporan tidak berkualitas	RSO 26.36.04.09	SOP penggunaan aplikasi telah tersedia dan dilakukan sosialisasi.	Kepatuhan penggunaan aplikasi belum optimal dan monitoring masih terbatas.	Meningkatkan monitoring penggunaan aplikasi, melakukan pendampingan dan evaluasi pemanfaatan aplikasi secara berkala.	Sekretaris Inspektorat, Admin Aplikasi	Triwulan IV 2026
	Sasaran: 2. Meningkatkan Kinerja Inspektorat			3. Capaian kinerja perangkat daerah	Anggaran pengawasan tidak mencukupi	RSO 26.35.04.18	Penyusunan anggaran dilakukan berdasarkan usulan kebutuhan pengawasan dan prioritas daerah.	Anggaran yang tersedia belum mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan PKPT dan pengawasan khusus	Menyusun skala prioritas pengawasan berbasis risiko, melakukan efisiensi penggunaan anggaran, dan mengusulkan penambahan anggaran pada perubahan APBD atau APBD tahun berikutnya.	Inspektur, Sekretaris Inspektorat	Desember 2026
	Sasaran: 2. Meningkatkan Kinerja Inspektorat			2. Jumlah inovasi yang diterapkan	Inovasi pengawasan tidak berkembang	RSO 26.36.04.10	PKPT telah disusun berdasarkan prioritas risiko dan dilakukan monitoring realisasi.	Keterbatasan SDM auditor, anggaran dan adanya pengurangan di luar PKPT.	Menyusun prioritas pengawasan berbasis risiko, melakukan penyesuaian PKPT secara berkala, mengoptimalkan SDM dan mengusulkan penambahan anggaran pengawasan.	Inspektur, Inspektur Pembantu	Desember 2026
	Sasaran: 2. Meningkatkan Kinerja Inspektorat			2. Jumlah inovasi yang diterapkan	Digitalisasi pengawasan belum optimal	RSO 26.35.04.11	Inspektorat telah menggunakan aplikasi pengawasan, e-Office, dan aplikasi pendukung administrasi pengawasan.	Belum seluruh proses pengawasan terintegrasi secara digital dan kompetensi pengguna masih terbatas.	Mengembangkan integrasi aplikasi pengawasan, meningkatkan kapasitas SDM, serta melakukan monitoring pemanfaatan aplikasi secara berkala.	Sekretaris Inspektorat, Administrator Sistem Informasi	Triwulan IV 2026

No	Risiko Prioritas					Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada (*)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Resiko						
a	Sasaran: 2. Meningkatkan Kinerja Inspektorat		b	1. Nilai LAKIP	Nilai LAKIP Inspektorat tidak mencapai target	c	d	e	f	g	h
						RSO.26.35.04.08	Pemanfaatan aplikasi e-Office, SIM HP dan aplikasi pendukung pengawasan telah dilakukan.	Integrasi aplikasi belum optimal dan kompetensi pengguna masih terbatas.	Mengembangkan aplikasi pengawasan, meningkatkan integrasi sistem dan melaksanakan pelatihan penggunaan aplikasi.	Sekretaris Inspektorat, Administrator Sistem Informasi	Triwulan IV 2026
II. Risiko Operasional Inspektorat											
	Program Penyelenggaraan Pengawasan										
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Rekomendasi hasil pemeriksaan tidak ditindaklanjuti	ROO.26.35.04.05	Monitoring tidak lanjut rekomendasi dilakukan secara berkala dan dilaporkan kepada pimpinan daerah.	Komitmen OPD terhadap penyelesaian tindak lanjut masih rendah dan koordinasi belum optimal.	Melaksanakan rapat evaluasi tindak lanjut, mengirimkan surat peringatan kepada OPD yang belum menindaklanjuti, serta melakukan monitoring berkala melalui aplikasi atau daftar pemantauan.	Inspektur, Irban	Triwulan IV 2026
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	PKPT belum sepenuhnya berbasis risiko	ROO.26.35.04.01	PKPT telah disusun setiap tahun dan dibahas bersama pimpinan serta mempertimbangkan prioritas pengawasan.	Penilaian risiko OPD belum sepenuhnya digunakan sebagai dasar penyusunan PKPT.	Menyempurnakan penyusunan PKPT berbasis risiko melalui pemetaan risiko OPD dan reviu PKPT secara berkala.	Inspektur, Irban, Koordinator Pengawasan	Triwulan I 2026
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Pemeriksaan tidak selesai sesuai jadwal	ROO.26.35.04.03	Jadwal pemeriksaan telah ditetapkan dalam PKPT dan Surat Tugas.	Penugasan mendadak, keterbatasan auditor, dan kondisi geografis menyebabkan keterlambatan.	Melakukan monitoring progres penugasan, penyelesaian jadwal, dan optimalisasi pembagian personel.	Irban, Ketua Tim Audit	Setiap Penugasan
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Dokumen objek pemeriksaan belum lengkap	ROO.26.35.04.02	Permintaan dokumen dilakukan melalui Surat Tugas dan Entry Meeting.	OPD terlambat atau belum menyerahkan dokumen yang dipersyaratkan.	Menyempikan daftar kebutuhan dokumen sebelum pemeriksaan, melakukan monitoring pemenuhan dokumen, dan koordinasi dengan OPD.	Irban, Ketua Tim Audit	Setiap Penugasan
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	LHP terlambat diterbitkan	ROO.26.35.04.04	Telaah benjang alas KKP dan konsep LHP telah diterapkan.	Proses reviu dan penyempurnaan LHP memerlukan waktu yang cukup lama.	Menetapkan batas waktu penyelesaian setiap tahapan, melakukan monitoring penyusunan LHP, dan memanfaatkan aplikasi pengawasan.	Irban, Pengendali Teknis, Ketua Tim	Maksimal 14 hari setelah pemetaan selesai

No	Risiko Prioritas					Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Resiko						
a	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Tindak lanjut rendah	ROO 26.35.04.10	Monitoring tidak lanjut dilakukan secara berkala dan dilaporkan kepada pimpinan daerah.	Komitmen OPD rendah dan monitoring belum berbasis aplikasi secara optimal.	Melaksanakan monitoring triwulanan, rapat evaluasi tindak lanjut, pemanfaatan aplikasi pemantauan tindak lanjut, dan penyampaian laporan kepada Bupati mengenai OPD yang belum menyelesaikan tindak lanjut.	Inspektur, Inspektur Pembantu	Triwulan IV 2026
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen kinerja OPD tidak lengkap	ROO 26.35.04.06	Surat pemberitahuan pemeriksaan, daftar permintaan dokumen (checklist), dan entry meeting telah dilaksanakan.	OPD belum memiliki mekanisme verifikasi kelengkapan dokumen sebelum pemeriksaan.	Menyampaikan checklist dokumen lebih awal, melakukan koordinasi awal dengan OPD, dan monitoring pemenuhan dokumen sebelum audit dimulai.	Inspektur Pembantu, Ketua Tim Audit	Setiap pengulangan
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Data kinerja tidak valid	ROO 26.35.04.07	Auditor melakukan uji petik, konfirmasi, dan telaah dokumen pendukung	Validasi data dan OPD belum dilakukan secara menyeluruh dan bukti pendukung belum memadai.	Meningkatkan prosedur verifikasi data, melakukan konfirmasi silang dengan sumber data lain, dan memperkuat review pengendali teknis.	Ketua Tim Audit, Pengendali Teknis	Setiap pengulangan
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Auditor tidak memahami proses bisnis OPD	ROO 26.35.04.08	Pembekalan tim audit, penggunaan Program Kerja Audit (PKA), dan diskusi pendahuluan telah dilakukan.	Pemahaman auditor terhadap karakteristik OPD tertentu masih terbatas.	Melaksanakan briefing sebelum pengulangan, menyusun profil risiko, dan proses bimbingan OPD, serta meningkatkan kompetensi auditor melalui bimtek dan knowledge sharing.	Inspektur Pembantu, Pengendali Teknis	Triwulan IV 2026
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Rekomendasi kurang implementatif	ROO 26.35.04.09	Konsep rekomendasi direvisi oleh Pengendali Teknis dan Inspektur Pembantu sebelum LHP diterbitkan.	Rekomendasi belum sepenuhnya mempertimbangkan akar penyebab masalah dan kemampuan OPD dalam menindaklanjuti.	Menerapkan analisis akar penyebab (root cause analysis), melibetkan OPD dalam pembahasan rekomendasi, dan melakukan quality assurance atas LHP.	Pengendali Teknis, Inspektur Pembantu	Setiap penerbitan LHP
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Rekomendasi keuangan tidak ditindaklanjuti	ROO 26.35.04.15	Monitoring tindak lanjut rekomendasi dilakukan secara berkala dan dilaporkan kepada pimpinan daerah.	Komitmen OPD dalam menyelesaikan tindak lanjut masih rendah dan pemantauan belum sepenuhnya berbasis sistem informasi.	Melaksanakan rapat evaluasi tindak lanjut, menyampaikan surat peringatan kepada OPD yang belum menindaklanjuti rekomendasi, serta meningkatkan pemanfaatan aplikasi pemantauan tindak lanjut.	Inspektur, Inspektur Pembantu	Triwulan IV 2026

No	Risiko Prioritas					Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Resiko						
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen keuangan belum lengkap	ROO 26.37.04.11	Surat pemberitahuan pemeriksaan, daftar permintaan dokumen (checklist), dan entry meeting telah dilaksanakan sebelum pemeriksaan.	OPD belum menyerahkan seluruh dokumen sesuai checklist dan belum melakukan verifikasi kelengkapan dokumen secara internal.	Menyampaikan checklist dokumen lebih awal, melakukan koordinasi pre-audit, dan monitoring kelengkapan dokumen sebelum pemeriksaan dimulai.	Inspektur Pembantu, Ketua Tim Audit	h Setiap penugasan
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Bukti transaksi tidak memadai	ROO 26.37.04.12	Auditor melakukan pemeriksaan dokumen sumber, konfirmasi, dan uji petik atas transaksi.	Sebagian bukti transaksi tidak lengkap atau tidak didukung dokumen yang sah.	Melakukan pendalaman pemeriksaan, konfirmasi kepada pihak terkait, serta memberikan pembinaan kepada OPD mengenai tertib administrasi keuangan.	Ketua Tim Audit, Inspektur Pengendali Teknis	Setiap penugasan
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kesalahan pengujian transaksi	ROO 26.37.04.13	Program Kerja Audit (PKA), Kerjasama Pemeriksaan (KKP), serta reviu berjenjang oleh Pengendali Teknis telah diterapkan.	Kompetensi auditor dan konsistensi penerapan prosedur audit masih perlu ditingkatkan.	Melaksanakan briefing sebelum audit, meningkatkan kompetensi auditor, supervisi selama penugasan, dan quality assurance alias KKP.	Pengendali Teknis, Inspektur Pembantu	Triwulan IV 2026
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	LHP terlambat diterbitkan	ROO 26.35.04.55	Jadwal penyelesaian LHP telah ditetapkan dan dilakukan reviu berjenjang sebelum diterbitkan.	Proses pembahasan hasil audit, penyempurnaan LHP, dan persetujuan masih membutuhkan waktu yang cukup lama.	Menetapkan batas waktu setiap tahapan penyusunan LHP, melakukan monitoring progres, dan memanfaatkan aplikasi pengawasan untuk mempercepat proses reviu.	Inspektur Pembantu, Pengendali Teknis, Ketua Tim	Maksimal 14 hari kerja setelah penugasan selesai
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Pengujian atas capaian kinerja tidak dilakukan secara memadai	ROO 26.35.04.20	Monitoring tindak lanjut rekomendasi dilakukan secara berkala dan dilaporkan kepada pimpinan daerah.	Komitmen OPD dalam menyelesaikan tindak lanjut masih rendah dan pemantauan belum sepenuhnya berbasis sistem informasi.	Melaksanakan rapat evaluasi tindak lanjut, menyampaikan surat peringatan kepada OPD yang belum menindaklanjuti rekomendasi, serta meningkatkan pemantauan aplikasi tindak lanjut.	Inspektur, Inspektur Pembantu	Triwulan IV 2026
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	OPD tidak menindaklanjuti rekomendasi hasil reviu	ROO 26.35.04.24	Monitoring tindak lanjut dilakukan secara berkala dan dilaporkan kepada pimpinan daerah.	Komitmen OPD masih bervariasi dan mekanisme pemantauan belum sepenuhnya berbasis aplikasi.	Melaksanakan rapat evaluasi tindak lanjut, menyampaikan surat permintaan penyelesaian kepada OPD, serta meningkatkan monitoring melalui aplikasi pemantauan tindak lanjut.	Inspektur, Inspektur Pembantu	Triwulan IV 2026

No	Risiko Prioritas					Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Risiko						
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Terjadi perubahan regulasi mengenai penyusunan LKJP	ROO 26.35.04.21	Inspektorat melakukan pemantauan regulasi, mengikut sosialisasi Kementerian PANRB, Kemendagri, dan BPKP serta menyampaikan informasi kepada tim reviu.	Informasi perubahan regulasi belum seluruhnya dipahami dan diimplementasikan secara seragam oleh auditor maupun OPD.	Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis atas regulasi terbaru, memperbarui pedoman reviu, serta melakukan pendampingan kepada OPD.	Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu	Triwulan I 2026
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Monitoring tindak lanjut belum dilaksanakan secara berkala	ROO 26.35.04.25	Jadwal monitoring tindak lanjut telah ditetapkan dan menjadi bagian dari PKPT.	Monitoring belum konsisten dilaksanakan sesuai jadwal dan dokumentasi hasil monitoring belum lengkap.	Menyusun kalender monitoring tahunan, menetapkan penanggung jawab monitoring, memanfaatkan aplikasi pemantauan tindak lanjut, dan menyampaikan laporan hasil monitoring secara triwulanan kepada Inspektur.	Inspektur Pembantu, Ketua Tim Monitoring	Triwulan IV 2026
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Jadwal reviu laporan kinerja tidak sesuai dengan jadwal penyusunan LKJP OPD	ROO 26.35.04.16	Surat pemberitahuan pemeriksaan, daftar permintaan dokumen (checklist), dan entry meeting telah dilaksanakan sebelum pemeriksaan.	OPD belum menyerahkan seluruh dokumen sesuai checklist dan belum melakukan verifikasi kelengkapan dokumen secara internal.	Menyampaikan checklist dokumen lebih awal, melakukan koordinasi pra-audit, dan monitoring kelengkapan dokumen sebelum pemeriksaan dimulai.	Inspektur Pembantu, Ketua Tim Audit	Setiap penugasan
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Data kinerja yang disampaikan tidak akurat atau tidak valid	ROO 26.35.04.18	Program Kerja Audit (PKA), Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), serta reviu berjenjang oleh Pengendali Teknis telah diterapkan.	Kompetensi auditor dan konsistensi penerapan prosedur audit masih perlu ditingkatkan.	Melaksanakan briefing sebelum audit, peningkatan kompetensi auditor, supervisi selama penugasan, dan quality assurance atas KKP.	Pengendali Teknis, Inspektur Pembantu	Triwulan IV 2026
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan Hasil Reviu terlambat disampaikan	ROO 26.35.04.22	Jadwal reviu telah ditetapkan dalam PKPT dan dilakukan monitoring penyelesaian laporan oleh Pengendali Teknis.	Reviu berjenjang dan penyempurnaan laporan sering memerlukan waktu lebih lama dari jadwal.	Menetapkan batas waktu setiap tahapan reviu, melakukan monitoring mingguan, dan memanfaatkan aplikasi pengawasan untuk memantau progres penyelesaian laporan.	Inspektur Pembantu, Pengendali Teknis, Ketua Tim	Maksimal 7 hari kerja setelah reviu selesai

No	Risiko Prioritas					Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada "j"	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Risiko						
a	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Dokumen LKJP dan data dukung belum lengkap	ROO 26.35.04.17	Auditor melakukan pemeriksaan dokumen sumber, konfirmasi, dan uji petik atas transaksi.	Sebagian bukti transaksi tidak lengkap atau tidak didukung dokumen yang sah.	Melakukan pendalaman pemeriksaan, konfirmasi kepada pihak terkait, serta memberikan pembinaan kepada OPD mengenai tertib administrasi keuangan.	Ketua Tim Audit, Pengendali Teknis	h Setiap penugasan
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Auditor/reviu tidak memahami proses bisnis atau indikator kinerja OPD	ROO 26.35.04.19	Jadwal penyelesaian LHP telah ditetapkan dan dilakukan reviu/berjalan sebelum diterbitkan.	Proses pembahasan hasil audit, penyempurnaan LHP, dan persetujuan masih membutuhkan waktu yang cukup lama.	Menetapkan batas waktu setiap tahapan penyusunan LHP, melakukan monitoring progres, dan memanfaatkan aplikasi pengawasan untuk mempercepat proses reviu.	Inspektur Pembantu, Pengendali Teknis, Ketua Tim	Maksimal 14 hari kerja setelah pemeriksaan selesai
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Rekomendasi hasil reviu kurang jelas atau sulit ditindaklanjuti	ROO 26.35.04.23	Rekomendasi direviu oleh Pengendali Teknis dan Inspektur Pembantu sebelum laporan diterbitkan.	Analisis akar penyebab belum selalu dilakukan sehingga rekomendasi yang operasional	Menerapkan root cause analysis, menyusun rekomendasi yang spesifik, terukur, realistis, dan berbasis waktu (SMART), serta melakukan quality assurance terhadap laporan hasil reviu.	Pengendali Teknis, Inspektur Pembantu	Setiap peniteltian laporan
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Dokumen LKPD dan kertas kerja pendukung belum lengkap	ROO 26.35.04.27	Checklist dokumen reviu telah disampaikan kepada perangkat daerah sebelum pelaksanaan reviu.	Dokumen pendukung belum diverifikasi secara internal oleh perangkat daerah.	Menyampaikan daftar dokumen lebih awal, melakukan koordinasi pre-reviu, dan memastikan kelengkapan dokumen sebelum reviu dimulai.	Inspektur Pembantu, Ketua Tim Reviu	Setiap penugasan
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Data pendukung laporan keuangan tidak akurat atau tidak konsisten	ROO 26.35.04.28	Tim reviu melakukan verifikasi dokumen, rekonsiliasi, konfirmasi, dan uji petik atas data keuangan.	Rekonsiliasi data antar unit belum dilakukan secara optimal sehingga masih terdapat perbedaan data	Memperkuat prosedur rekonsiliasi, melakukan konfirmasi ulang dengan sumber data, dan meningkatkan pembinaan kepada perangkat daerah mengenai penyusunan laporan keuangan.	Ketua Tim Reviu, Pengendali Teknis	Setiap penugasan
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Rekonsiliasi data antara OPD dan BPKAD belum selesai	ROO 26.35.04.31	Rekonsiliasi data keuangan dilakukan secara berkala antara OPD dan BPKAD sebelum penyusunan LKPD.	Rekonsiliasi belum selesai tepat waktu dan masih terdapat selisih data.	Menyusun jadwal rekonsiliasi yang lebih awal, melakukan monitoring penyelesaian selisih data, serta koordinasi intensif antara OPD, BPKAD, dan Inspektoral.	Inspektur Pembantu, Ketua Tim Reviu, BPKAD	Sebelum penyusunan LKPD berakhir

No	Risiko Prioritas					Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Risiko						
a	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	OPD tidak segera menindaklanjuti rekomendasi hasil reviu	ROO 26.35.04.35	Monitoring tindak lanjut kepada OPD disertai dan dilaporkan kepada pimpinan daerah.	Komitmen OPD terhadap penyelesaian tindak lanjut masih rendah dan pemantauan belum optimal.	Melaksanakan rapat evaluasi tindak lanjut, menyampaikan surat kepada OPD yang belum menindaklanjuti rekomendasi, dan melakukan monitoring triwulanan.	Inspektur, Inspektur Pembantu	Triwulan IV 2026
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Keterlambatan penyelesaian koreksi hasil reviu oleh OPD	ROO 26.35.04.37	Hasil reviu disampaikan kepada OPD disertai balas waktu penyelesaian koreksi.	Belum terdapat mekanisme pemantauan yang efektif terhadap penyelesaian koreksi oleh OPD.	Menyusun jadwal monitoring koreksi, menetapkan PIC pada setiap OPD, dan melakukan pelaporan berkala kepada Inspektur mengenai progres penyelesaian koreksi.	Inspektur Pembantu, Ketua Tim Reviu	Triwulan IV 2026
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Jadwal reviu laporan keuangan tidak selaras dengan jadwal penyusunan LKPD	ROO 26.35.04.26	Jadwal reviu disusun berdasarkan PKPT dan dikordinasikan dengan BPKAD serta perangkat daerah.	Perubahan jadwal penyusunan LKPD tidak segera diformasikan kepada tim reviu.	Meningkatkan koordinasi dengan BPKAD dan perangkat daerah, menyusun jadwal reviu yang fleksibel, serta melakukan monitoring pelaksanaan reviu secara berkala.	Inspektur, Sekretaris Inspektoral, Inspektur Pembantu	Triwulan I 2026
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Pengujian prosedur reviu tidak dilaksanakan secara memadai	ROO 26.35.04.29	Program Kerja Reviu (PKR), Kertas Kerja Reviu (KKR), dan reviu berjenjang oleh Pengendali Teknis telah diterapkan.	Pengujian belum dilakukan secara konsisten sesuai pedoman dan dokumentasi KKR belum lengkap.	Melakukan supervisi yang lebih intensif, quality assurance atas KKR, serta pelatihan penerapan prosedur reviu sesuai pedoman BPKP.	Pengendali Teknis, Inspektur Pembantu	Triwulan III 2026
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Auditor belum memahami perubahan Standar Akuntansi Pemerintahan (SA-PA) atau regulasi terbaru	ROO 26.35.04.30	Sosialisasi regulasi baru dan pembelajaran mandiri telah dilaksanakan secara berkala.	Belum seluruh auditor mengikuti pelatihan atau memahami perubahan regulasi secara merata.	Menyelenggarakan bimbingan teknis SAP dan regulasi terbaru, knowledge sharing internal, serta mewajibkan auditor mengikuti pelatihan sesuai bidang tugas.	Inspektur, Sekretaris Inspektoral, Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Triwulan IV 2026
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Gangguan aplikasi SIMDA, atau aplikasi pendukung lainnya menghambat reviu	ROO 26.35.04.32	Penggunaan aplikasi telah didukung oleh admin sistem serta dilakukan pencadangan (backup) data secara berkala.	Gangguan sistem belum dapat diantisipasi dengan cepat dan prosedur kontinjensi belum terdokumentasi dengan baik.	Menyusun SOP penanganan gangguan aplikasi, melakukan backup berkala, berkoordinasi dengan Diskominfo/BPKAD, dan menyediakan mekanisme kerja manual apabila sistem mengalami gangguan.	Sekretaris Inspektoral, Admin Aplikasi	Triwulan IV 2026

No	Risiko Prioritas					Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelidikan
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Risiko						
a	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan Hasil Reviu terfimbait disampaikan kepada Kepala Daerah	ROO 26.35.04.33	Jadwal penyusunan dan penyampaian laporan telah ditetapkan dalam PKPT serta dilakukan monitoring oleh Pengendali Teknis.	Proses reviu berjalan dengan baik dan penyampaian laporan serta keterlambatan penyampaian.	Menetapkan batas waktu setiap laporan reviu, memonitor progres penyelesaian laporan, dan memanfaatkan aplikasi pengawasan untuk mempercepat proses reviu.	Inspektur Pembantu, Pengendali Teknis	Maksimal 7 hari kerja setelah reviu selesai
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Perubahan regulasi pengelolaan keuangan daerah menjelang penyampaian LKPD	ROO 26.35.04.36	Pedoman reviu mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), peraturan perundang-undangan, dan pedoman BPKP.	Pedoman internal belum diperbarui mengikuti perubahan regulasi terbaru dan belum dipahami secara merata.	Memperbarui SOP/pedoman reviu, menyelenggarakan bimtek SAP, serta melakukan quality assurance terhadap pelaksanaan reviu.	Inspektur, Sekretaris Inspektorat	Triwulan III 2026
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Rekomendasi hasil reviu tidak jelas atau tidak operasional	ROO 26.35.04.34	Rekomendasi direviu oleh Pengendali Teknis dan dibahas bersama OPD sebelum laporan diterbitkan.	Rekomendasi belum sepenuhnya mempertimbangkan akar penyebab permasalahan dan kemampuan OPD dalam melaksanakan tindak lanjut.	Menerapkan analisis akar penyebab (root cause analysis), menyusun rekomendasi yang spesifik dan realistis (SMART), serta melakukan pembahasan akhir (exit meeting) dengan OPD.	Pengendali Teknis, Inspektur Pembantu	Selanjutnya
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Desa	Jumlah hasil Pengawasan Desa	Transportasi laut terbatas	ROO 26.35.04.40	Penjadwalan disesuaikan dengan ketersediaan transportasi laut dan darat.	Keterbatasan jadwal transportasi ke wilayah kepulauan belum diantisipasi secara optimal.	Menyusun jadwal berbasis kaster wilayah meningkatkan koordinasi dengan kecamatan, dan mengalokasikan waktu perjalanan yang memadai.	Sekretaris Inspektorat, Inspektur Pembantu	Triwulan IV 2026
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Desa	Jumlah hasil Pengawasan Desa	Cuaca buruk menghambat pemeriksaan	ROO 26.35.04.39	Perencanaan mempertimbangkan prakiraan cuaca dan koordinasi dengan pemerintah desa.	Belum terdapat rencana kontinjensi apabila cuaca ekstrem menghambat perjalanan ke desa.	Menyusun rencana kontinjensi, mengatur ulang jadwal pemeriksaan, dan memanfaatkan pemeriksaan jarak jauh jika memungkinkan.	Inspektur Pembantu, Ketua Tim	Selanjutnya
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Desa	Jumlah hasil Pengawasan Desa	Desa prioritas belum dipetakan berdasarkan risiko	ROO 26.35.04.38	Jadwal pengawasan desa telah ditetapkan dalam PKPT dan diberikan Surat Tugas.	Perubahan jadwal dan keterbatasan SDM menyebabkan pengawasan tidak sesuai rencana.	Menyusun jadwal pengawasan lebih awal, menetapkan prioritas desa berdasarkan risiko, dan melakukan monitoring realisasi PKPT.	Inspektur, Inspektur Pembantu	Triwulan IV 2026

No	Risiko Prioritas					Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Catat Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Risiko						
a	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Desa	Jumlah hasil Pengawasan Desa	Dokumen APBDes tidak lengkap	ROO 26.35.04.41	Daftar kebutuhan dokumen telah disampaikan kepada pemerintah desa sebelum pemeriksaan.	Kelengkapan dokumen belum diverifikasi oleh pemerintah desa sebelum pemeriksaan.	Menyampaikan checklist dokumen lebih awal, melakukan asistensi kepada desa, dan memastikan kelengkapan dokumen melalui koordinasi dengan kecamatan.	Ketua Tim Audit, Camat, Kepala Desa	h Setiap penugasan
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Desa	Jumlah hasil Pengawasan Desa	Tindak lanjut hasil pemeriksaan rendah	ROO 26.35.04.42	Monitoring tindak lanjut dilakukan secara berkala oleh Inspektorat.	Komitmen pemerintah desa dalam menyelesaikan rekomendasi masih rendah dan monitoring belum optimal.	Melaksanakan monitoring triwulanan, rapat evaluasi tindak lanjut, dan pembinaan kepada pemerintah desa.	Inspektur, Inspektur Pembantu	Triwulan IV 2026
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah kesepakatan Pengawasan Internal yang terbentuk	Koordinasi antar APIP kurang efektif	ROO 26.35.04.44	Forum koordinasi APIP dan rapat koordinasi telah dilaksanakan secara berkala.	Tindak lanjut hasil koordinasi belum terdokumentasi dan dipantau secara konsisten.	Menyusun rencana aksi hasil koordinasi, menetapkan PIC, dan melakukan monitoring pelaksanaan hasil rapat koordinasi.	Inspektur, Sekretaris Inspektorat	Triwulan IV 2026
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah kesepakatan Pengawasan Internal yang terbentuk	Ruang lingkup kerja sama tidak jelas	ROO 26.35.04.43	Kesepakatan kerja sama telah dituangkan dalam MoU, PKS, atau surat kesepakatan.	Pembagian tugas dan tanggung jawab antar pihak belum diatur secara rinci.	Menyusun pedoman kerja sama, memperjelas pembagian peran, serta melaksanakan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala.	Inspektur, Sekretaris Inspektorat	Triwulan III 2026
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah kesepakatan Pengawasan Internal yang terbentuk	Kerja sama tidak berlanjut	ROO 26.35.04.45	Tersedia MoUPKS dengan APIP/BPKP/APH, koordinasi melalui surat dan rapat, penunjukan PIC kerja sama.	Belum terdapat SOP monitoring implementasi kerja sama, evaluasi berkala belum dilakukan, koordinasi masih bersifat insidental.	Menyusun SOP monitoring kerja sama, melakukan evaluasi minimal setiap semester, membentuk tim koordinasi dan menyusun rencana aksi bersama.	Inspektur, Irtan terkait, Sekretaris Inspektorat	Triwulan IV 2026
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Masih terdapat rekomendasi hasil pemeriksaan yang belum ditindaklanjuti	ROO 26.35.04.50	Hasil monitoring disampaikan kepada OPD dan pimpinan daerah sebagai bahan evaluasi.	Belum terdapat mekanisme pemantauan penyelesaian atas hasil monitoring.	Menyusun rencana aksi tindak lanjut, menetapkan batas waktu penyelesaian, dan melaksanakan rapat evaluasi tindak lanjut secara berkala.	Inspektur, Inspektur Pembantu	Triwulan IV 2026
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Terdapat temuan pemeriksaan yang berulang pada OPD yang sama	ROO 26.35.04.51	Inspektorat melakukan pemantauan atas rekomendasi berulang dan pembinaan kepada OPD.	Analisis penyebab rekomendasi berulang belum dilakukan secara sistematis.		Inspektur, Inspektur Pembantu	Desember 2026

No	Risiko Prioritas					Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada (*)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Risiko						
a	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APUP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APUP	OPD belum melaksanakan rekomendasi sesuai batas waktu yang ditetapkan	ROO 26.35.04.57	Monitoring tindak lanjut dilakukan melalui rapat evaluasi dan aplikasi pemantauan tindak lanjut.	Komitmen OPD dalam menyelesaikan rekomendasi masih rendah.	Melaksanakan rapat evaluasi rutin, menyampaikan surat peringatan kepada OPD yang belum menyelesaikan tindak lanjut, dan melaporkan progres kepada Kepala Daerah.	Inspektur, Inspektur Pembantu	Triwulan IV 2026
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APUP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APUP	Kondisi geografis Kepulauan Mentawai menghambat verifikasi tindak lanjut lapangan	ROO 26.35.04.60	Pengawasan mempertimbangkan prakiraan cuaca dan jadwal transportasi laut.	Belum terdapat prosedur kontinjensi apabila transportasi terhenti akibat cuaca ekstrem.	Menyusun SOP pengurusan pada kondisi darurat, mengoptimalkan koordinasi dengan pemerintah kecamatan/desa, dan mengalokasikan anggaran perjalanan secara memadai.	Inspektur, Sekretaris Inspektorat	Triwulan IV 2026
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APUP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APUP	Data dan dokumen hasil pemeriksaan BPK RI/APUP belum lengkap	ROO 26.35.04.47	Monitoring tindak lanjut dilakukan secara berkala melalui aplikasi pemantauan dan pemeliharaan dokumen kepada OPD.	OPD belum memiliki mekanisme verifikasi kelengkapan dokumen sebelum disampaikan ke Inspektorat.	Menyusun checklist dokumen tindak lanjut, melakukan asistensi kepada OPD, dan verifikasi kelengkapan dokumen sebelum evaluasi.	Inspektur Pembantu, Ketua Tim Monitoring	Selanjutnya
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APUP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APUP	OPD terlambat menyampaikan laporan/bukti tindak lanjut hasil pemeriksaan	ROO 26.35.04.48	Jadwal penyampaian tindak lanjut telah ditetapkan dan disampaikan kepada seluruh OPD.	Monitoring kepatuhan terhadap jadwal belum optimal.	Mengirimkan surat pengingat sebelum batas waktu, melakukan monitoring berkala, dan menyampaikan daftar OPD yang terlambat kepada Sekretaris Daerah/Bupati.	Inspektur, Inspektur Pembantu	Selanjutnya
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APUP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APUP	Data tindak lanjut antara OPD, Inspektorat, dan BPK RI tidak sinkron	ROO 26.35.04.53	Asip tindak lanjut disimpan dalam bentuk fisik dan elektronik sesuai ketentuan kearsipan.	Pengelolaan arsip digital belum terintegrasi dan pencadangan (backup) belum dilakukan secara konsisten.	Mengembangkan sistem arsip elektronik, melakukan backup berkala, dan menetapkan SOP pengelolaan arsip tindak lanjut.	Sekretaris, Inspektur, Pengelola Arsip, Admin Aplikasi	Triwulan IV 2026
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APUP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APUP	Penyelesaian rekomendasi yang berkaitan dengan pihak ketiga mengalami hambatan	ROO 26.35.04.58	Tersedia format administrasi monitoring dan daftar penkasa dokumen.	Pengarsipan dokumen belum seragam dan belum seluruhnya terdigitalisasi.	Menyusun SOP administrasi monitoring, menerapkan arsip digital, dan melakukan pemeriksaan administrasi secara berkala.	Sekretaris, Inspektur, Kasubag Umum	Triwulan III 2026

No	Risiko Prioritas					Kode Risiko	Urutan Pengendalian yang Sudah Ada *)	Calah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Risiko						
a	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	b Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Pergantian pejabat pengelola keuangan/kegiatan menghambat penyelesaian rekomendasi	c ROO 26.35.04.59	d Jadwal monitoring telah mempertimbangkan PKPT dan ketersediaan transportasi.	e Belum tersedia jadwal berbasis kluster wilayah sehingga sering terjadi penundaan akibat cuaca dan transportasi.	f Menyusun jadwal monitoring berdasarkan kluster pulau, menyediakan waktu cadangan (buffer time), serta memanfaatkan monitoring daring apabila memungkinkan.	g Sekretaris Inspektoral, Inspektur Pembantu	h Triwulan I 2026
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Bukti tindak lanjut yang disampaikan OPD tidak sesuai dengan rekomendasi pemeriksaan	ROO 26.35.04.49	Verifikasi bukti tindak lanjut dilakukan oleh tim monitoring berdasarkan rekomendasi BPK RI/APIP.	Belum seluruh bukti diverifikasi melalui uji petik atau konfirmasi lapangan.	Melakukan verifikasi lapangan terhadap tindak lanjut yang material, menyusun pedoman verifikasi bukti, dan meningkatkan quality review.	Ketua Tim Monitoring, Pengendali Teknis	Selap, penugasan
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Status penyelesaian tindak lanjut tidak menggambarkan kondisi sebenarnya	ROO 26.35.04.52	Status tindak lanjut diverifikasi melalui telaah dokumen dan koordinasi dengan OPD.	Verifikasi lapangan belum dilakukan pada tindak lanjut yang berisiko tinggi.	Melakukan uji petik lapangan terhadap tindak lanjut prioritas dan meningkatkan validasi data sebelum perubahan status tindak lanjut.	Ketua Tim Monitoring	Selap, triwulan
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Perencanaan monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan belum berbasis prioritas risiko	ROO 26.35.04.46	Monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan dilakukan melalui surat, aplikasi tindak lanjut, rapat koordinasi dan pemantauan laporan kepada OPD.	Monitoring belum berbasis risiko, dashboard monitoring belum tersedia, tindak lanjut OPD masih rendah, belum ada prioritas berdasarkan tingkat risiko.	Menyusun metode monitoring berbasis risiko, membuat dashboard tindak lanjut, menetapkan OPD prioritas, melaksanakan monitoring triwulan dan evaluasi berkala.	Inspektur Pembantu, Auditor/P2UPD, Sekretaris	Triwulan III 2026
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Analisis penyebab belum selesai/rekomendasi belum dilakukan secara mendalam	ROO 26.35.04.54	Dilaksanakan rapat pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan, pemantauan klarifikasi kepada OPD, koordinasi dengan APIP dan penyampaian surat percepatan tindak lanjut.	Belum terdapat mekanisme analisis akar penyebab (root cause analysis) yang baku, dokumentasi hasil analisis belum seragam, kapasitas SDM dalam analisis penyebab masih terbatas.	Menyusun pedoman analisis akar penyebab rekomendasi, memberikan bimbingan teknis kepada auditor, menerapkan format baku root cause analysis pada setiap monitoring dan evaluasi.	Inspektur Pembantu, Koordinator Pengawasan, Auditor	Triwulan III 2026
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Laporan monitoring dan evaluasi tindak lanjut terlambat disampaikan	ROO 26.35.04.55	Monitoring pelaporan dilakukan melalui surat, grup koordinasi, rapat evaluasi dan pemantauan berkala terhadap penyampaian laporan oleh auditor dan OPD.	Belum terdapat batas waktu (timeline) yang diantarkan secara elektronik, belum tersedia dashboard monitoring, mekanisme pengingat (reminder) belum berjalan optimal.	Menyusun SOP penyampaian laporan, menetapkan target waktu setiap tahapan, membangun dashboard monitoring tindak lanjut serta menerapkan sistem reminder berkala kepada auditor dan OPD.	Sekretaris Inspektoral, Inspektur Pembantu, Auditor	Triwulan IV 2026

No	Risiko Prioritas					Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Risiko						
a	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APSP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APSP	Laporan tindak lanjut belum memberikan informasi yang memadai untuk pengambilan keputusan	ROO 26.35.04.55	d Jadwal penyampaian laporan telah ditetapkan dan dilakukan monitoring oleh Inspektur Pembantu.	e Monitoring terhadap batas waktu penyampaian laporan belum optimal.	f Menyusun jadwal pelaporan yang rinci, memberikan pengingat kepada OPD, dan melakukan monitoring berkala atas penyampaian laporan.	g Inspektur Pembantu, Ketua Tim Monitoring	h Setiap triwulan
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		Terlaksananya penyelenggaraan Pengawasan dengan tujuan tertentu	Pemeriksaan tidak selesai sesuai jadwal	ROO 26.35.04.63	Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) telah disusun, Surat Tugas diberikan, dan dilakukan monitoring pelaksanaan pengawasan oleh Inspektur Pembantu.	Penjadwalan belum mempertimbangkan perubahan kondisi di lapangan, keterbatasan jumlah auditor menyebabkan penyelesaian jadwal.	Menyusun jadwal pengawasan berbasis prioritas risiko, melakukan monitoring mingguan terhadap progres pemeriksaan, serta mengoptimalkan penugasan auditor.	Inspektur, Inspektur Pembantu, Koordinator Tim Pengawasan	Triwulan IV 2026
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		Terlaksananya penyelenggaraan Pengawasan dengan tujuan tertentu	Dokumen pendukung tidak diberikan lengkap	ROO 26.35.04.64	Tim pengawasan telah menyampaikan permintaan dokumen kepada objek pengawasan melalui surat resmi dan koordinasi awal.	Belum ada daftar periksa (checklist) dokumen yang baku, objek pengawasan sering terlambat atau belum lengkap menyampaikan dokumen.	Menyusun checklist dokumen pendukung, menetapkan batas waktu penyampaian dokumen, serta melakukan monitoring pemenuhan dokumen sebelum pemeriksaan dimulai.	Ketua Tim Pengawasan, Auditor	Triwulan III 2026
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		Terlaksananya penyelenggaraan Pengawasan dengan tujuan tertentu	Penentuan objek pemeriksaan tidak berbasis risiko	ROO 26.35.04.61	Penetapan objek PDIT mengacu pada usulan pimpinan, pengaduan masyarakat, hasil analisis, dan PKPT.	Analisis risiko belum terdokumentasi secara lengkap sebagai dasar penentuan objek pemeriksaan.	Menyusun metode penilaian risiko (risk scoring), memperkuat analisis data, dan melakukan pembahasan penetapan objek bersama Tim Perencanaan Pengawasan.	Inspektur, Irbas Investigasi/Irbas Teknis	Sebelum penelaan PKPT/penugasan
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		Terlaksananya penyelenggaraan Pengawasan dengan tujuan tertentu	Tim pengawasan tidak memiliki kompetensi sesuai objek pemeriksaan	ROO 26.35.04.62	Penugasan auditor disesuaikan dengan kompetensi dan pengalaman yang dimiliki serta dilakukan pembekalan sebelum pemeriksaan.	Jumlah auditor dengan kompetensi khusus (investigatif, konafuksi, TI, pengadaan barang/jasa) masih terbatas.	Menyenggarakan diklat dan sertifikasi, menyusun matriks kompetensi auditor, serta melibatkan auditor yang memiliki keahlian sesuai objek pemeriksaan.	Inspektur, Sekretaris, Inspektoral, Kasubag Umum dan Kepegawaian	Triwulan IV 2026
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		Terlaksananya penyelenggaraan Pengawasan dengan tujuan tertentu	LHP terlambat diberikan	ROO 26.35.04.65	LHP disusun berdasarkan hasil pemeriksaan, dilakukan revaluasi berjenjang oleh Pengendali Teknis dan Pengendali Mutu sebelum diterbitkan.	Proses revaluasi memerlukan waktu lama, penyampaian data tambahan dari tim sering terlambat, belum ada target waktu penyelesaian setiap tahapan.	Menetapkan standar waktu penyusunan LHP, menerapkan monitoring penyelesaian LHP, dan melakukan evaluasi berkala terhadap ketepatan waktu pemberian LHP.	Inspektur Pembantu, Pengendali Teknis, Ketua Tim	Triwulan IV 2026

No	Risiko Prioritas					Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Resiko						
a	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Pengawasan dengan tujuan tertentu	Jumlah Laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	Auditor yang ditugaskan belum memiliki kompetensi sesuai objek pemeriksaan	ROO 26.35.04.68	Penugasan auditor mempertimbangkan jenjang jabatan, dan pengalaman, dan kompetensi yang dimiliki. Auditor juga telah mengikuti diklat dan bimbingan teknis sesuai kebutuhan.	Belum seluruh auditor memiliki kompetensi spesifik sesuai objek pemeriksaan, pemetaan kompetensi belum diperbarui secara berkala.	Menyusun matriks kompetensi auditor, mengikutsertakan auditor pada diklat teknis sesuai objek pemeriksaan, dan menerapkan penugasan berbasis kompetensi.	Inspektur, Sekretaris Inspektorat, Irtan	Triwulan IV 2026
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Pengawasan dengan tujuan tertentu	Jumlah Laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	Dokumen dan data dan OPD tidak lengkap atau terlambat diberikan	ROO 26.35.04.69	Surat permintaan dokumen disampaikan sebelum pemeriksaan dan dilakukan koordinasi awal dengan OPD.	Belum tersedia checklist dokumen yang baku, belum ada sanksi atau eskalasi atas keterlambatan penyampaian dokumen.	Menyusun checklist dokumen pemeriksaan, menetapkan batas waktu penyerahan dokumen, serta melakukan monitoring pemenuhan dokumen sebelum pemeriksaan dimulai.	Ketua Tim, Auditor, OPD Objek Pemeriksaan	Triwulan II 2026
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Pengawasan dengan tujuan tertentu	Jumlah Laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	Pelaksanaan pemeriksaan tidak sesuai jadwal akibat kondisi geografis Kepulauan Mentawai	ROO 26.35.04.70	Jadwal pemeriksaan disusun dalam PKPT dan disesuaikan dengan agenda OPD serta kondisi lapangan.	Belum tersedia rencana kontinjensi terhadap cuaca ekstrem dan kendala transportasi antarpulau di Kepulauan Mentawai.	Menyusun jadwal cadangan (buffer time) melakukan koordinasi dengan pihak transportasi, serta memanfaatkan teknologi daring untuk koordinasi awal apabila memungkinkan.	Inspektur Pembantu, Ketua Tim	Triwulan III 2026
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Pengawasan dengan tujuan tertentu	Jumlah Laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	Terjadi intervensi terhadap independensi auditor	ROO 26.35.04.71	Auditor menandatangani Pakta Integritas dan Surat Pernyataan Independensi sebelum penugasan serta sebelum penugasan serta berjenjang oleh Pengendali Teknis dan Pengendali Mutu.	Monitoring kepatuhan independensi belum terdokumentasi secara sistematis, potensi benturan kepentingan belum dipetakan secara berkala.	Melakukan evaluasi independensi sebelum dan selama penugasan, menyusun daftar potensi benturan kepentingan, serta melakukan rotasi auditor apabila diperlukan.	Inspektur, Pengendali Teknis, Pengendali Mutu	Triwulan IV 2026
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Pengawasan dengan tujuan tertentu	Jumlah Laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	OPD tidak menindaklanjuti rekomendasi sesuai batas waktu	ROO 26.35.04.74	Telah ditetapkan batas waktu penyelesaian tindak lanjut rekomendasi yang dilakukan pemantauan secara berkala.	Komitmen OPD masih rendah, belum ada sistem peringatan dini (early warning) atas rekomendasi yang mendekati jatuh tempo.	Membangun dashboard monitoring tindak lanjut, memberikan notifikasi sebelum jatuh tempo, serta melakukan rapat evaluasi bersama OPD secara berkala.	Inspektur, Irtan, Kepala OPD	Triwulan IV 2026
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Pengawasan dengan tujuan tertentu	Jumlah Laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	Penetapan objek Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) tidak berdasarkan tingkat risiko	ROO 26.35.04.66	Penetapan objek PDTT dilakukan melalui usulan masyarakat, permintaan pimpinan, hasil koordinasi APH/APIP, dan pembahasan internal.	Belum menggunakan metode penilaian risiko yang baku sehingga prioritas objek pengawasan belum sepenuhnya berbasis risiko.	Menyusun kriteria penetapan objek PDTT berbasis manajemen risiko, menggunakan data hasil pengawasan sebelumnya dan profil risiko OPD sebagai dasar penetapan.	Inspektur, Inspektur Pembantu	Triwulan II 2026

No	Risiko Prioritas					Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Risiko						
a	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Pengawasan dengan tujuan tertentu	Jumlah Laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	Surat Tugas dan Program Kerja Pengawasan terlambat diterbitkan	c ROO 26.35.04.67	d Penyusunan PKPT dan Surat Tugas dilakukan sesuai prosedur administrasi serta mendapat persetujuan inspektur.	e Proses administrasi masih manual, koordinasi antarbagian belum optimal sehingga penerbatan Surat Tugas terlambat.	f Menyusun timeline penyusunan PKPT dan Surat Tugas, menerapkan monitoring administrasi secara berkala, serta memanfaatkan aplikasi persuratan apabila tersedia.	g Sekretaris Inspektoral, Kasubbag Administrasi Umum, Inspektur	h Triwulan I 2026
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Pengawasan dengan tujuan tertentu	Jumlah Laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) terlambat	c ROO 26.35.04.72	d Penyusunan LHP mengikuti SA/PI, dilakukan revaluasi oleh Pengendali Teknis dan Pengendali Mutu sebelum diterbitkan.	e Belum terdapat standar waktu penyelesaian setiap tahapan penyusunan LHP, proses klarifikasi sering memperpanjang waktu penyelesaian.	f Menetapkan Service Level Agreement (SLA) penyusunan LHP, melakukan monitoring penyelesaian setiap tahapan, dan memanfaatkan aplikasi administrasi pengawasan untuk memantau progres.	Kelua Tim, Pengendali Teknis, Inspektur Pembantu	Triwulan IV 2026
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Pengawasan dengan tujuan tertentu	Jumlah Laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	Rekomendasi hasil pengawasan kurang tepat atau tidak dapat ditindaklanjuti	c ROO 26.35.04.73	d LHP telah disampaikan kepada OPD dan dilakukan monitoring tindak lanjut secara berkala melalui rapat koordinasi, surat pantauan, dan aplikasi tindak lanjut (apabila tersedia).	e Monitoring tindak lanjut belum optimal, belum ada mekanisme eskalasi terhadap rekomendasi yang belum ditindaklanjuti.	f Menyusun rencana aksi tindak lanjut, melakukan monitoring triwulan, menyampaikan laporan kepada Kepala Daerah, serta melakukan pendampingan kepada OPD yang terkait tindak lanjutnya rendah.	Inspektur, Iban, Auditor	Triwulan IV 2026
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Pengawasan dengan tujuan tertentu	Jumlah Laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu tidak memberikan perbaikan tata kelola	c ROO 26.35.04.75	d Pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai SA/PI dengan revaluasi berjenjang oleh Pengendali Teknis dan Pengendali Mutu.	e Evaluasi efektivitas rekomendasi pasca tindak lanjut belum dilakukan secara sistematis.	f Melakukan evaluasi efektivitas hasil pengawasan, menyusun rekomendasi berbasis akar penyebab (root cause analysis), dan melakukan monitoring perbaikan tata kelola	Inspektur Pembantu, Pengendali Teknis	Triwulan IV 2026
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		Meningkatnya kepatuhan dan implementasi perangkat daerah dalam menjalankan birokrasi	Penyusunan kebijakan terlambat	c ROO 26.35.04.77	d Jadwal penyusunan kebijakan telah ditetapkan dalam rencana kerja dan dibahas melalui rapat internal.	e Timeline belum dipantau secara berkala sehingga terjadi keterlambatan penyusunan.	f Menyusun jadwal mci (milestone), melakukan monitoring mingguan, dan mempercepat proses pembahasan draft kebijakan.	Sekretaris Inspektoral, Tim Penyusun	Triwulan II 2026

No	Risiko Prioritas					Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Risiko						
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		Meningkatnya kepatuhan dan implementasi perangkat daerah dalam menjalankan brokrasi	Kebijakan tidak diterapkan OPD	ROO 26.35.04.78	Kebijakan telah disosialisasikan melalui surat edaran, rapat koordinasi, dan bimbingan teknis kepada OPD	Monitoring implementasi kebijakan di OPD belum optimal dan belum terdapat indikator kepatuhan yang terukur.	Melakukan monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan, menyusun indikator kepatuhan OPD, serta memberikan pendampingan kepada OPD yang belum menerapkan kebijakan.	Inspektur, Irbn, Sekretaris Inspektorat	Triwulan III 2026
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Kebutuhan kebijakan teknis tidak teridentifikasi secara lengkap	ROO 26.35.04.79	LHP telah disampaikan kepada OPD dan dilakukan monitoring tindak lanjut secara berkala melalui rapat koordinasi, surat pemantauan, dan aplikasi tindak lanjut (apabila tersedia).	Monitoring tindak lanjut belum optimal, belum ada mekanisme eskalasi terhadap rekomendasi yang belum ditindaklanjuti.	Menyusun rencana aksi tindak lanjut, melakukan monitoring triwulanan, menyampaikan laporan kepada Kepala Daerah, serta melakukan pendampingan kepada OPD yang tingkat tindak lanjutnya rendah.	Inspektur, Irbn, Auditor	Triwulan IV 2026
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		Meningkatnya kepatuhan dan implementasi perangkat daerah dalam menjalankan brokrasi	Kebijakan teknis tidak sesuai regulasi terbaru	ROO 26.35.04.76	Penyusunan kebijakan teknis mengacu pada peraturan penunjang-undangan, konsultasi dengan BPKP/Kemendagri, dan reviu internal.	Mekanisme pemantauan perubahan regulasi belum terdokumentasi secara sistematis.	Melakukan reviu regulasi setiap semester, menunjuk PIC pemantauan regulasi, dan memperbarui kebijakan apabila terdapat perubahan regulasi.	Inspektur, Sekretaris Inspektorat	Triwulan II 2026
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Penyusunan kebijakan teknis melebihi jadwal yang telah ditetapkan	ROO 26.35.04.82	Penyusunan kebijakan teknis mengacu pada peraturan penunjang-undangan, konsultasi dengan BPKP/Kemendagri, dan reviu internal.	Mekanisme pemantauan perubahan regulasi belum terdokumentasi secara sistematis.	Melakukan reviu regulasi setiap semester, menunjuk PIC pemantauan regulasi, dan memperbarui kebijakan apabila terdapat perubahan regulasi.	Inspektur, Sekretaris Inspektorat	Triwulan II 2026
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Kebijakan teknis terlambat ditetapkan oleh pejabat berwenang	ROO 26.35.04.84	Kebijakan telah disosialisasikan melalui surat edaran, rapat koordinasi, dan bimbingan teknis kepada OPD.	Monitoring implementasi kebijakan di OPD belum optimal dan belum terdapat indikator kepatuhan yang terukur.	Melakukan monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan, menyusun indikator kepatuhan OPD, serta memberikan pendampingan kepada OPD yang belum menerapkan kebijakan.	Inspektur, Irbn, Sekretaris Inspektorat	Triwulan III 2026

No	Risiko Prioritas					Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Risiko						
a	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Kebijakan teknis tidak mampu meningkatkan kualitas fasilitasi pengawasan	c ROO 26.35.04.88	d Kebijakan teknis disusun berdasarkan hasil pengkajian, evaluasi, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.	e Belum dilakukan pengukuran dampak kebijakan terhadap peningkatan kualitas pengawasan.	f Menyusun indikator kinerja kebijakan, melakukan monitoring dampak implementasi kebijakan, dan menyempurnakan kebijakan berdasarkan hasil evaluasi.	g Inspektur, Irbani	h Triwulan IV 2026
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Data dan informasi sebagai dasar penyusunan kebijakan tidak lengkap	ROO 26.35.04.80	Telah ditetapkan batas waktu penyelesaian tindak lanjut rekomendasi dan dilakukan pemantauan secara berkala.	Komitmen OPD masih rendah, belum ada sistem peringatan dini (early warning) atas rekomendasi yang mendekati jatuh tempo.	Membangun dashboard monitoring tindak lanjut, memberikan notifikasi sebelum jatuh tempo, serta melakukan rapat evaluasi bersama OPD secara berkala.	Inspektur, Irbani, Kepala OPD	Triwulan IV 2026
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Draft kebijakan teknis tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru	ROO 26.35.04.81	Pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai SAPI dengan revisi berjenjang oleh Pengendali Teknis dan Pengendali Mutu.	Evaluasi efektivitas rekomendasi pasca tindak lanjut belum dilakukan secara sistematis.	Melakukan evaluasi efektivitas hasil pengkajian, menyusun rekomendasi berbasis akar penyebab (root cause analysis), dan melakukan monitoring perbaikan tata kelola.	Inspektur, Pembantu, Pengendali Teknis	Triwulan IV 2026
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Terjadi perbedaan pendapat antar unit terhadap substansi kebijakan	ROO 26.35.04.83	Jadwal penyusunan kebijakan telah ditetapkan dalam rencana kerja dan dibahas melalui rapat internal.	Timeline belum dibuat secara berkala sehingga terjadi keterlambatan penyusunan.	Menyusun jadwal rinci (milestone), melakukan monitoring mingguan, dan mempercepat proses pembahasan draft kebijakan.	Sekretaris, Inspektoral, Tim Penyusun	Triwulan II 2026
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Kebijakan teknis belum dipahami oleh perangkat daerah	ROO 26.35.04.85	Kebijakan teknis telah disosialisasikan melalui surat edaran, rapat koordinasi, dan bimbingan teknis kepada OPD.	Sosialisasi belum menjangkau seluruh OPD dan belum dilakukan pengukuran tingkat pemahaman.	Menyelenggarakan sosialisasi dan bimbingan teknis secara berkala, menyusun pedoman pelaksanaan, serta melakukan evaluasi pemahaman OPD melalui survei atau kuesioner.	Inspektur, Sekretaris, Inspektoral, Irbani	Triwulan III 2026
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	OPD tidak menerapkan kebijakan teknis yang telah ditetapkan	ROO 26.35.04.86	Telah diterbitkan kebijakan teknis serta dilakukan pembinaan kepada OPD melalui forum koordinasi dan konsultasi.	Monitoring implementasi kebijakan belum dilakukan secara rutin dan belum ada indikator kepatuhan OPD.	Menyusun indikator kepatuhan implementasi kebijakan, melakukan monitoring dan evaluasi setiap semester, serta memberikan pendampingan kepada OPD yang belum menerapkan kebijakan.	Inspektur, Irbani, Kepala OPD	Triwulan IV 2026

No	Risiko Prioritas					Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Resiko						
a	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Tidak dilakukan evaluasi terhadap efektivitas kebijakan teknis	ROO 26.35.04.87	Evaluasi kebijakan dilakukan melalui rapat koordinasi dan pembahasan hasil pengawasan.	Belum terdapat metode evaluasi efektivitas kebijakan yang baku dan terdokumentasi.	Menyusun pedoman evaluasi kebijakan, menetapkan indikator efektivitas, dan melakukan evaluasi minimal satu kali setiap tahun.	Sekretaris Inspektorat, Tim Penyusun Kebijakan	Triwulan IV 2026
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Pendampingan dan Asistensi		Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi/ Meningkatnya Kinerja OPD yang telah dilakukan Pendampingan	Tidak dilakukan monitoring tindak lanjut	ROO 26.35.04.92	Monitoring tindak lanjut dilakukan melalui rapat koordinasi, komunikasi dengan OPD, dan laporan hasil pendampingan.	Monitoring belum memiliki jadwal baku dan indikator keberhasilan yang terukur.	Menyusun SOP monitoring, menetapkan indikator keberhasilan, serta membuat dashboard monitoring tindak lanjut.	Inspektor Pembantu, Auditor	Triwulan IV 2026
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Pendampingan dan Asistensi		Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi/ Meningkatnya Kinerja OPD yang telah dilakukan Pendampingan	OPD tidak mengajukan permohonan pendampingan	ROO 26.35.04.89	Informasi mengenai layanan pendampingan telah disampaikan melalui surat, rapat koordinasi, dan media komunikasi internal.	Belum seluruh OPD memahami mekanisme pengajuan pendampingan dan belum tersedia SOP layanan yang mudah diakses.	Menyusun SOP layanan pendampingan, membuat alur pengajuan yang sederhana, serta melakukan sosialisasi kepada seluruh OPD.	Inspektor, Sekretaris Inspektorat, Irbani	Triwulan II 2026
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Pendampingan dan Asistensi		Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi/ Meningkatnya Kinerja OPD yang telah dilakukan Pendampingan	Jadwal pendampingan sering berubah	ROO 26.35.04.90	Jadwal pendampingan disusun berdasarkan usulan OPD dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).	Belum terdapat mekanisme penjadwalan berbasis prioritas risiko sehingga perubahan jadwal sering terjadi.	Menyusun jadwal pendampingan berbasis tingkat risiko dan urgensi, menetapkan jadwal cadangan (buffer schedule), serta melakukan koordinasi berkala dengan OPD.	Inspektor Pembantu, Ketua Tim Pendampingan	Triwulan III 2026
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Pendampingan dan Asistensi		Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi/ Meningkatnya Kinerja OPD yang telah dilakukan Pendampingan	Rekomendasi pendampingan tidak dilaksanakan	ROO 26.35.04.91	Pendampingan dilaksanakan berdasarkan surat tugas dan diakhiri dengan penyampaian rekomendasi kepada OPD.	Belum terdapat mekanisme pemantauan implementasi rekomendasi secara berkala.	Menyusun rencana aksi tindak lanjut, melakukan monitoring setiap triwulan, dan meminta laporan perkembangan dari OPD.	Inspektor Pembantu, Ketua Tim Pendampingan, Auditor	Triwulan IV 2026
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Pendampingan dan Asistensi		Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi/ Meningkatnya Kinerja OPD yang telah dilakukan Pendampingan	Kinerja OPD tidak meningkat setelah pendampingan	ROO 26.35.04.93	Dilakukan evaluasi hasil pendampingan melalui pembahasan internal dan umpan balik dari OPD.	Belum dilakukan evaluasi terhadap dampak kinerja OPD secara kuantitatif.	Menyusun indikator kinerja pasca pendampingan, melakukan evaluasi berkala, dan memberikan pendampingan lanjutan kepada OPD yang belum mencapai target.	Inspektor, Inspektor Pembantu	Triwulan IV 2026

No	Risiko Prioritas					Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Resiko						
a	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Cuaca dan transportasi laut menghambat pendampingan	ROO 26.35.04.97	Jadwal pendampingan telah disusun dalam PKPT serta dilakukan koordinasi dengan OPD sebelum pelaksanaan.	Belum tersedia jadwal alternatif apabila terjadi cuaca buruk atau gangguan transportasi laut.	Menyusun <i>buffer schedule</i> , memantau prakiraan cuaca, melakukan koordinasi dengan penyedia transportasi dan memanfaatkan pendampingan daring apabila memungkinkan	Inspektur Pembantu, Ketua Tim Pendampingan	Triwulan IV 2026
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Rekomendasi hasil pendampingan tidak ditindaklanjuti	ROO 26.35.04.98	Hasil pendampingan disampaikan melalui berita acara, laporan hasil pendampingan, dan rapat evaluasi dengan OPD.	Belum ada mekanisme pemantauan implementasi rekomendasi secara berkala.	Menyusun rencana aksi tindak lanjut, melakukan monitoring triwulan, dan melaporkan progres tindak lanjut kepada Inspektur serta Kepala Daerah.	Inspektur Pembantu, Auditor	Triwulan IV 2026
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Penetapan OPD sasaran pendampingan belum berdasarkan prioritas risiko	ROO 26.35.04.94	Penetapan OPD yang akan didampingi mengacu pada PKPT, usulan OPD, dan arahan pimpinan.	Belum menggunakan metode penilaian risiko secara formal sehingga prioritas pendampingan belum sepenuhnya berbasis risiko.	Menyusun kriteria prioritas pendampingan berbasis profil risiko, tingkat maturitas SPIP, SAKIP, dan hasil pengawasan sebelumnya.	Inspektur, Sekretaris, Inspektoral	Triwulan II 2026
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jadwal pendampingan berubah	ROO 26.35.04.95	Jadwal pendampingan disusun pada awal tahun dan dikordinasikan dengan OPD.	Belum tersedia jadwal cadangan apabila terjadi perubahan kegiatan atau kondisi lapangan.	Menyusun jadwal alternatif (<i>buffer schedule</i>), melakukan koordinasi rutin dengan OPD, dan mengevaluasi perubahan jadwal setiap bulan.	Inspektur Pembantu, Ketua Tim Pendampingan	Triwulan III 2026
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen pendukung tidak lengkap	ROO 26.35.04.96	Sebelum pendampingan dilakukan penyampaian daftar dokumen yang harus disiapkan oleh OPD.	Checklist dokumen belum seragam dan belum dilakukan verifikasi kelengkapan sebelum pendampingan dimulai.	Menyusun checklist standar dokumen pendampingan, melakukan verifikasi awal dan menetapkan batas waktu penyampaian dokumen.	Ketua Tim Pendampingan, Auditor, OPD Pendampingan	Triwulan II 2026
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Dokumen Reformasi Birokrasi OPD belum lengkap	ROO 26.35.04.99	OPD telah diberikan daftar kebutuhan dokumen Reformasi Birokrasi sebelum proses verifikasi.	Checklist dokumen belum seragam dan verifikasi awal kelengkapan dokumen belum dilakukan secara menyeluruh.	Menyusun checklist standar dokumen Reformasi Birokrasi, melakukan verifikasi awal sebelum penilaian, dan memberikan pendampingan penyusunan dokumen kepada OPD.	Ketua Tim RB, Auditor, OPD	Triwulan III 2026

No	Risiko Prioritas					Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Risiko						
a	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Pendampingan dan Asistensi	b	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	OPD tidak menindaklanjuti rekomendasi RB	c	d	e	f	g	h
			Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi			ROO 26.35.04.103	Program pencegahan korupsi disusun berdasarkan pedoman MCP KPK, hasil evaluasi tahun sebelumnya, dan koordinasi dengan perangkat daerah.	Pemetaan risiko korupsi OPD belum diperbarui secara berkala sehingga prioritas program belum sepenuhnya berbasis risiko.	Melakukan pemutakhiran peta risiko korupsi, menyusun prioritas program berdasarkan hasil penilaian risiko, serta melakukan koordinasi dengan seluruh OPD.	Inspektur, Irbah, Koordinator MCP	Triwulan I 2026
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Bukti dukung penilaian RB tidak valid	ROO 26.35.04.100	Penilaian Reformasi Birokrasi mengacu pada pedoman Kementerian PANRB dan dilakukan revaluasi internal.	Validasi bukti dukung belum optimal sehingga masih terdapat bukti yang tidak memenuhi ketentuan.	Melaksanakan verifikasi lapangan, validasi silang terhadap bukti dukung, dan menyusun pedoman pemeriksaan bukti dukung Reformasi Birokrasi.	Tim Penilai RB, Inspektur Pembantu	Triwulan II 2026
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Perubahan regulasi Reformasi Birokrasi	ROO 26.35.04.101	Tim melakukan pemantauan terhadap perubahan regulasi melalui surat edaran, portal Kementerian PANRB, dan rapat koordinasi.	Belum terdapat mekanisme pembaruan pedoman internal secara cepat ketika regulasi berubah.	Menunjuk PIC pemantauan regulasi, melakukan revaluasi pedoman setiap ada perubahan regulasi, dan mensosialisasikan perubahan kepada seluruh OPD.	Sekretaris Inspektorat, Tim RB	Triwulan II 2026
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Verifikasi RB terlambat	ROO 26.35.04.102	Jadwal verifikasi telah ditetapkan pada awal tahun dan dikordinasikan dengan seluruh OPD.	Belum ada sistem monitoring progres verifikasi dan belum tersedia jadwal cadangan apabila terjadi perubahan agenda.	Menyusun timeline verifikasi yang rinci, melakukan monitoring mingguan, menetapkan jadwal cadangan, serta mengoptimalkan koordinasi dengan OPD.	Ketua Tim RB, Inspektur Pembantu	Triwulan III 2026
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Pendampingan dan Asistensi	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Program pencegahan korupsi belum sesuai area risiko	ROO 26.35.04.104	Inspektorat telah menyampaikan surat permintaan data, melakukan sosialisasi MCP, dan membuka konsultasi kepada OPD.	Belum terdapat sistem pengingat otomatis dan mekanisme eskalasi bagi OPD yang terlambat menyampaikan data.	Menyusun jadwal penyampaian data, membuat dashboard monitoring, memberikan notifikasi berkala, dan melaporkan keterlambatan kepada Sekretaris Daerah.	Koordinator MCP, Admin MCP, Kepala OPD	Triwulan II 2026
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Pendampingan dan Asistensi	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Monitoring tidak sesuai jadwal	ROO 26.35.04.106	Hasil monitoring disampaikan kepada OPD dalam bentuk laporan dan berita acara serta dibahas dalam rapat evaluasi.	Belum ada mekanisme pemantauan pelaksanaan hasil monitoring sampai selesai.	Menyusun rencana aksi tindak lanjut, melakukan monitoring triwulanan, dan mengevaluasi penyelesaian rekomendasi secara berkala.	Inspektur, Irbah, Tim MCP	Triwulan IV 2026

No	Risiko Prioritas					Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Resiko						
a	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Pendampingan dan Asistensi	b	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Hasil monitoring tidak dilindarkan	c	d	e	f	g	h
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Pendampingan dan Asistensi	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Hasil monitoring tidak dilindarkan	ROO 26.35.04.107	Pelaporan MCP dilakukan melalui aplikasi MCP KPK dan divifikasi sebelum dikirim.	Validasi data dan OPD belum optimal sehingga sering mendekati batas waktu.	Menyusun SOP pelaporan MCP, menetapkan batas waktu internal lebih awal, melakukan verifikasi berjenjang, dan membentuk tim validasi data.	Admin MCP, Sekretaris Inspektoriat, Koordinator MCP	Triwulan IV 2026
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Pendampingan dan Asistensi	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	OPD terlambat menyampaikan data MCP	ROO 26.35.04.105	Monitoring dilakukan sesuai rencana kerja melalui rapat koordinasi dan kunjungan ke OPD.	Monitoring belum mempertimbangkan perubahan kondisi lapangan dan belum terdapat jadwal cadangan.	Menyusun kalender monitoring tahunan, menyediakan buffer schedule, dan melakukan evaluasi realisasi monitoring setiap bulan.	Inspektur Pembantu, Tim MCP	Triwulan III 2026
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Pendampingan dan Asistensi	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Pelaporan MCP terlambat	ROO 26.35.04.108	Rekomendasi hasil penilaian Reformasi Birokrasi telah disampaikan kepada OPD melalui laporan hasil verifikasi dan rapat pembahasan.	Monitoring tindak lanjut rekomendasi RB belum dilakukan secara berkala dan belum terdapat indikator penyelesaiannya.	Menyusun rencana aksi tindak lanjut RB, melakukan monitoring setiap triwulan, memberikan pendampingan kepada OPD, dan melaporkan progres kepada Kepala Daerah.	Inspektur, Tim Reformasi Birokrasi, Kepala OPD	Triwulan IV 2026
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	OPD belum memahami indikator penegakan integritas	ROO 26.35.04.109	Sosialisasi SPI, bimbingan teknis, surat edaran, pendampingan kepada OPD	Sosialisasi belum menjangkau seluruh OPD, belum tersedia pedoman teknis yang mudah dipahami	Menyusun pedoman teknis melaksanakan coaching clinic, monitoring pemahaman OPD secara berkala	Irbat terkait, Auditor/P2UPD	Triwulan II 2026
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Bukti dukung verifikasi integritas tidak lengkap	ROO 26.35.04.110	Penyampaian daftar checklist dokumen, pendampingan penyusunan bukti dukung	Checklist belum digunakan secara konsisten, belum ada evaluasi keengkapan sebelum verifikasi	Menyusun checklist baku, melakukan review pendahuluan dan pendampingan sebelum verifikasi	Irbat terkait, Tim Penegakan Integritas	Triwulan II 2026
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Partisipasi responden Survei Penilaian Integritas rendah	ROO 26.35.04.111	Sosialisasi pelaksanaan SPI, koordinasi dengan admin OPD	Monitoring partisipasi belum real time, komitmen pimpinan OPD belum optimal	Menetapkan target responden tiap OPD, monitoring mingguan, koordinasi intensif dengan pimpinan OPD	Inspektur, Irbat terkait, Admin SPI	Selama pelaksanaan SPI 2026
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Rencana aksi integritas tidak dilaksanakan	ROO 26.35.04.112	Penyusunan rencana aksi dan monitoring berkala	Belum ada evaluasi capaian dan pelaporan berkala	Monitoring triwulan, evaluasi capaian, pemberian rekomendasi kepada OPD yang belum melaksanakan	Irbat terkait	Triwulan III 2026
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Target peningkatan integritas tidak tercapai	ROO 26.35.04.113	Monitoring indikator integritas, rapat evaluasi, pendampingan OPD	Analisis penyebab belum terdokumentasi, tindak lanjut belum optimal	Menyusun rencana perbaikan berbasis hasil evaluasi, meningkatkan intensitas pendampingan, melaksanakan monitoring berkala	Inspektur, Irbat terkait	Triwulan IV 2026

No	Risiko Prioritas					Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Resiko						
a			b			c	d	e	f	g	h
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota										
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terlaksananya Administrasi keuangan perangkat daerah	Perencanaan anggaran belanja pegawai tidak sesuai kebutuhan	ROO 26.37.04.114	Penyusunan RKA berdasarkan analisis kebutuhan, evaluasi TAPD, review APJP	Data kebutuhan pegawai belum diperbarui secara berkala	Melakukan pemutakhiran data pegawai dan evaluasi kebutuhan anggaran sebelum penyusunan RKA	Kasubbag Keuangan, PPK-SKPD	Triwulan I 2026
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terlaksananya Administrasi keuangan perangkat daerah	Penatausahaan keuangan tidak sesuai ketentuan	ROO 26.37.04.115	SOP penatausahaan keuangan, penggunaan SIPD, verifikasi oleh PPK dan Bendahara	Kepatuhan terhadap SOP belum konsisten, pemahaman regulasi masih bervariasi	Melaksanakan bimbingan teknis, monitoring kepatuhan SOP, dan pemertiksaan internal berkala	PPK-SKPD, Bendahara Pengeluaran	Triwulan II 2026
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terlaksananya Administrasi keuangan perangkat daerah	Keterlambatan proses pencairan anggaran	ROO 26.37.04.116	Jadwal penyusunan dokumen pembayaran, verifikasi berjenjang, monitoring realisasi anggaran	Kelengkapan dokumen sering terlambat dan koordinasi antar pihak belum optimal	Menyusun timeline pencairan, monitoring mingguan, dan percepatan penyelesaian dokumen	PPK-SKPD, Bendahara Pengeluaran	Triwulan IV 2026
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terlaksananya Administrasi keuangan perangkat daerah	Laporan keuangan tidak sesuai SAP	ROO 26.37.04.118	Penyusunan laporan berdasarkan SAP, review internal, rekonsiliasi sebelum pelaporan	Kompetensi penyusun laporan belum merata	Peningkatan kapasitas SDM, review berjenjang, dan checklist penyusunan laporan	Kasubbag Keuangan, PPK-SKPD	Triwulan IV 2026
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terlaksananya Administrasi keuangan perangkat daerah	Rekonsiliasi keuangan tidak tepat waktu	ROO 26.37.04.117	Rekonsiliasi bulanan dengan BKD/BPKAD, penggunaan aplikasi SIPD	Jadwal rekonsiliasi belum dipatuhi secara konsisten	Menetapkan jadwal tetap rekonsiliasi, monitoring penyelesaian, dan evaluasi bulanan	Kasubbag Keuangan	Selap Bulan Tahun 2026
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Data pegawai sebagai dasar pembayaran gaji tidak mutakhir	ROO 26.38.04.119	Sinkronisasi data dengan BKPSDM, verifikasi daftar gaji setiap bulan	Perubahan data pegawai belum segera dilaporkan	Melakukan pemutakhiran data pegawai secara berkala dan rekonsiliasi dengan BKPSDM sebelum pembayaran gaji	Kasubbag Keuangan, Pengelola Gaji	Selap Bulan Tahun 2026
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dokumen pembayaran gaji tidak lengkap	ROO 26.38.04.120	Tersedia checklist persyaratan pembayaran gaji, verifikasi oleh Pengelola Gaji, Bendahara Pengeluaran, dan PPK	Checklist belum digunakan secara konsisten, masih terdapat dokumen yang disampaikan tidak lengkap	Menerapkan checklist wajib, melakukan verifikasi berlapas sebelum pengajuan pembayaran, dan monitoring kelengkapan dokumen	Kasubbag Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Pengelola Gaji	Selap bulan Tahun 2026
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan terlambat	ROO 26.37.04.121	Jadwal penyusunan daftar gaji telah ditetapkan, koordinasi dengan BKAD/BPKAD	Penyampaian data perubahan pegawai sering terlambat, koordinasi belum optimal	Menyusun timeline proses pembayaran, memperkuat koordinasi dengan BKPSDM dan BKAD/BPKAD, serta monitoring penyelesaian setiap bulan	Kasubbag Keuangan, Bendahara Pengeluaran	Selap bulan Tahun 2026

No	Risiko Prioritas					Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Tingkat Waktu Penyelesaian
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Resiko						
a	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kesalahan perhitungan gaji dan tunjangan	ROO 26.37.04.122	Perhitungan menggunakan aplikasi penggalan, dilakukan verifikasi oleh Pengelola Gaji dan Bendahara	Verifikasi belum sepenuhnya terdokumentasi dan terdapat data belum ada uji petik berkala	Melakukan validasi data pegawai sebelum proses penggalan dan review silang hasil perhitungan	Pengelola Gaji, Bendahara Pengeluaran	Selap bulan Tahun 2026
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Rekonsiliasi pembayaran gaji tidak dilakukan secara berkala	ROO 26.37.04.123	Rekonsiliasi dengan BKAD/BPKAD dan BKPSDM dilakukan secara periodik	Jadwal rekonsiliasi belum terdokumentasi dan belum dipantau secara rutin	Menetapkan jadwal rekonsiliasi bulanan, membuat berita acara rekonsiliasi, dan melakukan evaluasi berkala	Kasubag Keuangan, Pengelola Gaji	Selap bulan Tahun 2026
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kesalahan penginputan data administrasi	ROO 26.38.04.126	SOP administrasi ASN, pemeriksaan berjenjang oleh Kasubag Umum dan Kepegawaian, penggunaan aplikasi SIMPEG	Belum seluruh data diverifikasi dua tahap	Menerapkan checklist verifikasi dan validasi sebelum data diisikan	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Triwulan II 2026
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Asip administrasi ASN tidak tertera dengan baik	ROO 26.24.04.127	Asip fisik dan digital telah tersedia, klasifikasi asip menggunakan kode	Asip digital belum lengkap dan belum dilakukan backup berkala	Penataan asip elektronik, digitalisasi dokumen, backup berkala	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Triwulan III 2026
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Administrasi pelaksanaan tugas belum sesuai ketentuan BKN	ROO 26.38.04.128	Mengacu pada peraturan BKN dan dilakukan konsultasi BKPSDM	Sosialisasi regulasi terbaru belum rutin	Sosialisasi regulasi BKN dan monitoring kepatuhan administrasi	Sekretaris Inspektori	Triwulan II 2026
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN tidak lengkap	ROO 26.38.04.124	SOP administrasi kepegawaian, penggunaan daftar persyaratan, verifikasi oleh pejabat berwenang	Asip dokumen belum tertera dengan baik dan kelengkapan dokumen belum dipantau	Menyusun checklist administrasi, melakukan digitalisasi asip, dan monitoring kelengkapan dokumen	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Triwulan II 2026
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyelesaian administrasi tugas ASN terlambat	ROO 26.38.04.125	SOP pelayanan administrasi ASN, disposisi pimpinan, monitoring surat masuk dan keluar	Belum ada standar waktu penyelesaian yang dipantau secara berkala	Menetapkan standar pelayanan (SLA), membuat register monitoring penyelesaian administrasi, dan melakukan evaluasi bulanan	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Triwulan IV 2026
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terkelaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah/ Meningkatkan kapasitas dan kompetensi APIP yang memiliki standar	Penilaian kinerja pegawai tidak dilakukan secara objektif dan tepat waktu	ROO 26.38.04.132	Penilaian kinerja mengacu pada SKP dan Peraturan BKN, dilakukan oleh atasan langsung melalui e-Kinerja	Monitoring dan evaluasi penilaian belum dilakukan secara berkala	Melaksanakan revaluasi berkala atas penilaian kinerja, sosialisasi pedoman penilaian, dan monitoring penyelesaian SKP	Sekretaris Inspektori / Kasubag Umum dan Kepegawaian	Triwulan II 2026
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terkelaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah/ Meningkatkan kapasitas dan kompetensi APIP yang memiliki standar	Jumlah APIP yang memenuhi standar kompetensi belum mencapai target	ROO 26.38.04.133	Penyusunan rencana pengembangan kompetensi dan usulan diklat setiap tahun	Keterbatasan anggaran dan kuota pelatihan	Menyusun roadmap peningkatan kompetensi APIP, mengoptimalkan pelatihan BPKP dan e-learning	Inspektur	Triwulan IV 2026

No	Risiko Prioritas					Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Calah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Resiko						
a	b					c	d	e	f	g	h
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah		Terlaksananya Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah/ Meningkatkan kapasitas dan kompetensi APIP yang memiliki standar	Perencanaan kebutuhan pegawai dan pengembangan kompetensi tidak sesuai kebutuhan organisasi	ROO 26.38.04.129	Penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Rencana Pengembangan Kompetensi	Belum sepenuhnya berdasarkan hasil analisis kebutuhan kompetensi APIP	Menyusun Training Need Analysis (TNA) dan rencana pengembangan kompetensi tahunan	Inspektur / Sekretaris	Triwulan III 2026
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah		Terlaksananya Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah/ Meningkatkan kapasitas dan kompetensi APIP yang memiliki standar	Data administrasi kepegawalan tidak lengkap atau tidak mutakhir	ROO 26.38.04.130	Update SIMPEG dan monitoring berkala	Masih terdapat keterambatan penyampalan dokumen ASN	Rekonsiliasi data dengan BKPSDM setiap triwulan	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Triwulan II 2026
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah		Terlaksananya Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah/ Meningkatkan kapasitas dan kompetensi APIP yang memiliki standar	Pendidikan dan pelatihan pegawai tidak terlaksana sesuai rencana	ROO 26.38.04.131	Telah tersedia rencana diklat tahunan	Keterbatasan anggaran menyebabkan sebagian diklat tertunda	Prioritas diklat berbasis kompetensi dan optimalisasi pelatihan daring/BPKP	Inspektur Pembantu / Sekretaris	Triwulan IV 2026
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Anggaran pendidikan dan pelatihan tidak mencukupi	ROO 26.37.04.135	Pengusulan anggaran diklat melalui RKPD dan RKA	Prioritas anggaran belum sepenuhnya mendukung peningkatan kompetensi	Melakukan prioritas diklat wajib, memanfaatkan pelatihan daring dan kerja sama dengan BPKP/BPSDM	Inspektur / Sekretaris	Triwulan III 2026
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kebutuhan diklat belum sesuai analisis kebutuhan kompetensi APIP	ROO 26.38.04.134	Telah disusun rencana diklat tahunan berdasarkan usulan unit kerja	Analisis kebutuhan kompetensi belum terdokumentasi secara komprehensif	Menyusun Training Need Analysis (TNA) berbasis gap kompetensi APIP	Sekretaris Inspektoral	Triwulan II 2026
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Hasil diklat belum diterapkan dalam pelaksanaan tugas	ROO 26.38.04.138	Pegawai diwajibkan menyampaikan laporan hasil diklat dan berbagi pengetahuan (knowledge sharing) kepada pegawai lain	Belum dilakukan monitoring terhadap implementasi hasil diklat	Melaksanakan evaluasi pascadiklat, menyusun rencana aksi implementasi hasil diklat, dan monitoring oleh atasan langsung	Sekretaris Inspektoral / Inspektur Pembantu	Triwulan IV 2026
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pegawai batal mengikuti diklat karena benturan tugas pengawasan	ROO 26.38.04.136	Penjadwalan peserta telah disusun sebelum pelaksanaan diklat	Belum ada pengaturan pengganti tugas selama pelaksanaan diklat	Menyusun jadwal pengawasan yang terintegrasi dengan jadwal diklat dan menyiapkan pegawai pengganti	Inspektur Pembantu	Triwulan II 2026
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jadwal diklat berubah atau dibatalkan oleh penyelenggara	ROO 26.38.04.137	Koordinasi dengan penyelenggara dan monitoring informasi pelaksanaan diklat	Belum tersedia rencana alternatif apabila jadwal berubah	Menyiapkan daftar pelatihan alternatif dan memberikan jadwal pengganti jika diperlukan	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Triwulan IV 2026
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dan Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Perencanaan kebutuhan administrasi umum tidak sesuai kebutuhan riil	ROO 26.33.04.139	Penyusunan RKBM, RKA dan perencanaan kebutuhan berdasarkan usulan masing-masing bidang	Usulan kebutuhan belum seluruhnya didasarkan pada analisis kebutuhan dan skala prioritas	Menyusun analisis kebutuhan secara berkala dan melakukan reviu perencanaan sebelum penganggaran	Sekretaris Inspektoral	Triwulan II 2026

No	Risiko Prioritas					Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Resiko						
a	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	b	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dan Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Anggaran administrasi umum tidak mencukupi	c	d	e	f	g	h
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dan Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pengadaan barang/jasa administrasi terlambat	ROO 26.33.04.141	Penyusunan anggaran mengacu pada pagu indikatif dan prioritas perangkat daerah	Elisensi anggaran belum optimal dan terdapat kebutuhan yang belum terakomodasi	Melakukan prioritas kegiatan, efisiensi belanja operasional, serta pengalangan penyesuaian anggaran bila diperlukan	Sekretaris Inspektoral / Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Triwulan III 2026
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dan Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pengadaan barang/jasa administrasi terlambat	ROO 26.33.04.141	Pengadaan telah mengacu pada RUP dan jadwal pelaksanaan pengadaan	Penyusunan spesifikasi dan dokumen pengadaan sering terlambat	Menyusun jadwal pengadaan lebih awal, mempercepat penyusunan spesifikasi, dan melakukan monitoring berkala	PPK / PPTK / Pejabat Pengadaan	Triwulan II 2026
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dan Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penggunaan barang administrasi tidak tertib	ROO 26.33.04.142	Penggunaan barang telah mengacu pada SOP dan pencatatan dalam buku inventaris	Pengawasan penggunaan barang belum dilakukan secara rutin	Melaksanakan inventarisasi berkala, monitoring penggunaan barang, dan pembinaan kepada pengguna barang	Pengguna Barang	Triwulan III 2026
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dan Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelayanan administrasi belum memenuhi standar pelayanan	ROO 26.33.04.143	Telah tersedia SOP pelayanan administrasi dan standar pelayanan internal	Evaluasi kepatuhan terhadap SOP belum dilakukan secara berkala	Melakukan evaluasi standar pelayanan, survei kepuasan pengguna layanan, dan pembinaan petugas pelayanan	Sekretaris Inspektoral	Triwulan IV 2026
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kebutuhan instalasi listrik tidak sesuai kondisi riil	ROO 26.99.04.144	Perencanaan kebutuhan instalasi dilakukan melalui usulan unit kerja dan survei lapangan.	Survei lapangan belum dilakukan secara menyeluruh dan terdokumentasi.	Melakukan inventarisasi dan survei kondisi instalasi listrik secara berkala sebelum penyusunan RKA.	Sekretaris Inspektoral / Kasubag Umum	Triwulan II 2026
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Pengadaan komponen listrik terlambat	ROO 26.99.04.145	Pengadaan dilaksanakan sesuai RUP dan jadwal pengadaan.	Penyusunan spesifikasi teknis dan proses pengadaan sering terlambat.	Menyusun jadwal pengadaan lebih awal dan melakukan monitoring progres pengadaan setiap bulan.	PPK / PPTK / Pejabat Pengadaan	Triwulan II 2026
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Komponen listrik tidak sesuai spesifikasi	ROO 26.99.04.146	Pemeriksaan spesifikasi dilakukan pada saat penerimaan barang oleh tim penerima.	Pemeriksaan kualitas barang belum menggunakan checklist yang baku.	Menyusun checklist pemeriksaan barang dan meningkatkan pengawasan pada proses penerimaan.	PPK / Pengurus Barang	Triwulan III 2026
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terjadi pemadaman listrik	ROO 26.99.04.147	Tersedia MCB, instalasi sesuai standar, dan koordinasi dengan PLN apabila terjadi gangguan.	Belum tersedia sumber listrik cadangan yang memadai	Menyediakan genset/UPS untuk peralatan penting dan menyusun SOP penanganan gangguan listrik.	Sekretaris Inspektoral	Triwulan IV 2026
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Instalasi listrik tidak dipelihara secara berkala	ROO 26.99.04.148	Pemeriksaan instalasi dilakukan apabila terjadi kerusakan.	Belum terdapat jadwal pemeliharaan preventif yang terdokumentasi.	Menyusun jadwal pemeliharaan berkala dan melakukan inspeksi rutin instalasi listrik.	Pengguna Barang / Kasubag Umum	Triwulan III 2026

No	Risiko Prioritas					Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Resiko						
a			b			c	d	e	f	g	h
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kebutuhan peralatan rumah tangga tidak teridentifikasi dengan baik	ROO 26.99.04.149	Inventarisasi kebutuhan dilakukan melalui usulan masing-masing bidang.	Pendataan kebutuhan belum berdasarkan kondisi riil dan umur ekonomis barang.	Melakukan inventarisasi aset secara berkala serta menyusun daftar kebutuhan berdasarkan prioritas.	Pengurus Barang	Triwulan II 2026
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Peralatan cepat rusak	ROO 26.99.04.151	Pengadaan dilaksanakan sesuai RUP dan jadwal pengadaan.	Penyusunan spesifikasi teknis dan proses pengadaan lebih awal dan melakukan monitoring progres pengadaan setiap bulan.	Menyusun jadwal pengadaan lebih awal dan melakukan monitoring progres pengadaan setiap bulan.	PPK / PPTK / Pejabat Pengadaan	Triwulan II 2026
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kehilangan peralatan	ROO 26.99.04.152	Pemeriksaan spesifikasi dilakukan pada saat penerimaan barang oleh tim penerima.	Pemeriksaan kualitas barang belum menggunakan checklist yang baku.	Menyusun checklist pemeriksaan barang dan meningkatkan pengawasan pada proses penerimaan.	PPK / Pengurus Barang	Triwulan III 2026
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Inventaris tidak sesuai kondisi fisik	ROO 26.99.04.153	Tersedia MCB, instalasi sesuai standar, dan koordinasi dengan PLN apabila terjadi gangguan.	Belum tersedia sumber listrik cadangan yang memadai.	Menyediakan genset/UPS untuk peralatan penting dan menyusun SOP penanganan gangguan listrik.	Sekretaris Inspektorat	Triwulan IV 2026
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Pengadaan peralatan terlambat	ROO 26.99.04.150	Perencanaan kebutuhan instalasi dilakukan melalui usulan unit kerja dan survei lapangan.	Survei lapangan belum dilakukan secara menyeluruh dan terdokumentasi.	Melakukan inventarisasi dan survei kondisi instalasi listrik secara berkala sebelum penyusunan RKA.	Sekretaris Inspektorat / Kasubag Umum	Triwulan II 2026
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penggunaan logistik tidak terkendali	ROO 26.99.04.156	Pengeluaran logistik dilakukan berdasarkan permintaan dari masing-masing bidang dan dicatat dalam buku/aplikasi persediaan.	Monitoring penggunaan logistik belum dilakukan secara berkala dan belum ada batas pemakaian.	Menyusun SOP penggunaan logistik, melakukan monitoring pemakaian setiap bulan, dan menyusun laporan penggunaan logistik.	Pengurus Barang / Persediaan / Kasubag Umum	Triwulan II 2026
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persediaan tidak sesuai pencatatan	ROO 26.99.04.157	Persediaan dicatat dalam kartu stok dan aplikasi persediaan serta dilakukan pencatatan setiap transaksi.	Stock opname dan rekonsiliasi persediaan belum dilakukan secara rutin.	Melaksanakan stock opname berkala, rekonsiliasi data persediaan, serta menghindari setiap selisih persediaan.	Pengurus Barang / Persediaan	Triwulan III 2026
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Distribusi logistik terlambat	ROO 26.99.04.154	Pemeriksaan instalasi dilakukan apabila terjadi kerusakan.	Belum terdapat jadwal pemeliharaan preventif yang terdokumentasi.	Menyusun jadwal pemeliharaan berkala dan melakukan inspeksi rutin instalasi listrik.	Pengurus Barang / Kasubag Umum	Triwulan III 2026
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Logistik rusak	ROO 26.99.04.155	Inventarisasi kebutuhan dilakukan melalui usulan masing-masing bidang.	Pendataan kebutuhan belum berdasarkan kondisi riil dan umur ekonomis barang.	Melakukan inventarisasi aset secara berkala serta menyusun daftar kebutuhan berdasarkan prioritas.	Pengurus Barang	Triwulan II 2026

No	Risiko Prioritas					Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Calah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Risiko						
a	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Dokumen tidak terdokumentasi dengan baik	ROO 26.99.04.162	Dokumen hasil pencetakan dan penggandaan telah diarsipkan sesuai tata naskah dinas dan disimpan dalam arsip fisik maupun digital.	Belum seluruh dokumen terdigitalisasi dan belum dilakukan evaluasi kearsipan secara berkala.	Melakukan digitalisasi arsip, penataan sesuai klasifikasi arsip, dan monitoring pengelolaan dokumen secara berkala.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Triwulan III 2026
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kebutuhan cetak tidak tepat	ROO 26.99.04.159	Pemeriksaan pencetakan diajukan melalui disposisi dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang.	Belum dilakukan analisis kebutuhan dan prioritas pencetakan.	Menyusun perencanaan kebutuhan cetak berdasarkan program kerja dan melakukan verifikasi sebelum pencetakan.	Kasubag Umum	Triwulan II 2026
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Pemborosan penggunaan kertas	ROO 26.99.04.161	Penggunaan kertas mengikuti kebutuhan administrasi dan mendapat persetujuan alasan.	Belum diterapkan pengendalian penggunaan kertas dan digitalisasi dokumen secara optimal.	Mengoptimalkan penggunaan aplikasi peruratan elektronik, menerapkan pencetakan dua sisi (duplex), serta melakukan monitoring penggunaan kertas setiap bulan.	Sekretaris Inspektoral / Kasubag Umum	Triwulan IV 2026
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyedia terlambat mencetak	ROO 26.99.04.159	Jadwal pekerjaan telah ditetapkan dalam kontrak/SPK serta dilakukan koordinasi dengan penyedia.	Monitoring progres pekerjaan belum optimal dan belum ada evaluasi sesuai kontrak apabila terjadi keterlambatan, dan mengevaluasi kinerja penyedia.	Melakukan monitoring pelaksanaan pekerjaan, memberikan teguran sesuai kontrak apabila terjadi keterlambatan, dan mengevaluasi kinerja penyedia.	PPK / PPTK	Triwulan II 2026
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Hasil cetak tidak sesuai spesifikasi	ROO 26.99.04.160	Pemeriksaan hasil pekerjaan dilakukan oleh PPK/PPTK sebelum dilakukan serah terima.	Pemeriksaan kualitas hasil cetak belum menggunakan checklist baku.	Menyusun checklist pemeriksaan hasil cetak dan melakukan uji kesesuaian spesifikasi sebelum berita acara serah terima.	PPK / PPTK	Triwulan III 2026
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Bahan bacaan tidak dimanfaatkan	ROO 26.33.04.166	Dokumen regulasi dan bahan bacaan tersedia dalam bentuk cetak maupun digital.	Belum dilakukan monitoring pemanfaatan bahan bacaan oleh pegawai.	Mengoptimalkan perpustakaan digital, mewajibkan sharing knowledge, dan melakukan evaluasi pemanfaatan referensi.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Triwulan IV 2026
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Koleksi regulasi tidak diperbarui	ROO 26.33.04.167	Pembaruan koleksi dilakukan apabila terdapat informasi regulasi baru.	Jadwal pembaruan belum ditetapkan dan belum ada daftar regulasi yang harus diperbarui.	Menyusun SOP pembaruan koleksi regulasi, melakukan inventarisasi regulasi setiap triwulan, dan memperbarui database regulasi secara berkala	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Triwulan IV 2026

No	Risiko Prioritas					Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Risiko						
a	b					c	d	e	f	g	h
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Peraturan terbaru tidak teridentifikasi	ROO 26.33.04.163	Pemantauan regulasi dilakukan melalui JDHI, Kemendagri, BPKP, dan instansi terkait.	Belum ada petugas khusus yang melakukan monitoring perubahan regulasi secara berkala.	Mendapatkan petugas monitoring regulasi dan menyusun daftar regulasi yang diperbarui setiap bulan.	Sekretaris Inspektoral	Triwulan II 2026
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Keterlambatan memperoleh regulasi terbaru	ROO 26.33.04.164	Koordinasi dengan Bagian Hukum, Inspektoral Provinsi, BPKP, dan JDHI telah dilakukan.	Belum tersedia mekanisme penyalpan informasi regulasi terbaru secara cepat kepada seluruh pegawai.	Membentuk grup informasi regulasi, berkoordinasi dengan Inspektoral Provinsi, JDHI, dan menyampaikan update regulasi secara berkala	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Triwulan II 2026
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Pegawai tidak memahami perubahan regulasi	ROO 26.33.04.165	Sosialisasi regulasi dilakukan melalui rapat, surat edaran, dan bimbingan teknis.	Sosialisasi belum menjangkau seluruh pegawai dan belum dievaluasi pemahamannya.	Menyelenggarakan sosialisasi, forum diskusi, dan evaluasi pemahaman terhadap regulasi baru.	Sekretaris Inspektoral	Triwulan III 2026
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jadwal rapat tidak sesuai agenda peserta	ROO 26.33.04.168	Jadwal rapat disusun berdasarkan kalender kegiatan dan dikordinasikan dengan seluruh bidang.	Koordinasi jadwal belum optimal sehingga masih terjadi benturan agenda.	Menyusun kalender rapat tahunan, melakukan konfirmasi kehadiran (meeting confirmation), dan menggunakan aplikasi penjadwalan.	Sekretaris Inspektoral / Kasubag Umum dan Kepegawaian	Triwulan II 2026
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dokumen rapat belum lengkap	ROO 26.33.04.169	Undangan, bahan rapat, dan daftar hadir dipersiapkan sebelum pelaksanaan rapat.	Checklist kelengkapan dokumen belum dilakukan secara konsisten.	Menyusun checklist administrasi rapat dan melakukan verifikasi dokumen sebelum rapat dimulai.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Triwulan II 2026
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Peserta tidak hadir sesuai undangan	ROO 26.33.04.170	Undangan disampaikan melalui surat resmi dan media elektronik serta dilakukan konfirmasi kepada peserta.	Belum terdapat mekanisme tindak lanjut terhadap peserta yang belum memberikan konfirmasi.	Melakukan konfirmasi ulang (reminder), menyampaikan undangan lebih awal, dan menunjuk peserta pengganti apabila diperlukan.	Sekretaris Inspektoral	Triwulan II 2026
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Hasil rapat tidak tindak lanjut	ROO 26.33.04.171	Setiap rapat menghasilkan notulen, daftar tindak lanjut, dan penanggung jawab.	Monitoring tindak lanjut hasil rapat belum dilakukan secara berkala.	Menyusun matriks tindak lanjut rapat, menetapkan batas waktu penyelesaian, dan melakukan monitoring pada setiap rapat berikutnya.	Sekretaris Inspektoral	Triwulan III 2026
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Notulen dan dokumentasi rapat tidak lengkap	ROO 26.33.04.172	Notulen dibuat oleh notulis dan dokumentasi disimpan oleh pengelola administrasi.	Belum ada standar baku mengenai format notulen dan penyimpanan dokumentasi.	Mendapatkan format baku notulen, melakukan digitalisasi dokumentasi, dan menyimpan arsip pada media penyimpanan terpusat.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Triwulan III 2026

No	Risiko Prioritas					Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Risiko						
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Terlaksananya Pengadaan BMD urusan Perangkat Daerah	Pencapaian kebutuhan barang tidak sesuai kebutuhan riil	ROO 26.99.04.173	Penyusunan RKBMMD mengacu pada usulan masing-masing bidang, analisis kebutuhan, dan standar barang milik daerah.	Analisis kebutuhan dan evaluasi pemanfaatan barang belum dilakukan secara menyeluruh.	Melakukan inventarisasi aset, analisis kebutuhan berdasarkan standar barang, serta reviu RKBMMD sebelum diajukan.	Pengurus Barang / Sekretaris Inspektorat	Triwulan II 2026
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Terlaksananya Pengadaan BMD urusan Perangkat Daerah	Anggaran pengadaan tidak mencukupi	ROO 26.99.04.174	Jadwal rapat disusun berdasarkan kalender kegiatan dan dikordinasikan dengan seluruh bidang.	Koordinasi jadwal belum optimal sehingga masih terjadi benturan agenda	Menyusun kalender rapat tahunan, melakukan konfirmasi kehadiran (meeting confirmation), dan menggunakan aplikasi penjadwalan.	Sekretaris Inspektorat / Kasubag Umum dan Kepegawaian	Triwulan II 2026
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Terlaksananya Pengadaan BMD urusan Perangkat Daerah	Barang yang diterima tidak sesuai spesifikasi	ROO 26.99.04.176	Undangan disampaikan melalui surat resmi dan media elektronik serta dilakukan konfirmasi kepada peserta.	Belum tercapai mekanisme tindak lanjut terhadap peserta yang belum memberikan konfirmasi.	Melakukan konfirmasi ulang (reminder), menyampaikan undangan lebih awal, dan menunjuk peserta pengganti apabila diperlukan.	Sekretaris Inspektorat	Triwulan II 2026
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Terlaksananya Pengadaan BMD urusan Perangkat Daerah	Pengadaan tidak mendukung peningkatan pelayanan	ROO 26.99.04.177	Selapa rapat menghasilkan notulen, daftar tindak lanjut, dan penanggung jawab.	Monitoring tindak lanjut hasil rapat belum dilakukan secara berkala	Menyusun matriks tindak lanjut rapat, menetapkan batas waktu penyelesaian, dan melakukan monitoring pada setiap rapat berikutnya.	Sekretaris Inspektorat	Triwulan III 2026
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Terlaksananya Pengadaan BMD urusan Perangkat Daerah	Proses pengadaan terlambat	ROO 26.99.04.145	Undangan, bahan rapat, dan daftar hadir dipersiapkan sebelum pelaksanaan rapat.	Checklist kelengkapan dokumen belum diterapkan secara konsisten.	Menyusun checklist administrasi rapat dan melakukan verifikasi dokumen sebelum rapat dimulai.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Triwulan II 2026
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Spesifikasi peralatan tidak sesuai kebutuhan	ROO 26.99.04.178	Notulen dibuat oleh notulis dan dokumentasi disimpan oleh pengelola administrasi.	Belum ada standar baku mengenal format notulen dan penyimpanan dokumentasi.	Menetapkan format baku notulen, melakukan digitalisasi dokumentasi, dan menyimpan arsip pada media penyimpanan terpusat.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Triwulan III 2026
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Peralatan mengalami kerusakan sebelum masa manfaat	ROO 26.99.04.181	Peralatan diperiksa saat diterima dan dilengkapi garansi penyedia.	Pemeliharaan preventif dan pengawasan penggunaan belum optimal.	Menyusun jadwal pemeliharaan berkala, melakukan monitoring penggunaan, dan mengklaim garansi apabila terjadi kerusakan.	Pengurus Barang	Triwulan IV 2026

No	Risiko Prioritas					Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Risiko						
a	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Penyedia terlambat menyerahkan barang	c ROO 26.99.04.179	d Penyusunan RKBMMD mengacu pada usulan masing-masing bidang, analisis kebutuhan, dan standar barang milik daerah.	e Analisis kebutuhan dan evaluasi pemanfaatan barang belum dilakukan secara menyeluruh.	f Melakukan inventarisasi aset, analisis kebutuhan berdasarkan standar barang, serta reviu RKSMMD sebelum diajukan.	g Pengurus Barang / Sekretaris Inspektorat	h Triwulan II 2026
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Barang tidak sesuai spesifikasi kontrak	ROO 26.99.04.180	Spesifikasi teknis telah dituangkan dalam KAK, HPS, dan kontrak serta dilakukan pemeriksaan saat serah terima barang.	Pemeriksaan kesesuaian spesifikasi belum dilakukan secara menyeluruh dan belum menggunakan checklist baku.	Menyusun checklist pemeriksaan, melibatkan pejabat teknis saat pemeriksaan, dan meniadak barang yang tidak sesuai spesifikasi kontrak.	PPK / PPTK / Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)	Triwulan III 2026
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Barang belum dicatat dalam KIB/BMD	ROO 26.99.04.182	Pencatatan dilakukan melalui aplikasi BMD/SIMDA BMD setelah serah terima barang.	Pencatatan sering terlambat dan belum direkonsiliasi secara berkala.	Melakukan pencatatan maksimal 7 hari setelah BAST, rekonsiliasi data dengan bidang keuangan, dan monitoring oleh Pengurus Barang.	Pengurus Barang	Triwulan II 2026
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kebutuhan jasa tidak teridentifikasi secara tepat	ROO 26.99.04.183	Kebutuhan jasa diusulkan oleh masing-masing bidang dan dibahas dalam penyusunan RKA.	Analisis kebutuhan belum sepenuhnya berbasis prioritas dan beban kerja.	Melakukan identifikasi kebutuhan melalui survei internal dan reviu kebutuhan sebelum penganggaran.	Sekretaris Inspektorat	Triwulan II 2026
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Anggaran jasa tidak mencukupi	ROO 26.99.04.184	Penyusunan anggaran mengacu pada standar harga dan pagu indikatif	Perubahan harga dan kebutuhan tambahan belum diantisipasi dalam perencanaan.	Melakukan evaluasi kebutuhan prioritas, efisiensi belanja jasa, dan mengusulkan perubahan anggaran apabila diperlukan.	Sekretaris Inspektorat / PPK	Triwulan II 2026
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kontrak jasa tidak diawasi secara optimal	ROO 26.99.04.186	Kontrak kerja telah memuat ruang lingkup pekerjaan, jadwal pelaksanaan, dan dilakukan monitoring oleh PPK/PPTK.	Monitoring lapangan belum dilakukan secara berkala dan belum terdokumentasi dengan baik.	Menyusun jadwal monitoring kontrak, membuat laporan hasil pengawasan, dan melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan kontrak.	PPK / PPTK	Triwulan III 2026
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kinerja penyedia jasa tidak dioptimasi	ROO 26.99.04.187	Evaluasi dilakukan pada akhir pelaksanaan pekerjaan berdasarkan ketentuan kontrak.	Belum terdapat indikator kinerja dan evaluasi berkala selama kontrak berjalan.	Menyusun indikator kinerja penyedia (KPI), melakukan evaluasi berkala, dan mendokumentasikan hasil evaluasi sebagai bahan penilaian penyedia.	PPK / PPTK	Triwulan IV 2026

No	Risiko Prioritas					Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Risiko						
a	b					c	d	e	f	g	h
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyedia jasa tidak memenuhi standar pelayanan	ROO 26.99.04.185	Kontrak kerja memuat spesifikasi layanan, indikator kinerja, dan pelaksanaan pekerjaan.	Evaluasi kinerja penyedia belum dilakukan secara berkala dan sanksi kontrak belum diterapkan secara optimal.	Melakukan monitoring kinerja penyedia, evaluasi berkala berdasarkan SLA/kontrak, serta menerapkan sanksi apabila penyedia tidak memenuhi standar pelayanan.	PPK / PPTK	Triwulan III 2026
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Pemadaman listrik	ROO 26.99.04.190	Instalasi listrik dipelihara secara berkala dan koordinasi dengan PLN dilakukan apabila terjadi gangguan.	Belum tersedia sumber listrik cadangan untuk mendukung operasional penting.	Menyediakan UPS/genset untuk menyediakan prosedur penanganan keadaan darurat akibat pemadaman listrik.	Kasubbag Umum	Triwulan III 2026
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Gangguan pasokan air bersih	ROO 26.99.04.191	Tersedia jaringan air dan dilakukan pemeliharaan instalasi secara berkala.	Belum tersedia cadangan pasokan air apabila terjadi gangguan distribusi.	Menyediakan tandon air, melakukan pemeriksaan instalasi secara berkala, dan berkoordinasi dengan penyedia layanan air bersih.	Kasubbag Umum	Triwulan III 2026
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kebutuhan anggaran utilitas tidak sesuai kebutuhan	ROO 26.99.04.188	Perencanaan kebutuhan didasarkan pada pemakaian tahun sebelumnya dan usulan unit kerja.	Belum dilakukan analisis tren penggunaan dan efisiensi konsumsi utilitas.	Melakukan evaluasi pemakaian utilitas setiap triwulan dan menyesuaikan kebutuhan dalam penyusunan anggaran.	Sekretaris Inspektoriat / Kasubbag Umum	Triwulan II 2026
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Gangguan jaringan internet dan telepon	ROO 26.99.04.189	Telah tersedia kontrak layanan dengan penyedia jasa dan mekanisme pelaporan gangguan (helpdesk).	Belum tersedia jalur komunikasi atau penyedia cadangan apabila terjadi gangguan.	Melakukan koordinasi rutin dengan penyedia, menyediakan koneksi internet cadangan (backup), dan menetapkan SOP penanganan gangguan.	Kasubbag Umum / Pengelola TI	Triwulan III 2026
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tagihan utilitas tidak terbayarkan tepat waktu	ROO 26.99.04.192	Jadwal pembayaran telah ditetapkan dan dilakukan verifikasi tagihan sebelum pembayaran.	Monitoring jatuh tempo pembayaran belum optimal.	Menyusun kalender pembayaran, menetapkan pengingat (reminder), dan melakukan rekonsiliasi tagihan setiap bulan.	Kasubbag Keuangan / Bendahara Pengeluaran	Triwulan II 2026
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kepuasan pengguna layanan rendah	ROO 26.99.04.197	Tersedia mekanisme penyampaian keluhan dan evaluasi pelayanan secara berkala.	Survei kepuasan pengguna belum dilaksanakan secara rutin dan tindak lanjut keluhan belum terdokumentasi.	Melaksanakan survei kepuasan pengguna layanan minimal setiap semester, menyusun rencana perbaikan layanan, dan memonitor tindak lanjut pengaduan.	Sekretaris Inspektoriat	Triwulan IV 2026

No	Risiko Prioritas					Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Risiko						
a	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Kebutuhan tenaga pelayanan umum tidak sesuai	ROO 26.99.04.193	Kebutuhan tenaga pelayanan disusun berdasarkan analisis beban kerja dan kebutuhan operasional kantor	Evaluasi kebutuhan tenaga pelayanan belum dilakukan secara berkala	Melakukan analisis beban kerja setiap tahun dan menyesuaikan jumlah tenaga pelayanan sesuai kebutuhan riil.	Sekretaris Inspektorat	Triwulan II 2026
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Tenaga pelayanan tidak hadir	ROO 26.99.04.194	Kehadiran tenaga pelayanan dipantau melalui daftar hadir dan pengawasan atasan langsung	Belum tersedia petugas pengganti apabila tenaga pelayanan berhalangan hadir.	Menyusun jadwal piket, menunjuk petugas cadangan, dan melakukan monitoring kehadiran setiap hari.	Kasubag Umum	Triwulan II 2026
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Pelayanan kebersihan tidak sesuai standar	ROO 26.99.04.195	Penyedia jasa bekerja berdasarkan kontrak kerja, SOP, dan jadwal pembersihan.	Pengawasan kualitas kebersihan belum dilakukan secara rutin.	Menyusun checklist kebersihan, melakukan inspeksi berkala, dan mengevaluasi kinerja penyedia setiap bulan.	PPTK / Kasubag Umum	Triwulan III 2026
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Kinerja penyedia jasa tidak dimonitor	ROO 26.99.04.196	Monitoring dilakukan melalui laporan pelaksanaan pekerjaan dan pemeriksaan lapangan.	Belum tersedia indikator kinerja (KPI) dan dokumentasi hasil monitoring.	Menyusun indikator kinerja penyedia, melakukan monitoring berkala, dan mendokumentasikan hasil evaluasi sebagai dasar pembayaran dan penilaian penyedia.	PPK / PPTK	Triwulan III 2026
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jadwal pemeliharaan tidak disusun dengan baik	ROO 26.99.04.198	Jadwal pemeliharaan disusun berdasarkan RKBM dan kebutuhan operasional serta mengacu pada SOP pemeliharaan BMD.	Jadwal belum mempertimbangkan umur ekonomis dan tingkat penggunaan aset.	Menyusun jadwal pemeliharaan tahunan berbasis kondisi aset dan melakukan revaluasi setiap semester.	Pengurus Barang / Sekretaris Inspektorat	Triwulan I 2026
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan terlambat dilakukan	ROO 26.99.04.199	Tersedia jadwal pemeliharaan dan monitoring oleh Pengurus Barang.	Monitoring pelaksanaan pemeliharaan belum dilakukan secara berkala.	Membuat teminder jadwal pemeliharaan dan melakukan evaluasi realisasi setiap bulan.	Pengurus Barang	Triwulan II 2026
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai aset menurun akibat pemeliharaan tidak optimal	ROO 26.99.04.202	Pemeliharaan dilakukan secara berkala sesuai kemampuan anggaran.	Pemeliharaan preventif belum diterapkan secara konsisten dan kondisi aset belum dimonitor secara periodik.	Menyusun program pemeliharaan preventif, melakukan inspeksi berkala, dan mengevaluasi kondisi aset setiap semester.	Pengurus Barang / Sekretaris Inspektorat	Triwulan IV 2026
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyedia jasa pemeliharaan tidak memenuhi standar	ROO 26.99.04.200	Pemilihan penyedia mengikuti ketentuan pengadaan dan kontrak memuat spesifikasi pekerjaan.	Evaluasi kinerja penyedia belum dilakukan secara berkala.	Melaksanakan evaluasi kinerja penyedia berdasarkan kontrak dan memberikan sanksi apabila tidak memenuhi standar.	PPK / PPTK	Triwulan III 2026

No	Risiko Prioritas					Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Risiko						
a	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	b	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kerusakan barang tidak segera dilaporkan	c ROO 26.99.04.201	d Tersedia mekanisme pelaporan kerusakan melalui Pengurus Barang dan pengguna barang.	e Belum seluruh pengguna barang melaporkan kerusakan secara tepat waktu.	f Menetapkan SOP pelaporan kerusakan minimal 1x24 jam dan melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai.	g Pengguna Barang / Pengurus Barang	h Triwulan II 2026
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Pemeliharaan, dan Dinas atau Kantor Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Pemeliharaan kendaraan dinas terlambat dilaksanakan	ROO 26.99.04.204	Telah disusun jadwal pemeliharaan kendaraan, belum dipantau secara konsisten, belum ada sistem pengingat (reminder) servis berkala, dan tersedia anggaran pemeliharaan.	Jadwal pemeliharaan belum dipantau secara konsisten, belum ada sistem pengingat (reminder) servis berkala, dan tersedia anggaran pemeliharaan.	Menyusun kalender pemeliharaan tahunan, membuat kartu kendali servis setiap kendaraan, dan melakukan monitoring realisasi pemeliharaan setiap bulan.	Sekretaris Inspektorat, Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Pengurus Barang	Triwulan I 2026
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Pemeliharaan, dan Dinas atau Kantor Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Riwayat pemeliharaan kendaraan tidak terdokumentasi dengan baik	ROO 26.99.04.207	Buku servis dan dokumen kendaraan telah tersedia serta dilakukan pencatatan riwayat perawatan.	Pencatatan masih manual, dokumen belum terdigitalisasi, dan belum seluruh riwayat pemeliharaan terdokumentasi lengkap.	Menyusun database digital riwayat pemeliharaan kendaraan dan melakukan pembaruan data setiap selesai servis atau perbaikan.	Pengurus Barang	Triwulan III 2026
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Pemeliharaan, dan Dinas atau Kantor Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jadwal pemeliharaan kendaraan dinas tidak disusun sesuai kebutuhan	ROO 26.99.04.203	Jadwal servis kendaraan mengacu pada buku servis, kilomiter tempuh, dan kondisi kendaraan.	Jadwal pemeliharaan belum terdokumentasi dan belum dimonitor secara berkala.	Menyusun jadwal servis seluruh kendaraan dinas, membuat kartu riwayat pemeliharaan, dan melakukan monitoring pelaksanaan servis.	Pengurus Barang / PPTK	Triwulan II 2026
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Pemeliharaan, dan Dinas atau Kantor Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Pembayaran pajak kendaraan melewati jatuh tempo	ROO 26.99.04.205	Masa berlaku pajak kendaraan dipantau melalui dokumen kendaraan dan dianggarkan setiap tahun.	Belum tersedia database masa berlaku pajak dan reminder otomatis sehingga berpotensi terjadi keterlambatan pembayaran.	Menyusun database pajak kendaraan, menetapkan petugas memantau, dan membuat pengingat minimal 30 hari sebelum jatuh tempo.	Pengurus Barang, Bendahara Pengeluaran	Triwulan I 2026
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Pemeliharaan, dan Dinas atau Kantor Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kendaraan mengalami kerusakan berat akibat penggunaan yang tidak sesuai SOP	ROO 26.99.04.206	Penggunaan kendaraan telah diatur melalui SOP penggunaan kendaraan dinas serta dilakukan pemeriksaan kondisi kendaraan setelah digunakan.	Pengawasan terhadap kepatuhan SOP belum optimal dan belum dilakukan evaluasi penggunaan kendaraan secara berkala.	Melakukan sosialisasi SOP, pemeriksaan rutin kendaraan, serta evaluasi penggunaan kendaraan setiap triwulan.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Pengurus Barang	Triwulan II 2026
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Pemeliharaan, dan Dinas atau Kantor Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kebutuhan pemeliharaan kendaraan operasional tidak sesuai Kondisi Kendaraan	ROO 26.99.04.208	Kendaraan operasional digunakan sesuai pemantauan kondisi perjalanan dinas.	Belum dilakukan evaluasi kelayakan kendaraan minimal satu kali setahun, menyusun rencana penggantian kendaraan yang sudah tidak ekonomis, dan mengoptimalkan penggunaan kendaraan yang masih layak.	Melaksanakan evaluasi kelayakan kendaraan minimal satu kali setahun, menyusun rencana penggantian kendaraan yang sudah tidak ekonomis, dan mengoptimalkan penggunaan kendaraan yang masih layak.	Sekretaris Inspektorat, Pengurus Barang, PPTK	Triwulan IV 2026

No	Risiko Prioritas					Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Realiso						
a	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya	Pajak atau izin kendaraan terlambat diperpanjang	ROO 26.99.04.210	Monitoring masa berlaku pajak dan izin kendaraan dilakukan melalui dokumen kendaraan serta dianggarkan dalam APBD.	Belum tersedia sistem pengingat otomatis, database masa berlaku belum diperbarui secara berkala.	Menyusun database masa berlaku pajak dan izin kendaraan, membuat reminder minimal 30 hari sebelum jatuh tempo, serta menetapkan petugas monitoring.	Pengurus Barang, Bendahara Pengeluaran	Triwulan I 2026
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya	Frekuensi kerusakan kendaraan meningkat	ROO 26.99.04.212	Dilaksanakan servis berkala sesuai jadwal dan dilakukan pemeriksaan kondisi kendaraan secara rutin.	Analisa penyebab kerusakan berulang belum dilakukan, monitoring riwayat kerusakan belum optimal.	Membuat database riwayat kerusakan kendaraan, melakukan analisis penyebab kerusakan, meningkatkan frekuensi inspeksi kendaraan, dan mengevaluasi pola penggunaan kendaraan setiap triwulan.	Kasubag Umum dan Kepegawaian, Pengurus Barang	Triwulan IV 2026
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya	Kendaraan operasional rusak saat digunakan untuk tugas pengawasan	ROO 26.99.04.209	Kendaraan dinas dilakukan pemeriksaan sebelum dan sesudah digunakan, servis berkala sesuai anggaran, serta dilakukan pengecekan kelayakan kendaraan.	Pemeriksaan harian belum terdokumentasi, belum tersedia kendaraan cadangan untuk kondisi darurat, pemeliharaan preventif belum optimal.	Menyusun checklist pemeriksaan kendaraan, meningkatkan pemeliharaan preventif, menyiapkan kendaraan pengganti apabila kendaraan utama mengalami kerusakan.	Sekretaris Inspektoral, Kasubag Umum dan Kepegawaian, Pengurus Barang	Triwulan II 2026
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya	Ketersediaan suku cadang terbatas	ROO 26.99.04.211	Pengadaan suku cadang dilakukan sesuai kebutuhan melalui penyedia yang ditunjuk serta memperhatikan spesifikasi teknis.	Stok suku cadang tidak tersedia, waktu pengiriman ke Kepulauan Mentawai relatif lama, belum ada daftar penyedia alternatif.	Menyusun daftar penyedia cadangan, mengidentifikasi suku cadang prioritas, dan menyediakan stok minimum untuk komponen yang sering mengalami kerusakan.	PPTK, Pengurus Barang	Triwulan III 2026
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jadwal pemeliharaan peralatan tidak disusun secara berkala	ROO 26.99.04.213	Terdapat daftar inventaris peralatan dan mesin serta pelaksanaan pemeliharaan sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran.	Belum tersedia jadwal pemeliharaan preventif yang terdokumentasi dan dipantau secara berkala	Menyusun SOP dan jadwal pemeliharaan berkala untuk seluruh peralatan, serta melakukan monitoring pelaksanaannya setiap bulan.	Sekretaris Inspektoral, Kasubag Umum dan Kepegawaian, Pengurus Barang	Triwulan I 2026
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Peralatan mengalami kerusakan karena penggunaan yang tidak sesuai SOP	ROO 26.99.04.214	Penggunaan peralatan telah mengikuti petunjuk penggunaan dan dilakukan pengawasan oleh penanggung jawab barang.	Belum seluruh pengguna memahami SOP penggunaan, sosialisasi dan pelatihan masih terbatas.	Menyusun SOP penggunaan peralatan, melaksanakan sosialisasi dan pelatihan kepada pengguna, serta melakukan pengawasan berkala.	Kasubag Umum dan Kepegawaian, Pengurus Barang	Triwulan II 2026

No	Risiko Prioritas					Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada ¹⁾	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Risiko						
a	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Perbaikan peralatan terlambat dilakukan	ROO 26.99.04.215	Perbaikan dilakukan setelah menerima laporan kerusakan dan tersedia anggaran pemeliharaan.	Belum terdapat batas waktu penanganan kerusakan dan belum tersedia penyedia jasa siaga.	Mendapatkan standar waktu penyelesaian perbaikan (SLA), membuat daftar penyedia jasa pemeliharaan, dan mengabsahkan anggaran perbaikan darurat.	PPTK, Pengurus Barang	Triwulan II 2026
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kerusakan tidak segera dilaporkan	ROO 26.99.04.216	Tersedia mekanisme pelaporan kerusakan kepada pengurus barang secara manual melalui surat atau komunikasi internal.	Belum tersedia sistem pelaporan yang cepat, pencatatan kerusakan belum terdokumentasi dengan baik.	Membuat formulir atau aplikasi pelaporan kerusakan, menetapkan batas waktu pelaporan maksimal 1x24 jam, dan melakukan monitoring tindak lanjut laporan.	Pengurus Barang, Kasubag Umum dan Kepegawaian	Triwulan III 2026
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Umur ekonomis peralatan lebih pendek dari yang direncanakan	ROO 26.99.04.217	Diakukan pemeliharaan rutin dan inventarisasi aset setiap tahun.	Pemeliharaan preventif belum optimal, kondisi peralatan belum dievaluasi berdasarkan umur ekonomis.	Menyusun rencana penggantian peralatan berdasarkan umur ekonomis, meningkatkan frekuensi pemeliharaan preventif, dan mengusulkan pengadaan peralatan pengganti dalam RKPD/RKA.	Sekretaris Inspektoral, Pengurus Barang, PPTK	Triwulan IV 2026
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kondisi kerusakan gedung tidak teridentifikasi secara akurat sehingga kebutuhan rehabilitasi tidak sesuai	ROO 26.99.04.218	Diakukan survei kondisi bangunan, pemeriksaan fisik, dan penyusunan usulan kebutuhan rehabilitasi berdasarkan hasil inventarisasi.	Belum dilakukan penilaian kondisi bangunan secara menyeluruh oleh tenaga teknis, data kondisi bangunan belum diperbarui secara berkala.	Melaksanakan inspeksi teknik berkala, memperbarui database kondisi gedung, dan menyusun skala prioritas rehabilitasi berdasarkan tingkat kerusakan.	Sekretaris Inspektoral, Kasubag Umum dan Kepegawaian, PPTK	Triwulan II 2026
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Anggaran pemeliharaan atau rehabilitasi tidak mencukupi	ROO 26.99.04.219	Penyusunan RKA berdasarkan usulan kebutuhan pemeliharaan dan rehabilitasi serta pembahasan dengan TAPD.	Kebutuhan anggaran lebih besar dari pagu yang tersedia, belum ada prioritas berbasis tingkat risiko kerusakan.	Menyusun prioritas rehabilitasi berdasarkan tingkat urgensi, mengoptimalkan pemeliharaan preventif, dan mengusulkan tambahan anggaran apabila diperlukan.	Sekretaris Inspektoral, PPTK	Triwulan I 2026
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi terlambat dari jadwal	ROO 26.99.04.220	Jadwal pelaksanaan pekerjaan telah disusun, memuat batas waktu penyelesaian serta dilakukan monitoring oleh PPTK.	Pengawasan progres pekerjaan belum optimal potensi keterlambatan penyedia belum terdeteksi sejak awal.	Menyusun jadwal monitoring mingguan, melakukan rapat evaluasi progres, dan menerapkan sanksi sesuai kontrak apabila terjadi keterlambatan.	PPTK, PPK, Penyedia Jasa	Triwulan III 2026

No	Risiko Prioritas					Kode Risiko	Urutan Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Realiso						
a	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Gedung yang telah dipelihara tidak dipelihara secara berkala sehingga cepat mengalami kerusakan kembali	ROO 26.99.04.222	Pemeliharaan rutin dilakukan sesuai kemampuan anggaran dan terdapat pencatatan aset daerah.	Jadwal pemeliharaan preventif belum baku, monitoring pasca rehabilitasi belum rutin dilakukan.	Menyusun SOP pemeliharaan berkala, membuat jadwal inspeksi rutin, serta mengalokasikan anggaran pemeliharaan preventif setiap tahun.	Kasubag Umum dan Kepegawaian, Pengurus Barang	Triwulan IV 2025
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Hasil pekerjaan tidak sesuai spesifikasi teknis atau mutu yang dipersyaratkan	ROO 26.99.04.221	Spesifikasi teknis dituangkan dalam dokumen pengawasan oleh PPTK dan pemeriksaan hasil pekerjaan sebelum serah terima.	Pengujian mutu pekerjaan belum dilakukan secara menyeluruh, dokumentasi hasil pemeriksaan belum lengkap.	Meningkatkan pengawasan lapangan, melibatkan tenaga teknis dalam pemeriksaan hasil pekerjaan, serta membuat checklist mutu pekerjaan.	PPTK, PPK, Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan	Triwulan III 2026



PENGKOMUNIKASIAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

: Inspektat Kabupaten Kepulauan Mentawai : 2026 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Akuntabel, Transparan dan Melayani : Unsur Pengawasan Unsur Pemerintahan													
No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Risiko	Kode Risiko	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a							b	c	d	e	f	g	h
I. Risiko Strategi Inspektat													
	Sasaran : 1. Meningkatkan Integritas Penyelenggaraan pemerintahan			2. Manajemen Risiko Indeks (MRI)	Agan risiko pada OPD tidak aktif	RSO 26 35 04 05	Pertapiati kembali Agen Risiko melalui SK Kepala OPD, sosialisasi dan monitoring berkala	Surat, Zoom Meeting, Rakor, WA Group, Laporan Monitoring	Inspektat	Seluruh OPD	Triwulan I-II 2026	Sesuai pelaksanaan	Monitoring berkala
	Sasaran : 1. Meningkatkan Integritas Penyelenggaraan pemerintahan			2. Manajemen Risiko Indeks (MRI)	Implementasi manajemen risiko pada OPD belum optimal	RSO 26 35 04 03	Bimtek Manajemen Risiko, pendampingan penyusunan register risiko dan evaluasi implementasi	Bimtek, Workshop, Surat Edaran, Pendampingan	Inspektat	Seluruh OPD	Triwulan I-IV 2026	Sesuai pelaksanaan	Dilaksanakan bertahap
	Sasaran : 1. Meningkatkan Integritas Penyelenggaraan pemerintahan			1. Indeks persepsi anti korupsi	Masih terjadi praktik penyimpangan pada OPD	RSO 26 35 04 02	Audit, reviu, monitoring, sosialisasi anti korupsi, penguatan SPIP	Sosialisasi, Surat Edaran, Rakor, Website	Inspektat	Seluruh OPD	Sepanjang Tahun 2026	Sesuai pelaksanaan	Pengawasan reguler
	Sasaran : 1. Meningkatkan Integritas Penyelenggaraan pemerintahan			3. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Rekomendasi hasil pengawasan tidak ditindaklanjuti	RSO 26 35 04 06	Monitoring tindak lanjut rekomendasi, rapat evaluasi, pemberian surat peringatan	Aplikasi TLHP, Surat, Rakor Evaluasi	Inspektat	OPD terkait	Triwulan I-IV 2026	Sesuai pelaksanaan	Dievaluasi tiap triwulan
	Sasaran : 1. Meningkatkan Integritas Penyelenggaraan pemerintahan			1. Indeks persepsi anti korupsi	Nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi tidak mencapai target	RSO 26 35 04 01	Peningkatan integritas ASN, kampanye anti korupsi, pembinaan SPI	Sosialisasi, Banner, Website, Rakor	Inspektat	ASN Kabupaten	Triwulan I-IV 2026	Sesuai pelaksanaan	Bagian dari Program Integritas
	Sasaran : 1. Meningkatkan Integritas Penyelenggaraan pemerintahan			2. Manajemen Risiko Indeks (MRI)	Dokumen register risiko OPD belum lengkap	RSO 26 35 04 04	Pendampingan penyusunan register risiko, reviu dokumen dan asistensi	Pendampingan, Klinik Risiko, Surat	Inspektat	Seluruh OPD	Triwulan I-II 2026	Sesuai pelaksanaan	Target seluruh OPD
	Sasaran : 1. Meningkatkan Integritas Penyelenggaraan pemerintahan			3. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Area rawan korupsi belum dimitigasi	RSO 26 35 04 07	Pemetaan area rawan korupsi, penyusunan rencana mitigasi, monitoring	FGD, Rakor, Laporan Hasil Pengawasan	Inspektat	OPD Berisiko Tinggi	Triwulan I-IV 2026	Sesuai pelaksanaan	Menjadi prioritas pengawasan
	Sasaran : 1. Meningkatkan Integritas Penyelenggaraan pemerintahan			2. Manajemen Risiko Indeks (MRI)	Dokumen register risiko OPD belum lengkap	RSO 26 35 04 04	Monitoring penyempurnaan register risiko, validasi oleh APIP	Pendampingan, Rakor, Email, WA Group	Inspektat	Seluruh OPD	Triwulan III-IV 2026	Sesuai pelaksanaan	Tindak lanjut penyempurnaan
	Sasaran: 2. Meningkatkan Kinerja Inspektat			3. Capaian kinerja perangkat daerah	Jadwal audit tertunda	RSO 26 36 04 14	Menyusun PKPT secara realistik, monitoring jadwal audit, penyesuaian jadwal bila terjadi perubahan	Rapat koordinasi, Surat Tugas, Email, WhatsApp	Ihwan/Sekretariat Inspektat	Tim Auditor	Triwulan I-IV 2026	Sesuai realisasi	Monitoring berkala
	Sasaran: 2. Meningkatkan Kinerja Inspektat			3. Capaian kinerja perangkat daerah	Cuaca ekstrem menghambat pelaksanaan audit	RSO 26 35 04 15	Menyusun jadwal alternatif, koordinasi BMKG dan OPD, penggunaan audit daring bila memungkinkan	Surat, WhatsApp, Zoom Meeting	Sekretariat Inspektat	Tim Auditor dan OPD	Sepanjang Tahun 2026	Sesuai realisasi	Disevaluasi kondisi cuaca
	Sasaran: 2. Meningkatkan Kinerja Inspektat			3. Capaian kinerja perangkat daerah	Akses transportasi antar pulau menghambat pengawasan	RSO 26 35 04 16	Menyusun rencana perjalanan lebih awal, koordinasi dengan penyedia transportasi, optimalisasi audit berbasis dokumen	Rapat, Surat Tugas, WhatsApp	Sekretariat Inspektat	Tim Auditor	Sepanjang Tahun 2026	Sesuai realisasi	Risiko khas wilayah kepulauan
	Sasaran: 2. Meningkatkan Kinerja Inspektat			3. Capaian kinerja perangkat daerah	Gangguan internet menghambat pengawasan berbasis elektronik	RSO 26 35 04 17	Menyediakan jaringan cadangan, penggunaan dokumen online, sinkronisasi data setelah jaringan normal	Email, WhatsApp, Telepon	Admin SPBE/IT Inspektat	Auditor dan OPD	Sepanjang Tahun 2026	Sesuai realisasi	Antisipasi gangguan jaringan
	Sasaran: 2. Meningkatkan Kinerja Inspektat			2. Jumlah Inovasi yang diterapkan	Pemanfaatan aplikasi pengawasan rendah	RSO 26 35 04 12	Pelatihan penggunaan aplikasi, pendampingan operator, monitoring pemanfaatan aplikasi	Bimtek, SOP, Panduan, WhatsApp	Admin Aplikasi Inspektat	Auditor dan OPD	Triwulan I-III 2026	Sesuai realisasi	Evaluasi setiap triwulan
	Sasaran: 2. Meningkatkan Kinerja Inspektat			3. Capaian kinerja perangkat daerah	PKPT tidak terlaksana sesuai target	RSO 26 36 04 13	Monitoring realisasi PKPT setiap bulan, evaluasi capaian, revisi PKPT bila diperlukan	Rapat Evaluasi, Laporan Monitoring	Sekretaris Inspektat	Inspektur dan Irbat	Triwulan I-IV 2026	Sesuai realisasi	Dievaluasi setiap triwulan

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Risiko	Kode Risiko	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a							b	c	d	e	f	g	h
	Sasaran: 2. Meningkatkan Kinerja Inspektorat			3. Capaian kinerja perangkat daerah	Jumlah auditor bersertifikat belum memenuhi kebutuhan	RSO.26.35.04.19	Mengusulkan diklat dan sertifikasi auditor, menyusun rencana pengembangan SDM	Surat Usulan, SIM Diklat, Rapat	Sekretariat Inspektorat	BKPSDM dan Auditor	Triwulan I-IV 2026	Sesuai realisasi	Program peningkatan kompetensi
	Sasaran: 2. Meningkatkan Kinerja Inspektorat			1. Nilai LAKIP	Dokumen perencanaan dan pelaporan tidak berkualitas	RSO.26.35.04.09	Revisi dokumen perencanaan, pendampingan penyusunan LKIP, monitoring kualitas dokumen	Rapat, Klinik AKIP, Pendampingan	Subbag Perencanaan	Seluruh Bidang	Triwulan I-IV 2026	Sesuai realisasi	Mendukung peningkatan nilai SAKIP
	Sasaran: 2. Meningkatkan Kinerja Inspektorat			3. Capaian kinerja perangkat daerah	Anggaran pengawasan tidak mencapai target	RSO.26.35.04.18	Prioritas kegiatan berdasarkan tingkat risiko, efisien anggaran, usulan penambahan anggaran pada perubahan APBD	Rapat TAPD, Surat Usulan, Laporan Evaluasi	Sekretariat Inspektorat	Inspektor, BPKPD, Bappeda	Triwulan I-IV 2026	Sesuai realisasi	Dilakukan sesuai kemampuan anggaran
	Sasaran: 2. Meningkatkan Kinerja Inspektorat			2. Jumlah inovasi yang diterapkan	Inovasi pengawasan tidak berkembang	RSO.26.35.04.10	Penyusunan roadmap inovasi, pembentukan tim inovasi, benchmarking, lomba inovasi internal	SK Tim, SOP, Rapat Koordinasi, Notulen, Laporan Inovasi	Sekretaris Inspektorat/Kasubag Perencanaan	Inspektor	Triwulan I-IV	Sesuai jadwal	Monitoring setiap triwulan
	Sasaran: 2. Meningkatkan Kinerja Inspektorat			2. Jumlah inovasi yang diterapkan	Digitalisasi pengawasan belum optimal	RSO.26.35.04.11	Pengembangan aplikasi pengawasan, pelatihan penggunaan aplikasi, penyediaan sarana TI, pendampingan operator	Aplikasi Pengawasan, SOP, Bimtek, Manual Pengguna	Kasubag Perencanaan/Tim IT	Inspektor dan Auditor	Triwulan I-IV	Sesuai jadwal	Dievaluasi setiap semester
	Sasaran: 2. Meningkatkan Kinerja Inspektorat			1. Nilai LAKIP	Nilai LAKIP Inspektorat tidak mencapai target	RSO.26.35.04.08	Monitoring dan evaluasi kinerja berkala, revisi IKU, penyusunan rencana aksi peningkatan SAKIP, pendampingan penyusunan LKIP	Dokumen SAKIP, Laporan Kinerja, Berita Acara, Rencana Aksi	Kasubag Perencanaan	Inspektor	Bulanan dan Triwulan	Sesuai jadwal	Dilakukan evaluasi capaian IKU
II. Risiko Operasional Inspektorat													
	Program Penyelenggaraan Pengawasan												
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Tindak lanjut rendah	ROO.26.35.04.10	Monitoring tindak lanjut hasil pengawasan secara berkala, rapat evaluasi, penyampaian surat peringatan kepada OPD	Surat Tindak Lanjut, Rekap TLHP, Berita Acara Rapat, Aplikasi SIM HP	Ituan/Tim Auditor	Inspektor, Kepala OPD	Triwulan I-IV	Sesuai jadwal	Monitoring setiap triwulan
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Rekomendasi kurang implementatif	ROO.26.35.04.09	Revisi kualitas rekomendasi sebelum LHP diterbitkan, pembahasan exit meeting	Kertas Kerja Audit, Checklist QA, Berita Acara Exit Meeting	Ketua Tim Audit	Pengendali Teknis/Inspektor	Setiap pengulangan	Sesuai pengulangan	Dilakukan QA internal
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Rekomendasi keuangan tidak diindaklanjuti	ROO.26.35.04.15	Monitoring penyelesaian rekomendasi, koordinasi dengan OPD dan BPKAD, pemberian surat peringatan	Rekap TLHP, Surat Monitoring, Notulen Rapat	Itcan	Inspektor, Kepala OPD	Bulanan	Sesuai jadwal	Dilaporkan dalam rapat pimpinan
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen keuangan belum lengkap	ROO.26.37.04.11	Pemeriksaan kelengkapan dokumen sebelum audit, permintaan 1 dokumen tambahan	Checklist Dokumen, Surat Permintaan Data	Ketua Tim Audit	Auditor	Sebelum pemeriksaan	Sesuai jadwal	Dokumen diverifikasi terlebih dahulu
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Bukti transaksi tidak memadai	ROO.26.37.04.12	Pengujian bukti transaksi, konfirmasi kepada pihak terkait, pemeriksaan fisik bila diperlukan	Kertas Kerja Audit, Konfirmasi, Dokumentasi	Auditor	Ketua Tim Audit	Selama pemeriksaan	Sesuai jadwal	Mengacu pada SAKIP
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kesalahan pengujian transaksi	ROO.26.37.04.13	Supervisi pengujian, revisi KKA oleh Ketua Tim dan Pengendali Teknis	Kertas Kerja Audit, Checklist Revisi	Ketua Tim	Pengendali Teknis	Selama pemeriksaan	Sesuai jadwal	Dilakukan quality assurance
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	LHP tertambat diterbitkan	ROO.26.35.04.85	Penyusunan jadwal audit, monitoring penyelesaian KKA, evaluasi progres mingguan	Jadwal Audit, Monitoring Progres, Notulen	Ketua Tim Audit	Itcan/Inspektor	Setiap pengulangan	Sesuai jadwal	Target sesuai PKPT
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Pengawasan Internal	Revisi Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Kinerja	Pengujian atas capaian kinerja tidak dilakukan secara memadai	ROO.26.35.04.20	Penyusunan Program Kerja Audit berbasis risiko, supervisi pelaksanaan audit kinerja	Program Kerja Audit, KKA, Checklist Supervisi	Ketua Tim Audit	Pengendali Teknis	Selama revisi	Sesuai jadwal	Mengacu pada SAKIP dan Pedoman Audit

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Risiko	Kode Risiko	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomsiliasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a							b	c	d	e	f	g	h
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	OPD tidak menindaklanjuti rekomendasi hasil reviu	ROO.26.35.04.24	Monitoring tindak lanjut hasil reviu, rapat koordinasi dengan OPD, pengimbalan surat pengingat	Rekap Tindak Lanjut, Surat Monitoring, Berita Acara	Irbat/Tim Reviu	Inspektur, Kepala OPD	Triwulan I-IV	Sesuai jadwal	Dievaluasi setiap triwulan
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Terjadi perubahan regulasi mengenai penyusunan LKJP	ROO.26.35.04.21	Monitoring regulasi, sosialisasi peraturan terbaru, penyesuaian pedoman reviu	Surat Edaran, Pedoman Reviu, Bimtek, Nulken Sosialisasi	Bagian Perencanaan/Sekretariat	Tim Reviu, Inspektur	Triwulan I dan sewaktu-waktu	Sesuai pelaksanaan	Disesuaikan dengan regulasi terbaru
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Monitoring tindak lanjut belum dilaksanakan secara berkala	ROO.26.35.04.25	Menyusun jadwal monitoring, monitoring berkala, rapat evaluasi tindak lanjut	Jadwal Monitoring, Rekap TL, Berita Acara, Laporan Monitoring	Irbat/Pengendali Teknis	Inspektur	Triwulan I-IV	Sesuai jadwal	Dievaluasi setiap triwulan
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Jadwal reviu laporan kinerja tidak sesuai dengan jadwal penyusunan LKJP OPD	ROO.26.35.04.16	Penyusunan kalender reviu, koordinasi dengan Bappeda dan OPD	Kalender Reviu, Surat Koordinasi, WhatsApp Group, Email	Kasubag Perencanaan	Tim Reviu dan OPD	Awal Tahun	Sesuai jadwal	Sinkronisasi dengan jadwal LKJP
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Data kinerja yang disampaikan tidak akurat atau tidak valid	ROO.26.35.04.18	Verifikasi data, konfirmasi kepada OPD, validasi dokumen pendukung	Checklist Verifikasi, Berita Acara, Klarifikasi, Kertas Kerja Reviu	OPD dan Tim Reviu	Ketua Tim/Pengendali Teknis	Selama reviu	Sesuai pelaksanaan	Menggunakan data yang telah diverifikasi
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan Hasil Reviu terlambat disampaikan	ROO.26.35.04.22	Penyusunan timeline reviu, monitoring progres penyelesaian laporan, supervisi	Jadwal Reviu, Monitoring Progres, Laporan Tahunan	Ketua Tim Reviu	Irbat dan Inspektur	Selap Pengawasan	Sesuai penugasan	Mengacu pada target PKPT
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Rekomendasi hasil reviu kurang jelas atau sulit ditindaklanjuti	ROO.26.35.04.23	Reviu kualitas rekomendasi sebelum laporan ditribukan, pembahasan Ext Meeting	Checklist Quality Assurance, Berita Acara, Ext Meeting	Ketua Tim	Pengendali Teknis/Inspektur	Selap Pengawasan	Sesuai pelaksanaan	Mengacu pada SAPI
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Dokumen LKPD dan kertas kerja pendukung belum lengkap	ROO.26.35.04.27	Pemeriksaan kelengkapan dokumen sebelum reviu, permintaan kelengkapan kepada OPD	Checklist Dokumen, Surat Permintaan Data	OPD	Tim Reviu	Sebelum reviu	Sesuai pelaksanaan	Dokumen harus lengkap sebelum pengisian
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Data pendukung laporan keuangan tidak akurat atau tidak konsisten	ROO.26.35.04.28	Rekonsiliasi data, uji konsistensi, konfirmasi kepada pengelola keuangan OPD	Rekonsiliasi Data, Kertas Kerja Reviu, Berita Acara, Klarifikasi	PIK/ Bendahara/OPD	Tim Reviu	Selama reviu	Sesuai pelaksanaan	Dilakukan pengisian ulang antar dokumen
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Rekonsiliasi data antara OPD dan BPKAD belum selesai	ROO.26.35.04.31	Melakukan koordinasi dan monitoring rekonsiliasi secara berkala serta menetapkan batas waktu penyelesaian	Surat Permintaan Data, Berita Acara Rekonsiliasi, Rekap Rekonsiliasi, Email/WhatsApp	BPKAD dan OPD	Tim Reviu, Inspektur	Selama pelaksanaan reviu	Sesuai jadwal	Dilakukan sebelum penyusunan laporan hasil reviu
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	OPD tidak segera menindaklanjuti rekomendasi hasil reviu	ROO.26.35.04.35	Monitoring tindak lanjut, rapat koordinasi, dan pengimbalan surat pengingat kepada OPD	Rekap Tindak Lanjut, Surat Monitoring, Berita Acara, Dashboard TL	Irbat/Tim Reviu	Inspektur dan Kepala OPD	Triwulan I-IV	Sesuai jadwal	Dievaluasi secara berkala
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Keterlambatan penyelesaian koreksi hasil reviu oleh OPD	ROO.26.35.04.37							
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Jadwal reviu laporan keuangan tidak selaras dengan jadwal penyusunan LKPD	ROO.26.35.04.26	Menyusun jadwal reviu bersama BPKAD dan melakukan koordinasi dengan seluruh OPD	Kalender Reviu, Surat Koordinasi, Jadwal Reviu	Sekretariat Inspektur/BPKAD	Tim Reviu dan OPD	Awal Tahun dan sebelum reviu	Sesuai jadwal	Sinkron dengan jadwal penyusunan LKPD
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Pengisian prosedur reviu tidak dilaksanakan secara memadai	ROO.26.35.04.29	Supervisi pelaksanaan reviu, reviu Kerja Reviu, dan quality assurance oleh Pengendali Teknis	Program Kerja Reviu, Checklist Supervisi, Kertas Kerja Reviu	Ketua Tim Reviu	Pengendali Teknis/Inspektur	Selama reviu	Sesuai jadwal	Mengacu pada Pedoman Reviu App
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Auditor belum memahami perubahan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) atau regulasi terbaru	ROO.26.35.04.30	Sosialisasi regulasi, bimbingan teknis, workshop, dan penyediaan pedoman terbaru	Bimtek, SOP, Modul, Surat Edaran, Nulken	Sekretariat Inspektur/Narasumber	Auditor dan P2UPD	Triwulan I atau saat terdapat perubahan regulasi baru	Sesuai pelaksanaan	Dilakukan setiap terdapat perubahan regulasi
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Gangguan aplikasi SIPD, SIMDA, atau aplikasi pendukung lainnya menghambat reviu	ROO.26.35.04.32	Koordinasi dengan admin SIPD/BPKAD, backup data, penggunaan aplikasi alternatif/manual apabila diperlukan	Helpdesk, Grup Koordinasi, Backup Database, Berita Acara Gangguan	Admin SIPD/BPKAD/Tim IT	Tim Reviu	Selama pelaksanaan reviu	Sesuai kejadian	Dilakukan mitigasi apabila terjadi gangguan sistem

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Risiko	Kode Risiko	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a							b	c	d	e	f	g	h
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Revisi Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Keuangan	Laporan Hasil Revisi terdapat disimpulkan kepada Kepala Daerah	ROO.26.35.04.33	Menyusun jadwal penyelesaian revisi, melakukan monitoring progres penyusunan LHR, supervisi oleh Pengendali Teknis dan Inspektur sebelum penyampaian	Jadwal Revisi, Laporan Monitoring, Checklist Penyelesaian LHR, Berita Acara	Ketua Tim Revisi	Inspektur	Selanjutnya pengisian revisi	Sesuai jadwal	Penyampaian mengacu pada jadwal penyusunan LKPD
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Revisi Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Keuangan	Perubahan regulasi pengelolaan keuangan daerah menjelang penyampaian LKPD	ROO.26.35.04.38	Monitoring regulasi terbaru, sosialisasi kepada auditor, pemberian pedoman dan program kerja revisi	Surat Edaran, Pedoman Revisi, Bimtek, Notulen Sosialisasi	Sekretariat Inspektoral/BPKAD	Tim Revisi	Triwulan I atau saat terbit regulasi	Sesuai pelaksanaan	Dilaksanakan setiap ada perubahan regulasi
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Revisi Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Keuangan	Rekomendasi hasil revisi tidak jelas atau tidak operasional	ROO.26.35.04.34	Revisi kualitas rekomendasi, pembahasan pada exit meeting, quality assurance sebelum LHR diterbitkan	Kertas Kerja Revisi, Checklist OA, Berita Acara Exit Meeting	Ketua Tim Revisi	Pengendali Teknis dan Inspektur	Selanjutnya pengisian	Sesuai jadwal	Rekomendasi harus memenuhi prinsip SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound)
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Desa	Jumlah hasil Pengawasan Desa	Transportasi laut terbatas	ROO.26.35.04.40	Menyusun jadwal pengawasan menyesuaikan jadwal kapal/cuaca, koordinasi dengan pemerintah kecamatan/desa, menyediakan anggaran transportasi yang memadai, memanfaatkan rapat daring bila memungkinkan	Jadwal Pengawasan, Surat Tugas, Jadwal Pelayaran, Grup WhatsApp, Zoom Meeting	Sekretariat Inspektoral/Tim Pengawasan Desa	Tim Pengawasan, Inspektur	Sebelum dan selama pelaksanaan pengawasan	Sesuai kondisi lapangan	Risiko khas wilayah kepulauan, jadwal disesuaikan dengan kondisi cuaca dan transportasi
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Desa	Jumlah hasil Pengawasan Desa	Cuaca buruk menghambat pemantauan	ROO.26.35.04.39	Menyusun jadwal pemantauan dengan mempertimbangkan prakiraan cuaca, menyiapkan jadwal alternatif, dan berkoordinasi dengan penyedia transportasi	Jadwal Pengawasan, Informasi BMKG, Surat Tugas, Grup WhatsApp	Sekretariat Inspektoral/Ketua Tim	Tim Pengawasan Desa	Sebelum dan selama pemantauan	Sesuai kondisi lapangan	Jadwal dapat disesuaikan apabila terjadi cuaca ekstrem
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Desa	Jumlah hasil Pengawasan Desa	Desa prioritas belum dipetakan berdasarkan risiko	ROO.26.35.04.38	Menyusun pemetaan risiko desa sebagai dasar penyusunan PKPT dan penentuan prioritas pengawasan	Dokumen Peta Risiko, Register Risiko, PKPT, Berita Acara	Kasubag Perencanaan/Inan	Inspektur dan Tim Pengawasan	Awal Tahun	Sesuai jadwal	Menggunakan pendekatan Risk Based Audit
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Desa	Jumlah hasil Pengawasan Desa	Dokumen APBDes tidak lengkap	ROO.26.35.04.41	Menyampaikan permintaan kelengkapan dokumen sebelum pemantauan, melakukan checklist kelengkapan administrasi	Surat Permintaan Dokumen, Checklist Kelengkapan, Berita Acara	Pemerintah Desa	Tim Pengawasan Desa	Sebelum pemantauan	Sesuai jadwal	Pemantauan dimulai setelah dokumen lengkap
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Desa	Jumlah hasil Pengawasan Desa	Tindak lanjut hasil pemantauan rendah	ROO.26.35.04.42	Monitoring tindak lanjut rekomendasi, rapat koordinasi dengan pemerintah desa dan kecamatan, penyampaian surat pengingat	Rikap Tindak Lanjut, Surat Monitoring, Berita Acara, Dashboard TLHP	Iran/Ketua Tim	Inspektur, Camat, Kepala Desa	Triwulan I-IV	Sesuai jadwal	Dievaluasi secara berkala setiap triwulan
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah kesepakatan Pengawasan internal yang terbentuk	Koordinasi antar APIP kurang efektif	ROO.26.35.04.44	Menyusun jadwal koordinasi rutin, melaksanakan rapat koordinasi dan evaluasi kerja sama APIP	Surat Undangan, Notulen Rapat, Berita Acara, Grup WhatsApp, Email	Sekretariat Inspektoral	Inspektur, AP/PP/BKPP/Inspektoral lainnya	Triwulan I-IV	Sesuai jadwal	Dilaksanakan secara berkala
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah kesepakatan Pengawasan internal yang terbentuk	Ruang lingkup kerja sama tidak jelas	ROO.26.35.04.43	Menyusun dan menyepakati ruang lingkup kerja sama dalam MoU/PPKS beserta rencana aksi	MoU, PKS, TOR, Rencana Aksi	Sekretariat Inspektoral	Seluruh pihak yang bekerja sama	Sebelum pelaksanaan kerja sama	Sesuai jadwal	Ruang lingkup disepakati bersama
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah kesepakatan Pengawasan internal yang terbentuk	Kerja sama tidak berlanjut	ROO.26.35.04.45	Monitoring pelaksanaan kerja sama, evaluasi berkala, dan penyusunan rencana tindak lanjut	Laporan Monitoring, Berita Acara Evaluasi, Rencana Tindak Lanjut	Sekretariat Inspektoral	Inspektur dan Mitra Kerja Sama	Semester I dan Semester II	Sesuai jadwal	Dievaluasi minimal satu kali dalam satu tahun

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Risiko	Kode Risiko	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a							b	c	d	e	f	g	h
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Masih terdapat rekomendasi hasil pemeriksaan yang belum ditindaklanjuti	ROO.26.35.04.50	Monitoring tindak lanjut rekomendasi, rapat koordinasi dengan OPD, penyempaihan surat pengingat, pemutakhiran data tindak lanjut	Rekap TLHP, Surat Monitoring, Dashboard Tindak Lanjut, Berita Acara	Irban/Tim Monitoring TLHP	Inspektur, Kepala OPD, Sekretaris Daerah	Triwulan I-IV	Sesuai jadwal	Dipantau secara berkala kepada Kepala Daerah
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Terdapat temuan pemeriksaan yang berulang pada OPD yang sama	ROO.26.35.04.51	Melakukan analisis akar penyebab temuan, monitoring berkala, pembinaan kepada OPD, dan evaluasi efektivitas tindak lanjut	Laporan Monitoring, Berita Acara, Rekap TLHP, Dashboard Tindak Lanjut	Irban/Tim Monitoring TLHP	Inspektur, Kepala OPD	Triwulan I-IV	Sesuai jadwal	Dipantau sampai status tidak lanjut selesai
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	OPD belum melaksanakan rekomendasi sesuai batas waktu yang ditetapkan	ROO.26.35.04.57	Menyampaikan surat pengingat, rapat koordinasi, monitoring berkala, dan eskalasi kepada Sekretaris Daerah apabila melewati batas waktu	Surat Pengingat, Rekap TLHP, Notulen Rapat, Dashboard Monitoring	Irban	Inspektur, Sekretaris Daerah, Kepala OPD	Triwulan I-IV	Sesuai jadwal	Dilaksanakan sesuai ketentuan pemantauan TLHP
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kondisi geografis Kepulauan Mentawai menghambat verifikasi tindak lanjut lapangan	ROO.26.35.04.60	Menyusun jadwal verifikasi berdasarkan wilayah, memanfaatkan verifikasi daring apabila memungkinkan, dan koordinasi dengan kecamatan/desa	Jadwal Verifikasi, Surat Tugas, Video Conference, Dokumentasi Lapangan	Sekretariat Inspekturat/Irban	Tim Monitoring	Sesuai jadwal verifikasi	Sesuai kondisi lapangan	Penjajalan memperlengkap an cuaca dan transportasi laut
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Data dan dokumen hasil pemeriksaan BPK RI/APIP belum lengkap	ROO.26.35.04.47	Melakukan inventarisasi dokumen, meminta kelengkapan dokumen kepada OPD, serta verifikasi kelengkapan sebelum monitoring	Checklist Dokumen, Surat Permintaan Data, Berita Acara Verifikasi	OPD/Irban	Tim Monitoring TLHP	Sebelum monitoring	Sesuai jadwal	Monitoring dilakukan setelah dokumen dinyatakan lengkap
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	OPD terlambat menyampaikan laporan/bukti tindak lanjut hasil pemeriksaan	ROO.26.35.04.48	Menyampaikan surat permintaan penyempaihan bukti tindak lanjut, melakukan monitoring berkala, rapat koordinasi, dan pemberian reminder kepada OPD	Surat Permintaan, Rekap TLHP, Dashboard Monitoring, Email/WhatsApp	Irban/Tim Monitoring TLHP	Kepala OPD, Inspektur	Triwulan I-IV	Sesuai jadwal	Dipantau sampai bukti tindak lanjut diterima
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Data tindak lanjut antara OPD, Inspekturat, dan BPK RI tidak sinkron	ROO.26.35.04.53	Melakukan rekonsiliasi data secara berkala, validasi status tindak lanjut, dan koordinasi dengan BPK RI	Berita Acara Rekonsiliasi, Rekap TLHP, Aplikasi Pemantauan TLHP	Tim Monitoring TLHP	Inspektur, OPD, BPK RI Perwakilan Sumbur	Triwulan I-IV	Sesuai jadwal	Rekonsiliasi dilakukan secara berkala

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Risiko	Kode Risiko	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APSP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APSP	Penyelesaian rekomendasi yang berkaitan dengan pihak ketiga, dan Bagian Hukum serta mengantisipasi hambatan	ROO 26.35.04.58	Melakukan koordinasi dengan OPD, penyedia jasa/pihak ketiga, dan Bagian Hukum serta menyusun rencana aksi penyelesaian	Berita Acara Rapat, Surat Koordinasi, Rencana Aksi	OPD/iban	Inspektur, Sekretaris Daerah	Sesuai kebutuhan	Sesuai perkembangan	h Diakukan pemantauan hingga rekomendasi selesai
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APSP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APSP	Pengantian pejabat pengelola keuangan/kegiatan menghambat penyelesaian rekomendasi	ROO 26.35.04.59	Melakukan serah terima informasi tindak lanjut pembinaan kepada pejabat pengantian, dan monitoring penyelesaian rekomendasi	Berita Acara Serah Terima, Surat Edaran, Rekap TLHP	OPD	Inspektur, Kepala OPD	Sesuai terjadi pergantian pejabat	Sesuai kejadian	Menjamin kesinambungan penyelesaian tindak lanjut
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APSP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APSP	Bukti tindak lanjut yang disampaikan OPD tidak sesuai dengan rekomendasi pemeriksaan	ROO 26.35.04.49	Melakukan verifikasi dan validasi bukti tindak lanjut, klarifikasi dengan OPD, serta memberikan pendampingan penyempurnaan bukti	Checklist Verifikasi, Berita Acara Klarifikasi, Surat Pernyataan Perbaikan, Dashboard TLHP	Tim Monitoring TLHP/iban	Kepala OPD, Inspektur	Triwulan I-IV	Sesuai jadwal	Bukti dinyatakan memadai sebelum usulan status selesai
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APSP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APSP	Status penyelesaian tindak lanjut tidak mengambarkan kondisi sebenarnya	ROO 26.35.04.52	Melakukan uji petik/verifikasi lapangan, rekonalisasi data, dan revalu status tindak lanjut secara berkala	Berita Acara Verifikasi, Rekap TLHP, Dokumentasi Lapangan, Dashboard Monitoring	Tim Monitoring TLHP	Inspektur, Kepala OPD	Triwulan I-IV	Sesuai jadwal	Status diperbarui berdasarkan hasil verifikasi
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APSP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APSP	Perencanaan monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan belum berbasis prioritas risiko	ROO 26.35.04.46	Menyusun prioritas monitoring berdasarkan tingkat risiko, nilai temuan, dan batas waktu penyelesaian	Peta Risiko, Register Risiko, Rencana Monitoring, PKPT	Kasubag Perencanaan/iban	Inspektur, Tim Monitoring	Awal Tahun dan Triwulan I	Sesuai jadwal	Menggunakan pendekatan Risk Based Monitoring
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APSP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APSP	Analisis penyebab belum selesainya rekomendasi belum dilakukan secara mendalam	ROO 26.35.04.54	Melakukan analisis akar penyebab (Root Cause Analysis), evaluasi hambatan penyelesaian, dan menyusun rencana aksi perbaikan	Laporan Analisis, Berita Acara Evaluasi, Matriks RCA, Rencana Aksi	iban/Tim Monitoring TLHP	Inspektur, Kepala OPD	Triwulan I-IV	Sesuai jadwal	Menjadi dasar pembinaan dan perbaikan sistem pengendalian
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APSP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APSP	Laporan monitoring dan evaluasi tindak lanjut terlambat disampaikan	ROO 26.35.04.55	Menyusun jadwal penyampaian laporan, melakukan monitoring progres penyusunan laporan, dan revalu oleh atasan sebelum disampaikan	Jadwal Pelaporan, Laporan Monitoring, Checklist Revalu, Email/Surat	Tim Monitoring TLHP	Inspektur, Sekretaris Daerah, Kepala Daerah	Triwulan I-IV	Sesuai jadwal	Mengacu pada jadwal pelaporan yang ditetapkan

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Risiko	Kode Risiko	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APUP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APUP	Laporan tindak lanjut belum memberikan informasi yang memadai untuk pengambilan keputusan	ROO.26.35.04.56	Menetapkan format baku laporan, melakukan validasi data, analisis tren tidak lanjut, dan revaluasi kualitas laporan	Format Laporan, Dashboard TLHP, Rekapitulasi TLHP, Berita Acara Revaluasi	Tim Monitoring TLHP	Inspektur, Sekretaris Daerah, Kepala Daerah	Triwulan I-IV	Sesuai jadwal	Laporan revaluasi analisis, kendala, dan rekomendasi
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		Terdaksananya penyelenggaraan Pengawasan dengan tujuan tertentu	Pemeriksaan tidak selesai sesuai jadwal	ROO.26.35.04.63	Menyusun jadwal pengawasan yang realistis, melakukan monitoring progres pemeriksaan, dan supervisi berkala oleh Pengendali teknis	PKPT, Surat Tugas, Jadwal Pemeriksaan, Laporan Progres	Ketua Tim Pemeriksaan	Pengendali Teknis, Inspektur	Sesuai pengawasan	Sesuai jadwal	Dilakukan monitoring mingguan
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		Terdaksananya penyelenggaraan Pengawasan dengan tujuan tertentu	Dokumen pendukung tidak diberikan lengkap	ROO.26.35.04.64	Menyampaikan permintaan dokumen sebelum pemeriksaan, melakukan verifikasi kelengkapan dokumen, dan koordinasi dengan objek pemeriksaan	Surat Permintaan Dokumen, Checklist Kelengkapan, Berita Acara	OPD/Objek Pemeriksaan	Tim Pemeriksa	Sebelum dan selama pemeriksaan	Sesuai jadwal	Pemeriksaan dilaksanakan setelah dokumen memadai
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		Terdaksananya penyelenggaraan Pengawasan dengan tujuan tertentu	Penentuan objek pemeriksaan tidak berbasis risiko	ROO.26.35.04.61	Menyusun peta risiko, menetapkan prioritas objek berdasarkan tingkat risiko, dan melakukan pembahasan PKPT bersama pimpinan	Register Risiko, PKPT, Berita Acara Pembahasan, Nota Dinas	Kasubag Perencanaan/Itban	Inspektur	Awal Tahun	Sesuai jadwal	Menggunakan pendekatan Risk Based Audit
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		Terdaksananya penyelenggaraan Pengawasan dengan tujuan tertentu	Tim pengawasan tidak memiliki kompetensi sesuai objek pemeriksaan	ROO.26.35.04.62	Menetapkan personel sesuai kompetensi, menyelenggarakan bimbingan teknis, serta melakukan konsultasi teknis apabila diperlukan	SK Tim, Serifikat Diklat, Daftar Kompetensi Auditor, TOR	Sekretariat Inspektur/Itban	Inspektur dan Ketua Tim	Sebelum pengawasan	Sesuai jadwal	Penugasan mempertimbangkan kompetensi auditor
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		Terdaksananya penyelenggaraan Pengawasan dengan tujuan tertentu	LHP terlambat diterbitkan	ROO.26.35.04.65	Menyusun jadwal penyelesaian LHP, memantau progres penyusunan laporan, dan melakukan revaluasi sebelum penerbitan	Jadwal Pengawasan, Monitoring Progres, Checklist Revaluasi, Kertas Kerja Pemeriksaan	Ketua Tim	Pengendali Teknis dan Inspektur	Sesuai jadwal	Sesuai jadwal	Mengacu pada target waktu dalam PKPT
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		Jumlah Laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	Auditor yang ditugaskan belum memiliki kompetensi sesuai objek pemeriksaan	ROO.26.35.04.68	Melakukan pelatihan kompetensi auditor, pelatihan teknis, coaching oleh auditor senior, dan pengawasan sesuai keahlian	Matriks Kompetensi Auditor, Serifikat Diklat, SK Pengawasan, Program Coaching	Sekretariat Inspektur/Kepegawaian	Inspektur, Itban	Sebelum pengawasan	Sesuai jadwal	Evaluasi kompetensi dilakukan secara berkala
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		Jumlah Laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	Dokumen dan data dari OPD tidak lengkap atau terlambat diberikan	ROO.26.35.04.69	Menyusun peta risiko, menetapkan prioritas objek berdasarkan tingkat risiko, dan melakukan pembahasan PKPT bersama pimpinan	Register Risiko, PKPT, Berita Acara Pembahasan, Nota Dinas	Kasubag Perencanaan/Itban	Inspektur	Awal Tahun	Sesuai jadwal	Menggunakan pendekatan Risk Based Audit
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		Jumlah Laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	Peaksanaan pemeriksaan tidak sesuai jadwal akibat kondisi geografis Kepulauan Mentawai	ROO.26.35.04.70	Menetapkan personel sesuai kompetensi, menyelenggarakan bimbingan teknis, serta melakukan konsultasi teknis apabila diperlukan	SK Tim, Serifikat Diklat, Daftar Kompetensi Auditor, TOR	Sekretariat Inspektur/Itban	Inspektur dan Ketua Tim	Sebelum pengawasan	Sesuai jadwal	Penugasan mempertimbangkan kompetensi auditor
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		Jumlah Laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	Terjadi intervensi terhadap independensi auditor	ROO.26.35.04.71	Menyusun jadwal penyelesaian LHP, memantau progres penyusunan laporan, dan melakukan revaluasi sebelum penerbitan	Jadwal Pengawasan, Monitoring Progres, Checklist Revaluasi, Kertas Kerja Pemeriksaan	Ketua Tim	Pengendali Teknis dan Inspektur	Selama pengawasan	Sesuai jadwal	Mengacu pada target waktu dalam PKPT
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		Jumlah Laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	OPD tidak menindaklanjuti rekomendasi sesuai batas waktu	ROO.26.35.04.74	Melakukan pembinaan kompetensi auditor, pelatihan teknis, coaching oleh auditor senior, dan pengawasan sesuai keahlian	Matriks Kompetensi Auditor, Serifikat Diklat, SK Pengawasan, Program Coaching	Sekretariat Inspektur/Kepegawaian	Inspektur, Itban	Sebelum pengawasan	Sesuai jadwal	Evaluasi kompetensi dilakukan secara berkala

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Risiko	Kode Risiko	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Pengawasan dengan Tujuan tertentu	Jumlah Laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	Penetapan objek Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) tidak berdasarkan tingkat risiko	ROO.26.35.04.66	Menyusun pemetaan risiko OPD sebagai dasar penetapan objek PDTT, melaksanakan rapat penetapan PKPT berbasis risiko, revu oleh Inspektur	Dokumen PKPT, Rak Register, Notulen Rapat, Surat Keputusan Inspektur	Irian Koordinator Perencanaan	Inspektur, Tim Pengawas	Januari	Januari	Dilaksanakan setiap siklus penyusunan PKPT
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Pengawasan dengan Tujuan tertentu	Jumlah Laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	Surat Tugas dan Program Kerja Pengawasan terlambat diterbitkan	ROO.26.35.04.67	Menyusun jadwal pemberian Surat Tugas, monitoring administrasi, checklist kelengkapan dokumen sebelum pelaksanaan pengawasan	Surat Tugas, Disposisi, Checklist Administrasi, Whats-pp/Email	Sekretariat Inspektur, Kasubag Administrasi	Inspektur, Irian, Tim Pengawas	Sebelum pelaksanaan pengawasan	Sesuai pelaksanaan	Monitoring dilakukan setiap pengulangan
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Pengawasan dengan Tujuan tertentu	Jumlah Laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) terlambat	ROO.26.35.04.72	Menetapkan batas waktu penyusunan LHP, monitoring progres oleh Pengendali Teknis, revu berjenjang sebelum penandatanganan	LHP, Lumbur Monitoring, Aplikasi e-Office/SIM HP, Email	Ketua Tim Pengawas	Pengendali Teknis, Irian, Inspektur	Maksimal 14 hari setelah berakhirnya pengawasan	Sesuai realisasi	Dievaluasi setiap akhir kegiatan pengawasan
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Pengawasan dengan Tujuan tertentu	Jumlah Laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	Rekomendasi hasil pengawasan kurang tepat atau tidak dapat diindaklanjuti	ROO.26.35.04.73	Review berjenjang terhadap konsep LHP, pembahasan hasil audit bersama tim, quality assurance sebelum penerbitan LHP	Rapat pembahasan, Nota Dinas, LHP, Email, Whats-pp Group	Ketua Tim Audit	Inspektur, Irian, Auditor, OPD	Selanjutnya pelaksanaan pengawasan	Sesuai pelaksanaan	Dilaksanakan sebelum LHP diterbitkan
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Pengawasan dengan Tujuan tertentu	Jumlah Laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu tidak memberikan perbaikan tata kelola	ROO.26.35.04.75	Monitoring tindak lanjut rekomendasi, koordinasi dengan OPD, evaluasi berkala TLHP	Rapat koordinasi, SIM HP, Surat, Email	Irian/Ketua Tim	Kapala OPD, Inspektur	Triwulan	Didit setelah pelaksanaan	Monitoring sampai rekomendasi selesai
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyusunan Kebijakan dan Fasilitas Pengawasan	Penyusunan Kebijakan dan Fasilitas Pengawasan	Meningkatnya kepatuhan dan implementasi perangkat daerah dalam menjalankan brokrasi	Kebijakan tidak diterapkan OPD	ROO.26.35.04.77	Penyusunan jadwal kerja, pembentukan tim penyusun, monitoring progres, rapat evaluasi	Jadwal kerja, Notulen rapat, Email, WhatsApp Group	Sekretariat Perencanaan	Tim Penyusun, Inspektur	Semester I	Dit di sesuai realisasi	Dievaluasi setiap bulan
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyusunan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Penyusunan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Meningkatnya kepatuhan dan implementasi perangkat daerah dalam menjalankan brokrasi	Kebijakan tidak diterapkan OPD	ROO.26.35.04.78	Sosialisasi kebijakan, bimbingan, monitoring implementasi, evaluasi ketaatan OPD	Surat Edaran, Bimtek, Zoom Meeting, Whats-App Group	Inspektur	Seluruh OPD	Selanjutnya pelaksanaan	Didit sesuai realisasi	Dilakukan monitoring berkala
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyusunan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Penyusunan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun	Kebutuhan kebijakan teknis tidak teridentifikasi secara lengkap	ROO.26.35.04.79	Inventarisasi kebutuhan kebijakan dari seluruh OPD, rapat koordinasi, telaah regulasi, penyusunan daftar kebutuhan kebijakan	Rapat koordinasi, Notulen, Surat Permintaan Data, Email, WhatsApp Group	Perencanaan Sekretariat Inspektur	Inspektur, Irian, Tim Penyusun Kebijakan	Triwulan I	Sesuai realisasi	Dilaksanakan sebelum penyusunan rancangan kebijakan
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyusunan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Penyusunan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Meningkatnya kepatuhan dan implementasi perangkat daerah dalam menjalankan brokrasi	Kebijakan teknis tidak sesuai regulasi terbaru	ROO.26.35.04.76	Monitoring perubahan regulasi, telaah hukum, konsultasi dengan APIP/BPKP/Bagian Hukum, review naiknaik kebijakan	Surat Edaran, Email, Rapat, Website JDH	Tim Penyusun Kebijakan	Inspektur, Tim Penyusun	Selanjutnya perubahan regulasi	Sesuai realisasi	Dirvu sebelum ditetapkan
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyusunan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Penyusunan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun	Penyusunan kebijakan teknis melebihi jadwal yang telah ditetapkan	ROO.26.35.04.82	Menyusun jadwal kerja, monitoring progres penyusunan, rapat evaluasi berkala, penetapan target penyelesaian	Jadwal Kerja, Notulen Rapat, Email, Whats-App Group	Ketua Tim Penyusun	Inspektur, Sekretaris, Tim Penyusun	Sesuai Time Schedule (Triwulan I-II)	Sesuai realisasi	Dievaluasi setiap bulan
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyusunan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Penyusunan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun	Kebijakan teknis terlambat ditetapkan oleh pejabat berwenang	ROO.26.35.04.84	Koordinasi intensif dengan pejabat penilai, penyampaian draft lebih awal, monitoring proses paraf dan penetapan	Surat Pengantar, Nota Dinas, Email, Whats-App Group, Rapat	Ketua Tim Penyusun	Inspektur/Pejabat Penetap	Sebelum batas waktu penetapan	Sesuai realisasi	Dilakukan monitoring sampai kelengkapan ditetapkan

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Risiko	Kode Risiko	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkondisian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a							b	c	d	e	f	g	h
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun	Kebijakan teknis tidak mampu meningkatkan kualitas fasilitas pengawasan	ROO.26.35.04.88	Analisis kebutuhan, konsultasi dengan pemangku kepentingan, uji publik/internal review, evaluasi efektivitas kebijakan	Rapat Koordinasi, FGD, Notelem, Email, WhatsApp Group	Tim Penyusun Kebijakan	Inspektur, Sekretaris, Irbat, Tim Penyusun	Triwulan I	Disiat sesuai realisasi	Dievaluasi setelah implementasi kebijakan
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun	Data dan informasi sebagai dasar penyusunan kebijakan tidak lengkap	ROO.26.35.04.80	Inventarisasi kebutuhan data, permintaan data kepada OPD, verifikasi (dan validasi data, penyesuaian daftar periksa (checklist))	Surat, permintaan data, Email, aplikasi berbagi data, Rapat koordinasi	Perencana/Tim Penyusun	Tim Penyusun, Inspektur	Sebelum penyusunan rancangan kebijakan	Disiat sesuai realisasi	Dilakukan validasi sebelum penyusunan draft
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun	Draft kebijakan teknis tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru	ROO.26.35.04.81	Telaah regulasi, review oleh Bagian Hukum, konsultasi dengan BPKP/Kementerian terkait, review berjalan	JDIH, Surat, Email, Rapat pembahasan	Tim Penyusun Kebijakan	Inspektur, Bagian Hukum, Tim Penyusun draft	Selama proses penyusunan draft	Disiat sesuai realisasi	Revisi dilakukan sebelum peneltapan
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun	Terjadi perbedaan pendapat antar unit terkait substansi kebijakan	ROO.26.35.04.83	Harmonisasi dan sinkronisasi substansi, rapat koordinasi lintas unit, penyelesaian melalui pembahasan bersama dan persetujuan pimpinan	Rapat koordinasi, FGD, Notelem, Email	Kelua Tim Penyusun	Seluruh unit terkait, Inspektur	Selama pembahasan kebijakan	Disiat sesuai realisasi	Perbedaan diselesaikan melalui keputusan pimpinan
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun	Kebijakan teknis belum dipahami oleh perangkat daerah	ROO.26.35.04.85	Melaksanakan sosialisasi, bimbingan teknis, penyusunan pedoman/ petunjuk teknis, penyediaan media konsultasi	Sosialisasi, Bimtek, Surat Edaran, Buku Pedoman, Email, WhatsApp Group	Tim Penyusun Kebijakan/Sekretariat Inspekturat	Seluruh OPD	Setelah kebijakan ditetapkan	Disiat sesuai realisasi	Dilakukan secara berkala sesuai kebutuhan
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun	OPD tidak menerapkan kebijakan teknis yang telah ditetapkan	ROO.26.35.04.86	Monitoring implementasi kebijakan, asistensi kepada OPD, evaluasi kepatuhan, penyampaian rekomendasi perbaikan	Monitoring lapangan, Rapat Evaluasi, Laporan Monitoring, Email	Inspektur/Irbat	Kapala OPD	Triwulan	Disiat sesuai realisasi	Dilaksanakan sebagai bagian monitoring implementasi
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun	Tidak dilakukan evaluasi terhadap efektivitas kebijakan teknis	ROO.26.35.04.87	Menyusun jadwal evaluasi, pengumpulan data implementasi, survei kepuasan pengguna, review dan penyempurnaan kebijakan	Laporan Evaluasi, Kuesioner, Rapat Evaluasi, Email	Tim Evaluasi/Perencana	Inspektur dan Tim Penyusun	Semesteran/Tahunan	Disiat sesuai realisasi	Hasil evaluasi menjadi dasar revisi kebijakan
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi	Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi/ Meningkatkan Kinerja OPD yang telah dilakukan Pendampingan	Tidak dilakukan monitoring tindak lanjut	ROO.26.35.04.92	Menyusun rencana monitoring, meminta laporan tindak lanjut dari OPD, melakukan verifikasi lapangan, rapat evaluasi tindak lanjut	Laporan Tindak Lanjut, Surat, Email, WhatsApp Group, Rapat Koordinasi	Tim Pendamping/Irbat	Inspektur dan OPD terkait	Triwulan	Disiat sesuai realisasi	Monitoring dilakukan sampai seluruh rekomendasi ditindaklanjuti
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi	Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi/ Meningkatkan Kinerja OPD yang telah dilakukan Pendampingan	OPD tidak mengajukan permohonan pendampingan	ROO.26.35.04.89	Sosialisasi layanan pendampingan, penyampaian surat permohonan kepada OPD, identifikasi kebutuhan pendampingan, koordinasi dengan OPD	Surat Edaran, Surat Permohonan, Email, WhatsApp Group, Rapat Koordinasi	Inspektur/Irbat/Tim Pendamping	Seluruh OPD	Awal Tahun dan sesuai kebutuhan	Disiat sesuai realisasi	Dilaksanakan secara berkala
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi	Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi/ Meningkatkan Kinerja OPD yang telah dilakukan Pendampingan	Jadwal pendampingan sering berubah	ROO.26.35.04.90	Menyusun jadwal pendampingan bersama OPD, konfirmasi ulang jadwal, monitoring pelaksanaan, penjadwalan kembali apabila diperlukan	Surat Tugas, Kalender Kegiatan, Email, WhatsApp Group	Tim Pendamping	OPD yang didampingi	Sebelum pelaksanaan pendampingan	Disiat sesuai realisasi	Perubahan jadwal disesuaikan kedua belah pihak

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Risiko	Kode Risiko	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a							b	c	d	e	f	g	h
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Pendampingan dan Asistensi		Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi/ Meningkatkan Kinerja OPD yang telah dilakukan Pendampingan	Rekomendasi pendampingan tidak dilaksanakan	ROO.26.35.04.91	Monitoring tidak lanjut rekomendasi, permintaan laporan tidak lanjut, asistensi lanjutan, evaluasi hasil pendampingan	Laporan Pendampingan, Berita Acara, Surat, Email, Rapat Evaluasi	Tim Pendamping	Kepala OPD dan Inspektur	Triwulan	Disisi sesuai realisasi	Dilakukan sampai rekomendasi ditindaklanjuti
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Pendampingan dan Asistensi		Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi/ Meningkatkan Kinerja OPD yang telah dilakukan Pendampingan	Kinerja OPD tidak meningkat setelah pendampingan	ROO.26.35.04.93	Evaluasi efektivitas pendampingan, identifikasi akar penyebab, penyusunan rencana aksi perbaikan, pendampingan lanjutan, monitoring indikator kinerja	Laporan Evaluasi, Rapat Evaluasi, Dashboard Kinerja, Email	Tim Pendamping/Perencana	Inspektur dan Kepala OPD	Semesteran	Disisi sesuai realisasi	Hasil evaluasi menjadi dasar perbaikan metode pendampingan
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Pendampingan dan Asistensi		Jumlah Perangkat daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Cueca dan transportasi laut menghambat pendampingan	ROO.26.35.04.97	Menyusun jadwal dengan mempertimbangkan prakiraan cuaca, menyiapkan jadwal alternatif, koordinasi dengan pihak transportasi, memanfaatkan pendampingan daring apabila memungkinkan	Surat Tugas, BMKG, Whats/ App Group, Zoom Meeting, Email	Tim Pendamping/ibn	Inspektur, OPD yang didampingi	Sebelum dan selama pelaksanaan pendampingan	Disisi sesuai realisasi	Diselesaikan dengan kondisi cuaca dan transportasi antarpulau
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Pendampingan dan Asistensi		Jumlah Perangkat daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Rekomendasi hasil pendampingan tidak ditindaklanjuti	ROO.26.35.04.98	Menyusun rencana aksi tidak lanjut, monitoring berkala, permintaan laporan tidak lanjut, verifikasi penyelesaian rekomendasi	Laporan Pendampingan, Berita Acara, Surat, Email, Rapat Evaluasi	Tim Pendamping	Kepala OPD, Inspektur	Triwulan	Disisi sesuai realisasi	Monitoring dilakukan sampai rekomendasi selesai ditindaklanjuti
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Pendampingan dan Asistensi		Jumlah Perangkat daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Penetapan OPD sasaran pendampingan belum berdasarkan prioritas risiko	ROO.26.35.04.94	Menyusun kriteria prioritas berbasis risiko, melakukan penelaan risiko OPD, menetapkan sasaran melalui rapat pimpinan	Dokumen Peta Risiko, Rapat Koordinasi, Nota Dinas	Pencapaian/ibn	Inspektur, Tim Pendamping	Awal Tahun Anggaran	Disisi sesuai realisasi	Mengacu pada Risk Register dan PKPT
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Pendampingan dan Asistensi		Jumlah Perangkat daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jadwal pendampingan berubah	ROO.26.35.04.95	Menyusun jadwal bersama OPD, melakukan konfirmasi sebelum pelaksanaan, menetapkan jadwal pengganti apabila terjadi perubahan	Surat Tugas, Kalender Kegiatan, Whats/ App Group, Email	Tim Pendamping	OPD yang didampingi	Sebelum pelaksanaan pendampingan	Disisi sesuai realisasi	Perubahan jadwal didokumentasikan dan dituliskan para pihak
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Pendampingan dan Asistensi		Jumlah Perangkat daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen pendukung tidak lengkap	ROO.26.35.04.96	Menyusun dan menyebarkan checklist/daftar elemen kelengkapan dokumen sebelum pelaksanaan pendampingan, serta menyelenggarakan verifikasi awal (pre-assessment) kelengkapan administrasi.	Daftar Simakan (Checklist) Dokumen Pendukung / Surat Pemberitahuan Pendampingan / Nota Dinas	Perangkat Daerah (OPD) / Subbag Program OPD	Tim Pendamping / Tim Asistensi Inspektur	Sebelum Pelaksanaan Asistensi (H-7)	H-3 Sebelum Pendampingan	Memastikan efektivitas dan kelancaran pelaksanaan pendampingan
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Pendampingan dan Asistensi		Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Brokrasi	Dokumen Reformasi Brokrasi OPD belum lengkap	ROO.26.35.04.99	Melakukan sosialisasi pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Brokrasi (PMPRB), menyediakan klinik/helpdesk konsultasi RB, serta menetapkan batas waktu pemenuhan data dukung (evidence).	Surat Edaran Pemenuhan Evidence RB / Aplikasi PMPRB / Lembar Verifikasi Penilaian RB	Tim Relokasi Brokrasi CPD / Agen Perubahan	Tim Verifikator / Tim Penilai Internal (TP) RB	Triwulan I - Triwulan II	Sesuai Jadwal Penilaian PMPRB	Memaksimalkan capaian Indeks Reformasi Brokrasi Kabupaten/Kota
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Pendampingan dan Asistensi		Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Brokrasi	OPD tidak menindaklanjuti rekomendasi RB	ROO.26.35.04.103	Monitoring tidak lanjut rekomendasi, rapat evaluasi berkala, penyempitan surat tidak lanjut, pendampingan lanjutan kepada OPD	Surat, Berita Acara, Email, Whats/ App Group, Rapat Koordinasi	Tim RB Inspektur/ibn	Kepala OPD, Inspektur	Triwulan	Disisi sesuai realisasi	Monitoring sampai rekomendasi ditindaklanjuti
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Pendampingan dan Asistensi		Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Brokrasi	Bukti dukung penilaian RB tidak valid	ROO.26.35.04.100	Verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen, checklist bukti dukung, revaluasi, penyesuaian data dukung (evidence)	Checklist Verifikasi, Email, Surat, Aplikasi PMPRB/Portal RB, Rapat	Tim Verifikator RB	Kepala OPD, Tim RB	Sebelum pelaksanaan penilaian	Disisi sesuai realisasi	Sesuai bukti dukung diverifikasi sebelum penilaian

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Risiko	Kode Risiko	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bantuan Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Perubahan regulasi Reformasi Birokrasi	ROO.26.35.04.101	Monitoring regulasi terbaru, sosialisasi perubahan kebijakan, pemberian pedoman penilaian, koordinasi dengan KemenPANRB/BKPP	JDIH, Surat Edaran, Email, Zoom Meeting, Whats-App Group	Tim RB/Perencana	Tim RB, OPD, Inspektur	Sesuai jadwal perubahan regulasi	Ditai sesuai realisasi	Pedoman terbaru sesuai regulasi terbaru
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Verifikasi RB terlambat	ROO.26.35.04.102	Menyusun jadwal verifikasi, menetapkan target waktu, monitoring progres, penambahan personel jika diperlukan, evaluasi berkala	Jadwal Verifikasi, Surat Tugas, Email, WhatsApp Group, Rapat Tim	Ketua Tim RB	Tim Verifikasi, Inspektur	Sesuai jadwal PMPRB (Tahunan)	Ditai sesuai realisasi	Jadwal mengikuti kalender penilaian Reformasi Birokrasi
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Pendampingan dan Asistensi	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Program pencegahan korupsi belum sesuai area risiko	ROO.26.35.04.104	Melakukan pemetaan area risiko korupsi, koordinasi dengan OPD, revu program pencegahan korupsi, penyusunan rencana aksi berdasarkan hasil pemetaan risiko	Rapat Koordinasi, FGD, Notulen, Surat Edaran, Email, MCP KPK	Inspekturat (Tim Pencegahan Korupsi)	Inspektur, Kepala OPD	Awal tahun dan semesteran	Ditai sesuai realisasi	Mengacu pada hasil penilaian risiko dan indikator MCP
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Pendampingan dan Asistensi	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Monitoring tidak sesuai jadwal	ROO.26.35.04.106	Menyusun kalender monitoring, menentukan surat tugas, melakukan konfirmasi jadwal kepada OPD, monitoring berkala atas pelaksanaan kegiatan	Kalender Monitoring, Surat Tugas, Email, WhatsApp Group	Ketua Tim Monitoring	Tim Monitoring, OPD terkait	Triwulan	Ditai sesuai realisasi	Jadwal disesuaikan apabila terdapat kondisi tertentu
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Pendampingan dan Asistensi	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Hasil monitoring tidak ditindaklanjuti	ROO.26.35.04.107	Menyampaikan rekomendasi secara tertulis, memantau tindak lanjut, rapat evaluasi, verifikasi penyelesaian rekomendasi	Laporan Monitoring, Berita Acara, Surat, Email, MCP KPK	Tim Monitoring	Kepala OPD, Inspektur	Triwulan	Ditai sesuai realisasi	Monitoring dilakukan hingga rekomendasi selesai ditindaklanjuti
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Pendampingan dan Asistensi	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	OPD terlambat menyampaikan data MCP	ROO.26.35.04.105	Menyampaikan jadwal penyampaian data, memberikan pengingat (reminder), melakukan pendampingan pengisian MCP, verifikasi kelengkapan data sebelum batas waktu	Surat Edaran, Email, Whats-App Group, Aplikasi MCP K-PK	Admin MCP, Inspektur	Admin MCP OPD, Kepala MCP	Sesuai jadwal MCP KPK	Ditai sesuai realisasi	Dilakukan reminder sebelum batas waktu pelaporan
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Pendampingan dan Asistensi	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Pelaporan MCP terlambat	ROO.26.35.04.108	Menyusun jadwal pelaporan MCP, menyampaikan reminder kepada OPD, monitoring progres pengisian MCP, verifikasi kelengkapan data sebelum dikirim	Surat Edaran, Email, Whats-App Group, Rapat Koordinasi	Admin MCP/Tim Pencegahan Korupsi Inspektur	Admin MCP OPD, Kepala OPD, Inspektur	Sesuai timeline MCP KPK (bulanan/triwulanan)	Ditai sesuai realisasi	Monitoring dilakukan sampai seluruh data MCP terkirim tepat waktu
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Pencegahan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Pencegahan Integritas	OPD belum memahami indikator pencegahan integritas	ROO.26.35.04.109	Melaksanakan sosialisasi indikator pencegahan integritas, bimbingan teknis, penyusunan pedoman, membuka layanan konsultasi	Sosialisasi, Bimtek, Buku Pedoman, Email, Whats-App Group	Tim Pencegahan Integritas Inspektur	Seluruh OPD	Awal tahun dan sesuai kebutuhan	Ditai sesuai realisasi	Maka disesuaikan dengan pedoman penilaian integritas terbaru
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Pencegahan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Pencegahan Integritas	Bukti dukungan verifikasi integritas tidak lengkap	ROO.26.35.04.110	Menyusun checklist dokumen, melakukan verifikasi administrasi, memberikan pendampingan penyusunan bukti dukung, revu berjalan	Checklist Verifikasi, Surat, Email, WhatsApp Group	Tim Verifikasi Integritas	OPD yang diverifikasi	Sebelum pelaksanaan verifikasi	Ditai sesuai realisasi	Bukti dukungan diverifikasi sebelum penilaian akhir
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Pencegahan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Pencegahan Integritas	Partisipasi responden Survei Penilaian Integritas rendah	ROO.26.35.04.111	Melakukan sosialisasi pentingnya SPI, koordinasi dengan OPD, monitoring tingkat partisipasi responden, mengingatkan pengingat kepada responden	Surat Edaran, Email, Whats-App Group, Rapat Koordinasi	Inspektur/Koordinator or SPI	Kepala OPD, Responden SPI	Sesuai jadwal pelaksanaan SPI	Ditai sesuai realisasi	Monitoring dilakukan hingga target partisipasi tercapai

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Risiko	Kode Risiko	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Pelaksanaan Kegiatan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Pelaksanaan Kegiatan Integritas	Rencana aksi integritas tidak dilaksanakan	ROO.26.35.04.112	Menyusun rencana aksi yang jelas, menetapkan penanggung jawab, melakukan monitoring dan evaluasi berkala, serta menyampaikan laporan tindak lanjut	Rapat koordinasi, Surat, Email, WhatsApp Group, Laporan Monitoring	Tim Petaregakan Integritas/Infra	Kepala OPD, Inspektur	Triwulan	Ditai sesuai realisasi	Monitoring dilakukan sampai seluruh rencana aksi terlaksana
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Pelaksanaan Kegiatan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Pelaksanaan Kegiatan Integritas	Target peningkatan integritas tidak tercapai	ROO.26.35.04.113	Evaluasi capaian indikator integritas, identifikasi akar penyebab, pendampingan lanjutan, penyusunan rencana perbaikan	Laporan Evaluasi, Rapat Evaluasi, Dashboard Monitoring, Email	Tim Petaregakan Integritas	Inspektur, Kepala OPD	Semesteran	Ditai sesuai realisasi	Hasil evaluasi menjadi dasar penyempurnaan program integritas
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota												
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terlaksananya Administrasi keuangan perangkat daerah	Perencanaan anggaran belanja pegawai tidak sesuai kebutuhan	ROO.26.37.04.114	Menyusun kebutuhan belanja pegawai berdasarkan analisis kebutuhan riil, melakukan review RKA, rekonsiliasi data kepegawaian dan penganggaran, serta verifikasi pagu anggaran	SIPO, Surat Anggaran, Nota Dinas, Email	Kasubag Keuangan/Perencana	Sekretaris Inspektoral, PPK, Inspektur	Pada saat penyusunan RKA dan APBD	Ditai sesuai realisasi	Diesuaikan dengan kebijakan penganggaran dan kebutuhan dan kebutuhan pegawai
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terlaksananya Administrasi keuangan perangkat daerah	Penatausahaan keuangan tidak sesuai ketentuan	ROO.26.37.04.115	Menyusun dan menerapkan SOP penatausahaan keuangan, review dokumen oleh PPK, verifikasi oleh Bendahara Pengeluaran, pembinaan dan monitoring kepatuhan terhadap peraturan	SIPO, Surat Ederan, Rapat Koordinasi, Checklist Verifikasi, Email	Bendahara Pengeluaran, PPK-SKPD	Sekretaris, PA/KFA, Inspektur	Selap bulan	Ditai sesuai realisasi	Mengacu pada ketentuan pengelolaan keuangan daerah
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terlaksananya Administrasi keuangan perangkat daerah	Keterlambatan proses pencairan anggaran	ROO.26.37.04.116	Menyusun jadwal pengajuan SPP/SPM monitoring kelengkapan dokumen, koordinasi dengan BPKD/BUD, monitoring proses pencairan	SIPO, Surat Pengantar, Email, WhatsApp Group, Rapat Koordinasi	Bendahara Pengeluaran	PPK-SKPD, PA/KFA, BPKD	Sesuai jadwal pencairan anggaran	Ditai sesuai realisasi	Monitoring dilakukan sampai SP2D diterbitkan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terlaksananya Administrasi keuangan perangkat daerah	Laporan keuangan tidak sesuai SAP	ROO.26.37.04.118	Review laporan keuangan sebelum disampaikan, rekonsiliasi akun, pemecatan kasasuan dengan SAP, peningkatan kompetensi pengelola keuangan	SIPO, Laporan Keuangan, Rapat Evaluasi, Email	PPK-SKPD/Bendahara Pengeluaran	Sekretaris, PA/KFA, Inspektoral	Bulan, Triwulan, Tahunan	Ditai sesuai realisasi	Laporan direvisi sebelum disampaikan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terlaksananya Administrasi keuangan perangkat daerah	Rekonsiliasi keuangan tidak tepat waktu	ROO.26.37.04.117	Menetapkan jadwal rekonsiliasi, monitoring penyampaian dokumen, koordinasi dengan BPKD, tindak lanjut atas selisih hasil rekonsiliasi	Berita Acara Rekonsiliasi, SIPO, Email, WhatsApp Group	Bendahara Pengeluaran/PPK-SKPD	Sekretaris, PA/KFA, BPKD	Selap bulan	Ditai sesuai realisasi	Rekonsiliasi dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Data pegawai sebagai dasar pembayaran gaji tidak mutakhir	ROO.26.38.04.119	Rekonsiliasi data kepegawaian secara berkala, verifikasi data sebelum pengajuan, pembakuan data pada aplikasi kepegawaian dan SIPO	Aplikasi SIMPEG, SIPO, Surat, Email, WhatsApp Group	Pengelola Kepegawaian, Bendahara Gaji	PPK-SKPD, Sekretaris, PA/KFA	Selap bulan sebelum proses pengajuan	Ditai sesuai realisasi	Data mengacu pada SK terakhir (kemakin pengikut, gaji berkala, mutasi, pensiun, cuti di luar tanggungan negara, dll.)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dokumen pembayaran gaji tidak lengkap	ROO.26.38.04.120	Menyusun checklist kelengkapan dokumen, verifikasi oleh PPK dan Bendahara Gaji sebelum pengajuan SPM	Checklist Dokumen, SIPO, Surat, Email	Bendahara Gaji	PPK-SKPD, PA/KFA	Selap bulan	Ditai sesuai realisasi	Dokumen diverifikasi sebelum diajukan ke BUD
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan terlambat	ROO.26.37.04.121	Menyusun jadwal pengajuan, memastikan dokumen lengkap tepat waktu, koordinasi dengan BKPSDM dan BPKD, monitoring proses pencairan	SIPO, Surat, Email, WhatsApp Group, Rapat Koordinasi	Bendahara Gaji	PPK-SKPD, BPKD, PA/KFA	Selap bulan sesuai jadwal pembayaran gaji	Ditai sesuai realisasi	Monitoring dilakukan hingga SP2D terbit dan gaji diterima ASN

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Risiko	Kode Risiko	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a							b	c	d	e	f	g	h
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kesalahan perhitungan gaji dan tunjangan	ROO 26 37 04 122	Verifikasi ulang perhitungan gaji, rekonsiliasi dengan data kepegawaian, revisi oleh PPK, pengumpulan aplikasi penggalan sesuai ketentuan	Aplikasi Gaji, SIMPEG, SIPD, Checklist Verifikasi	Bendahara Gaji	PPK-SKPD, Sekretaris, PA/KPA	Selap bulan sebelum pembayaran	Disi sesuai realisasi	Perhitungan disesuaikan dengan ketentuan gaji ASN yang berlaku
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Rekonsiliasi pembayaran gaji tidak dilakukan secara berkala	ROO 26 37 04 123	Menyusun jadwal rekonsiliasi bulanan, rekonsiliasi data gaji dengan BKPSDM dan BPKD, verifikasi hasil rekonsiliasi serta tindak lanjut atas selisih	SIPD, SIMPEG, Berita Acara Rekonsiliasi, Email, Whats-pp Group	Bendahara Gaji/PPK-SKPD	Sekretaris, PA/KPA, BPKD	Selap bulan	Disi sesuai realisasi	Rekonsiliasi dilakukan sebelum pembayaran gaji bulan berikutnya
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kesalahan penginputan data administrasi	ROO 26 38 04 126	Verifikasi data sebelum diinput, revisi oleh alasan langsung, pengumpulan checklist, validasi pada aplikasi	SIPD, SIMPEG, Checklist Verifikasi, Email	Pengelola Administrasi Kepegawaian	Kasubag Umum dan Kepegawaian, Sekretaris	Selap ada proses administrasi	Disi sesuai realisasi	Dilakukan pemertisan berjangka sebelum data diinput
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Arsip administrasi ASN tidak tertata dengan baik	ROO 26 24 04 127	Menata arsip sesuai klasifikasi, digitalisasi dokumen, pembuatan daftar arsip, monitoring pengelolaan arsip secara berkala	Arsip Fisk, Arsip Digital, Sistem Informasi Kepegawaian, Email	Pengelola Kepegawaian/Arsip	Kasubag Umum dan Kepegawaian, Sekretaris	Triwulan	Disi sesuai realisasi	Mengacu pada ketentuan kepegawaian nasional
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Administrasi pelaksanaan tugas belum sesuai ketentuan BKN	ROO 26 38 04 128	Monitoring perubahan regulasi BKN, sosialisasi ketentuan terbaru, revisi dokumen administrasi, konsultasi dengan BKPSDM	Surat Edaran, JIH BKN, Email, Rapat Koordinasi	Pengelola Kepegawaian	Kasubag Umum dan Kepegawaian, Sekretaris, ASN terkait	Selap terdapat perubahan regulasi dan secara berkala	Disi sesuai realisasi	Dokumen administrasi disesuaikan dengan ketentuan BKN terbaru
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN tidak lengkap	ROO 26 38 04 124	Menyusun checklist kelengkapan dokumen, verifikasi langsung, monitoring kelengkapan berkas sebelum diinput	Checklist Dokumen, SIPD, Email, Surat, WhatsApp Group	Pengelola Kepegawaian	Kasubag Umum dan Kepegawaian, Sekretaris	Selap proses administrasi	Disi sesuai realisasi	Dokumen diverifikasi sebelum diproses lebih lanjut
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyelesaian administrasi tugas ASN terlambat	ROO 26 38 04 125	Menyusun SOP dan jadwal pelayanan, monitoring penyelesaian administrasi, evaluasi keterlambatan secara berkala	SOP, Buku Register, Email, WhatsApp Group	Pengelola Kepegawaian	Kasubag Umum dan Kepegawaian, ASN terkait	Selap bulan	Disi sesuai realisasi	Mengacu pada standar waktu pelayanan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah/ Meningkatkan kapasitas dan kompetensi AP/ yang memiliki standar	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah/ Meningkatkan kapasitas dan kompetensi AP/ yang memiliki standar	Penilaian kinerja pegawai tidak dilakukan secara objektif dan tepat waktu	ROO 26 38 04 132	Sosialisasi ketentuan SKP, monitoring penyusunan dan penilaian SKP revisi hasil penilaian oleh alasan, evaluasi berkala	e-Kinerja, SIMPEG, Surat Edaran, Rapat	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Pejabat Penilai Sekretaris, Inspektur	Semesteran dan Tahunan	Disi sesuai realisasi	Mengacu pada ketentuan manajemen kinerja ASN
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah/ Meningkatkan kapasitas dan kompetensi AP/ yang memiliki standar	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah/ Meningkatkan kapasitas dan kompetensi AP/ yang memiliki standar	Jumlah AP/ yang memenuhi standar kompetensi belum mencapai target	ROO 26 38 04 133	Menyusun rencana pengembangan kompetensi, mengkategorikan AP/ dalam diklat, sertifikasi, bimbingan teknis, serta monitoring capaian kompetensi	Rencana Pengembangan Kompetensi, Surat Tugas, Email, SIMPEG	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris, Inspektur, AP/	Sesuai Rencana Kompetensi Tahunan	Disi sesuai realisasi	Mengacu pada pengembangan kompetensi AP/
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah/ Meningkatkan kapasitas dan kompetensi AP/ yang memiliki standar	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah/ Meningkatkan kapasitas dan kompetensi AP/ yang memiliki standar	Perencanaan kebutuhan pegawai dan pengembangan kompetensi tidak sesuai kebutuhan organisasi	ROO 26 38 04 129	Analisis Jabatan (Anjab), Analisis Job-an Kerja (ABK), Analisis Kebutuhan Diklat, evaluasi kebutuhan SDM secara berkala	Dokumen Anjab, ABK, Rencana Pengembangan Kompetensi, Rapat Koordinasi	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris, Inspektur	Pada saat penyusunan Renja dan RKA	Disi sesuai realisasi	Menjadi dasar penyusunan kebutuhan SDM dan pengembangan kompetensi

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Risiko	Kode Risiko	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Teraksaninya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah/ Meningkatnya kapasitas dan kompetensi APUP yang memiliki standar	Data administrasi kepegawaian tidak lengkap atau tidak mutakhir	ROO.26.38.04.130	Melakukan pemutakhiran data ASN secara berkala, rekonsiliasi data dengan BKPSDM, verifikasi dokumen kepegawaian, monitoring perubahan data pegawai	SMPEG, SIPD, Surat, Email, WhatsApp Group	Kasubag Umum dan Kepegawaian/Pengelola Kepegawaian	Sekretaris, Inspektur, BKPSDM	Bulan dan setiap ada perubahan data	Dilai sesuai realisasi	Data diperbandingkan dengan SK terbit (mutasi, kenaikan pangkat, pensiun, dll.)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Teraksaninya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah/ Meningkatnya kapasitas dan kompetensi APUP yang memiliki standar	Pendidikan dan pelatihan pegawai tidak terlaksana sesuai rencana	ROO.26.38.04.131	Menyusun rencana pengembangan kompetensi tahunan, koordinasi dengan BKPSDM/BPSDM, monitoring realisasi diklat, evaluasi pelaksanaan pelatihan	Rencana Pengembangan Kompetensi, Surat Tugas, Email, WhatsApp Group	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris, Inspektur, BKPSDM	Sesuai kalender diklat tahunan	Dilai sesuai realisasi	Dievaluasi setiap semester
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Anggaran pendidikan dan pelatihan tidak mencukupi	ROO.26.37.04.135	Menyusun prioritas kebutuhan diklat berdasarkan analisis kebutuhan, mengoptimalkan pelatihan yang dibayai pemerintah, mengusulkan tambahan anggaran bila diperlukan	RKA, DPA, SIPD, Rapat, Anggaran, Nota Dinas	Perencana/Kasubag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris, PPK, Inspektur	Saat penyusunan RKA dan APBD	Dilai sesuai realisasi	Prioritas diberikan pada diklat wajib dan sertifikasi APUP
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kebutuhan diklat belum sesuai analisis kebutuhan kompetensi APUP	ROO.26.38.04.134	Melakukan Analisis Kebutuhan Diklat (AKD), penetaan kompetensi APUP, menyusun rencana pengembangan kompetensi berbasis gap kompetensi, evaluasi hasil diklat	Dokumen AKD, Pola Kompetensi, SMPEG, Rapat Koordinasi	Kasubag Umum dan Kepegawaian/Perencana	Sekretaris, Inspektur	Awal tahun dan sebelum penyusunan Renja	Dilai sesuai realisasi	Mengikuti pada standar kompetensi APUP dan kebutuhan organisasi
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Hasil diklat belum diterapkan dalam pelaksanaan tugas	ROO.26.38.04.138	• Kewajiban penyusunan Laporan Hasil Diklat (LHD) dan sharing session internal • Penyusunan rencana aksi penerapan hasil diklat dalam tugas penjawaban.	Naskah Dinas / Laporan Risalah / SAKIP / Rapat Internal	Pegawai Peserta Diklat	Inspektur / Sekretaris / Kasubag Kepegawaian	Maksimal 5 hari kerja setelah diklat selesai	Dilai saat move over berkala	Pemantauan berkala oleh Subbag Kepegawaian.
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pegawai belum mengikuti diklat karena belum tugas penjawaban	ROO.26.38.04.136	• Penyelesaian/pembagian ulang Surat Tugas Penjawaban (STP) dan penunjukan pemotikan pengganti (backup system). • Penyusunan jadwal PKPT yang menyelaskan kalender diklat.	Surat Tugas Pengganti / Jabwal Pengawasan (STP) dan penunjukan pemotikan pengganti (backup system). • Penyusunan jadwal PKPT yang menyelaskan kalender diklat.	Kasubag Kepegawaian / Tim Perencana PKPT	Inspektur / Iban Tertask / Pegawai Bersangkutan	H-3 sebelum pelaksanaan diklat	Dilai saat move over berkala	Berkordinasi dengan Puskelwas BPQP / Penyelenggara Diklat
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jadwal diklat berubah atau dibatalkan oleh penyelenggara	ROO.26.38.04.137	• Koordinasi dan konfirmasi aktif berkala dengan penyelenggara diklat. • Penyajian opsi diklat alternatif (e-learning/diklat mandiri/webinar) jika diklat tatap muka dibatalkan.	Surat Pemberitahuan / WhatsApp Group / Email Resmi	Penyelenggara Diklat / Subbag Kepegawaian	Pegawai Calon Peserta / Inspektur	Kondisional (Setiap Thwulan)	Dilai saat move over berkala	Pengalihan anggaran diklat ke jadwal/jenis diklat terdekat.
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Meningkatnya pelayanan administrasi perantoran dan Teraksaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Perencanaan kebutuhan administrasi umum tidak sesuai kebutuhan riil	ROO.26.33.04.139	• Melakukan analisis kebutuhan barang/jasa dan stock opname berkala sebelum penyusunan RKA/DPA. • Reviu usulan kebutuhan unit kerja oleh Subbag Umum dan Keuangan.	Form RKB (Rencana Kebutuhan Barang Unit) / Rapat RKA	Kasubag Umum / Pengurus Barang / Itan	Sekretaris / Tim Anggaran	Januari - Februari 2026	Dilai saat move over berkala	Menjadi dasar input RKB dan Rencana Kerja Anggaran (RKA).
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Meningkatnya pelayanan administrasi perantoran dan Teraksaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Anggaran administrasi umum tidak mencukupi	ROO.26.33.04.140	• Penyusunan skala prioritas belanja operasional perantoran • Efisiensi penggunaan sarana operasional serta usulan pengesam/perubahan anggaran pada Perubahan APBD.	Laporan Realisasi Anggaran (LRA) / Form Pergeseran Anggaran	Bendahara / Kasubag Keuangan / Umum	Inspektur / TAPD /ab. Kepala Menatwil	Thwulan II & Penyusunan APBD-P 2026	Dilai saat move over berkala	Penghematan ATK dan operasional non-prioritas.

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Risiko	Kode Risiko	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dan Teraksanannya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pengadaan barang/jasa administrasi terlambat	ROO.26.99.04.141	- Menyusun RUP dan menginput ke SIRUP tepat waktu di awal tahun anggaran. - Pembentukan PPK/Pejabat Pengadaan di awal tahun dan penetapan timeline pengadaan.	Aplikasi SIRUP / SPK / Surat Pesanan (E-Katalog)	Pejabat Pengadaan / Kasubag Umum	PPK / Inspektur / Penyedia	Januari - Maret 2026	Dis/ saat move terkala	Menggunakan metode E- Purchasing / E- Katalog Lokal
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dan Teraksanannya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penggunaan barang administrasi tidak terbit	ROO.26.99.04.142	- Penerapan Kartu Inventaris Barang (KIB) dan Kartu Inventaris Ruangan (KIR) yang ter-update. - Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) penerimaan, pemanfaatan, dan perawatan barang milik daerah. - Stok opname barang/ATK secara berkala setiap bulan.	SOP Penggunaan Barang / Buku Kendali Kenderaan & ATK / Kartu Inventaris Ruangan (KIR)	Pengurus Barang / Kasubag Umum	Seluruh Pegawai / Inspektur	Januari - Desember 2026 (Rutin Bulanan)		Monitoring berkala oleh Pengurus Barang dan Kasubag Umum
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dan Teraksanannya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelayanan administrasi belum memenuhi standar pelayanan	ROO.26.99.04.143	- Menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Makuat Pelayanan Inspektori. - Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM). - Pelatihan/sosialisasi pelayanan prima bagi petugas persuratan/office.	Dokumen Standar Pelayanan / Kotak Saran & Pengaduan / Media Informasi (Website/Banner)	Kasubag Umum / Tim Reformasi Birokrasi	Sekretaris / Inspektur / Masyarakat & OFD	Triwulan I - IV 2026		Evaluasi berkala Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kebutuhan instalasi listrik tidak sesuai kondisi riil	ROO.26.99.04.144	- Melakukan survei dan inventarisasi kondisi instalasi listrik serta penerangan gedung kantor sebelum penyusunan RKA. - Berkordinasi dengan tenaga ahli/PLN untuk perhitungan daya dan material instalasi yang dibutuhkan.	Ceklis Inventaris Sarpras / Form Usulan Kebutuhan Listrik / Laporan Hasil Inspeksi Fisik	Pengurus Barang / Pengabte Sarpras / Tim	Kasubag Umum / Sekretaris	Januari - Februari 2026		Penyusunan dengan Rencana Kerja Anggaran (RKA) 2026
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Pengadaan komponen listrik terlambat	ROO.26.99.04.145	- Menetapkan jadwal pelaksanaan pengadaan komponen listrik sejak awal Tahun Anggaran. - Mempercepat proses pemesanan melalui E-Katalog/E-Purchasing untuk komponen listrik standar. - Menyediakan stok cadangan (buffer stock) untuk komponen vital (lampu, MCB, kabel dasar).	Jadwal Pengadaan / Surat Pesanan (E-Katalog) / Nota Pembelian / Bukti Penerimaan Barang	Pejabat Pengadaan / Kasubag Umum	PPK / Sekretaris	Triwulan I 2026 (Januari - Maret)		Menggunakan penyedia lokal yang siap pasokan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Komponen listrik tidak sesuai spesifikasi	ROO.26.99.04.146	- Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Spesifikasi Teknis komponen listrik secara riil (SNI/standar PLN). - Pengecekan dan verifikasi fisik barang bersama Tim Penerimaan Hasil Pekerjaan/PPK saat penyerahan barang.	Dokumen KAK / Spesifikasi Teknis / Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang	Pejabat Pengadaan / Penyedia	PPK / Tim Penerima Barang / Kasubag Umum	Saat pelaksanaan pengadaan (Triwulan I - II 2026)		Pengembalian barang jika tidak sesuai standar SNI

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Risiko	Kode Risiko	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terjadi pemadaman listrik	ROO.26.99.04.147	1. Pemeliharaan dan servis berkala mesin genset operasional kantor. 2. Penyediaan cadangan bahan bakar genset yang memadai. 3. Pemasangan/pemeliharaan Automatic Transfer Switch (ATS) / UPS untuk perangkat server & data vital.	Jadwal Pemeliharaan Genset / Log Sheet Penggunaan Genset & BBM	Penjela Sarpras / Penjurus Barang	Kasubag Umum / Sekretaris / Seluruh Pegawai	Januari - Desember 2026 (Rutin)	-	Memhinalkan gangguan operasional perkantoran
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Instalasi listrik tidak dipelihara secara berkala	ROO.26.99.04.148	1. Penyusunan jadwal inspeksi dan pemeliharaan berkala jaringan/komponen listrik kantor. 2. Kerjasama/pe-nun-jukan teknis listrik untuk pemeriksaan keleyakan instalasi secara periodik.	Jadwal Pemeliharaan Berkala / Laporan Hasil Pemeriksaan Instalasi Listrik	Penjela Sarpras / Teknis Listrik	Kasubag Umum / Sekretaris / PPTK	Triwulan I - IV 2026 (Setiap 3 Bulan)	-	Mencegah risiko korsleting baha-ya kebakaran listrik
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kebutuhan peralatan rumah tangga tidak teridentifikasi dengan baik	ROO.26.99.04.149	1. Pendataan inventarisasi kondisi peralatan rumah tangga kantor (dispenser, kulkas, AC, dll) sebelum penyusunan RKA. 2. Penampungan usulan kebutuhan dari masing-masing bidang/unit kerja.	Form Inventarisasi Sarpras / Form Usulan Form Usulan Kebutuhan Peralatan / Rencar a Kebutuhan Barang Unit (RKBU)	Penjurus Barang / Kasubag Umum	Sekretaris / Tim Anggaran/ PPTK	Januari - Februari 2026	-	Menjadi acuan penyusunan DPA 2026

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Risiko	Kode Risiko	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a							b	c	d	e	f	g	h
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Peralatan cepat rusak	ROO 26 99 04 151	1. Penilaian produk/pealatan dengan kualitas standar baik dan bergaransi resmi. 2. Edukasi dan pembuatan petunjuk/SOP pemanfaatan serta pemeliharaan peralatan rumah tangga kantor.	Kartu Garansi / SOP Penggunaan & Pemeliharaan Alat / Kartu Pemeliharaan Perangkat	Penyusun Barang / Pengelola Sarpras	Januari - Desember 2026	Januari - Desember 2026	-	Pemeliharaan rutin berkala oleh unit kerja
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kehilangan peralatan	ROO 26 99 04 152	1. Penempelan kode/label Kartu Inventaris Ruangan (KIR) serta nomor register BMD pada setiap aset. 2. Penerapan prosedur keamanan gedung dan penulisan akses keluar-masuk barang. 3. Penundaan/pe mberlakuan penanggung jawab ruangan (PIC) atas peralatan di tiap ruangan.	Kartu Inventaris Ruangan (KIR) / Stiker Label BMD / Berita Acara Serah Terima Ruangan	Penyusun Barang / Pengelola Keamanan Kantor	Kepala Ruangan / Kasubag Umum / Inspektur	Januari - Desember 2026	-	Pemeliharaan fisik/stok opname berkala
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Inventaris tidak sesuai kondisi fisik	ROO 26 99 04 153	1. Pelaksanaan stock opname dan rekonsiliasi aset/BMD secara rutin (per semester). 2. Pemutakhiran Aplikasi SIMDA BM / SIMAN sesuai kondisi fisik myala (Bak, Rusak Ringan, Rusak Berat).	Laporan Hasil Stock Opname Aset / Berita Rekonsiliasi BMD / Laporan SIMDA BMD	Penyusun Barang / Pengelola Aset	Kasubag Umum / BKAD Meritsai	Semester I & II 2026 (Juni & Desember)	-	Proses audit penghapusan aset untuk barang rusak berat
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Pengadaan peralatan terlambat	ROO 26 99 04 150	1. Penyusunan RUP dan pengusulan paket pengadaan peralatan rumah tangga lebih awal di awal tahun anggaran. 2. Penetapan jadwal dan timeline proses pengadaan/pembelian yang mengikat dengan penyedia/vendor.	Rencana Umum Pengadaan (RUP) / Jadwal Pengadaan / Surat Pesanan (SP)	Pejabat Pengadaan / Kasubag Umum	PPK / Penyedia / Inspektur	Triwulan I - II 2026	-	Memastikan kesigapan operasional kantor tepat waktu

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Risiko	Kode Risiko	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disiapkan	Penggunaan logistik tidak terkendali	ROO.26.99.04.156	1. Penerapan Sistem Bonifor untuk Pemintaan Bahan Logistik Kantor (ATK/perengkapan) yang disertai asasan langsung. 2. Penetapan kuota/standar pemakaian logistik bulanan untuk tiap unit kerja/bagian.	Form Pemintaan Barang (doni ATK) / Buku Kuntai Pemakaian Logistik Kantor	Pengurus Barang / Pengelola Logistik	Para Kasubag / Irtan / Seluruh Pegawai	Januari - Desember 2026 (Rutin)	-	Mencegah pemborosan dan penyalahgunaan bahan logistik
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disiapkan	Persediaan tidak sesuai pencatatan	ROO.26.99.04.157	1. Pencatatan keluar-masuk barang secara real-time pada Kartu Stok Barang / Aplikasi Persediaan. 2. Pelaksanaan Stock Opname bahan logistik secara periodik setiap akhir bulan/triwulan.	Kartu Stok Barang Persediaan / Laporan Hasil Stock Opname Persediaan	Pengurus Barang / Persediaan	Kasubag Umum / BKAD Mendagri	Selanjut Akhir Bulan / Triwulan (2026)	-	Mencegah akurasi Laporan Keuangan & Laporan Persediaan BMD
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disiapkan	Distribusi logistik terhambat	ROO.26.99.04.154	1. Pembuatan jadwal distribusi rutin bulanan/mingguan ke masing-masing bidangnya. 2. Penyediaan buffer stock (stok penyangga) logistik vital agar tidak terjadi kekosongan saat proses pengadaan.	Jadwal Distribusi Logistik / Buku Tunda Terima Penyerahan Logistik	Pengelola Logistik Kantor	Staff/PIC Masinc- Masing Bidang	Januari - Desember 2026 (Rutin)	-	Mendukung kelancaran administrasi pemerintahan tanpa hambatan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disiapkan	Logistik rusak	ROO.26.99.04.155	1. Penataan dan penyimpanan bahan logistik di gudang yang bersih, kering, terhindar dari kelembaban dan hama. 2. Penerapan prinsip FIFO (First In, First Out) dalam pengeluaran bahan logistik.	SOP Pengelolaan & Storage Gudang Persediaan / Check-list Kondisi Gudang	Pengurus Barang / Pelugas Gudang	Kasubag Umum	Januari - Desember 2026	-	Mencegah kerusakan bahan kertas/ATK akibat kelembaban/hama
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disiapkan	Dokumen tidak terdokumentasi dengan baik	ROO.26.99.04.162	1. Pengangan cetakan/dokumen secara fisik (filing cabinet/ordner) dan digital (scan PDF ke server Cloud/Drive). 2. Penataan peromoran dan klasifikasi arsip sesuai Permendagri/SOP Kearsipan.	Buku Katalis Arsip Cetakan / Repository Digital Kearsipan Inspektat	Pengelola Kearsipan / Staf Administrasi	Kasubag Umum / Sekretaris	Januari - Desember 2026	-	Memudahkan pencarian kembali dokumen hasil pencetakan/penggandaan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disiapkan	Kebutuhan cetak tidak tepat	ROO.26.99.04.158	1. Melakukan verifikasi dan konfirmasi spesifikasi, format, serta jumlah cetakan sebelum dilakukan pemesanan/pencetakan massal. 2. Pembuatan dummy/sample proof-print sebelum pencetakan dalam jumlah besar.	Form Pemintaan Cetak / Lembar Verifikasi & Proofing Draft Cetak	Kasubag Umum / Staf Pemohon	Pihak Ketiga (Pencetakan) / PHK	Sesuai kebutuhan kegiatan (2026)	-	Mencegah pemborosan anggaran akibat kesalahan cetak/kalah format
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disiapkan	Pemborosan penggunaan kertas	ROO.26.99.04.161	1. Penerapan kebijakan Paperless / Digital Office (penggunaan draft digital, cetak bolak-balik / duplex untuk dokumen internal). 2. Pembatasan kuota pencetakan/penggandaan per bidang serta evaluasi berkala pemakaian kertas.	Himbauan/SE Penghematan Kertas / Laporan Rekapitulasi Pemakaian Kertas Per Bidang	Kasubag Umum / Pengelola Logistik	Seluruh Pegawai / Para Irtan / Kabag	Januari - Desember 2026	-	Mendukung gerakan ramah lingkungan dan efisiensi anggaran
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disiapkan	Penyedia terlambat mencetak	ROO.26.99.04.159	1. Penerbitan Surat Pesanan (SP) / Kontrak Pengadaan Cetak dan Penggandaan yang mencantumkan sanksi denda keterlambatan yang tegas. 2. Pemantauan dan koordinasi progres pencetakan secara berkala ke tempat pencetakan.	Surat Pesanan (SP) / Jadwal Produksi Penerimaan / Form Monitoring Progres	Pegawai Pengadaan / PHK	Penyedia (Pencetakan) / Kasubag Umum	Triwulan I - IV 2026	-	Memastikan barang cetak tersedia tepat waktu sebelum kegiatan dimulai

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Risiko	Kode Risiko	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bering Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Hasil cetak tidak sesuai spesifikasi	ROO 26.33.04.160	1. Verifikasi ketajam jenis bahan kertas, ukuran, dan kualitas cetak berdasarkan proofing/sample awal sebelum cetak massal. 2. Pemeriksaan fisik secara menyeluruh oleh Tim Penerima Hasil Pekerjaan (PPH) saat penyerahan hasil cetakan.	Berita Acara Pemeliharaan Barang / Berita Acara Serah Terima (BAST) / Lembar Proofing	Penyedia / Tim Penerima Barang	PPK / Kasubag Umum	Sesuai jadwal pengadaaan (2026)	-	Pencetakan/pemeliharaan cetakan ulang jika tidak sesuai spesifikasi KAK
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Bahan bacaan tidak dimanfaatkan	ROO 26.33.04.166	1. Pengkajian perpustakaan/jepok baca kantor berbasis digital dan fisik yang terintegrasi. 2. Sosialisasi dan pembuatan e-catalog/digital bahan bacaan & Peraturan Perundang-Undangan terbaru secara berkala kepada seluruh Pegawai/Auditor.	Katalog Bahan Bacaan / Newsletter Internal / E-Library Inspektorat Mentawai	Pencelola Perpustakaan / Kasubag Umum	Auditor / PPUPT / Seluruh Pegawai	Januari - Desember 2026	-	Meningkatkan literasi hukum dan referensi pengawesan para auditor
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Koleksi regulasi tidak diperbarui	ROO 26.33.04.167	Melakukan inventarisasi dan pembaruan berkala (trivulan) terhadap koleksi bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan serta pengadaan buku/regulasi terbaru.	Nota Dinas / Laporan Evaluasi / Sistem Informasi Perpustakaan/Hukum	Kasubag Umum / Pengelola Perpustakaan	Kepala Perangkat Daerah / Seluruh Pegawai / Unit Kerja Terkait	Trivulan I - IV (Januari - Desember)	Sesuai Jadwal (Trivulan I - IV)	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Peraturan terbaru tidak teridentifikasi	ROO 26.33.04.163	Berlangganan / melakukan pemantauan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDih) secara berkala serta koordinasi aktif dengan Bagian Hukum Setda.	Email / Portal JDih / Digital Bulletin / Memo Internal	Pengelola JDih / Kasubag Hukum / Bagian Umum	Seluruh Unit Kerja / Pembuat Kebijakan Internal	Selanjut Bulan / Kontinu	Realisasi setiap awal bulan	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Keterlambatan memperoleh regulasi terbaru	ROO 26.33.04.164	1. Berlangganan databaseport peraturan-perundangan digital terintegrasi (JDih / Legal Database). 2. Membentuk tim/petugas khusus penanggung jawab pemantauan dan update regulasi secara berkala.	Aplikasi JDih / Email Alert Regulasi / Grup Koordinasi Internal	Sisubag Hukum / Kasubag Umum	Para Auditor / PPUPT / Pimpinan Inspektorat	Januari - Desember 2026	-	Memastikan landasan hukum pengawesan selalu mutakhir
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Pegawai tidak mengikuti perubahan regulasi	ROO 26.33.04.165	1. Melakukan sosialisasi internal / Internal Sharing Session (1-House Training) setiap ada regulasi baru. 2. Menyusun ringkasan/matrika perubahan regulasi (Executive Summary/Infografis) untuk dibagikan ke seluruh pegawai.	Nota Sharing Session / Matriks Perubahan Regulasi / Modul Ringkasan	Tim Hukum / Auditor Ahli Utama/Madya	Seluruh Pegawai & Auditor Inspektorat	Sesuai kebutuhan (Trivulan I-IV 2026)	-	Meningkatkan kompetensi dan persapa yang sama antar pegawai
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jadwal rapat tidak sesuai agenda peserta	ROO 26.33.04.168	1. Penyusunan dan penjadwalan kalender Agenda Rapat & Konsultasi bulanan yang terintegrasi. 2. Penyiapan surat undangan dan konfirmasi kehadiran (konfirmasi H-2) sebelum pelaksanaan rapat.	Surat Undangan Rapat / Kalender Kegiatan Digital / Form Konfirmasi Kehadiran	Sekretaris / Kasubag Umum & Kepegawaian	Peserta Rapat (rtuan Auditor, SKPD Terkait)	Januari - Desember 2026	-	Menghindari bentrok jadwal dan memastikan kuarum peserta

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Risiko	Kode Risiko	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dokumen rapat belum lengkap	ROO 26 33 04 169	1. Penggunaan Checklist kelongkapan administrasi rapat (Daftar Hadir, Notula, Bahan Pagar, Dokumentasi, & BASTRIPT). 2. Penunjukan penanggung jawab (Notulis & Moderator) pada setiap pelaksanaan rapat koordinasi/konsultasi.	Checklist Kelengkapan Rapat / Draft Notulensi / Berita Acara Rapat	Notulis / Panitia Pelaksanaan Rapat	Pimpinan Rapat / Kasubag Umum	Januari - Desember 2026	-	Menjamin akurabilitas dan kelengkapan bukti dukung (eviden) rapat
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Peserta tidak hadir sesuai undangan	ROO 26 33 04 170	1. Penengasan kewajiban kehadiran pimpinan/pemwakilan berespon dengan surat tugas. 2. Mengirimkan pengingat (reminder H-1) via pesan instan/whatsapp dan menerapkan sistem absensi digital.	Surat Undangan Resmi / Reminder H-1 via WA Group / Form Presensi Kehadiran	Sekretariat / Panitia Rapat	SKPD / Unit Kerja Tercundang	Januari - Desember 2026	-	Mematikan pengantilan keputusan rapat berjalan optimal dan tepat sasaran
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Hasil rapat tidak diindaklanjuti	ROO 26 33 04 171	1. Penyusunan Matriks Rencana Aksi/Rekomendasi Tindak Lanjut Rapat yang dilengkapi batas waktu ("deadline") dan penanggung jawab. 2. Pelaksanaan pemantauan/monitoring tindak lanjut secara berkala oleh Sekretaris/Tim Pengawas.	Matriks Tindak Lanjut Rapat / Lembar Kontinuitas Hasil Rapat / Laporan Monitoring TL	Notulis / Tim Pemanitua TL	Pimpinan / SKPD Penanggung Jawab TL	Januari - Desember 2026	-	Mematikan setiap rekomendasi dan keputusan rapat terakalisasi dengan jelas
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Notulen dan dokumentasi rapat tidak lengkap	ROO 26 33 04 172	1. Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Administrasi Rapat. 2. Pembuatan template notulensi standar dan pengarsipan digital/cloud untuk seluruh foto dokumentasi & notulensi rapat.	Template Notulensi Standar / Folder Archive Digital Rapat / Album Dokumentasi	Notulis / Tim Dokumentasi	Kasubag Umum / Pengelola Arsip	Januari - Desember 2026	-	Menjaga kerapian arsip administrasi dan kesiapan saat pemertan, pemertan internal/eksternal
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Teraksananya Pengadaan BMD urusan Perangkat Daerah	Pencapaian kebutuhan barang tidak sesuai kebutuhan nil	ROO 26 96 04 173	1. Menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RK-BMD) berdasarkan analisis kebutuhan nil unit kerja dan standar sarana prasarana. 2. Melakukan verifikasi dan rekonsiliasi data KB/aset eksisting sebelum pengusulan pengadaan.	Dokumen RK-BMD / Form Analisa Kebutuhan / Berita Acara Rekonsiliasi Aset	Pengurus Barang / Kasubag Umum	Tim Anggaran / PPK / Pimpinan Inspektirat	Januari - Maret 2026	-	Mendagah pengadaan barang yang mubazir atau tidak produktif
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Teraksananya Pengadaan BMD urusan Perangkat Daerah	Anggaran pengadaan tidak mencukupi	ROO 26 96 04 174	1. Melakukan analisis Standar Harga Satuan (SHS) / HSPK secara cermat saat penyusunan RKA. 2. Penentuan skala prioritas pengadaan BMD utama yang mendukung kinerja pengawasan.	Dokumen RKA / Daftar Standar Harga Satuan (SHS) / Matriks Skala Prioritas	Kasubag Perencanaan & Keuangan	PPK / Tim Anggaran Perangkat Daerah (TAPD)	Januari - April 2026	-	Mematikan alokasi anggaran mencakup kebutuhan prioritas
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Teraksananya Pengadaan BMD urusan Perangkat Daerah	Barang yang diterima tidak sesuai spesifikasi	ROO 26 96 04 176	1. Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Kerangka Spesifikasi Teknis yang terperinci. 2. Pemertan fisik secara detail oleh Tim Pemerina Hasil Pekerjaan (PPHJ) dan Pengurus Barang saat serah terima.	Dokumen KAK & Spesifikasi Teknis / Berita Acara Pemertan Barang (BAPB) / BAST	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	Penyedia Barang / Pengurus Barang	Sesuai Jadwal Kontrak (2026)	-	Penilaian penyertan barang apabila tidak memenuhi spesifikasi KAK
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Teraksananya Pengadaan BMD urusan Perangkat Daerah	Pengadaan tidak mendukung peningkatan pelayanan	ROO 26 96 04 177	1. Evaluasi Kemanfaatan ("utility rate") BMD yang diuulkan terdapat efisiensi layanan pengawasan internal. 2. Monitor ng pemanfaatan dan penempatan barang secara tepat sasaran secara unit kerja yang merbutukan.	Laporan Evaluasi Kemanfaatan BMD / Form Distribusi & Penempatan Aset	Pengurus Barang / Kasubag Umum	Para itaban / Pimpinan Inspektirat	Triwulan I - IV 2026	-	Memasikan aset yang obil benar benar meningkatkan kinerja operasional

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Risiko	Kode Risiko	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Metode/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya Pengadaan BMD urusan Perangkat Daerah	Proses pengadaan terlambat	ROO 26.99.04.145	1. Menyusun Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan mempercepat pengumuman di SIRUP sejak awal tahun anggaran. 2. Pembentukan Pokja / Penunjang Pejabat Pengadaan lebih awal dan memantau timeline pengadaan secara intensif.	SIRUP / Jadwal Pelaksanaan Pengadaan / Form Monitoring Timeline	Pejabat Pengadaan / PPK	Kepala UKPEJ / Pimpinan Inspektoral	Januari - Mei 2026	h	Menghentikan penunjukan kegiatan pengadaan di akhir tahun anggaran
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Spesifikasi peralatan tidak sesuai kebutuhan	ROO 26.99.04.178	1. Menyusun "Market Survey" (survei pasar) dan analisis kebutuhan teknis unit kerja sebelum penerbitan dokumen lelang/E-Purchasing. 2. Uji fungsi dan uji coba operasional ("trial operation") peralatan sebelum diadartagannya BAST.	Hasil Survei Pasar / Dokumen E-Purchasing / Laporan Uji Fungsi & Operasional	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) / Tim Teknis	Pengguna Peralatan	Triwulan I - III 2026		Memastikan peralatan dan mesin sesuai spesifikasi beroperasi optimal sesuai kebutuhan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Peralatan mengalami kerusakan sebelum masa manfaat	ROO 26.99.04.181	1. Memastikan adanya sertifikat garansi dan komitmen layanan purna jual (after-sales service) dan penyedia. 2. Melakukan pemeliharaan rutin/berkala sesuai petunjuk pemakaian pabrik.	Kartu Garansi / Kartu Pemeliharaan Berkala / SOP Pengoperasian Alat	Pengguna Barang / Pengasah Aset	Unit Pengguna / Kasubag Umum	Januari - Desember 2026		Menjaga usia pakai peralatan agar dapat berfungsi optimal selama masa manfaat
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Penyedia terlambat menyerahkan barang	ROO 26.99.04.179	1. Penerapan surat teguran tertulis / Surat Peringatan (SP 1-3) dan pemantauan progress jadwal delivery. 2. Penerapan sanksi denda keterlambatan sesuai ketentuan surat perjanjian/kontrak pengadaan.	Surat Taguran / Form Monitoring Timeline / Surat Penetapan Denda	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	Penyedia Barang / Pimpinan Inspektoral	Sesuai Jadwal Kontrak (2026)		Mendorong kedisiplinan penyedia dalam menepati batas waktu penyelesaian
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Barang tidak sesuai spesifikasi kontrak	ROO 26.99.04.180	1. Verifikasi dan verifikasi kesesuaian sampel/spesifikasi barang secara detail saat penerimaan. 2. Penolakan penerimaan barang dan kewajiban penggantian barang oleh penyedia sesuai RKS/kontrak	Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) / Surat Penolakan Barang / BAST	Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan / PPK	Penyedia Barang / Pengurus Barang	Saat Serah Terima Barang (2026)		Memastikan unit barang yang diterima 100% memenuhi standar kualitas kontak
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Barang belum dicatat dalam KIB/BMD	ROO 26.99.04.182	1. Pencatatan langsung pada Kartu Inventaris Barang (KIB) dan SIMDA BMD/aplikasi aset segera setelah BAST diadartagani. 2. Pembuatan label/code QR inventaris barang milik daerah sebelum didistribusikan ke unit kerja.	Berita Acara Serah Terima (BAST) / Register KIB B / Label Barcode Aset	Pengurus Barang / Pengelola BMD	Kasubag Umum / BPKPAD Mentawai	Maksimal 3 Hari Setelah BAST (2026)		Memeriksa aset tidak terdapat ("unrecorded assets")
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kebutuhan jasa tidak teridentifikasi secara tepat	ROO 26.99.04.183	1. Menyusun Analisis Kebutuhan Jasa Penunjang (Tenaga Kebersihan, Keamanan, Jasa Komunikasi, Air, Listrik, dll) secara terukur. 2. Mengadakan rapat koordinasi internal pembahasan KAK/Spesifikasi Jasa sebelum penyusunan RKA.	Form Analisis Kebutuhan Jasa / KAK Penyediaan Jasa Penunjang	Kasubag Umum & Kepegawaian	PPK / Tim Anggaran Perangkat Daerah (TAPD)	Januari - Februari 2026		Memastikan layanan jasa penunjang operasional kantor terpenuhi secara presisi
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Anggaran jasa tidak mencakup	ROO 26.99.04.184	1. Perhitungan estimasi biaya jasa berdasarkan tarif resmi (tagihan nirlir/SBM) dan data historis pemakaian tahun sebelumnya. 2. Penyesuaian skema efisiensi pemanfaatan jasa dan pengusulan penyesuaian anggaran pada Perubahan APBD jika terjadi kenaikan tarif.	Dokumen RKA / Histori Tagihan Layanan / Matriks Evaluasi Boban Jasa	Kasubag Perencanaan & Keuangan	PPK / Pimpinan Inspektoral	Januari - Maret 2026 / Perubahan APBD		Mencegah terjadinya pembayaaan jasa operasional penunjang kantor

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Risiko	Kode Risiko	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kontrak jasa tidak diawasi secara optimal	ROO 26.96.04.186	1. Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) / Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pengawas Pekerjaan secara tertulis. 2. Melaksanakan pengawasan berkala dan menyusun laporan bulanan kinerja pelaksanaan pekerjaan jasa.	SK Penunjukan Pengawas / Laporan Pengawasan Bulanan / Checklist Pengawasan	PPK / PPTK / Pengawas Pekerjaan	Kasubag Umum / Pimpinan Inspektoral	Januari - Desember 2026	-	Memastikan seluruh kualitas kontrak jasa dipenuhi oleh penyedia
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kinerja penyedia jasa tidak deviasi	ROO 26.96.04.187	1. Menyusun Form Evaluasi Kinerja Penyedia Jasa berkala (Triwulan) / Akhir Masa Kontrak. 2. Menasipkan hasil evaluasi ke dalam SAP/aplikasi Skap LKPP sebagai rctam jejak penyedia.	Form Evaluasi Kinerja Penyedia / Berita Acara Evaluasi / Aplikasi SIKAP LKPP	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	Penyedia Jasa / Pengelola Pengadaan	Selanjutnya & Akhir Kontrak (2026)	-	Menjadi dasar perpanjangan kontrak atau pembetulan penyedia
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyedia jasa tidak memenuhi standar pelayanan	ROO 26.96.04.185	1. Penetapan Service Level Agreement (SLA) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Jasa dalam dokumen kontrak. 2. Pemasangan Uninterruptible Power Supply (UPS) pada server utama dan perangkat kerja krusial.	Dokumen SLA Kontak / Surat Taguran / Notulen Rapat Evaluasi	Penyedia Jasa / PPK	Penyedia Jasa / PPK	Januari - Desember 2026	-	Menjaga kualitas layanan penyuplai kantor tetap sesuai standar
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemadaman listrik	ROO 26.96.04.190	1. Penyediaan dan pemeliharaan rutin Generator Set (Genset) kantor serta pasokan BBM yang memadai. 2. Pemasangan Uninterruptible Power Supply (UPS) pada server utama dan perangkat kerja krusial.	Jadwal Maintenance Genset / Form Cek Flak UPS / Log Book Pemadaman	Pengelola Sarana Prasarana / Kasubag Umum	Seluruh Pegawai Inspektoral	Januari - Desember 2026	-	Mencegah terhentinya layanan operasional kantor dan kerusakan server
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Gangguan pasokan air bersih	ROO 26.96.04.191	1. Pembuatan penampungan air cadangan (Tangki/Toren Air) dengan kapasitas memadai. 2. Pemeliharaan rutin mesin pompa air dan koordinasi berkala dengan PDAM/pemedia air.	Jadwal Kurat Tangki Air / Log Book Pemeliharaan Pompa / Kontrak PDAM	Pengelola Sarana Prasarana	Kasubag Umum / Seluruh Pegawai	Januari - Desember 2026	-	Menjamin ketersediaan air bersih untuk sanitasi kantor secara berkelanjutan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kebutuhan anggaran utilitas tidak sesuai kebutuhan	ROO 26.96.04.188	1. Analisis tren konsumsi dan penuliskan data tagihan utilitas (listrik, air, internet, telepon) 12 bulan terakhir saat penyusunan RKA. 2. Melakukan langkah efisiensi energi ("Penerapan budaya hemat energi & pemadaman alat elektronik non-aktif").	Rekap Tagihan Utilitas Bulanan / Dokumen RKA / Himbauan Hemat Energi	Kasubag Perencanaan & Keuangan	PPK / Pimpinan Inspektoral	Januari - Desember 2026	-	Menjaga ketercukupan anggaran dan efisiensi belanja utilitas kantor
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Gangguan jaringan internet dan telepon	ROO 26.96.04.189	1. Menyediakan jaringan internet cadangan (backup ISP), pemeliharaan rutin jaringan, dan koordinasi cepat dengan provider saat terjadi gangguan.	Laporan Gangguan / Tiket Komplain / WhatsApp Group / Memo Internal	Pengelola IT / Kasubag Umum	Kepala Perangkat Daerah / Seluruh Pegawai / Unit Kerja	Selanjutnya / Kontinu	Sesuai Kebutuhan (Real Time)	Tersedia SLA dengan Provider
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tagihan utilitas tidak terbayarkan tepat waktu	ROO 26.96.04.192	Melakukan rekaptulasi dan verifikasi tagihan utilitas (listrik, air, internet) secara berkala sebelum jatuh tempo serta persentase proses pengajuan SPP/SPM.	Rekap Tagihan / Berita Acara Verifikasi / Nota Dinas Pengajuan	Bendahara Pengeluaran / PPK / Staf Keuangan	PPK / Kepala Sub Bagian Keuangan / Kepala OPD	Bulanan (sebelum tanggal jatuh tempo)	Selanjutnya 15-20 per bulan	Pembayaran rutin berjalan lancar
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kepuasan pengguna layanan rendah	ROO 26.96.04.197	Melakukan survei kepuasan pelanggan internal secara berkala, membuka kotak saran/kantel pengaduan, dan menindaklanjuti keluhan pegawai.	Kuesioner SKM / Form Pengukuran / Portal Internal / Laporan Evaluasi	Tim Pengelola Layanan / Subag Umum	Kepala OPD / Seluruh Pegawai	Triwulan / Semesteran	Sesuai Jadwal Evaluasi	Hasil evaluasi dindaklanjuti
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kebutuhan tenaga pelayanan umum tidak sesuai	ROO 26.96.04.193	Melakukan analisis beban kerja (ABK) dan pemetaan kebutuhan tenaga pe ayan umum (security, kebersihan, driver) secara pra-sti.	Dokumen ABK / Laporan Analisis Kebutuhan / Perencanaan Pengadaan Jasa	Kasubag Umum / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	Tim Anggaran / Kepala Perangkat Daerah	Awal Tahun / Perencanaan Anggaran	Sesuai Penyusunan RKA	Menjadi dasar pengadaan jasa

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Risiko	Kode Risiko	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Tenaga pelayanan tidak hadir	ROO 26.96.04.194	Menerapkan presensi harian (fingerprint/manual), membatalkan kausul sanksi/pemotongan pembayaran pada kontrak, dan mengalihkan vendor menyediakan tenaga pengganti (standby).	Daftar Hadir / Rekap Presensi / Surat Teguran / BAP	Pengawas Lapangan / Kasubag Umum	Pihak Penyedia Jasa (Vendor) / PPK	Harian / Bulanan	Setiap Hari Kerja	Pengawasan dilakukan secara ketat
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Pelayanan kebersihan tidak sesuai standar	ROO 26.96.04.195	Menyusun SOP Kebersihan, melakukan inspeksi/audit kebersihan area kantor secara berkala (check-list harian), dan mengadakan rapat evaluasi bulanan bersama vendor.	Check-list Kebersihan Harian / Laporan Pemeliharaan Hasil Pekerjaan (PPHP)	Pengawas Kebersihan / Pejabat Pemeliharaan Hasil Pekerjaan (PPHP)	Penyedia Jasa Kebersihan / PPK	Harian & Bulanan	Setiap Hari Kerja & Akhir Bulan	Checklist terisi setiap hari
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Kinerja penyedia jasa tidak dimonitor	ROO 26.96.04.196	Menyusun dan menerapkan Indikator Kinerja Utama (KPI) penyedia jasa, melakukan penilaian berkala, serta memberikan Berita Acara Evaluasi Kinerja sebagai syarat pencaran.	Form Penilaian Kinerja Vendor / Laporan Monitoring Bulanan / BAP	PPK / Pejabat Pengadaan / Kasubag Umum	Kepala Perangkat Daerah / Vendor Jasa	Setiap Bulan / Triwulan	Setiap Akhir Bulan	Pengertian pembayaran bulanan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Teraksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Jadwal pemeliharaan tidak disusun dengan baik	ROO 26.96.04.198	Menyusun Kartu Kendali dan Jadwal Pemeliharaan Berkala (Preventive Maintenance Schedule) untuk seluruh BMD/Kendaraan dinas di awal tahun anggaran.	Dokumen Jadwal Pemeliharaan / Kartu Kendali BMD / Memo Internal	Pengurus Barang / Kasubag Umum	Pengguna Barang / Pemegang Kendaraan / PPK	Awal Tahun (Januari)	Realisasi Januari M1	Tersusun Jadwal Induk Pemeliharaan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Teraksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan terlambat dilakukan	ROO 26.96.04.199	Menerapkan sistem pengingat otomatis/kalender pemeliharaan dan melakukan monitoring berkala atas tanggal jatuh tempo servis/pajak.	Notifikasi Sistem / Surat Peringatan / Whatsapp Reminder	Pengelola Pemeliharaan / Pengurus Barang	Pemegang BMD / Pejabat Pembuat Komitmen	Setiap Bulan / Sesuai Jadwal	Tegat Waktu Sesuai Jadwal	Terhindar dari denda/kenusakan bensin
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Teraksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Nilai aset menurun akibat pemeliharaan tidak optimal	ROO 26.96.04.202	Menyusun standar teknis pemeliharaan (SOP) dan memastikan suku cadang/perbaikan sesuai spesifikasi standar pabrikan/OEM.	Laporan Hasil Pemeliharaan / Berita Acara Servis / Check-list Fisik	Bengkel Rekanan / Pengawas Pemeliharaan	Kasubag Umum / Pengurus Barang	Triwulan / Semesteran	Sesuai Jadwal Servis	Nilai guth dan fungsi aset terjaga
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Teraksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Penyedia jasa pemeliharaan tidak memenuhi standar	ROO 26.96.04.200	Melakukan seleksi ketat dan kualifikasi terhadap penyedia jasa (berdasarkan rekam/referensi/track record serta menerapkan syarat garansi pekerjaan).	Dokumen Kontrak / SPK / Sertifikat Kualifikasi Bengkel	Pejabat Pengadaan / PPK	Kasubag Umum / Pengurus Barang	Awal Tahun / Saat Pengadaan	Sesuai Proses Pengadaan	Kerjasama dengan bengkel resmi/terakreditasi baik
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Teraksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Kerusakan barang tidak segera dilaporkan	ROO 26.96.04.201	Menyediakan Form Laporan Kerusakan (Manual/Digital) dan mewajibkan penanggung/pengguna BMD segera melaporkan indikasi kerusakan maksimal 1x24 jam.	Form Laporan Kerusakan / Aplikasi Pengaduan / Nota Dinas Form	Pemegang BMD / Pegawai Pengguna	Pengurus Barang / Kasubag Umum	Insidental / Sewaktu-waktu	Real Time saat Kejadian	Prosedur pelaporan dipahani pegawai
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Teraksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan kendaraan dinas terlambat dilaksanakan	ROO 26.96.04.204	Menyusun kalender servis berkala (berdasarkan kilometer/waktu) dan memberikan Surat Pemberitahuan/Pengingat Servis kepada pemegang kendaraan dinas secara berkala.	Jadwal Servis Berkala / Kartu Kendali Kendaraan / Reminder WhatsApp	Pengurus Barang / Pengelola Kendaraan Dinas	Pemegang Kendaraan Dinas / Kasubag Umum	Setiap 3 Bulan / Sesuai Jarak Tempuh	Sesuai Jadwal Servis	Terhindar dari kerusakan mesin bensin
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Teraksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Riwayat pemeliharaan kendaraan tidak terdokumentasi dengan baik	ROO 26.96.04.207	Membuat Buku Log/Kartu Riwayat Pemeliharaan (Service Logbook) fisik dan digital untuk setiap unit kendaraan yang tercatat setiap perbaikan, pengaduan suku cadang, dan biaya.	Buku Log Kendaraan / Kartu Riwayat Pemeliharaan / File Excel/Sistem	Pengurus Barang / Bengkel Rekanan	Kasubag Umum / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	Setiap Kali Pemeliharaan / Servis	Real Time setelah Servis	Menjadi acuan kondisi fisik & nilai aset

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Risiko	Kode Risiko	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pemeliharaan Kendaran Perorangan Dinas atau Jabatan	Jumlah Kendaran Perorangan Dinas atau Kendaran Dinas Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jadwal pemeliharaan kendaran dinas tidak disusun sesuai kebutuhan	ROO 26.99.04.203	Melakukan inventarisasi dan "check-list" kondisi fisik aset tahun serta mengelompokkan jadwal pemeliharaan berdasarkan usia dan tingkat frekuensi pemakaian kendaran.	Dokumen Inventarisasi / Form Assessment Kondisi Kendaran	Pengelola Kendaran Dinas / Pengurus Barang	Kasubag Umum / Tim Perencanaan Anggaran	Awal Tahun Anggaran (Januari)	Realisasi Minggu ke-2 Januari	Menghasilkan Skala Prioritas Pemeliharaan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pemeliharaan Kendaran Perorangan Dinas atau Jabatan	Jumlah Kendaran Perorangan Dinas atau Kendaran Dinas Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Pembayaran pajak kendaran melewati jatuh tempo	ROO 26.99.04.205	Membuat Matriks Database Jatuh Tempo STNK/Pajak Kendaran, melakukan rekapitulasi 1 bulan sebelum jatuh tempo, dan mempercepat proses pengajuan anggaran pembayaran pajak.	Database Pajak Kendaran / Nota Dinas Pengajuan Pembayaran Pajak	Pengurus Barang / Staf Pengelola Kendaran	Bendahara Pengeluaran / Kasubag Keuangan	Bulan (1 bulan sebelum jatuh tempo)	Tepat Waktu Sebelum Jatuh Tempo	Terhindar dari denda administratif/ank
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pemeliharaan Kendaran Perorangan Dinas atau Jabatan	Jumlah Kendaran Perorangan Dinas atau Kendaran Dinas Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kendaran mengalami kerusakan berat akibat penggunaan yang tidak sesuai SOP	ROO 26.99.04.206	Menyusun dan mensosialisasikan SOP Penggunaan Kendaran Dinas Jabatan/Perorangan, membetulkan pengisian log pemakaian harian, serta melarang penggunaan di luar batas teknis operasional.	Dokumen SOP / Buku Log Pemakaian Kendaran / Surat Edaran / Banner Edukasi	Kasubag Umum / Pengurus Barang	Pemegang Kendaran Dinas / Pengemudi	Awal Tahun & Kontinu	Setiap Hari Penggunaan	Evaluasi pemakanan berkala
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pemeliharaan Kendaran Perorangan Dinas atau Jabatan	Jumlah Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kebutuhan pemeliharaan kendaran operasional tidak sesuai kondisi kendaran	ROO 26.99.04.208	Melakukan "general check-up" / uji kelayakan fisik kendaran lapangan secara berkala oleh teknisi/bergel rem dan menyusun Rencana Kebutuhan Pemeliharaan berbasis hasil "check-list".	Form Assessment Kondisi / Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Kendaran	Pengelola Kendaran Dinas / Bengkel Rekanan	Kasubag Umum / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	Triwulan / Semesteran	Sesuai Jadwal Check-up	Pencatatan perbaikan lebih presisi
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pemeliharaan Kendaran Perorangan Dinas atau Jabatan	Jumlah Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Pajak atau izin kendaran terlambat diperpanjang	ROO 26.99.04.210	Membuat Sistem/Matriks Monitoring Jatuh Tempo Pajak (STNK) & Perizin (KIR/ Uji Berkala) serta mengajukan anggaran dan berkas perpanjangan 1 bulan sebelum masa berlaku habis.	Database Perizinan & Pajak / Kartu Pengingat / Nota Dinas Pengajuan	Pengurus Barang / Staf Pengelola Kendaran	Bendahara Pengeluaran / Kasubag Keuangan / PPK	Bulan (1-30 Jauh Tempo)	Tepat Waktu Sebelum Jatuh Tempo	Mencegah denda & legalitas jalan terjamin
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pemeliharaan Kendaran Perorangan Dinas atau Jabatan	Jumlah Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Frekuensi kerusakan kendaran meningkat	ROO 26.99.04.212	Melakukan perawatan pencegahan berkala ("preventive maintenance") setiap sepekan sekali, servis berkala tepat waktu, dan rekap tuntas analisis usi/kelayakan teknis untuk pertimbangan peremajaan.	Buku Kartu Servis Berkala / Laporan Rekapitulasi Kendaran / Evaluasi Kelayakan	Pengurus Barang / Bengkel Rekanan	Kepala Perangkat Daerah / PPK	Setiap Bulan / Sesuai Kebutuhan	Sesuai Jadwal Servis Berkala	Meningkatkan efisiensi operasional lapangan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pemeliharaan Kendaran Perorangan Dinas atau Jabatan	Jumlah Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kendaran operasional rusak saat digunakan untuk tugas pengawasan	ROO 26.99.04.209	Melakukan "eye-tip inspection" (pemeriksaan kondisi kendaran sebelum keberangkatan), menyediakan kendaran cadangan/pool, serta memberikan pelatihan penanganan darurat bagi pengemudi.	Form Checklist Pre-Trip Inspection / Surat Tugas Pengawasan / Standar Operasional Prosedur (SOP)	Pengemudi / Pengelola Kendaran Dinas	Tim Pengawasan / Kasubag Umum	Sebelum Keberangkatan Tugas	Sesuai Jadwal Tugas Pengawasan	Meminimalkan hambatan operasional lapangan

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Risiko	Kode Risiko	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Medis/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Ketersediaan suku cadang tidak terbatas	ROO 26 96 04 211	Bekerja sama dengan penyedia/anggotanya memiliki sistem terpadu yang memiliki sistem "e-Katalog" / stok suku cadang terjamin, serta melakukan inventarisasi suku cadang rutin ("fast-moving").	Kontrak Kerja Sama Bengkel / Daftar Inventaris Suku Cadang / Katalog Suku Cadang	Pengurus Barang / Penyedia Jasa Pemeliharaan	Pjabat Pembuat Komitmen (PPK) / Kasubag Umum	Awal Tahun & Evaluasi Per 3 Bulan	Sesuai Kontrak Pemeliharaan	Menjamin ketersediaan suku cadang tepat waktu
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Perawatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perawatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jadwal pemeliharaan peralatan tidak disusun secara berkala	ROO 26 96 04 213	Menyusun Mantra Kalender Pemeliharaan Berkala untuk seluruh aset peralatan dan mesin, serta menentukan jadwal rutin perawatan pencegahan harian/bulanan.	Dokumen Jadwal Pemeliharaan Berkala / Kartu Kendal Pemeliharaan Peralatan	Pengurus Barang / Pengelola Aset	Pengurus Peralatan / Kasubag Umum	Awal Tahun Anggaran (Januari)	Realisasi Minggu ke-1 Januari	Pemeliharaan terstruktur dan teratur
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Perawatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perawatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Peralatan mengalami kerusakan karena penggunaan yang tidak sesuai SOP	ROO 26 96 04 214	Menyusun, menetapkan "user manual" / SOP penggunaan pada unit peralatan, dan melaksanakan sosialisasi/pelatihan teknis pengoperasian alat bagi operator/pengguna.	Lembar Instruksi Kerja (SOP) / Sikler Panduan Operasional / Sertifikat Pelatihan	Pengurus Barang / Pengelola a Teknis	Operator Alat / Staf Pengguna Peralatan	Awal Penggunaan & Kontinu	Sesuai Pengoperasian Alat	Mencegah "human error" dan kerusakan diri
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Perawatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perawatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Perbaikan peralatan terlambat dilakukan	ROO 26 96 04 215	Menerapkan SLA (Service Level Agreement) penanganan perbaikan maksimal 2x24 jam sejak laporan diterima, serta menyediakan cadangan sparepart/penggantian alat bagi operator/pengguna.	Formulir Pemohonan Perbaikan / Tiket Helpdesk / WhatsApp Pengaduan	Pengguna Peralatan / Staf Pengguna	Pengurus Barang / Teknisi / Rekanan	Kontinu (Setiap ada kerusakan)	Sesuai SLA Perbaikan	Mencegah terganggunya alur kerja pelayanan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Perawatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perawatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kerusakan tidak segera dilaporkan	ROO 26 96 04 216	Membuat sistem pelaporan kerusakan berbasis digital/QR Code pada aset dan kewajiban "check-list" inspeksi kondisi harian/mingguan oleh pengguna aset.	Aplikasi Laporan kerusakan / Form Checklist Inspeksi / Sistem QR Code Aset	Pengguna Aset / Operator	Pengurus Barang / Kasubag Umum	Setiap Minggu / Saat Terjadi Kerusakan	Real Time setelah Kerusakan	Deteksi dini kerusakan mencegah kerusakan kompleks
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Perawatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perawatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Umur ekonomis peralatan lebih pendek dari yang direncanakan	ROO 26 96 04 217	Melakukan perawatan berkala ("preventive maintenance") secara disiplin sesuai petunjuk pabakan serta menjaga kondisi lingkungan operasional aset (dulu, kebersihan, listrikian).	Kartu Pemeliharaan Berkala / Laporan Kalibrasi & Servis	Pengurus Barang / Teknis	Kasubag Umum / Pjabat Pembuat Komitmen (PPK)	Bulanan / Triwulanan	Sesuai Jadwal Servis	Memaksimalkan usia pakai dan efisiensi aset
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kondisi kerusakan gedung tidak teridentifikasi secara akurat sehingga kebutuhan rehabilitasi tidak sesuai	ROO 26 96 04 218	Melakukan inspeksi kolektif fisik bangunan berkala bersama Dinas PU/Tenaga Ahli Bangunan dan menyusun Dokumen Detail Engineering Design (DED) / RAB berdasarkan skala prioritas kerusakan.	Laporan Inspeksi Fisik / Dokumen DED / Form Assessment Kerusakan Gedung	Tim Struktural Inspector / Dinas PU / Pengurus Barang	Kasubag Umum / Tim Anggaran / PPK	Awal Tahun Anggaran (Sebelum Penyusunan RKBG)	Realisasi Sebelum Penyusunan RKA	Pencapaian rehabilitasi tepat sasaran
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Anggaran pemeliharaan atau rehabilitasi tidak mencukupi	ROO 26 96 04 219	Menyusun analisis kebutuhan pemeliharaan gedung berdasarkan skala prioritas ("critical path"), melakukan penyesuaian anggaran pada APBD Perubahan, serta mengoptimalkan swakelola pemeliharaan ringan.	Dokumen Usulan Anggaran / Rencana Kebutuhan BMD (RKBMD) / Nota Dinas APBD Perubahan, serta mengoptimalkan swakelola pemeliharaan ringan.	Kasubag Umum / Pengurus Barang	TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) / Kepala OPD	Tahap Penyusunan RKA / APBD-P	Saat Pembahasan Anggaran	Fokus pada perbaikan bagian vital/mendesak
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi tertambat dari jadwal	ROO 26 96 04 220	Melakukan pengawasan berkala oleh Pjabat Pembuat Komitmen (PPK)/Tim Teknis, menetapkan jadwal pelaksanaan ("S-Curve") secara ketat, serta memberikan surat teguran/SP jika terjadi keterlambatan proyek.	Laporan Kemajuan Pekerjaan (Weekly/Monthly Progress Report, Kurva S, Surat Teguran / SP	Kontraktor Pelaksana / Tim Pengawas Lapangan	PPK / Kepala S.b Bagian Umum / Pengurus Barang	Sesuai Kontrak Kerja (Tahapan Konstruksi)	Mingguan / Bulanan Selama Pelaksanaan Proyek	Mencegah penumpukan pekerjaan di akhir tahun anggaran

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Risiko	Kode Risiko	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Komunikasi	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Gedung yang telah dipelihara tidak dipelihara secara berkala sehingga cepat mengalami kerusakan kembali	ROO 26.96.04.222	Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pemeliharaan rutin pasca-rehabilitasi, menetapkan petugas penanggung jawab area gedung, serta melakukan "monitoring" dan evaluasi kondisi gedung secara berkala.	SOP Pemeliharaan Gedung; Buku Log Kontrol/Inspeksi Kebersihan & Fisik Gedung	Petugas Pemeliharaan / Pengelola Gedung / Pengurus Barang	Kasubag Umum / Kepala OPD	Kontinu / Bulanan Pasca Pekerjaan	Setiap Bulan	Menjaga kondisi aset tetap optimal dan memperpanjang usia pakai gedung
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Hasil pekerjaan tidak sesuai spesifikasi teknis atau mutu yang dipersyaratkan	ROO 26.96.04.221	Melakukan "Uji Pelek" / "Mutual Check" (MC-0 & MC-100), melibatkan Tim Peneliti Pelaksanaan Kontrak / Pengawas Independen, serta melakukan Berita Acara Serah Terima (BAST) hanya jika pekerjaan 100% sesuai spesifikasi.	Dokumen Spesifikasi Teknis/RAB, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, BAST	Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) / Pengawas Teknis	PPK / Kasubag Umum / Pengurus Barang	Pada Saat Tahap Pemeriksaan & Serah Terima Pekerjaan	Saat Serah Terima Fisik Pekerjaan (PHO/FHO)	Menaikkan mutu fisik gedung memenuhi standar keselamatan dan keamanan





PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

INSPEKTORAT

Jln. Raya Tuapeijat KM 4 Sipora Utara Telp. (0759) 320056, Fax.0759-320058

Email : inspektoratmtw@gmail.com

KEPUTUSAN INSPEKTUR KEPULAUAN MENTAWAI NOMOR: **30** TAHUN 2026

TENTANG

TIM PENYUSUN MANAJEMEN RISIKO INSPEKTORAT DAERAH

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2026

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan organisasi melalui penerapan Manajemen Risiko yang terintegrasi dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu dilaksanakan pengelolaan risiko pada Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- b. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada huruf a secara efektif, efisien, terarah, dan berkesinambungan, perlu membentuk Tim Manajemen Risiko Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Pembentukan Tim Manajemen Risiko pada Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi;
7. PermenPANRB Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Manajemen Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 5);
9. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Manajemen Risiko pada Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Menyusun kebijakan internal penerapan Manajemen Risiko;
 - b. Mengidentifikasi tujuan organisasi sebagai dasar penyusunan risiko;
 - c. Melaksanakan identifikasi, analisis, evaluasi, dan penanganan risiko;
 - d. Menyusun dan memperbaharui Daftar Risiko (Risk Register);
 - e. Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP);
 - f. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengendalian risiko;
 - g. Menyampaikan laporan penerapan Manajemen Risiko kepada Inspektur secara berkala.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Manajemen Risiko bertanggung jawab kepada Inspektur Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Inspektorat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Tuapejat

Pada tanggal : 28 Januari 2026

INSPEKTUR DAERAH,



SERIELI BAWAMENEWI, SH, CGCAE
NIP. 19830905 200802 1 001

Lampiran I Keputusan Inspektur Daerah

Nomor : Tahun 2026

Tanggal : Januari 2026

tentang Penyusunan Manajemen Resiko pada
Inspektorat Kabupaten Kepulauan
Mentawai Tahun Anggaran 2026

SUSUNAN TIM

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Inspektur	Ketua Tim
2.	Sekretaris Inspektorat	Sekretaris
3.	Ruddin Purba, S.Sos, MM/Perencana Ahli Muda	Anggota
4.	Afnilda Jenitria, SE/ Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
5.	Mutiara Meilyn Siregar, SE/ Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
6.	Fernando Saragi, S.AP/Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
7.	Jevon Adelwin Hura, S.Kom/Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota

INSPEKTUR DAERAH,



SERIELI BAWAMENEWI, SH, CGCAE
NIP. 19830905 200802 1 001